

# TIRTA

## Tertiary Irrigation Technical Assistance



SURVEY REPORT 2:  
STAKEHOLDER MAPPING  
Laporan Survey Tahap 2

## Tertiary Irrigation Technical Assistance

January 2016 (draft 28 January)

## TABLE OF CONTENTS

<b>LIST OF TABLES</b> .....	IV
<b>LIST OF FIGURES</b> .....	V
Abstract .....	1
1. Latar Belakang.....	2
2. Tujuan Dan Metodologi .....	3
3. Temuan-Temuan .....	5
3.1 Alur usaha padi di Desa .....	5
3.1.1 Petani Skala Kecil .....	1
3.1.2 Penyedia Jasa Irigasi .....	1
3.1.3 Penyedia Tractor.....	4
3.1.4 Penyedia Bibit.....	4
3.1.5 Buruh Tanam .....	4
3.1.6 Buruh Pemupukan/Pembersihan Gulma.....	4
3.1.7 Penebas/Tengkulak/Buruh Panen .....	5
3.2 Peta Stakeholder Layanan Jasa Irigasi .....	5
3.3 Ringkasan Analisa Stakeholder .....	1
3.3.1 Petani Pemakai Air dan Non Pemakai Air.....	7
3.3.2 Profil Pengusaha .....	13
3.3.3 HIPPA dan BUMDES Sebagai Penyedia Jasa Layanan Irigasi .....	15
3.3.4 Profil Lembaga Keuangan .....	20
3.3.5 Profil Pemerintah.....	25
3.3.6 Supplier Pompa dan Layanan Perawatan.....	42
3.3.7 Perusahaan Listrik Negara (PLN) .....	44
3.3.8 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I .....	49
3.4 Model-Model Skema Irigasi Potensial.....	52
3.5 Peran Perempuan Dalam usaha Padi dan Penyediaan Jasa Layanan Irigasi Pompa .....	53
3.6 Orang-Orang Berkebutuhan Khusus (People With Disabilities) .....	55
3.7 Temuan Fisik Stasiun Pompa .....	58
3.7.1 Type, Merk, kapasitas, Serta Ukuran Pompa Yang Ditemukan .....	59
3.7.2 Type Jenis/Kapasitas Motor Penggerak Pompa .....	60
3.7.3 Pipa .....	62
3.7.4 Karakteristik Stasiun-Stasiun Pompa Di Desa-Desa Sample Stakeholder Mapping .....	62
4. Implikasi dan Rekomendasi Untuk Program TIRTA.....	64

4.1	Penentuan Beneficiary Program TIRTA .....	64
4.2	Kriteria Seleksi Skema Irigasi .....	64
4.3	Proses Seleksi Skema Irigasi .....	65
4.3.1	Sosialisasi Program TIRTA dan Kriteria dan Proses Seleksi.....	65
4.3.2	Proses Seleksi Skema Irigasi .....	66
4.4	Koordinasi dan Pelibatan Pemerintah .....	67
Lampiran 1 – Daftar Desa-Desa Survey Tahap 2 .....		69
Lampiran 2 – Daftar Responden .....		70
Stakeholder Interviews at the Villages Based on Service Provicer Type .....		70
Government Agencies .....		72
Pump Suppliers and Pump Repair Shops.....		73
Supplementary Interviews with Stakeholders .....		73
Investors .....		74
People with Disabilities .....		74
Financial Institutions.....		75
Lampiran 3 – Profil-Profil Usaha Padi .....		77
3.1	Penyedia Traktor .....	77
3.2	Pengusaha Bibit (Benih) Cabut .....	78
3.3	Penyedia Tenaga Tanam.....	81
3.4	Pemborong (Tengkulak) .....	82
Lampiran 4 – Profil Pengusaha .....		85
4.1	Profil Pengusaha Desa Ngringinrejo .....	85
4.2	Profil Pengusaha Areal – Jayus .....	87
4.3	Profil Pengusaha Sumur Bor .....	88
4.5	Pengusaha Slep – Haji Makmur (UD Haji Makmur).....	89
4.6	Pengusaha Areal Arif Saifudin .....	91
4.6	Pengusaha Pak Sudarwaji (CV Areal Sekawan Prambonwetan).....	92
4.7	Profil Pengusaha Rendeng (Muslih) – Kepala Desa .....	94
4.8	Profil Pak Haji Mochammad Achsin.....	96
4.9	Pengusaha Sumur Pompa – Latif.....	97
4.10	Profil Haji Untung Basuki .....	99
Lampiran 5 – Profil Bengkel Pompa .....		101
Lampiran 6 – Data Biaya Produksi dan Pendapatan Petani.....		103
Lampiran 7 – Data Indeks Kemiskinan Menurut Progress Against Poverty Index (PPI).....		108
Lampiran 8 – Profil HIPPA Aktif (HIPPA Klotok) .....		110
Lampiran 9 – Profil BUMDES Aktif (BUMDES Gedongarum) .....		124

Lampiran 10 – Lembaga-Lembaga Keuangan .....	126
Lampiran 11 – Data Peran Perempuan Dalam Usaha Padi .....	135
Lampiran 12 – Data Kelompok Tani di Kabupaten Bojonegoro .....	137
Lampiran 13 – Questionnaire .....	138

## LIST OF TABLES

Table 1: Ringkasan Daftar Responden Survey .....	3
Table 2: Ringkasan Stakeholder Utama .....	1
Table 3: Data Luas Lahan Petani .....	7
Table 4: Biaya Irigasi Berdasarkan Penyedia Jasa .....	8
Table 5: Biaya Usaha Padi (Petani Suntoro - Desa Prambonatan, Bojonegoro).....	9
Table 6: Perbandingan Produksi dan Pendapatan .....	10
Table 7: Perbandingan Produksi Padi dan Biaya Jasa Irigasi .....	11
Table 8: Status Kemiskinan Menurut PPI .....	12
Table 9: Umur Petani dan Jumlah Anggota Keluarga .....	12
Table 10: Pengusaha-Pengusaha Pompa dan Areal .....	15
Table 11: Desa Survey Mendalam dan HIPPA/BUMDes.....	17
Table 12: Ringkasan HIPPA dan BUMDes Dari Sample Desa-Desa Sasaran Stakeholder Mapping.....	19
Table 13: Produk Keuangan Potensial Untuk Mitra Program TIRTA .....	23
Table 14: Alokasi Dana Desa.....	26
Table 15: Pemberi Izin dan Rekomendasi Teknis .....	31
Table 16: Lokasi Pendampingan BUMDes di Bojonegoro .....	34
Table 17: Daftar Toko Penjual Pompa .....	43
Table 18: Bengkel Servis Pompa .....	44
Table 19: Rincian Biaya Pasang Baru Listrik Pra-Bayar .....	45
Table 20: Standard Waktu Pelayanan .....	45
Table 21: Alamat Kantor PLN Berdasarkan Rayon.....	46
Table 22: Contoh RAB Instalasi Listrik .....	47
Table 23: Analisa dan Rekomendasi Aliran Daya berdasarkan Kebutuhan dan Kapasitas.....	48
Table 24: Data Disabilitas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 .....	56
Table 25: Data Penyandang Disabilitas di 9 Desa Sample .....	57
Table 26: Jenis dan Type Pompa Hasil Temuan Survey Potensi Desa .....	59
Table 27: Motor Penggerak Pompa (Mesin Diesel).....	60
Table 28: Penggerak Pompa Berbasis Listrik/Dynamo .....	61
Table 29: Kriteria Seleksi Skema Irigasi .....	64
Table 30: Jenis-Jenis Strategi Pelibatan Pemerintah.....	67

## LIST OF FIGURES

Figure 1: Alur Usaha Padi di Desa dan Berbagai Layanan Barang dan Jasa Pendukung.....	1
Figure 2: Peta Stakeholder Layanan Irigasi Pompa .....	6
Figure 3: Pengelola Stasiun Pompa .....	13
Figure 4: Kategori Kepala Desa .....	28
Figure 5: Prosedur Perizinan Penggunaan dan Pemanfaat Sumber Daya Air .....	32
Figure 6: PLN Bojonegoro .....	45

## **ABSTRACT**

Laporan ini memaparkan tentang hasil pemetaan stakeholder yang dilakukan Tim TIRTA di Bojonegoro dan Tuban. Tujuan Stakeholder Mapping adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji peran, kepentingan, potensi dan hambatan yang dihadapi para stakeholder dalam penyediaan jasa layanan irigasi pompa kepada petani. Stakeholder-stakeholder penting yang di temui adalah para petani laki-laki dan perempuan, pengurus HIPPA/BUMDES, para investor lokal (pengusaha pompa dan areal), Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta stakeholder pendukung lainnya seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Supplier Pompa. Semua informasi ini nantinya akan membantu TIRTA mengembangkan kriteria seleksi dan merancang kegiatan-kegiatan intervensi.

## 1. LATAR BELAKANG

Program TIRTA (Tertiary Irrigation Technical Assistance) dibawah payung program AIP-Rural, bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan pendapatan masyarakat dari hasil pertanian dengan cara mendorong dan memfasilitasi investasi sektor swasta dalam pengelolaan system irigasi tersier. Program TIRTA akan bekerja sama dengan para entrepreneur dan wadah kelembagaan masyarakat desa seperti HIPPA dan BUMDES dengan cara memberi bantuan teknis dalam hal pengembangan rencana bisnis pengelolaan usaha layanan jasa air irigasi. Target cakupan pemanfaat program (*outreach*) dari program TIRTA adalah 10,000 petani skala kecil di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang diharapkan akan meningkat pendapatannya hingga 60% per petani. Secara lebih spesifik dari tiga provinsi ini, fokus utama program TIRTA adalah di Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. Program TIRTA secara resmi di mulai di akhir bulan July 2015 dan akan berakhir di tahun 2018.

Dalam enam bulan pertama implementasi program TIRTA ada dua tahapan penting yang harus diselesaikan, yaitu; (i) pemilihan lokasi yang secara teknis dan komersil berpotensi untuk irigasi dan (ii) pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tahapan pertama, pemilihan lokasi yang secara teknis dan komersil berpotensi, telah dilakukan di bulan September – October 2015 dengan mengkombinasikan dua metode utama; analisa foto satelit beresolusi tinggi dan survey cepat yang dilakukan oleh tim TIRTA di 175 desa sepanjang bantaran Bengawan Solo. Tahapan kedua, pemetaan pemangku kepentingan dilakukan di bulan November – Desember 2015.

## 2. TUJUAN DAN METODOLOGI

Tujuan utama dari pemetaan stakeholder adalah mengidentifikasi dan mengkaji peran, kepentingan dan potensi dari para stakeholder serta hambatan yang mereka hadapi dalam penyediaan jasa layanan irigasi pompa. Berdasarkan temuan-temuan Survey Tahap 1 yang mengindikasikan sebagian besar potensi perluasan ada di Bojonegoro, serta efisiensi waktu yang ada, stakeholder mapping lebih difokuskan pada wilayah Bojonegoro, dari pada di Tuban dan Lamongan. Pendalaman di Wilayah Tuban dan Lamongan akan dilakukan di masa yang akan datang.

Stakeholder-stakeholder penting yang di temui tim TIRTA adalah seperti para petani laki-laki dan perempuan, pengurus HIPPA/BUMDES, para pengusaha areal, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta stakeholder pendukung lainnya seperti Lembaga Keuangan (Bank, BPR dan Koperasi), PLN dan Supplier Pompa. Semua informasi ini diharapkan akan membantu TIRTA mengembangkan kriteria pemilihan skema intervensi. Kajian juga harus menyertakan analisa gender dan analisa social inclusion<sup>1</sup>.

Dengan data yang telah diperoleh dari dari Survey tahap 1 (Rapid Survey), Survey tahap 2 dilakukan selama dua bulan (bulan November dan Desember 2015) dan diharapkan akan melengkapi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk;

- Mengidentifikasi calon intervensi yang berpotensi
- Mengembangkan konsep kriteria pemilihan intervensi
- Menghasilkan analisa kepentingan dan pola relasi para stakeholder
- Mengidentifikasi informasi terkait kebijakan-kebijakan dan peraturan tentang irigasi
- Menggali informasi tentang peran dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam usaha padi, dan informasi awal tentang tingkat kemiskinan

Stakeholder mapping melanjutkan proses Survey Tahap I (Rapid Survey of Potential Locations). Hasil Survey tahap 1 mengidentifikasi 66 wilayah potensial dari 175 desa di bantaran Bengawan Solo. Dari 65 desa ini Tim TIRTA mengunjungi 19 Desa calon desa sasaran berdasarkan berbagai kriteria seperti; seperti luas lahan perluasan, desa-desa dengan rencana perluasan, desa-desa sasaran penerima layanan jasa air irigasi, dan desa-desa contoh penyedia jasa layanan irigasi (Lampiran 1). Dengan menggunakan teknik sampling kombinasi *criterion sampling* dan *snowballing*<sup>2</sup> dalam menentukan responden, Tim TIRTA melakukan sebanyak 206 interviews kepada responden petani laki-laki dan perempuan, pengusaha, perwakilan HIPPA / BUMDES, tokoh masyarakat di Desa, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Keuangan, dan para stakeholder pendukung lainnya seperti supplier pompa, PLN dan kontraktornya (Daftar lengkap responden ada di Lampiran 2).

Table 1: Ringkasan Daftar Responden Survey

Jenis Responden		Jumlah
1	Responden di Desa (Petani, Penyedia Jasa Irigasi dan, Pemerintah etc)	108
2	Kantor Pemerintah	21
3	Supplier-supplier pendukung dan bengkel Pompa	14

<sup>1</sup> Contract 70204 – Schedule 1 P. 78

<sup>2</sup> Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications. P. 243

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

<b>4</b>	Investors (tambahan)	<b>4</b>
<b>5</b>	Orang-orang berkebutuhan khusus	<b>32</b>
<b>6</b>	Lembaga-lembaga Keuangan	<b>5</b>
	<b>Total</b>	<b>184</b>

### 3. TEMUAN-TEMUAN

Temuan-temuan survey tahap II akan di bagi dalam beberapa topik pembahasan. Topik pertama menyangkut usaha padi dan stakeholder di pasar irigasi pompa di bahas dalam bagian 3.1 - 3.4. Di empat sub-bab ini dibahas tentang alur lengkap usaha padi di desa, proses pemilihan penyedia jasa layanan air irigasi pompa, dan peta stakeholder untuk layanan irigasi pompa di Bojonegoro dan Tuban, serta penjelasan tentang kepentingan dan pola relasi antar stakeholder. Pembahasan diakhiri dengan perumusan temuan model-model potential skema irigasi. Topik kedua dari bab temuan-temuan adalah pembahasan tentang peran perempuan dalam usaha padi dan temuan tentang orang-orang berkebutuhan khusus (people with disabilities) di bahas dalam bagian 3.5 dan 3.6. Bagian terakhir, 3.7, dari bab temuan adalah temuan fisik stasiun pompa.

#### 3.1 ALUR USAHA PADI DI DESA

Untuk menggambarkan alur usaha padi di desa, stakeholder mapping memilih kabupaten Bojonegoro sebagai sample analisa karena paling memiliki potensi perluasan irigasi diantara tiga kabupaten sasaran Program TIRTA<sup>3</sup>. Bojonegoro memiliki total luas areal 230.706 Ha, dimana sebagian besar yaitu 42,70% merupakan lahan hutan milik negara, kemudian disusul oleh luas lahan sawah sebesar 32,65%, tanah kering 24,39%, perkebunan 0,04% dan lain-lain 0,18% (Pemkab Bojonegoro, 2011). Dari jenis-jenis penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah potensial pengembangan lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

Bojonegoro mampu menjadi lumbung pangan negeri apabila memiliki produktivitas padi yang mantap tinggi. Kondisi lahan (fisik, kimia dan biologi), pola tanam, waktu tanam dan jarak tanam merupakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro. Pola tanam dan waktu tanam yang tidak serempak serta jarak tanam yang tidak tepat menjadi peluang munculnya gangguan bahkan serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas.

Ciri khas Bojonegoro yang membedakannya dengan daerah lain yaitu adanya Bengawan Solo yang mengalir sepanjang Bojonegoro bagian selatan ke wilayah utara dan memanjang ke bagian timur Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan daerah aliran Bengawan Solo yang subur dengan pertanian intensif, sedangkan bagian selatan dan bagian barat laut yang berbatasan dengan pegunungan kapur, sebagian besar lahannya merupakan lahan tadah hujan.

Kondisi yang berbeda antara beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro memberikan gambaran waktu tanam dan pola tanam yang berbeda antara daerah sekitar bantaran Bengawan Solo dan daerah yang berada di luar bantaran Bengawan Solo. Pola tanam petani di bantaran Bengawan Solo adalah Padi-Padi-Bero (karena banjir), sedangkan di daerah sebelah selatan dan barat laut Bojonegoro, yang tidak terganggu dengan luapan Bengawan Solo di musim hujan, pola tanam yang dianjurkan adalah Padi-Padi-Palawija.

Di wilayah bantaran Bengawan, terjadi pergeseran iklim (agroklimat) dari kondisi rata-rata, yang mempengaruhi perubahan pola tanam anjuran. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan air tersedia untuk budidaya padi ke-3. Pola tanam anjuran yang seharusnya Padi-Padi-Bero berubah menjadi Padi-Padi-Padi. Karena tanam padi ke-3 ini petani “berharap” belum terjadi banjir, maka sering dijumpai suatu kondisi dimana pada satu hamparan lahan, ada

---

<sup>3</sup> Hasil Rapid Review (Survey I)

sekelompok petani yang sibuk memanen padinya, di Trucut sebelahnya yang berdampingan sudah mulai muncul persemaian baru, dan di petak yang lain ada padi yang masih berumur sekitar 2 bulan.

Dapat dikatakan penentuan musim tanam (MT) hanya bagi Daerah Irigasi Teknis yang dilayani oleh Waduk Pacal saja, sedangkan untuk daerah hamparan Bengawan solo yang menggunakan irigasi pompa tergantung dari kondisi dilapangan atau kesepatan dengan penyedia jasa air (Pengusaha / HIPPA /BUMdes).

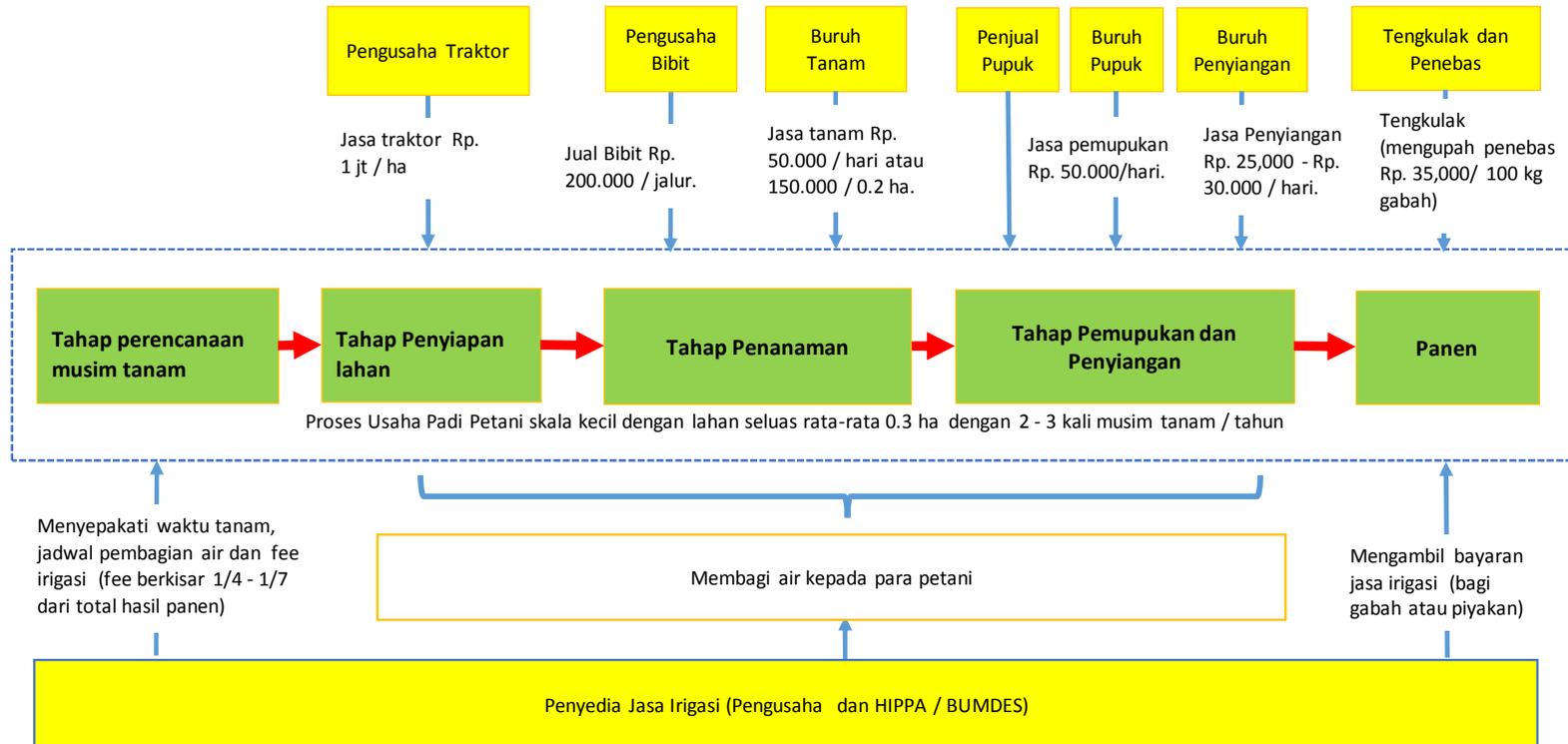
Air bagi petani di sepanjang bantaran Bengawan Solo merupakan input biaya yang cukup tinggi karena untuk mengairi sawah mereka membutuhkan biaya untuk menyalurkan air dari bengawan ke persawahan dengan kisaran antara 14 – 20 % dari hasil produksi. Demikian juga saat awal musim hujan mereka tidak terpengaruh /mengikuti kondisi pola intensitas hujan atau menunggu air tercukupi untuk mulai tanam padi karena mereka tetap dapat air dari pengusaha areal/ HIPPA/BUMdes secara terus menerus sepanjang tahun jika tidak terjadi banjir hingga waktu tanam antar petani di bantaran Bengawan Solo berbeda.

Ada petani yang tanamnya terlambat (lebih dari) 15 hari dari waktu yang dijadwalkan. Kondisi perubahan iklim dan mulai terbatasnya buruh tani menyebabkan tanam tidak serempak terjadi di beberapa wilayah. Hal ini merupakan kondisi yang sangat rawan jika ditinjau dari keberlanjutan hidup dan ketersediaan makanan Hama tanaman sehingga memicu serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berakibat gagal panen ataupun turunnya produktivitas. Jarak tanam padi yang terlalu rapat juga berpotensi menimbulkan kerawanan serangan OPT.

Melihat alur usaha padi secara lengkap dari persiapan lahan hingga panen, bercocok tanam padi sawah di Jawa sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, seperti misalnya di wilayah Indonesia Timur, terutama dalam hal penggunaan tenaga kerja dalam setiap tahapan budi daya padi sawah tersebut. Pada umumnya pemilik sawah lebih banyak menggunakan layanan jasa dan barang yang ada dalam proses produksi padi dimulai dari persemaian benih, pengolahan tanah, tanam, pemupukan/pembersihan gulma hingga panen. Berdasarkan keterbatasan tenaga buruh tani yang ada di setiap hamparan sawah /daerah irigasi, maka usaha padi sawah juga dapat mendatangkan tenaga buruh dari dalam desa atau daerah-daerah lain dan membuka peluang bisnis baru untuk setiap tahapan kegiatan budidaya padi sekaligus menambah pendapatan bagi pebisnis yang lain bukan hanya pemilik sawah/lahan.

Hal ini berdampak pada rencana TIRTA membantu petani memperluas akses air pada areal sawah untuk menambah intensitas tanam. Dengan sendirinya perluasan lahan padi akan berdampak pada kenaikan pendapatan bukan hanya untuk petani pemilik sawah namun juga pada para penyedia layanan jasa dan barang yang ada seperti para buruh tani serta berbagai bisnis jasa lain seperti bisnis penyedia air, benih, tractor, jasa panen, angkutan dan lainnya. Peta stakeholder usaha padi bisa di lihat di Figure 1 di bawah.

Figure 1: Alur Usaha Padi di Desa dan Berbagai Layanan Barang dan Jasa Pendukung



### **3.1.1 PETANI SKALA KECIL**

Berbeda dengan system bercocok tanam padi sawah di daerah lain, untuk kabupaten Bojonegoro kebanyakan pemilik sawah/petani (pemilih lahan atau penyewa) tidak membawa produk padi/gabah ke rumah, tetapi produk padi atau gabah yang terpanen langsung dijual disawah sehingga mereka langsung menerima uang tunai dan tidak tidak disibukkan lagi dengan penanganan pasca panen, storage dan grading product.

Petani pemilik sawah Akan mendapatkan pendapatan bersih setelah dikurangi pengeluaran untuk pembayaran kepada penyedia bibit, penyedia jasa traktor, pembelian pupuk dan obat-obatan serta jasa pemupukan, Jasa panen dan Jasa Air.

Pada umumnya untuk kabupaten Bojonegoro rata-rata hasil panen untuk system pengairan pompanisasi adalah sekitar 7 – 9 ton gabah kering giling untuk per hektar padi sawah , tergantung , sedangkan harga gabah mulai dari Rp.4,300 – Rp.4,900 untuk setiap kilo gabah kering basah.

### **3.1.2 PENYEDIA JASA IRIGASI**

Berbeda dengan Usaha padi sawah pada areal irigasi teknis dimana penentuan calendar tanam ditentukan oleh Dinas Pengairan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk daerah sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo yang mempergunakan irigasi pompa sebagai sumber irigasi, peranan penyedia air (seperti Pengusaha, HIPPA/BUMDes) lebih berpengaruh dalam penentuan kalender tanam padi. Dalam praktek yang ditemukan di lapangan, Penyedia air akan menginformasikan kepada petani tentang rencana waktu tanam (mulai dari pengoperasian pompa untuk pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman hingga panen). Untuk situasi tertentu, para petani bisa mengusulkan kepada penyedia air untuk memberikan layanan air pada musim-musim tertentu. Misalnya di Trucut, pola tanam di tahun-tahun sebelumnya adalah, MT1-padi, MT2-padi, MT3- beroh (tidak tanam), namun karena prediksi kondisi iklim akibat El-Nino mereka berpikir tahun ini tidak akan terjadi banjir dan mengusulkan kepada penyedia air untuk menyediakan jasa air agar mereka bisa menanam lagi padi untuk yang ke-tiga kali sehingga pola tanam menjadi padi-padi-padi.

Keputusan untuk jadwal mulai tanam lebih tergantung pada persiapan logistik seperti penyediaan modal kerja untuk pembelian bahan bakar dan pembayaran tagihan rekening listrik bulanan. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan padi di sawah yang tidak seragam untuk areal/hamparan yang sama ketika pengelola jasa airnya berbeda. Kenyataan yang dilihat ada hamparan yang baru mulai masa penanaman namun ada hamparan lain yang sudah mendekati panen.

Penyedia Jasa Air mempekerjakan karyawan yang bertugas untuk membagi air ke seluruh areal petak sawah berdasarkan jadwal yang telah ditentukan seperti intensitas dan lamanya pemberian air selama proses produksi padi. Mirip dengan masa penanaman padi, tiap penyedia jasa air (Pengusaha, HIPPA/BUMDes) tidak akan sama dalam hal menentukan intensitas dan lamanya air pada petak sawah karena sangat tergantung pada kondisi tanah dan kebiasaan setempat.

Jumlah petugas pembagi air yang dipekerjakan oleh penyedia jasa irigasi tergantung pada luasan areal pelayanan dan jumlah blok pengairan. Pada umumnya pengusaha sebagai penyedia jasa irigasi memberikan upah/ gaji untuk menjalankan tugas pembagian air. Namun kondisi berbeda bisa ditemui di beberapa skema irigasi pengusaha seperti di tempat pak Sudarwadji. Pembagian air dilakukan oleh pengurus HIPPA yang ada di desa-desa layanan. Pak Sudarwadji kemudian memberikan kontribusi kepada HIPPA tiap desa dari pendapatan jasa air yang diterima. Untuk

HIPPA/BUMDes sebagai penyedia jasa air, petugas pembagi air pada umumnya adalah pengurus inti dari HIPPA/BUMDes itu sendiri.

### ***Proses Pemilihan dan Penggantian Penyedia jasa layanan irigasi pompa di Desa***

Terlepas dari Program Pompanisasi yang dilakukan Pemerintah seperti bantuan pompa dari Balai Bengawan Solo (1980-1981) dan bantuan Pompa dari JICA (1983), serta kebijaksanaan Menteri Pertanian saat ini dengan pembagian pompa irigasi lewat Dinas Pertanian kepada kelompok tani, HIPPA atau BUMDes, sebenarnya partisipasi masyarakat (private sector) dalam penyediaan air irigasi untuk wilayah Bojonegoro sudah dimulai di awal tahun 1980-an, dengan inisiatif pribadi Pak Nursalim di daerah Trucut kata Pak Jayus (Pengusaha Areal).

Pak Jayus sendiri telah memulai bisnis pompanisasi atau penyediaan jasa air sejak tahun 1987 di desa Mojoagung, Kecamatan Soko dan hingga saat ini beliau mengelola areal persawahan seluas 150 ha di desa Kalirejo, kecamatan Bojonegoro melalui lelang/tender yang dilakukan aparat desa Kalirejo dan pengurus HIPPA pada tahun 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 35 juta per tahun untuk jangka waktu 3 tahun. Berhubung karena kontrak pengelolaan hanya berdurasi 3 tahun maka Pak Jayus tidak tertarik untuk melakukan investasi pengalihan dari penggunaan mesin mobil ke listrik pada areal yang dikelola (Kalirejo) saat ini. Berbeda dengan Pak Jayus, Haji Achin (Pengusaha Areal) di Kecamatan Kanor dan Balen memulai usaha penyediaan Jasa air sejak tahun 1988 di Puncangarum, Kecamatan Baureno dan hingga saat ini beliau mengelola bisnis penyediaan air di desa Sarirejo (60 ha) dan desa Pilangede (150 ha).

Pemilihan pengusaha untuk memberikan layanan jasa air untuk suatu desa bisa terjadi karena beberapa penyebab. Penyebab pertama misalnya suatu desa belum pernah mendapatkan layanan jasa air dan mulai menggunakan layanan jasa irigasi dari pengusaha untuk pertama kali. Penyebab kedua adalah karena ada peralihan / penggantian penyedia air irigasi. Secara umum dapat kita katakan terjadinya peralihan / pergantian penyedia air irigasi di suatu tempat karena beberapa hal berikut:

- a) Adanya ketidakpuasan terhadap pengelola/pengusaha sehingga kepala desa/aparat harus mencari pengelola /pengusaha lain. Ketidakpuasan ini disebabkan karena ketidakmampuan pelayanan air atau hubungan yang tidak harmonis antara pengusaha dan pejabat di desa.
- b) Jika jangka waktu kontrak telah selesai antara pengusaha dan desa yang bersangkutan
- c) Kelompok Tani /HIPPA di desa telah berkembang/ maju sehingga sudah dapat mengelola pelayanan air irigasinya sendiri dan menghentikan kerja sama dengan Pengusaha. Pergantian seperti ini akan sering terus terjadi di kemudian hari pada HIPPA yang masih bekerja sama dengan pengusaha saat ini. Hal ini terjadi ketika organisasi para petani pemakai air semakin kuat dan solid seperti yang terjadi di Gedongarum dan Kedung Primpem. Pada awalnya mereka bekerja sama dengan pengusaha, seiring perjalanan kelompok mereka berkembang hingga terbentuk HIPPA dan dengan tabungan dari pembagian jasa air dari pengusaha berkembang, mereka memutuskan untuk mengelola usaha penyediaan air dalam desa sendiri. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah tentang pembentukan BUMdes maka HIPPA di masing-masing desa Gedongarum dan Kedungprimpem tersebut merjer / bergabung dalam struktur kepengurusan BUMDes. Kenyataannya perkembangan bisnis jasa air terus berkembang hingga saat ini dan kedua BUMdes tersebut ingin memperluas areal pelayanan air mereka ke desa-desa disekitarnya.

Pada awal proses stakeholder mapping, Tim TIRTA berasumsi bahwa untuk melakukan pemilihan pengusaha areal (pemilihan baru atau karena penggantian), Desa akan menggunakan salah dari dua cara utama pemilihan; *pertama*, melakukan penunjukan langsung (direct selection) dan, *kedua*, melakukan tender terbuka mengundang beberapa pengusaha untuk mengajukan penawaran, menganalisa penawaran dari berbagai pengusaha, dan secara terbuka berembung dan memilih pengusaha yang dianggap paling tepat untuk memberikan layanan jasa irigasi.

Hasil dari stakeholder mapping membuktikan bahwa praktek tender terbuka tidak terjadi dan juga tidak terlalu diminati oleh para pengusaha. Proses pemilihan penyedia jasa irigasi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan secara perorangan dengan pengusaha-pengusaha areal yang dikenal. Kepala Desa akan mendekati pengusaha yang dikenalnya dan melakukan penjajakan dan negosiasi. Jika cocok, Kepala Desa kemudian akan berembung dengan para tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan menggunakan layanan jasa calon penguasah areal tersebut, seperti yang disampaikan oleh kepala desa Sukoharjo tentang proses pemilihan pengusaha di desanya.

- Pemerintah desa mencari pengusaha areal yang berminat untuk melayani jasa irigasi di desa Sukoharjo.
- Pemerintah desa mengundang pengusaha areal untuk melihat/survey desa yang akan dilayani.
- Pengusaha areal mengajukan proposal rencana pelayanan jasa irigasi ke pemerintah desa.
- Pengusaha areal menjelaskan proposal tersebut kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pertemuan/kegiatan musyawarah desa (MUSDES).
- Pemerintah desa dan masyarakat membuat keputusan terhadap pengusaha areal.
- Membuat perjanjian yang ditujukan antara desa dan pengusaha

Tentu saja resiko dari proses pendekatan langsung seperti ini rentan dengan berbagai kemungkinan penyimpangan. Salah satu dampak dari proses pendekatan dan penunjukan langsung ini bisa dilihat di desa yang sama, Desa Sukoharjo, yang memiliki kontrak dengan Pengusaha dengan periode kontrak selama 25 tahun dengan berbagai klausul yang mengamankan monopoli bisnis pengusaha tersebut selama periode kontrak.

Pengalaman dan pandangan para pengusaha tentang proses pemilihan berbeda-beda. Mereka pada umumnya lebih tertarik dengan proses pendekatan langsung dari desa kandidat penerima layanan jasa irigasi. Haji Achin misalnya, mendapatkan pengelolaan areal berdasarkan tawaran dari aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu masyarakat menyediakan pompa / air untuk sawah mereka. Haji Achin bersedia karena sebagai pengusaha slep/penggilingan padi, ia menerima tawaran itu karena dapat memenuhi kebutuhan akan gabah guna memenuhi kontrak dengan Bulog/Dolog.

Demikian juga dengan pengusaha Areal, pak Jayus, yang memberikan pelayanan jasa air irigasi di lima desa wilayah Kecamatan Trucut – Bojonegoro. Beliau tidak tertarik jika ada kepala desa/aparat HIPPA memberikan tawaran untuk mengikuti tender pengelolaan areal karena dengan cara demikian berarti kepala desa atau aparat tersebut punya maksud-maksud tertentu dalam negosiasi misalnya dalam hal besarnya nilai kontrak dan lainnya. Metode yang lebih dipilihnya adalah dengan cara melakukan kajian langsung ke daerah/ areal yang baru lewat survey yang dilakukan oleh staf dan diikuti dengan proses verifikasi langsung olehnya sebelum memulai bisnis penyediaan air pada lokasi yang baru.

Pengelolaan air irigasi juga berhubungan dengan jabatan kepala desa. Pada desa-desa tertentu, berdasarkan hasil survey, ditemukan dua kepala desa yang juga menjalankan bisnis penyediaan air irigasi di desanya seperti pak Muslih ST Kepala Desa Rendeng, kecamatan Malo dan pak Arif Saifudin kepala desa Nguken Kecamatan Graho di kabupaten Bojonegoro. Selain dua kepala desa tersebut, kepala desa Petak dan Ngujung saat ini mulai mengelola Pompa bantuan Dinas Pertanian di Kecamatan Malo dan bertindak sebagai pengusaha.

Dari beberapa kenyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses tender terbuka tidak lazim dilakukan oleh Desa dan proses pemilihan dan pengalihan pengelolaan bisnis penyediaan air irigasi saat ini berbeda-beda sesuai kondisi di lapangan.

### **3.1.3 PENYEDIA TRACTOR**

Pada setiap lokasi ada beberapa pengusaha local/petani yang menyediakan jasa pengolahan tanah. Pak Suardi merupakan salah satu penyedia jasa Traktor dengan 1 (satu) unit traktor yang dimilikinya dalam setahun. Pada MK 1 melayani jasa pengolahan tanah sekitar ~ 15 ha sawah, dan untuk MK 2 dan 2 (musim panas) dapat melayani hingga ~ 20 ha. Tarif jasa pengolahan tanah adalah Rp.1.000.000 per hektar.

### **3.1.4 PENYEDIA BIBIT**

Penyedia bibit padi bekerja secara terintegrasi mulai dari penyediaan tanah, pupuk, benih, penaburan benih dan pemeliharaan persemaian sampai siap untuk ditanam. Penyedia bibit juga mempekerjakan orang untuk pengolahan tanah, penyalur tanah, penakar benih dan pemeliharaan persemaian sampai siap dipindahkan ke lahan tanam.

Keunggulan sistem pembibitan ini dibanding dengan cara pembibitan konvensional adalah persemaian dapat dipelihara di lahan kering di luar areal tanam/sawah dengan penyiraman (hemat lahan/air), mengurangi resiko kegagalan karena banjir di lahan sawah, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, dan pengendalian pertumbuhan lebih mudah. Keuntungan lainnya adalah pertumbuhan bibit lebih cepat dan dapat mengikuti jadwal air/percepatan musim tanam.

Perhitungan biaya operasional unit ini menghasilkan harga bibit yang sebanding dengan harga bibit yang ditanam secara konvensional (harga bibit siap tanam termasuk pencabutan dan pengangkutan ± Rp. 200 ribu per lajur x 5 lajur untuk satu hektar sawah Rp.1.000.000). Pendapatan pengusaha bibit dengan luasan pembibitan 1 ha adalah sekitar Rp.6.300.000 untuk sekali semai. Dalam setahun, seorang pengusaha bibit bisa melakukan hingga 10 kali penyemaian atau dengan pendapatan sekitar Rp.63.000.000, -

Secara ekonomis Usaha pembibitan padi hemat lahan ini membuka peluang bisnis baru dibidang penyediaan bibit bagi petani untuk Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu hampir di setiap hamparan sawah dapat ditemukan Penyedia Bibit Cabut ini. Dengan melakukan bisnis perbibitan padi, diperoleh manfaat lain yaitu penghematan waktu dan lahan untuk persiapan tanam padi yang berurutan

### **3.1.5 BURUH TANAM**

Untuk pekerjaan penanaman biasanya dipergunakan tenaga buruh perempuan yang tergabung dalam kelompok buruh tanam ibu-ibu tani. Biasanya mereka bekerja system borongan dengan dikoordinir oleh salah satu dari mereka. Tarif harian per-orang untuk buruh tanam adalah Rp.50.000 per hari sedangkan borongan tergantung negosiasi dengan pemilik lahan berdasarkan luasan tanam.

### **3.1.6 BURUH PEMUPUKAN/PEMBERSIHAN GULMA**

Di lapangan dapat kita lihat bahwa pemupukan sebagian besar dilakukan oleh buruh pria/laki-laki. Ini disebabkan karena karena berat-nya beban/pupuk yang harus dibawa saat melakukan kegiatan pemupukan. Upah untuk pemupukan sehari Rp 50, 000,-. Sedangkan kegiatan penyiangan sering dilakukan oleh buruh perempuan dan laki-laki, dan dilakukan secara kelompok. Upah yang dibayar untuk kegiatan penyiangan adalah Rp.25, 000 – Rp.30, 000. Tidak ada perbedaan upah bayaran antara laki-laki dan perempuan.

### 3.1.7 PENEBAS/TENKULAK/BURUH PANEN

Untuk daerah BojonegoroTuban dan Lamongan kita sering mendengar istilah “Penebas” yakni orang yang berfungsi sebagai pemborong hasil padi di lahan sawah, mengorganisir panen, serta penjualan kepada pembeli gabah/ atau pemilik penggilingan padi (Sleb). Penebas dalam menjalankan profesinya dapat hanya sebagai penyedia jasa panen padi, baik bagi petani/pemilik sawah atau bagi pengusaha/HIPPA BUMDes dengan tariff/upah Rp.40.000 – Rp.50.000 per 100 kg Gabah.

Dalam pelaksanaan panen padi “Penebas” mempekerjakan sekitar 25-50 buruh panen yang dibayar Rp.35.000 per 100 kg Gabah yang dipanen. Sehingga untuk setiap 100 kg gabah hasil panen “Penebas” akan mendapatkan income sekitar Rp.5,000 – Rp.15,000. “Penebas” juga dapat berfungsi sebagai penyedia jasa panen, pembeli hasil (padi) dan penjual gabah, tergantung negosiasi dan penawaran dengan pemilik sawah atau HIPPA/BUMdes juga pengusaha.

Ada sisi lain yang menarik dari “Penebas” mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan pengusaha penggilingan, dan menjual gabah hasil tebasan / panen kepada Pengusaha Slep /penggilingan hingga ke Lamongan seperti yang dilakukan oleh pak Nurjaman di Trucuk.

## 3.2 PETA STAKEHOLDER LAYANAN JASA IRIGASI

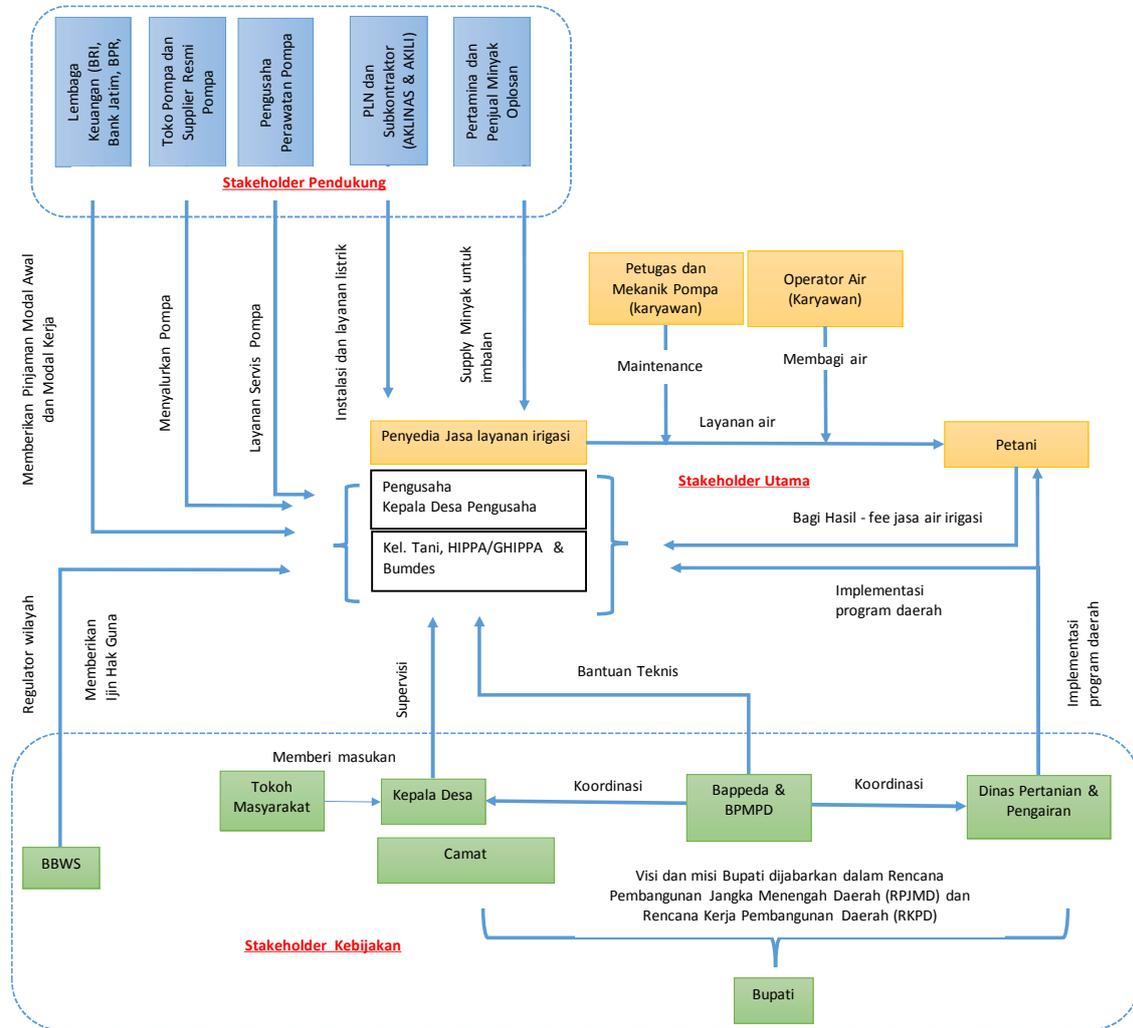
Pada dasarnya para stakeholder bisa di bagi dalam tiga kategori; **Stakeholder Utama, Stakeholder Pendukung, dan Stakeholder Kebijakan** seperti yang tergambar dalam peta stakeholder dibawah (Figure 2).

Kategori pertama adalah **stakeholder utama** dalam layanan jasa irigasi. Stakeholder utama terdiri dari dua stakeholder yaitu; *petani* sebagai klien utama, dan para investor sebagai *Penyedia Jasa Irigasi*. Beberapa jenis investor penyedia jasa irigasi yang bisa ditemui adalah para pengusaha pompa dan areal, kepala desa yang menjalankan bisnis irigasi, atau wadah kelembagaan di desa seperti HIPPA dan BUMDe). Penyedia Jasa Irigasi juga termasuk di dalamnya para karyawan pembagi air dan mekanik perawatan mesin dan pompa.

Untuk bisa menyediakan jasa irigasi, penyedia jasa membutuhkan berbagai dukungan finansial dan dukungan layanan barang dan jasa dari pihak luar. Para stakeholder yang memberikan dukungan finansial serta layanan barang dan jasa dan dalam peta di sebut kelompok **stakeholder pendukung**. Dari temuan stakeholder mapping, penyedia jasa irigasi mendapatkan dukungan finansial dari beberapa lembaga keuangan yang ada seperti BRI, Bank Jatim, BPR, dan UPK PNPM. Dukungan modal dipakai untuk investasi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membangun stasiun pompa dan menjalankannya sepanjang musim tanam. Dukungan layanan jasa dan barang yang juga penting adalah dari Toko Pompa dan Supplier Resmi Pompa, Penyedia Jasa Perawatan Pompa, PLN beserta sub-kontraktornya dan Pertamina ataupun penjual minyak oplosan untuk menjalankan berbagai mesin-mesin pompa imbalan.

Kelompok ketiga stakeholder adalah **stakeholder kebijakan**. Beberapa jenis stakeholder yang masuk adalah para tokoh masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten ataupun kewilayahan. Di luar desa dan kecamatan, stakeholder pemerintah daerah dan badan-badan pemerintah juga memainkan perannya dalam mendukung layanan jasa irigasi dalam hal penyusunan dan implementasi berbagai kerangka regulasi seputar penyediaan jasa irigasi dan penggunaan air Bengawan Solo serta menjalankan berbagai program-program pembangunan pemerintah daerah dan pusat. Beberapa kantor pemerintah yang relevan adalah Bappeda, BPMPD, Dinas Pertanian dan Pengairan, dan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BBWS). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing stakeholder tentang peran dan kepentingan dalam penyediaan jasa irigasi pompa di desa.

Figure 2: Peta Stakeholder Layanan Irigasi Pompa



### 3.3 RINGKASAN ANALISA STAKEHOLDER

Berikut adalah ringkasan dari masing-masing stakeholder tentang analisa peran, kepentingan, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, serta posisi masing-masing stakeholder terhadap tujuan utama TIRTA. Penjelasan detail setiap stakeholder akan dilakukan di bagian 3.3.1 hingga 3.3.8.

Table 2: Ringkasan Stakeholder Utama

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
Stakeholder Utama				
Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola usaha padi</li> <li>Membayar jasa air irigasi</li> <li>Memilih badan pengurus HIPPA/BUMDES</li> <li>Memilih Kepala Desa</li> </ul>	Mendapatkan air irigasi agar bisa memperluas / meningkatkan usaha padi dan memperbaiki penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan Sawah (yang dimiliki sendiri / di sewa)</li> <li>Kemampuan bertani dan memiliki akses kepada berbagai layanan barang dan jasa yang mendukung usaha padi</li> </ul>	<b>(Pro)</b> Petani yang memiliki rencana untuk perluasan lahan / menambah musim panen akan antusias dan bersedia terlibat dalam kerja sama dengan penyedia jasa layanan irigasi dengan berbagai persyaratan.
HIPPA / BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola anggota pemakai air</li> <li>Memelihara jaringan irigasi di desa</li> <li>Menjalankan stasiun pompa dan memastikan air terbagi secara adil kepada anggota</li> <li>Menarik fee pembayaran</li> <li>Memastikan HIPPA mendapatkan keuntungan untuk menunjang keberlanjutan layanan</li> </ul>	Keuntungan yang berkelanjutan bagi lembaga dan anggotanya	<p>Pengalaman HIPPA / BUMDES akan beragam. Untuk HIPPA/BUMDES yang aktif akan memiliki berbagai sumber daya dan kapasitas dibawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman Mengelola jasa layanan irigasi</li> <li>Memiliki anggota</li> <li>Memiliki kepengurusan</li> <li>Memiliki areal layanan yang sedang diairi dan juga target perluasan yang jelas</li> </ul>	<p><b>(Pro)</b> HIPPA/BUMDES aktif akan antusias terlibat dalam kegiatan program TIRTA.</p> <p>HIPPA yang tidak aktif akan membutuhkan waktu yang lama dalam membangun komitmen dan kapasitas.</p>
Pegusaha Pompa / Areal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan stasiun pompa dan memastikan air terbagi secara adil kepada para anggota</li> <li>Menarik fee pembayaran</li> </ul>	Keuntungan usaha dalam jangka waktu yang panjang	Beragam kapasitas dari pengusaha skala kecil (pengusaha pompa) hingga pengusaha besar yang melayani areal lahan >500 ha dan memiliki perangkat	<b>(Mixed)</b> Pengusaha akan antusias terlibat apabila potensi perluasan jelas. Keengganan untuk melakukan investasi bisa terjadi

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
			karyawan, sarana dan prasarana pendukung	apabila tidak ada jaminan periode kontrak bisa memberikan keuntungan.
Stakeholder Pendukung				
Lembaga Keuangan	Membiayai modal awal dan modal kerja penyedia jasa irigasi pompa	Keuntungan perusahaan dari pinjaman yang diberikan	Berbagai produk yang ditawarkan pada usaha kecil dan menengah sesuai dengan kebutuhan tidak hanya spesifik untuk pembiayaan irigasi.	<b>(Pro)</b> Ada beberapa lembaga keuangan dengan berbagai produk yang ditawarkan. Tim TIRTA harus membantu mitranya untuk bisa memilih produk yang paling tepat dengan kapasitas.
Supplier Pompa	Menyediakan Pompa rakitan maupun pompa resmi	Keuntungan usaha dan keberlanjutan support purna jual	Supplier lokal menyediakan pompa rakitan / import china Supplier resmi seperti Torishima menyediakan jasa rancangan pompa sesuai kebutuhan dan bantuan teknis	<b>(Pro)</b> PT Torishima berpotensi untuk dilibatkan terutama pada skema medium dan besar karena bisa memberikan asistensi teknis dalam merancang pompa yang tepat untuk areal dan karakteristik lapangan di masing-masing intervention
Bengkel Pompa	Menawarkan jasa perbaikan mesin pompa tidak hanya untuk irigasi tapi juga penggilingan padi	Keuntungan usaha dan keberlanjutan penggunaan jasa perbaikan	Keahlian dan pengalaman perbaikan Telah melayani klien tidak hanya wilayah bojonegoro	<b>(Pro)</b> Terbuka untuk bekerja sama dalam memberikan jasa layanan kepada klien yang membutuhkan, dan memberikan informasi secara transparan tentang bisnisnya

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
			Layanan perbaikan di bengkel maupun di lokasi mesin  Memiliki karyawan di bengkel dan di lapangan.pompa	terhadap tim TIRTA tentang harga pelayanan jasa perbaikan dan keuntungan per tahunnya.
PLN dan subkontraktor	Menyediakan instalasi dan jasa listrik untuk menjalankan stasiun pompa	Keuntungan Perusahaan dari hasil penjualan listrik	Tenaga Teknis  Standard Operating Procedure yang baku  Beberapa model / produk listrik yang ditawarkan pada khalayak umum	<b>(Neutral)</b> Satu-satunya perusahaan penyedia daya listrik, pelibatan PLN akan sangat penting perannya namun harus dipertimbangkan ketepatan daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan agar bisa lebih efisien.
Pertamina	Menjual bahan bakar kepada masyarakat umum	Keuntungan perusahaan	Ketersediaan bahan bakar dan outlet yang tersedia di berbagai tempat	<b>(Neutral)</b> Tidak berhubungan langsung dengan TIRTA menyediakan bahan bakar kepada public.
<b>Stakeholder Pendukung</b>				
Kepala Desa	Menjalankan pemerintahan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan	Memastikan masyarakat desa bisa menjalankan usaha produksi dengan dukungan yang memadai dari segi prasarana dan sarana.	Otoritas tertinggi di desa dan dipercaya masyarakat. Sebagai pemimpin di desa akan mampu mengorganisir masyarakat desa, kelompok masyarakat dan bertanggung jawab atas organisasi /unit-unit usaha di desa. Menjadi figure penting dalam memimpin negosiasi antar desa.	<b>(Mixed)</b> Tokoh utama di desa yang harus di galang kerja sama dan dukungannya, sebelum bisa menjalankan berbagai kegiatan intervensi di desa. Kepala Desa tipe fasilitator dan pemberdayaan (lihat analisa pemerintah Desa) merupakan figure ideal untuk diajak kerja sama.

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
				Kepala Desa yang juga merangkap sebagai pengusaha bisa saja resisten ketika proses bantuan teknis merencanakan kemungkinan pengalihan penyedia jasa kepada HIPPA / BUMDES
Tokoh Masyarakat	Peran informal dan formal lewat (BPD) memberikan masukan dan pengawasan kepada kepala desa	Berbagai pengambilan keputusan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan kepentingan masyarakat	Anggota-anggota masyarakat yang suaranya di dengar oleh Kepala Desa	<b>(Pro)</b> Karena peran TIRTA membantu petani meningkatkan akses irigasi tidak dianggap kemungkinan akan ada penolakan terhadap tujuan TIRTA.
Bupati	Menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk menjalankan program-program pembangunan	Janji politik terpenuhi lewat berbagai program-program yang dicanangkan dalam 5 tahunan dan tahunan	SKPD-SKPD yang menjalankan berbagai program daerah maupun pusat untuk mendukung pertanian dan irigasi (misalnya 1,000 embung, Pompanisasi, dan asuransi pertanian)	<b>(Pro)</b> Tujuan TIRTA sejalan dengan visi dan misi Bupati Bojonegoro untuk menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung padi nasional
Camat	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan	Lancarnya tugas-tugas Camat (pemerintahan, pemberdayaan, koordinasi dan pengawasan) sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang	Dana APBD untuk kecamatan serta otoritas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, bisa menjembatani komunikasi dan negosiasi antara desa, serta komunikasi dengan berbagai perangkat pemerintah kabupaten	<b>(Pro)</b> Peran mereka dianggap penting dalam hal mendorong dan mempengaruhi para pihak terkait, baik tingkat terkait di kecamatan (HIPPA/BUMDES, Kepala Desa, UPTD, Lembaga Keuangan) maupun di tingkat Kabupaten (Dinas terkait dan Bupati) untuk

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
				memberikan dukungan kepada Project TIRTA.
Bappeda	Koordinator perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten	Program-program pembangunan sejalan dengan visi dan misi bupati. Anggaran dipergunakan tepat waktu sesuai dengan perencanaan.	Perencanaan tingkat kabupaten, SKPD yang mempunyai wewenang dalam mengkoordinasikan SKPD teknis seperti PU Pengairan dan Pertanian.  Bappeda memiliki program-program unggulan dalam setiap tahun anggaran sesuai visi dan misi Bupati, yang bisa disinergikan seperti penguatan BUMDES.	<b>(Pro with cautious)</b> Koordinasi teratur harus dilakukan dengan pejabat bappeda yang berwenang agar mengetahui tentang TIRTA dan bisa membantu memfasilitasi berbagai pertemuan atau apabila ada persoalan ketika berhubungan dengan SKPD teknis di kabupaten ataupun dengan Bappeda tingkat Provinsi.  Hubungan dengan Bappeda bisa counterproductive apabila terlalu intense ataupun kurang intense dalam membagi informasi dan koordinasi.
Dinas PU Pengairan	Melaksanakan urusan pembangunan di bidang teknis sumber daya air dan pengairan. Dinas Pengairan memiliki fungsi dan peran utama dalam hal pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air.	Memastikan pembangunan di bidang sumber daya air dan pengairan sejalan dengan visi dan misi Bupati	Program Bupati 1,000 embung dan pengelola 62 daerah irigasi waduk non-pacal, serta memiliki program penguatan kapasitas pengurus HIPPA, serta memiliki perangkat di lapangan yang dikenal dengan Mantri Air	<b>(Pro)</b> Mendukung program TIRTA karena memiliki banyak kesamaan kepentingan, namun informasi harus selalu di share dan koordinasi serta hubungan kerja sama di jaga dengan baik.

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Sumber Daya dan Kapasitas	Posisi (Pro atau Kontra) atas tujuan Program TIRTA
Dinas Pertanian	Memberikan bantuan sarana dan prasarana irigasi, memberikan bantuan alat mesin pertanian untuk mendukung kegiatan usaha tani, dan memberikan penyuluhan kepada petani, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan HIPPA	Memastikan pembangunan di bidang pertanian sejalan dengan visi dan misi Bupati.	Menjalankan beberapa program pemerintah seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembinaan dan pemberdayaan HIPPA</li> <li>• memberi bantuan sarana dan prasarana JITUT/JIDES</li> <li>• memberikan bantuan sarana pompanisasi bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran Sungai Bengawan Solo</li> <li>• memberikan bantuan berupa seperangkat sumur bor bagi masyarakat yang jauh dari Sungai Bengawan Solo.</li> <li>• penyuluhan kepada Gapoktan/Kelompok Tani, dan</li> <li>• Rencana memberikan subsidi/asuransi gagal panen untuk petani.</li> </ul>	<b>(Pro)</b> Mendukung program TIRTA karena memiliki banyak kesamaan kepentingan, namun informasi harus selalu di share dan koordinasi serta hubungan kerja sama di jaga dengan baik.
BBWS	Institusi Resmi Pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya air di Bengawan solo	Pengelolaan sumber daya air dalam rangka konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air	Regulator resmi Bengawan solo dan institusi yang memberikan rekomendasi teknis	<b>(Pro)</b> Lembaga yang mengeluarkan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air, mempunyai pandangan positif tentang penggunaan air bengawan solo untuk meningkatkan produksi usaha padi para petani skala kecil

### 3.3.1 PETANI PEMAKAI AIR DAN NON PEMAKAI AIR

Sasaran Program TIRTA adalah para petani yang tinggal di desa-desa sepanjang Bengawan Solo di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Timur; *Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan*. Diperkirakan terdapat sekitar 175 desa yang berada di sepanjang bantaran sungai di tiga kabupaten ini. Dalam hal akses pada air irigasi, para petani di desa bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu para petani pemakai air dan petani bukan pemakai air atau non pemakai air.

Petani pemakai air adalah para petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air baik jaringan irigasi teknis ataupun irigasi pompa untuk mengairi lahan pertaniannya<sup>4</sup>. Namun dalam profil ini istilah Petani Pemakai Air adalah petani yang memanfaatkan air irigasi dari skema irigasi pompa. Petani non pemakai air adalah para petani yang belum memiliki akses pada air irigasi. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hambatan utama seperti lokasi geografis lahan pertaniannya yang tinggi, jarak jauh yang dari sungai, ataupun ketiadaan penyedia jasa layanan air irigasi pompa.

Para petani pemakai air biasanya tergabung dalam suatu wadah kelembagaan di desa yang disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Di wilayah Jawa Timur kelompok P3A lebih dikenal dengan nama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). HIPPA dibentuk secara swadaya oleh para petani pemakai air di desa untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan irigasi seperti mengatur pembagian air untuk petani, mengatur dana pengelolaan irigasi, memelihara jaringan irigasi dan menjamin keberlanjutan system irigasi di desa. Apabila HIPPA telah maju dan berkembang, Pemerintah Desa bisa mengembangkan HIPPA menjadi suatu unit usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengelola berbagai usaha-usaha produktif selain pengelolaan air.

Dalam hal kepemilikan lahan, baik pemakai air maupun non pemakai air, pada umumnya mengerjakan lahan-lahan milik mereka sendiri. Hanya ada sejumlah kecil petani (3 dari 52 orang sample) yang harus menyewa lahan setiap tahun atau mendapatkan pinjaman lahan sebagai fasilitas yang bisa dinikmatinya karena menduduki jabatan administrasi pemerintahan di desa (2 dari 52 orang)<sup>5</sup>.

Dari aspek luasan lahan, data survey TIRTA untuk pemakai dan non-pemakai air menunjukkan data-data luas lahan sebagai berikut.

Table 3: Data Luas Lahan Petani

Sample (N)	46*
Rata-Rata Luas Lahan (mean)	0.48 ha
Median	0.4 ha
95% CI (Confidence Interval)	± 0.3 ha (Lower limit 0.17ha – Upper limit 0.78 ha)

\* Outlier petani dengan luas lahan >2 ha dihilangkan

Sebagian besar petani yang memiliki akses air irigasi dari Bengawan Solo mengerjakan sawahnya antara dua hingga tiga kali musim tanam dalam setahun. Sedangkan para petani yang tidak memiliki akses air irigasi, pada umumnya hanya mengerjakan lahan sekali dalam setahun dengan mengandalkan air yang tersedia saat musim hujan. Di saat tertentu ketika air mencukupi, beberapa petani menambah musim tanamnya, namun tidak menanam padi tapi menggantikannya dengan tanaman lain seperti jagung, cabe ataupun tembakau. Untuk usaha padi, pada umumnya para petani mendapatkan hasil panen berkisar rata-rata 4.5 ton per ha.

<sup>4</sup> Produk kebijakan pemerintah yang relevan adalah; PP Nomer 20 Tahun 2006, Peraturan tentang irigasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, No. 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

<sup>5</sup> Lahan pinjaman ini lebih dikenal dengan nama Tanah Bengkok

Sample (N)	46*
Rata-Rata Produksi	4.5 ton/ha
Median	4.52 ton/ha
95% CI (Confidence Interval)	± 1.75 (Lower limit 2.76 – Upper limit 6.27)

\* Outlier petani dengan luas lahan >2 ha dihilangkan

Para petani yang mendapatkan air dari irigasi pompa harus membayar jasa air irigasi. Mereka melakukan pembayaran jasa air irigasi di saat panen dengan membagi hasil panen sesuai kesepakatan kepada para penyedia jasa air irigasi. Para penyedia jasa layanan air di desa terdiri dari pengusaha<sup>6</sup> (*biasanya disebut pengusaha areal*) atau kepada HIPPA/BUMDES.

Biaya jasa irigasi yang disediakan oleh HIPPA/BUMDES pada umumnya jauh lebih kecil dibandingkan biaya jasa irigasi yang dibebankan oleh pengusaha areal. Biaya jasa air irigasi yang disediakan oleh HIPPA berkisar antara 14–16% dari hasil panen per hektar, sedangkan pengusaha areal membebankan biaya air sebesar 20–25% dari hasil panen per hektar. Diantara para penyedia jasa irigasi; HIPPA, pengusaha areal, dan pengusaha sumur pompa, biaya jasa air irigasi tertinggi dikenakan oleh pengusaha jasa irigasi sumur pompa yang membebankan biaya air hingga sebesar 1/3 atau 33% dari hasil panen para petani per hektar.

Table 4: Biaya Irigasi Berdasarkan Penyedia Jasa

No	Penyedia Jasa Irigasi	Biaya Air Irigasi
1	HIPPA & BUMDES	14% - 16%
2	Pengusaha Areal Irigasi Pompa	20% - 25%
3	Pengusaha Sumur Pompa	33%

Sekalipun biaya jasa air tersebut cukup mahal, para petani tetap bersedia membayar jasa air asalkan mereka tetap bisa mendapatkan air untuk mengairi lahan pertaniannya. Dari 35 petani pemakai air yang diwawancarai oleh tim TIRTA, hanya empat orang petani yang menyatakan ada permasalahan dari layanan jasa air irigasi yang diterimanya saat ini. Ini menunjukkan seberapa besar petani merasa puas dengan layanan jasa air irigasi yang diterimanya<sup>7</sup>. Tingkat kepuasan para petani akan pelayanan irigasi lebih banyak ditentukan oleh dua hal utama, pertama, tingkat kecukupan kebutuhan air di lahan petani, dan kedua, tingkat kecepatan respon para penyedia jasa layanan air apabila terjadi permasalahan dalam hal penyaluran ataupun pembagian air. Dalam hal ini, peran operator lapangan yang dipekerjakan para pengusaha ataupun karyawan HIPPA/BUMDES untuk menjalankan pembagian air dan bertugas menanggapi permasalahan layanan air irigasi menjadi sangat penting.

Hasil survey tim TIRTA menunjukkan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh setiap petani pemakai pengguna air irigasi pompa rata-rata sebesar Rp. 15 juta / ha untuk satu musim tanam. Ini telah termasuk biaya jasa air irigasi yang berkisar antara 14% - 33% dari hasil panen. Penghasilan bersih yang diterima petani rata-rata sejumlah Rp. 28 juta / ha. Jika dibandingkan, tentu saja biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani pemakai air irigasi pompa lebih besar dibandingkan dengan petani tadah hujan. Namun penghasilan bersih para petani dengan jasa air irigasi dua kali lebih besar dari para petani sawah tadah hujan.

<sup>6</sup> Di beberapa desa seperti Desa Rendeng dan Nguken, Kepala Desa memainkan peran sebagai pengusaha areal

<sup>7</sup> Atau bisa saja para petani tidak memiliki banyak pilihan Penyedia Jasa Layanan Irigasi di Desa.

Table 5: Biaya Usaha Padi (Petani Suntoro - Desa Prambonetan, Bojonegoro)

Tahap Usaha Tani		Keterangan	Rp
1	Pendapatan (0.5 ha)	3.500 kg x 4.500	15,750,000
		Total Pendapatan (A)	15,750,000
2	Biaya Produksi		
a	Benih	Ciherang 15 kg x @9.000	135,000
		TOTAL BENIH	135,000
b	Pupuk:		
	Ponska (100 kg)	2 sak x @115.000	230,000
	TSP (150 kg)	3 sak x @110.000	330,000
	Urea	2 sak x @115.000	230,000
	Organik	5 sak x@ 20.000	100,000
		TOTAL PUPUK	890,000
c	Pestisida:		
	Virtako	2 botol x@ 189.000	378,000
	Primatan Daun	1 botol x @12.000	12,000
		TOTAL PESTISIDA	390,000
d.	Sewa Buruh	(hari & orang)	
	- Pengolahan Tanah / Traktor	Traktor	200,000
	- Tanam	16 orang x @25.000	400,000
	- Cabut benih	4 orang x @35.000	140,000
	- Pemupukan	Sendiri	-
	- Penyemprotan	Sendiri	-
	- Panen	Tebasan	-
		TOTAL SEWA BURUH	740,000
e.	Biaya listrik	Untuk hama tikus	100,000
	Biaya air	1/5	3,150,000
		Total Biaya Produksi (B)	5,405,000
		Laba (A – B)	10,345,000

Berikut adalah perbandingan biaya produksi padi antara berbagai petani dengan luas lahan yang berbeda dengan beberapa biaya irigasi:

Table 6: Perbandingan Produksi dan Pendapatan

	Kriteria – Luas Lahan	Total Petani	Total Luas Lahan	Total Panen	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Pendapatan Bersih per Individu	Pendapatan Net per Ha	Pendapatan Net per Tahun per Ha	Rerata Luas Lahan
<b>With Irrigation</b>	All land sizes (0.1 – 5 ha)	35	36.3	205.8	530,083,814	992,890,175	28,368,290.71	27,352,346.42	*56,736,581	1.04
	<2 ha	30	17.7	112.9	263,482,421	578,238,300	19,274,610.00	32,668,830.51	*65,337,661	0.59
<b>Rain Dependant</b>	All land sizes (0.2 – 2 ha)	17	9.56	56.4	186,892,900	213,536,875	12,560,992.65	22,336,493.20	**22,336,493.20	0.56
	<2 ha	16	7.56	37.81	102,900,400	179,848,750	11,240,546.88	23,789,517.20	**23,789,517	0.47

Table 7: Perbandingan Produksi Padi dan Biaya Jasa Irigasi

Petani	*Tasir	*Mat	*Lasmujiono	*Suntoro	*Kasmuri	**Ali
<b>Desa</b>	Leran	Rendeng	Tulungrejo	Prambonwetan	Kedungprimpen	Banaran
<b>Jenis Irigasi</b>	Sumur Bor	B.Solo	B.Solo	B.Solo	B.Solo	Tadah Hujan
<b>Service Provider</b>	Pengusaha	Pengusaha	Pengusaha	Pengusaha	Bumdes	-
<b>Luas Lahan (ha)</b>	0.36	0.25	0.5	0.3	1.5	0.5
<b>Tarif Jasa Irigasi</b>	1/4	1/4	1/5	1/6	1/7	-
<b>Produksi (ton)</b>	2	1.7	3.85	3.5	7.605	3
<b>Pendapatan Kotor(Rp)</b>	13,500,000	15,600,000	34,650,000	31,500,000	68,445,000	13,500,000
<b>Biaya Produksi (Rp)</b>	9,300,000	7,370,000	14,185,000	10,810,000	20,697,857	3,315,000
<b>Proporsi (ISF) dibandingkan Biaya Produksi (%)</b>	48%	53%	48%	58%	47%	-
<b>Pendapatann Bersih (Rp)</b>	4,200,000	8,230,000	20,465,000	20,690,000	47,747,143	10,185,000
<b>Pendapatan Bersih per Ha (Rp)</b>	11,666,667	32,920,000	40,930,000	68,966,667	31,831,429	20,370,000

Saat melakukan survey mendalam, Tim TIRTA juga melaksanakan pengukuran indeks kemiskinan dengan menggunakan instrument kuisisioner yang dikembangkan oleh Grameen Bank atau yang lebih dikenal dengan *Progress out of Poverty Index* (PPI)<sup>8</sup>. Dari total 52 petani (pemakai dan non pemakai air) yang disurvei, 24% dikategorikan miskin (100% National Threshold Level). Yang menarik adalah, proporsi petani miskin lebih besar ditemui pada kelompok petani non pemakai air (44%) dari pada petani pemakai air (14%). Ini bisa mengindikasikan bahwa akses kepada layanan jasa air betul bisa membedakan tingkat ekonomi keluarga tani. Tentu saja dengan keterbatasan jumlah sample petani non pemakai air pada survey tim TIRTA, temuan ini tetap harus disikapi secara hati-hati oleh karena kecilnya jumlah sample secara keseluruhan dan sample yang lebih kecil untuk sub-group non-pemakai air.

Table 8: Status Kemiskinan Menurut PPI

Petani	Tidak Miskin	Miskin	Total	Prosentasi Miskin
Non Pemakai Air	9	7	16	44%
Pemakai Air	31	5	36	14%
Total	40	12	52	23%

Temuan menarik lainnya yang bisa memberikan gambaran tentang karakteristik para petani di desa-desa sasaran Program TIRTA adalah aspek umur petani kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga di setiap keluarga tani. Data sample survey menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah memasuki umur diatas 45 tahun (67%) dan sekitar 73% petani memiliki anggota keluarga yang kecil dibawah 5 anggota per keluarga. Proporsi petani yang hampir atau telah memasuki usia pensiun (>60 tahun) namun masih tetap harus melakukan usaha tani cukup besar yaitu sejumlah 27%.

Table 9: Umur Petani dan Jumlah Anggota Keluarga

Umur	Jumlah Anggota Keluarga		Total	%
	0-4	5-9		
30 – 44 thn	13	4	17	33
45 - 59 thn	17	4	21	40
60 – 75 thn	8	6	14	27
<b>Grand Total</b>	38	14	52	
<b>%</b>	73	27		100

<sup>8</sup> <http://progressoutofpoverty.org/ppi-country>

### 3.3.2 PROFIL PENGUSAHA

Berbicara tentang irigasi pompa tidak akan terlepas dari kontribusi private sector / pengusaha dalam pengadaan pompa dan perbaikan/bangun saluran irigasi. Salah satu tujuan survey potensi desa adalah mengetahui peranan pengusaha-pengusaha (entrepreneurs) dalam pengelolaan air irigasi di desa-desa yang terletak di bantaran Bengawan Solo.

Berdasarkan hasil survey pada 175 desa potensial terdapat 287 stasiun pompa air yang mengambil air dari Sungai Bengawan Solo untuk mengairi sawah-sawah sekitarnya dan dikelola oleh Kelompok tani, HIPPA dan BUMDes.

Figure 3: Pengelola Stasiun Pompa

Kabupaten	Pengelola Stasiun Pompa (Penyedia Jasa Air)				Total
	Kelompok Tani	HIPPA	BUMDes	Pengusaha/swasta (Private Sector)	
Bojonegoro	1	27	2	61	91
Tuban	2	21		10	33
Lamongan	4	33		7	44
Total	7	81	2	78	168

Berdasarkan table diatas pengelola stasiun pompa terbanyak dilakukan oleh HIPPA, kemudian disusul oleh Pengusaha, kelompok tani dan BUMDes. Data juga menunjukkan bahwa pengusaha lebih banyak mengelola stasiun pompa di Kabupaten Bojonegoro dibandingkan dengan Kabupaten Tuban dan Lamongan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan penggunaan pompa untuk irigasi padi sawah yang berawal dari daerah Lamongan terus bergerak ke arah hulu sungai Bengawan Solo seperti yang diceritakan pak Aksan seorang pembuat pompa irigasi dari lamongan dalam wawancara dengannya. Dengan berjalannya waktu terjadi pengalihan pengelolaan stasiun pompa/jasa penyediaan air dari pengusaha ke HIPPA karena petani merasa telah bisa mengelola irigasi mereka sendiri, sehingga para pengusaha mencari daerah-daerah baru yang potensial untuk menggunakan irigasi pompa. Penyebab lain adalah pada daerah Lamongan banyak areal yang rentan banjir sehingga luasan lahan sawah tidak terlalu banyak untuk diairi dengan pompa.

#### Type Pengusaha Jasa Pelayanan Air Irigasi

Pengusaha dalam bisnis penyediaan air irigasi biasanya dipanggil Pengusaha Pompa dan Pengusaha Areal. “Pengusaha Pompa” adalah pemilik pompa pribadi yang disamping memompa air untuk sawahnya sendiri juga memberikan pelayanan air kepada tetangga disekitar lahan/sawahnya. Karena keterbatasan kapasitas sumur pompa maka maksimum luasan kurang dari 10 ha. Pengusaha Areal adalah para entrepreneurs yang menginvestasikan uangnya untuk stasiun pompa guna memompa air dari Bengawan Solo untuk mengairi sawah-sawah atau memberikan pelayanan air pada suatu hamparan yang mempunyai luasan lebih dari sepuluh hektar hingga ratusan hektar dan menggunakan beberapa pompa berkapasitas besar.

“Pengusaha Pompa” lebih banyak terdapat pada areal-areal yang jauh dari bantaran sungai dan lokasi-lokasi yang berada di sebrang jalan utama. Pengusaha Pompa bermunculan oleh karena sangatlah sulit untuk menyalurkan air dari Bengawan Solo ke lokasi-lokasi tersebut.

“Pengusaha Areal” berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan kepada petani padi sawah bisa dikategorikan lagi dalam tiga kelompok; 1) Pengusaha yang hanya memberikan jasa pelayanan air saja, 2) Pengusaha yang memberikan pelayanan air dan sarana produksi seperti Bibit, Pupuk dan Obat-obatan, serta Pembelian hasil dan jasa penggilingan, 3) Pengusaha yang menyediakan jasa air dan membeli hasil gabah dan punya bisnis penggilingan.

Bisnis penyediaan jasa air ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar sehingga bagi orang-orang yang telah mempunyai profesi tertentu (seperti Kepala Desa, Anggota Polisi /TNI) berkeinginan menjalankan bisnis ini. Dampaknya, sering terjadi persaingan yang tidak sehat di Lapangan.

Pengusaha Areal juga sangat berkeinginan untuk memperluas areal pelayanan agar dapat meningkatkan pendapatan dari jasa pembayaran pemakaian air. Jika dalam desa yang dilayaninya sudah tidak ada lagi lahan untuk di irigasi maka akan mereka akan mencari peluang di desa tetangga atau bahkan kecamatan dan Kabupaten lain seperti yang dilakukan oleh Pak Haji Untung, pak Sudarwadji, pak Haji Makmur dan kawan-kawannya. Sepertinya lebih mudah melakukan penyediaan jasa air lintas desa atau kecamatan oleh “Pengusaha Areal” dari pada HIPPA atau BUMDes (Kasus Gedomarum dan Kedungprimpen). Hal ini karena negosiasi antara pengusaha dengan desa/areal baru lebih cepat mencapai kesepakatan sebab Pengusaha dapat memutuskan secara langsung tentang berbagai keputusan mengenai penawaran bisnis dibandingkan HIPPA/BUMDES, kata pak Haji dalam wawancaranya.

### ***Tarif Jasa Pelayanan Air***

Dibandingkan tarif jasa pelayanan air yang ditentukan Kelompok Tani, HIPPA atau BUMDes dengan kisaran antara 1/5 hingga 1/7 maka tarif jasa pelayanan oleh pengusaha ini biasanya lebih tinggi mulai kisaran tarif terendah bagi hasil 1/5 dan yang paling tinggi 1/3 pada sumur bor pribadi.

### ***Perjanjian Kontrak Pelayanan Jasa Air***

Hingga saat ini tidak ada ketentuan baku/resmi tentang kontrak pelayanan jasa air baik itu tentang tarif, jangka waktu pelayanan, serta pengalihan asset investasi yang ada jika terjadi penggantian pengelola. Dalam wawancara dengan Pak Jayus, ia menjelaskan bahwa kontrak pengelolanya dibuat oleh Notaris, namun tidak demikian dengan pak Haji Achin dan pak Sudarwadji, mereka merasa tidak perlu ada kontrak tertulis namun cukup kesepakatan verbal atas dasar kepercayaan saja. Demikian juga dalam wawancara dengan beberapa pengusaha areal ada berbagai tanggapan yang beragam terhadap proses tender pengelolaan jasa pelayanan air. Pada umumnya pengusaha tidak mempercayai proses tender terbuka dan lebih tertarik dengan cara-cara pendekatan langsung dengan kepala desa/HIPPA.

### ***Permodalan Pengusaha***

Pada umumnya pengusaha mendapat pinjaman modal investasi dan modal kerja dari perbankan seperti dari Bank BRI , dan Bank Jatim. Hal ini dimungkinkan karena para pengusaha mempunyai collateral (Jaminan) sehingga pihak bank tidak ragu dalam menyalurkan kredit kepada mereka. Namun ada juga pengusaha yang menggunakan dana dari cabang bisnis lain yang dimilikinya, seperti pak Haji Untung memakai dana dari usaha Peternakan Ayam dan Penggilingan untuk membiayai usaha penyediaan air irigasi.

### ***Strategy perluasan areal pelayanan***

Hampir semua pengusaha yang ditemui mengatakan bahwa mereka memiliki staff khusus yang mencari daerah- daerah potensial untuk pelayanan air irigasi, dan mengadakan pengamatan untuk beberapa kali musim tanam untuk mengetahui produktivitas areal/ lahan yang akan diintervensi tersebut, kata pak Haji Achin. Sedangkan lain pendapat pak Haji Untung, beliau akan mensurvey secara langsung tentang potensi suatu daerah baru, terutama bukan hanya tentang potensi hasil tapi juga tentang porositas tanah terkait dengan kebutuhan air yang harus dipompakan yang sangat berpengaruh terhadap operasional cost-nya.

Kedua pengusaha sepakat mereka tertarik untuk memberikan pelayanan jasa air jika ada areal baru yang sudah terpasang jaringan listriknya. Walau itu merupakan daerah baru bagi mereka, mereka tetap akan tertarik untuk melakukan investasi karena dengan penggunaan listrik akan meminimalisir kerugian yang disebabkan karena kehilangan bahan bakar/solar.

Dalam pertemuan tersebut pak haji Achin hanya berharap bagaimana TIRTA bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian yang ada saat ini, karena dengan peningkatan hasil akan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan petani dan pengusaha. Salah satu cara adalah dengan melalui system demoplot secara langsung di lapangan agar petani lain bisa melihat dan mengikutinya. Berikut adalah data para pengusaha dari hasil interview tim TIRTA.

Table 10: Pengusaha-Pengusaha Pompa dan Areal

No	Nama Pengusaha	Alamat	Luas Areal Layanan air (ha)	Jumlah Stasiun Pompa	Tarif Jasa Air (%)	Jenis Jasa Layanan	Dalam / Lintas Desa, Kec. Atau Kab	Jml Desa Layanan	Rencana Perluasan Areal Layanan
1	Latief	Sukoharjo-Kalitidu-BJR	5	1	¼	Air	Dlm desa	1	Tdk ada
2	Abdul Hamid	Leran-Kalitidu-BJR	5	1	1/3	Air	Dlm desa	1	Tdk ada
3	Hadi Pranoto	Ngringrejo-Kalitidu-BJR	7	1	1/4	Air	Dlm desa	1	Tdk ada
4	Arief Saifudin	Nguken –Ngraho BJR	75	1	1/5	Air+Slep	Lintas desa	3	250 ha
5	Muslih, ST	Rendeng-Malo BJR	75	2	¼- 1/5	Air	Lintas Desa	4	50 ha
6	Jayus	Simo,Soko-TBN	190	5	1/5	Air	Lintas Kecamatan	2	Tdk ada
7	Haji Makmur	MjoAgung,Soko-TBN	360	7	1/5	Air+Sapro di+Slep	Lintas Kabupaten	2	200 ha
8	Haji Moh Achin	Pilangede,Balen-BJR	210	4	1/5	Air+Slep	Lintas Kecamatan	2	Tergantung area potensial
9	Sudarwadi	Prambonwetan,Rengel-TBR	426	1	1/5	Air	Lintas Desa	4	50 ha
10	H Untung Basuki	Bojonegoro	565	7	1/5	Air+Slep	LinDesa	5	Malo (500ha)

### 3.3.3 HIPPA DAN BUMDES SEBAGAI PENYEDIA JASA LAYANAN IRIGASI

Ada dua jenis kelembagaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan air di desa yaitu HIPPA dan BUMDes. Pada umumnya, wadah pengelola irigasi di desa disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)<sup>9</sup>, namun di Provinsi Jawa Timur lebih dikenal dengan nama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)<sup>10</sup>. HIPPA dibentuk oleh para petani dan menjalankan berbagai fungsi pengaturan pelayanan air irigasi dan pemeliharaan di jaringan irigasi tersier. Jika HIPPA merupakan wadah para petani di tingkat Desa, di tingkat antar desa dikenal dengan Gabungan HIPPA atau GHIPPA yang bertugas untuk melakukan pengelolaan daerah irigasi pada tingkat sekunder. Induk HIPPA (IHIPPA), merupakan wadah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang bekerja sama untuk mengelola daerah irigasi pada tingkat induk/primer. Wadah terbesar petani untuk mengelola irigasi adalah Federasi HIPPA (FHIPPA) yang merupakan wadah kelembagaan sejumlah IHIPPA dalam suatu daerah irigasi.

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang digunakan untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa<sup>11</sup>. BUMDES diharapkan menjadi jawaban atas kurang berhasilnya program-program pemerintah lainnya yang dinilai didominasi peran pemerintah yang sangat kuat sehingga mematikan semangat inovasi dan kemandirian masyarakat desa dan sektor swasta. BUMDES dirancang untuk dapat membangkitkan inovasi dan

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur, No 3 Tahun 2009 tentang Irigasi

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, No 4 Tahun 2015

kemandirian tersebut, karena BUMDES tidak didirikan atas dasar instruksi pemerintah tetapi harus didasarkan pada keinginan dan kesiapan masyarakat desa sendiri.

Dalam operasionalnya BUMDES memiliki dua peranan utama, yaitu:

a) *Penguatan Otonomi Desa*, yaitu mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Potensi yang dikembangkan mencakup SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia) dan Sarana/Prasarana & Kelembagaan (SPK). Sering ditemui potensi-potensi ini, khususnya SDA, tidak dikelola karena tidak adanya visi dan koordinasi di internal desa. Contoh, banyak desa memiliki keindahan alam yang dapat dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi objek pariwisata yang layak dijual dan menjadi sumber pendapatan desa.

b) *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* - Mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Contoh, pengembangan objek pariwisata di desa dapat memperluas lapangan kerja dan industri pendukungnya (penginapan, rumah makan, kerajinan).

Kedua peranan di atas menjadikan BUMDES sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke masyarakat.

Pembentukan BUMDes harus melalui suatu kesepakatan yang dibangun dari musyawarah desa menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat. Kesepakatan dari musyawarah desa kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMdes dengan mengeluarkan Peraturan Desa. BUMDes kemudian bisa membentuk unit-unit usaha yang berbadan misalnya berupa Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro sesuai peraturan perundang-undangan tentang microfinance dari lembaga otoritasnya (OJK). Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas yang bertugas menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDES sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kepengurusan BUMdes harus terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, namun Kepala Desa oleh karena posisinya sebagai kepala pemerintahan di desa akan menjabat sebagai penasihat BUMDes secara *ex officio*.

Secara umum kegiatan BUMDES dapat dikelompokkan menjadi dua sektor utama:

- a) Sektor Riil, seperti pariwisata, pertanian, jasa, dll.
- b) Sektor Keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro perdesaaan (microfinance).

Dalam hal permodalan, modal awal BUMDes berasal dari APB Desa, namun modal selanjutnya berasal dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa bisa berupa hibah dari pihak luar yang disalurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, bantuan Pemerintah, kerjasama usaha dengan pihak swasta, dan asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa. Penyertaan modal masyarakat bisa berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat.

Jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- a. Bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan (eg. air minum, usaha listrik, lumbung pangan)
- b. Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli desa (PAD) (eg. alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took)
- c. Usaha Perantara, (eg. jasa pembayaran listrik, pasar desa dan jasa pelayanan lainnya)
- d. Bisnis yang memproduksi atau berdagang (eg. pabrik es, hasil pertanian, sarana produksi pertanian)
- e. Bisnis keuangan yang memberikan akses kredit untuk masyarakat
- f. Usaha bersama, sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa.

Hasil usaha BUMDes adalah pendapatan yang dikurangi pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris. Pembagian hasil usaha BUMDes dilakukan sesuai kesepakatan anggota yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada penasihat / Kepala Desa. Pemerintahan Desa lalu mempertanggungjawabkan tugas pembinaan BUMDes kepada BPD.

### **Peran Pemerintah dalam Bumdes**

Secara bertingkat, pemerintah memiliki peranan dalam bidang pembinaan, pengawasan, regulasi dan dukungan sumber dana. Di tingkat nasional, menteri menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria BUMDES. Di tingkat provinsi melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standard, prosedur dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDES. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDES.

Khusus dari segi regulasi, selain ketentuan-ketentuan pemerintah pusat yang menjadi dasar hukum BUMDES, pengaturannya dapat lebih lanjut diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA). Dengan PERDA ini, diharapkan para pihak terkait (Dinas setempat, Camat dan Kepala Desa) dapat lebih memahami dan mampu mengimplementasikan BUMDES secara lebih efektif.

Berdasarkan survey yang di lakukan di Bojonegoro, pemerintah lokal telah melaksanakan pengembangan BUMDES sejak tahun 2006 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Sedangkan sejak tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga mulai ikut serta dalam pembinaan BUMDES.

Secara umum, saat ini kedua badan pemerintah daerah tersebut fokus untuk kedua hal berikut:

a) Penyediaan dan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Untuk Pengembangan BUMDES Dilakukan oleh BPMPD dengan fokus aktivitas yaitu merencanakan dan mengimplementasikan dana program pengembangan BUMDES.

Beberapa dana program yang telah dan sedang dikelola BPMPD antara lain DPKD (Dana Pembangunan Desa dan Kelurahan), yaitu dukungan dana Rp. 2,5 juta perdesa untuk pembentukan dan modal awal BUMDES. Tahun 2007 dana ditambah sebesar Rp. 10 juta dan dana penguatan BUMDES sebesar Rp. 25 juta disalurkan ditahun 2015.

b) Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan BUMDES - Dilakukan oleh Bappeda dengan fokus aktivitas mulai dari proses sosialisasi BUMDES, penyiapan legalitas hukum, pendampingan dan bimbingan teknis operasional, serta monitoring dan pengawasannya.

Kegiatan yang dilakukan Bappeda antara lain penyediaan 18 orang tenaga pendamping untuk pilot project pengembangan BUMDES Bojonegoro di 53 desa di tahun 2015. Juga bekerjasama dengan BPR milik Pemkab Bojonegor (BPR Bank Daerah Bojonegoro) yang memberikan kredit kepada BUMDES di tahun 2015 (BUMDES Kedungprimpen/Usaha Jasa Irigasi Air dan BUMDES Sugihwaras/Usaha Jasa Simpan Pinjam (microfinance).

Karena kedua aktivitas saling berkaitan, BPMPD dan Bappeda melakukan sinergi agar dana program pengembangan BUMDES berjalan baik dan BUMDES sendiri dengan dana program dan bimbingan teknis dapat semakin berkembang manajemen dan usahanya.

Table 11: Desa Survey Mendalam dan HIPPA/BUMDes

	Villages	Location	HIPPA / BUMDes
1	Kedungprimpen	Bojonegoro	BUMdes Kedungprimpen
2	Temu	Bojonegoro	BUMdes Kedungprimpen & Gedongarum
3	Ngoken	Bojonegoro	-

	Villages	Location	HIPPA / BUMDes
4	Sukoharjo	Bojonegoro	HIPPA Tirto Sari
5	Sidorejo	Bojonegoro	-
6	Gedongarum	Bojonegoro	BUMDes Gedongarum
7	Pomahan	Bojonegoro	-
8	Banaran	Bojonegoro	-
9	Ketileng	Bojonegoro	-
10	Rendeng	Bojonegoro	-
11	Prambonwetan	Tuban	HIPPA Prambonwetan
12	Tulungrejo	Bojonegoro	-
13	Kliteh	Bojonegoro	-
14	Trucuk	Bojonegoro	HIPPA Tirta Agung
15	Leran	Bojonegoro	-
16	Tinawun	Bojonegoro	HIPPA Tirta Mulyo
17	Petak	Bojonegoro	-
18	Ngujung	Bojonegoro	-
19	Klotok	Tuban	HIPPA Subur Makmur

Dari tujuh wadah kelembagaan petani penyedia jasa layanan irigasi, Tim TIRTA dengan mudah bisa langsung mengenali perbedaan antara wadah kelembagaan yang aktif dan yang tidak aktif dalam menyediakan jasa layanan air irigasi.

Ciri-ciri khas yang membedakan antara HIPPA/BUMDes yang aktif dan berfungsi secara baik misalnya;

- Adanya struktur kepengurusan HIPPA / BUMDes dan para pengurus secara aktif terlibat dalam pengelolaan layanan HIPPA / BUMDes
- Manajemen Asset dan Manajemen Keuangan yang baik dan transparan. Data tentang asset tersedia dan di update secara teratur, sistem pembukuan dan pelaporan laba rugi internal tersedia, laporan keuangan dengan mudah bisa diakses oleh publik.
- HIPPA / BUMDes secara teratur melakukan berbagai pertemuan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia jasa layanan irigasi, misalnya melaksanakan pertemuan di awal musim tanam, pertemuan koordinasi bulanan untuk menilai kinerja layanan air yang diberikan kepada petani, dan ada pertemuan yang membahas kinerja per musim / tahunan dari HIPPA/BUMDes, dimana para pengurus memberikan pelaporan kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab unit-unit usaha di Desa dan kepada anggota-anggota HIPPA / BUMDes.
- Komunikasi yang baik antara pengurus HIPPA/BUMDES dan anggotanya terutama tentang penentuan waktu musim tanam dan areal lahan yang akan diairi, jadwal pembagian air, pembayaran jasa air, dan pembagian sisa hasil usaha HIPPA/BUMDes.

Berikut adalah ringkasan karakteristik delapan HIPPA / BUMDes yang dikunjungi oleh Tim TIRTA:

Table 12: Ringkasan HIPPA dan BUMDes Dari Sample Desa-Desa Sasaran Stakeholder Mapping

1. HIPPA TIRTO SUKOHARJO – Desa Sukorharjo (TIDAK AKTIF)
<p>HIPPA Tirto Sari terbentuk sejak 1982 dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola pengairan di Desa Sukoharjo yang bersumber dari Waduk Leran. Di tahun 1980 an, waduk tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengairan para petani di Desa Sukoharjo, namun sejak 1990an berangsur-angsur berkurang, khususnya sampai tahun 1995. Oleh karena itu sejak tahun 1996, pengusaha layanan air mulai memberikan pelayanan hingga saat ini. Sebelum pengusaha saat ini (Haji Arifin), ada 6 pengusaha yg telah melayani dari tahun 1996-2013.</p> <p>HIPPA tidak memiliki struktur organisasi dan juga tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti Kantor, Rekening Bank dan NPWP.</p> <p>Saat ini HIPPA tidak aktif dan layanan jasa irigasi disediakan oleh pengusaha areal.</p>
2. HIPPA SUMBER MAKMUR – Desa Prambonwetan (TIDAK AKTIF)
<p>Dulunya ditunjuk Kepala Desa, awal tahun 2009 ditunjuk secara musyawarah, kemudian ada kepengurusan baru di tahun 2010 selama 1 tahun semua anggota mundur (karena merasa bosan, HIPPA hanya sebagai jembatan antara petani dengan pengusaha dan desa), akhirnya Kades memilih 7 orang untuk dijadikan anggota HIPPA.</p> <p>HIPPA tidak memiliki struktur organisasi dan juga tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti Kantor, Rekening Bank dan NPWP.</p> <p>Saat ini HIPPA tidak aktif dan layanan jasa irigasi disediakan oleh pengusaha areal.</p>
3. HIPPA TIRTA AGUNG – Desa Trucuk (TIDAK AKTIF)
<p>HIPPA sudah pernah terbentuk pada saat acara pertemuan kelompok Tani ketika musim tanam kepemimpinan Lurah Supadi tahun 2006-2013. Pada tahun 2007 HIPPA mendapatkan bantuan pompo JICA tetapi karena banjir dan panen gagal total HIPPA bangkrut dan mengadakan musyawarah untuk mencari pengusaha untuk melanjutkan layanan irigasi hingga saat ini.</p> <p>BUMDES sudah pernah terbentuk karena sosialisasi kurang, BUMDES gagal tidak berkembang dan rencana akan dibentuk ulang.</p>
4. HIPPA TIRTA Mulya – Desa Trucuk (TIDAK AKTIF)
<p>Dengan cara musyawarah di desa kepala desa menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengurus HIPPA di tahun 2014.</p> <p>Walaupun ada kepengurusan, HIPPA tidak aktif sama sekali, progam kerja hippa tidak ada, karena menunggu layanan irigasi dari kliteh baru akan dilakukan pemberdayaan melalui HIPPA</p>
5. HIPPA SUMBER MAKMUR – KLOTOK (AKTIF)
<p>Pemerintah Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melalui musyawarah desa pada tanggal 8 Januari 1993 membentuk HIPPA “SUBUR MAKMUR” dengan Keputusan Desa Nomor : 01/1993 yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban Nomor : 06/1993 tertanggal 14 Mei 1993. HIPPA “SUBUR MAKMUR” difasilitasi pemerintah mengembangkan sumber air Bengawan Solo menjadi suplisi tambahan bagi Daerah Irigasi Beron untuk wilayah tersier Desa Klotok melalui proyek JICA. Di sisi lain degradasi sumber air di DI Beron mulai meningkat, sehingga layanan ini tidak mendapatkan air dari DI Beron.</p> <p>Pengembangan sumber daya air dari pompa Bengawan Solo bantuan JICA tidak berlangsung lama (1993-1996), akibat kerusakan pompa air. Masyarakat petani Desa Klotok berinisiatif mengembangkan fasilitas pompa air dengan swadaya. Pengelolaan dan pengembangan pompa air untuk Desa Klotok juga didukung oleh pemerintah desa. Pendanaan pemerintah desa dan petani dapat meningkatkan potensi prasarana irigasi pompa ini secara bertahap, dan berdampak pengembangan areal 555 Ha menjadi 644 Ha dengan 1,905 petani yang menerima jasa</p>

layanan irigasi. HIPPA Klotok menarik Irrigation Service Fee (ISF) sebesar 12% saat musim penghujan dan 14% saat musim kemarau.

HIPPA Klotok memiliki pengurus dan badan pengawas yang di dukung system administrasi dan keuangan yang terpadu. Total pendapatan HIPPA Subur Makmur di tahun 2015 sebesar Rp. 4.7 milyar dikurangi pengeluaran sebesar Rp. 4.3 milyar, maka laba bersih HIPPA Subur Makmur sebesar Rp. 421 juta.

#### 6. BUMDES Kedungprimpen (AKTIF)

Dasar pembentukan BUMDES berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro KPTS/412.12/2014 tentang Tim Koordinasi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bojonegoro dan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tanggal 30 oktober 2006 No. 414.1/916/205.412/2006 tentang Pedoman tata cara pembentukan BUMDES

Tahun 2013 mengadakan penjaringan pengurus bumdes ke dusun-dusun melalui Kepala Dusun dengan melalui musyawarah di tingkat desa

Tahun 2014 Pembentukan BUMDES di Kedungprimpen dan pendampingan agar berkembang dengan kegiatan usaha:

- Unit Jasa Pompanisasi (Pengairan lahan pertanian)
- Unit Pasar meliputi pengelolaan pasar desa atau pasar tradisional

BUMDes Kedungprimpen memiliki areal pelayanan seluas 350 ha dengan 1,070 petani yang dilayani. BUMDes Kedungprimpen mengenakan biaya irigasi sebesar 14% untuk dalam desa dan 20% untuk luar desa. Total pendapatan BUMDes Kedungprimpen untuk tahun 2015 (MT2 & MT3) Rp. 1.4 milyar dan total pengeluaran sebesar Rp. 1.2 milyar, dan pendapatan bersih sebesar Rp. 150 juta.

#### 7. BUMDes Gedongarum (AKTIF)

Berdiri sejak 7 April 2003, dilakukan pembuatan legalitas 2008 dan disahkan dng akte notaris 2014. HIPPA adalah bagian dari BUMDes dan bertanggung jawab dalam mengelola anggota dan lahan sawah. Sedangkan BUMDes berperan dalam mengelola penyediaan air (secara tehnis, keuangan, dan administrasi). Dengan sinergi ini menciptakan suatu bentuk pelayanan maksimal bagi petani di Desa Gedongarum. BUMDes Gedongarum memiliki areal pelayanan seluas 505 ha dengan 1,456 petani yang menerima jasa layanan air. BUMDes Gedongarum mengenakan biaya irigasi sebesar 14% untuk dalam desa dan 16% untuk luar Desa.

Total pendapatan BUMDes Gedongarum untuk tahun 2015 (MT2 & MT3), Rp. 2.8 milyar, total pengeluaran Rp. 2.6 milyar, dan pendapatan bersih sebesar Rp. 187,8 juta.

### 3.3.4 PROFIL LEMBAGA KEUANGAN

Sistem keuangan secara prinsip diartikan sebagai kumpulan pasar, lembaga, peraturan dan teknis dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan ke seluruh wilayah di Indonesia.

Terdapat berbagai jenis lembaga keuangan di Indonesia dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Fungsi-fungsi yang ada antara lain, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi kredit, fungsi pengelolaan resiko, fungsi penyimpan kekayaan, fungsi pembayaran dan fungsi konsultasi keuangan.

Seluruh fungsi tersebut menjadikan lembaga keuangan menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem perekonomian, khususnya bagi para pengelola usaha (bisnis). Fungsi yang dianggap paling penting untuk mendukung perkembangan pengusaha adalah dalam penyediaan sumber dana/kredit (baik kredit modal kerja dan kredit investasi).

Sejak tahun 2012, seluruh lembaga keuangan di Indonesia operasionalnya diatur, dimonitor dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, fungsi pengaturan, monitoring dan pengawasan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga berbeda seperti Bank (oleh Bank Indonesia), Asuransi & Multifinance (oleh Departemen Keuangan), Microfinance berbadan hukum koperasi (oleh Dinas/Kementerian Koperasi).

#### **Produk & Layanan Keuangan Secara Umum**

Secara umum dalam sistem perekonomian, produk dan layanan lembaga keuangan terdiri atas 3 fungsi pokok:

- a) Fungsi menghimpun dana (giro, tabungan, deposito, pasar modal)
- b) Fungsi memberikan pinjaman (kredit, penyertaan modal)
- c) Fungsi lainnya (transaksi keuangan, pengelolaan resiko, penyimpanan kekayaan, konsultasi keuangan)

Sedangkan jenis-jenis lembaga utama yang berperan dalam memberikan layanan produk keuangan dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Bank
- b) Multifinance (consumer finance/pembiayaan konsumen, leasing/sewa guna usaha, factoring/anjak piutang)
- c) Microfinance/Lembaga Keuangan Mikro (BPR, Koperasi Simpan Pinjam, Credit Union, BMT)
- d) Lainnya (Pegadaian, Venture Capital/Modal Ventura, Asuransi, Dana Pensiun)

### ***Usaha Pompa dan akses pada Lembaga Keuangan***

Dari hasil interview para pengelola pompa (pengusaha maupun HIPPA), seluruhnya menyebutkan faktor kebutuhan dana (modal kerja atau investasi) sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam mengelola ataupun meningkatkan usaha pompa yang dimiliki. Para responden menyatakan mengalami hambatan dalam mencari sumber dana untuk usaha pompanya. Umumnya permasalahan mereka adalah, kurang paham terhadap prosedur & ketentuan lembaga keuangan, kurang mampu menyusun dan melengkapi prosedur bank (perizinan dan proposal) serta kurang atau tidak memiliki jaminan.

Sebagai contoh, pengurus BUMDES Gedongarum-Bojonegoro ketika ditanya mengapa hanya mengakses lembaga keuangan non bank yang memberikan bunga cukup tinggi (2,72-3% flat/bulan dibanding bank umum 0,75-1% flat/bulan), para pengurus menjelaskan bahwa mereka telah terbiasa dan lebih mengenal (baik pengurus maupun lembaganya) lembaga keuangan yang telah selama ini memberikan pinjaman kepada mereka (UPK PNPM dan KPRI), sehingga mereka berpikir akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga tersebut. Kalau di bank umum, mereka belum mengenal secara produk maupun personilnya, sehingga akan lebih kecil kemungkinan mendapatkan pinjaman.

Contoh lain di HIPPA Sukoharjo-Bojonegoro yang tidak aktif walaupun telah dibina pemerintah sejak tahun 1990 an. Ketika ditanyakan kenapa tidak pernah mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. ketua HIPPA menjawab, mereka tidak pernah diarahkan/dibina untuk hal tersebut, sehingga mereka tidak mengerti peranan lembaga keuangan untuk membantu HIPPA mereka. Ketika diberikan penjelasan manfaat dan prosedur lembaga keuangan, ketua HIPPA menyampaikan bahwa HIPPA tidak memiliki asset yang bisa digunakan sebagai jaminan.

Secara spesifik, kebutuhan kredit bagi para pengelola pompa adalah sebagai berikut:

- a) ***Kredit Modal Kerja*** - Khususnya digunakan untuk pembelian sumber daya energy mesin pompa (BBM atau listrik), pemeliharaan/perawatan mesin pompa, perbaikan saluran irigasi dan biaya tenaga kerja.
- b) ***Kredit Investasi*** - Khususnya digunakan untuk pembelian mesin baru, instalasi listrik dan perluasan atau pembuatan jaringan irigasi baru.

Dari beberapa jenis lembaga keuangan utama yang disebutkan diatas, lembaga yang potensial dapat mendukung penyediaan kredit adalah bank, multifinance (leasing), microfinance dan lainnya (venture capital). Selain penyediaan kredit, bentuk-bentuk pendanaan alternative seperti pola leasing dan venture capital belum ditemui di wilayah sasaran TIRTA.

Pola leasing dilakukan ketika lembaga penyedia (perusahaan leasing) menyediakan barang untuk kebutuhan usaha nasabahnya melalui pola sewa beli. Di bidang pertanian, khususnya untuk petani kecil, barang yang telah umum dilayani pola leasing adalah traktor tangan. Dimana perusahaan leasing bekerjasama dengan produsen traktor tangan

menyediakan traktor tangan dengan kualitas yang baik dan layanan purna jual yang lengkap. Namun berdasarkan temuan di lapangan, sampai saat ini belum ada perusahaan leasing yang menawarkan layanan ini.

Alternatif lain yang bisa dimanfaatkan usaha pompa sebagai sumber dana adalah modal ventura (*venture capital*). Berbeda dengan pembiayaan biasa, perusahaan modal ventura umumnya menyediakan pembiayaan dengan pola penyertaan (sebagai investor). Sehingga secara prinsip, pengembalian pembiayaan kepada perusahaan modal ventura didasarkan atas hasil usaha yang terjadi. Pola lembaga ini cukup menarik, karena biasanya menangani pembiayaan di sektor usaha yang belum diminati lembaga keuangan lainnya serta memiliki resiko cukup tinggi. Untuk meminimalkan risikonya, perusahaan modal ventura memungkinkan menempatkan perwakilannya di operasional usaha yang dibiayainya dengan fungsi untuk pembinaan manajemen dan pengawasan operasional.

Berdasarkan hasil survey dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait peranan dan potensi lembaga keuangan terhadap usaha pompa irigasi sebagai berikut.

Karena sifat usahanya yang tergolong capital intensive (padat modal), baik kebutuhan jangka pendek (modal kerja) dan jangka panjang (investasi), peranan lembaga keuangan sangat penting untuk keberlanjutan usaha pompa irigasi ini. Dari profil pengusaha/lembaga usaha yang berhasil maupun gagal dalam pengelolaan usaha pompa irigasi, terdapat perbedaan besar yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan mereka, yaitu kemampuan atau kegagalan mengakses sumber dana dari lembaga keuangan.

Dari beberapa lembaga keuangan yang disurvei<sup>12</sup>, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari skala usaha, badan hukum, produk yang dimiliki maupun jangkauan pelayanan. Namun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, semua lembaga tertarik dan terjun melayani usaha pompa irigasi. Hal ini menandakan bahwa usaha pompa irigasi secara mendasar dapat dibiayai dan diminati oleh lembaga keuangan manapun. Ini menjadi salah satu indikasi penting bahwa pengembangan usaha pompa irigasi memiliki masa depan yang cerah karena banyak lembaga keuangan siap mendanai kebutuhan usahanya.

Secara ideal, lembaga keuangan mensyaratkan 5 faktor bagi usaha apapun untuk mendapatkan pendanaan. Kelima faktor disebut 5 C's (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral). Dari hasil survey, didapat kendala yang dihadapi HIPPA/BUMDES/Pengusaha Lokal terhadap 5 faktor tersebut, yaitu:

#### **a) Character (Karakter)**

Sebagian besar petani atau kelompok tani masih memiliki paradigma atau terbiasa dengan skema bantuan dan subsidi yang disediakan pemerintah. Sehingga belum berani atau terpikirkan untuk mengakses lembaga keuangan.

#### **b) Capacity (Kapasitas)**

Faktor kapasitas dapat diukur secara financial dan non financial. Secara financial khususnya dapat diukur dapat kemampuan pendapatan usaha yang dihasilkan. Kemampuan financial ini tidak terlepas dari kemampuan non financial, yaitu kemampuan individu SDM dan kekuatan bersama organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kelemahan faktor ini sering menjadi kendala utama di pengelola usaha pompa irigasi.

#### **c) Capital (Modal)**

Faktor ini dinilai dari kemampuan keuangan usaha, khususnya laba dan modal yang dimiliki. Lembaga keuangan secara bertahap memberikan dan meningkatkan nilai kredit, sesuai dengan kemampuan usaha debiturnya memupuk dan meningkatkan kemampuannya. Karena adanya keinginan untuk lebih mendapatkan subsidi ataupun kurangnya kemampuan memupuk permodalan, banyak pengelola usaha pompa irigasi terkendala di hal ini.

#### **d) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)**

Secara umum, kondisi perekonomian bidang pertanian khususnya terkait pompa irigasi dianggap stabil oleh lembaga keuangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dari lembaga keuangan yang dianggap dapat mempengaruhi kondisi ekonomi usaha pompa irigasi adalah gejolak harga padi serta kegagalan panen (banjir dan hama). Namun pemerintah

---

<sup>12</sup> Bank Jatim, BPR Bojonegoro, UPK PNPMP Perdesaan – Kanor, KPRI Lumintu Rengel dan BRI (Profil masing masing Lembaga Keuangan ada di Lampiran 10)

(melalui BUMN PT Asuransi Jasindo) telah mengantisipasi hal ini sejak tahun 2015 dengan meluncurkan produk asuransi gagal panen yang dapat menutupi resiko kondisi-kondisi tersebut.

#### **e) Collateral (Jaminan)**

Ketiadaan atau kurangnya nilai jaminan merupakan kendala klasik bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Karena kelembagaan usaha pompa (HIPPA/BUMDES) masih belum maju, mereka belum memiliki asset memadai untuk dijamin. Namun di beberapa HIPPA/BUMDES yang telah berjalan cukup baik, terdapat komitmen para pengurusnya untuk memberikan asset pribadi untuk dijamin. Untuk mengatasi kendala jaminan, pemerintah telah memiliki lembaga asuransi kredit seperti ASKRINDO dan Perum Jamkrindo dengan nilai premi yang cukup terjangkau. Untuk beberapa skema kredit untuk UKM, pemerintah bahkan memberikan subsidi untuk premi tersebut.

Untuk mengelola dan meningkatkan usahanya, maka produk pinjaman lembaga-lembaga keuangan yang dapat dan sesuai kebutuhan pengelola usaha pompa adalah sebagai berikut:

Table 13: Produk Keuangan Potensial Untuk Mitra Program TIRTA

NO	LEMBAGA KEUANGAN	PRODUK	FITUR UMUM
1	Bank Jatim	1.Pundi Kencana	-Plafond = Max 500 juta -Jangka Waktu = Max 5 Tahun -Bunga =15,5%/tahun annuitas -Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu
		2.Kredit Investasi Pemerintah	-Plafond = Sesuai kebutuhan dan kemampuan (dapat diatas 500 juta). -Jangka Waktu = Max 5 Tahun -Bunga =13-14%/tahun efektif murni -Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu
		3.Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi	-Plafond = -Perorangan Max 100 juta -Kelompok/Kop Max 500 juta -Jangka Waktu = Max 5 tahun -Bunga =12,75-13,75%/tahun efektif murni -Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu
		4.Pinjaman Rekening Koran	-Plafond = Sesuai Kemampuan dan kebutuhan -Jangka Waktu = Max 1 tahun -Bunga = 12,75% dari fasilitas pinjaman yang dipakai -Biaya lain = Tidak Ada
2	BPR Bank Daerah Bojonegoro	1.Kredit Modal Kerja Jasa	-Plafond = Max 10 juta -Jangka Waktu = Max 12 bulan -Bunga =0,5%/bulan flat -Biaya lain-lain tidak ada

NO	LEMBAGA KEUANGAN	PRODUK	FITUR UMUM
		2.Kredit Modal Kerja Pertanian	-Plafond = Max 100 juta (khusus HIPPA/BUMDES Max. 300 juta) -Jangka Waktu = Max 6 bulan -Bunga = 1,5%/bulan flat -Biaya lain = Provisi 1,5%
3	UPK PNPM Kec. Kanor	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-Plafond = Max 150 juta (khusus HIPPA/BUMDES Max. 300 juta) -Jangka Waktu = Max 18 bulan (khusus HIPPA/BUMDES 1 musim tanam dng angsuran pada saat panen sekaligus). -Bunga =1,25%/bulan flat (khusus HIPPA/BUMDES 2,75%) -Biaya lain-lain tidak ada.
4	KPRI Lumintu Rengel	Kredit Perumahan	-Plafond = Sesuai kebutuhan anggota, kesediaan dana dan putusan pengurus KPRI -Jangka Waktu = Max 60 bulan (khusus HIPPA/BUMDES 1 musim tanam dng angsuran pada saat panen sekaligus). -Bunga =1,5%/bulan flat (khusus HIPPA/BUMDES 3%) -Jangka Waktu = Max 60 bulan -Biaya lain-lain : Provisi 1%
5	BRI	1. Kupedes	- Plafond = Max 200 juta -Jangka Waktu= Max 60 bulan -Bunga = 1-1,2%/bulan , flat (sesuai plafond) Biaya lain : Adm (sesuai jumlah plafond mulai dari Rp. 10.000).
		2. KUR	Plafond = Max 500 juta -Jangka Waktu =Max 60 bulan -Bunga =0,55%/bulan flat -Biaya lain-lain tidak ada
		3. Kredit Modal Kerja	Kredit Modal Kerja -Plafond = Max 40 Milyar -Jangka Waktu =Max 36 bulan -Bunga =15-16%/thn, efektif -Biaya lain = Adm. 1,5% Provisi sesuai plafond
		4. Kredit Investasi	-Plafond = Max 40 Milyar -Jangka Waktu =Max 36 bulan -Bunga =15-16%/thn, efektif -Biaya lain = Adm. 1,5%

NO	LEMBAGA KEUANGAN	PRODUK	FITUR UMUM
			Provisi sesuai plafond
		5. KKPE	-Plafond = -Perorangan Max 50 juta -Kelompok/Kop Max 500 juta -Jangka Waktu= Max 36 bulan -Bunga =12,5-13,5%/tahun Efektif, murni (mengacu tingkat suku bunga LPS) -Biaya lain-lain = Adm & Provisi sesuai plafond

### 3.3.5 PROFIL PEMERINTAH

#### 3.3.5.1 Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan di desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana operasional. Kepala Desa dipilih oleh masyarakat dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Seorang Kepala Desa bisa menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau pun tidak secara berturut-turut.

Tugas utama Kepala Desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, Kepala Desa harus menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan diwakili oleh Camat. Seyogyanya, Kepala Desa juga harus memberikan laporan lewat berbagai media yang mudah diakses kepada masyarakat.

Pengembangan irigasi sebagai salah satu kegiatan pembangunan di Desa juga menjadi bagian tugas Kepala Desa. Tentu saja kewenangan Kepala Desa dalam hal irigasi dibatasi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah<sup>13</sup> menjabarkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan system irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Untuk mendanai pembangunan di Desa, termasuk peningkatan dan pemeliharaan system irigasi desa, Kepala Desa bisa mengalokasikannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang diperoleh lewat transfer Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kabupaten setiap tahunnya harus mengalokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari total dana anggaran belanja desa, Kepala Desa mengalokasikan 30% untuk keperluan pembayaran gaji dan operasional dan 70% untuk mendanai fungsi-fungsi pemerintahan desa seperti menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Total Alokasi Dana Desa yang ada di APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban serta estimasi penerimaan ADD per desa adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> PP No 20/2006 tentang irigasi membatasi kewenangan pemerintah desa dalam hal irigasi khusus untuk system irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa. UU ini juga mengatur bahwa untuk system irigasi primer dan sekunder untuk luas areal lebih dari 3,000 ha dibawah kewenangan Pemerintah Pusat, areal 1.000-3.000 ha dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi, areal kurang dari 1.000 ha dibawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Table 14: Alokasi Dana Desa

Kabupaten	Total ADD 2015 (Rp)	% dibandingkan APBD 2015	Jumlah Desa	Estimasi Rata-Rata per Desa (Rp)
Bojonegoro	116,539,758,000	6%	366	308,390,300
Lamongan	127,056,805,000	4%	273	318,414,640
Tuban	88,124,523,000	5%	412	322,800,450

\* Sumber Data<sup>14</sup>

Dari Total 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan adalah dua kabupaten teratas dengan jumlah ADD tertinggi sedangkan Kabupaten Tuban berada pada peringkat 10. Sekilas ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten-kabupaten sasaran program TIRTA memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan desa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur, namun, jika dibandingkan antara prosentasi jumlah ADD dengan APBD kenyataannya masih jauh dari proporsi yang disarankan oleh Peraturan Pemerintah bahwa paling sedikit 10% dari dana APBD di alokasikan untuk ADD.

Tim Tirta berhasil bertemu dan melakukan wawancara dengan 12 Kepala desa dan mendiskusikan berbagai hal menyangkut pengembangan dan pelayanan irigasi di desanya. Dari berbagai paparan tentang perkembangan irigasi, situasi irigasi, peran dan arah kebijakan Kepala Desa untuk mendukung irigasi di desa, para kepala desa ini bisa dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

#### Tipe Pemadam Kebakaran

Tipe pemadam kebakaran adalah kepala desa yang melihat peran utamanya lebih sebagai seorang *problem solver* ketika terjadi permasalahan dengan layanan irigasi di desanya. Dari desa-desa yang dikunjungi oleh tim TIRTA, kepala desa Petak dan desa Ngujung masuk dalam kategori ini. Dua desa ini bersama empat desa lainnya, Desa Tambakromo, Sumber Rejo, Tinawun dan Banaran, yang tergabung dalam Gabungan HIPPA atau G-HIPPA, menerima bantuan pompa dari Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2015. Dalam perjalanannya G-HIPPA tidak memiliki kapasitas untuk mendanai biaya operasional dari pompa ini. Melalui musyawarah bersama diputuskan tiga orang, Kepala Desa Ngujung, Kepala Desa Petak, dan seorang pengusaha bersedia menalangi biaya operasional saat ini<sup>15</sup> namun dengan komitmen setelah 1 tahun akan beralih pengelolaannya kepada G-HIPPA.

#### Tipe Fasilitator

Kepala Desa yang dikategorikan sebagai tipe fasilitator adalah kepala desa yang aktif terlibat dalam mencari, menyeleksi dan memantau penyediaan jasa layanan air irigasi di desa. Motivasi dan insentif kepala desa bisa saja positif ataupun negative. Kepala desa aktif mencari dan memilih pengusaha bisa saja murni untuk memastikan masyarakat desanya mendapatkan layanan air irigasi tanpa imbalan dan keuntungan pribadi apapun untuk kepala desa (positif). Namun bisa

<sup>14</sup> Data ADD diperoleh dari Dirjen Perimbangan dan Keuangan Daerah (DJPK), Kementerian Keuangan, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/berita/527-rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-pada-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-perubahan-apbn-p-tahun-anggaran-2015>, Data APBD - <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>, Data jumlah desa dari Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2015.

<sup>15</sup> Desa Petak harus mengalokasikan dari APBDES sebesar Rp. 81 juta untuk membangun sarana pendukung agar bisa mengalirkan air dari stasiun pompa di Kliteh ke Desa Petak. Ketiga 'investor'; Kepala Desa Petak, Ngujung dan Pengusaha Yon, harus menalangi biaya operasional dari dana pribadinya. Sebagai gambaran untuk 4 bulan dibutuhkan biaya listrik sebesar; Rp. 128 juta.

juga terjadi Kepala Desa aktif mencari pengusaha yang tepat dengan harapan ganda bahwa pertama masyarakat di desa mendapatkan layanan air (positif), dan kedua, adanya keuntungan finansial pribadi untuk dirinya (negative).

Proses pemilihan pengusaha jasa layanan air dilakukan lewat suatu proses pemilihan, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai suatu proses tender terbuka, contohnya seperti yang dipaparkan berikut oleh *Drs. Dwi Setiono*, Kades Sukoharjo:

- Pemerintah desa mencari pengusaha areal yang berminat untuk melayani jasa irigasi di desa Sukoharjo.
- Pemerintah desa mengundang pengusaha areal untuk melihat/survey desa yang akan dilayani.
- Pengusaha areal mengajukan proposal rencana pelayanan jasa irigasi ke pemerintah desa.
- Pengusaha areal menjelaskan proposal tersebut kepada pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pertemuan/kegiatan musyawarah desa (MUSDES).
- Pemerintah desa dan masyarakat membuat keputusan terhadap pengusaha areal.
- Membuat perjanjian yang ditujukan antara desa dan pengusaha

Temuan menarik dari pengumpulan data tim TIRTA adalah Desa Leran dan Desa Sukoharjo bekerja sama dengan pengusaha areal yang sama dan memiliki kontrak tertulis dengan rentang waktu yang sangat lama, 20 dan 25 tahun, dengan klausul-klausul kontrak yang mengikat dan mendukung monopoli usaha penyediaan jasa layanan air<sup>16</sup>.

Dari 12 Kepala Desa yang ditemui tim TIRTA, beberapa kepala desa yang masuk dalam kategori fasilitator adalah; Kepala Desa Leran, Kliteh, Trucuk, Prambonwetan, Tulungrejo, dan Sukoharjo.

#### **Tipe Pengusaha**

Tipe selanjutnya adalah Kepala Desa yang bertindak langsung sebagai pengusaha areal dan aktif menjalankan bisnis penyediaan jasa irigasi untuk masyarakat di desa-desanya. Kepala Desa Nguken dan Rendeng masuk dalam kategori ini. Sejarah perkembangan mengapa para Kepala Desa ini aktif terlibat dalam usaha penyediaan jasa irigasi oleh karena alasan historis bisnis keluarga yang telah dirintis dan dijalankan turun temurun dari orang tua mereka.<sup>17</sup> Pada umumnya kepala desa yang langsung aktif terlibat sebagai pengusaha memiliki ketertarikan untuk mendukung perluasan layanan irigasi baik dengan dana APB-DES ataupun dana pribadi/pinjaman. Namun mereka tidak terlalu tertarik mendukung penguatan HIPPA / BUMDES untuk bisa mengelola jasa layanan air irigasi di desa karena tentu saja akan mempengaruhi bisnis yang dimilikinya. Desa Rendeng memiliki BUMDES namun tidak bergerak dalam usaha produktif pengelolaan jasa air irigasi tetapi dalam bidang wisata gerabah dan distributor pupuk.

#### **Tipe Pemberdayaan**

Kepala Desa yang dikategorikan sebagai tipe pemberdayaan adalah mereka yang aktif mendukung penyediaan layanan jasa irigasi di desa kewenangannya namun tidak dengan cara terlibat langsung sebagai penyedia jasa layanan air irigasi. Mereka lebih memilih dengan cara mendukung pengembangan kelembagaan masyarakat yang bisa menjalankan usaha pengelolaan air irigasi secara mandiri sebagai suatu unit usaha yang ada di desa.

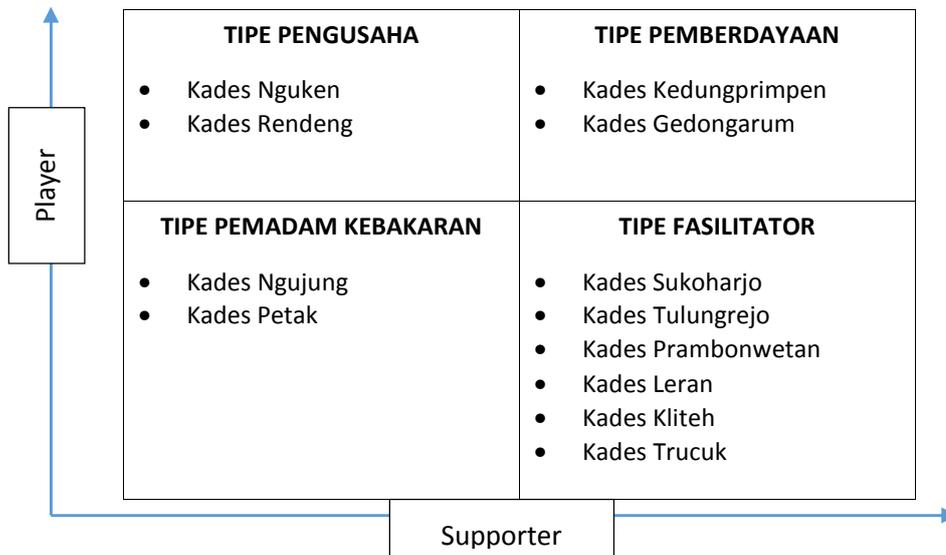
Kepala Desa Kedungprimpen dan Gedongarum masuk dalam kategori ini. Hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah pilihan mendukung penguatan kelembagaan desa adalah pilihan nyata sebagai bukti komitmen dan arah kebijakan kepala desa sebagai pemimpin desa atau sebenarnya karena dorongan dari masyarakat desanya. Desa Kedungprimpen dan Gedongarum memiliki BUMDES yang cukup mapan dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa-desa lain seperti Desa Sukoharjo, Prambonwetan, Trucuk, dan Tinawon memiliki kelembagaan HIPPA dan telah terbentuk namun tidak aktif sama sekali dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Penyediaan jasa layanan irigasi di desa-desa ini disediakan oleh para pengusaha areal.

---

<sup>16</sup> Kontrak perjanjian antara Desa Sukoharjo memuat klausul penggantian biaya Rp. 10 milyar apabila sebagai ganti rugi apabila perjanjian dibatalkan dan masyarakat tidak boleh menggunakan pompa lain seperti pompa bantuan dari pemerintah.

<sup>17</sup> Lebih lanjut tentang pengusaha seperti skala bisnis, investasi, modal kerja, kriteria, strategi pemilihan lokasi usaha dan strategi pengelolaan usaha akan dibahas di bagian profil pengusaha

Figure 4: Kategori Kepala Desa



Dari berbagai tipe kategori kepala desa diatas, tipe pemberdayaan dan fasilitator dengan motif positif adalah dua kategori ideal untuk menjadi mitra potensial program TIRTA.

### 3.3.5.2 Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah kota/kabupaten yang pembagian kerjanya meliputi desa dan/atau kelurahan. Sesuai dengan Undang (UU) No. 23 Tahun 2014, fungsi pembentukan pemerintah kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan<sup>18</sup>.

Suatu kecamatan sesuai dengan UU tersebut dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan diklasifikasikan atas dua tipe, yaitu :

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Istilah "Kecamatan" di provinsi Aceh disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".

Pemerintah Kecamatan berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota yang membentuknya. Sebagai kepala pemerintahan kecamatan, Camat mendapat pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Menurut Pasal 225 UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, Camat mempunyai tugas untuk:

<sup>18</sup> Undang-undang dan peraturan yang relevan tentang pemerintah kecamatan adalah, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota., Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. , dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) UU tersebut.
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pertanian masyarakat merupakan bagian penting dari suatu aktivitas yang diperhatikan atau dikelola pemerintah kecamatan. Dari segi fungsi pemerintahan kecamatan, terdapat dua fungsi penting yang terkait dengan aktivitas pemerintah di bidang irigasi, yaitu:

**a) Fungsi pelayanan publik**

Penyediaan infrastruktur terkait irigasi, seperti saluran dan mesin pompa merupakan bidang utama yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Melalui dana pemerintah daerah dan pusat, pemerintah kecamatan berkepentingan memberikan infrastruktur pelayanan pendukung untuk keberhasilan pertanian di wilayahnya. Penyediaan dan penambahan mesin pompa serta penambahan dan perbaikan jaringan irigasi merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan di kecamatan.

**b) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Salah satu perangkat Pemerintah Kecamatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Melalui seksi ini, pemerintah kecamatan secara aktif meningkatkan kualitas SDM pertanian di desa beserta kelembagaannya. Dalam operasionalnya terkait usaha pertanian masyarakat, Camat berkoordinasi dengan dua kantor pelayanan dinas kabupaten yang terkait penanganan irigasi di kecamatan, yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Kedua UPTD tersebut adalah UPTD Pertanian dan UPTD Perairan. Dana pemerintah daerah maupun pusat terkait teknis pertanian, khususnya irigasi ditingkat kecamatan dikelola atau dikoordinasikan oleh kedua unit teknis tersebut.

Selain dengan kedua UPTD tersebut, Camat juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan para kepala desa dalam melaksanakan, memonitor dan membina mereka terkait kelancaran program pemerintah dibidang irigasi serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Dari survey yang dilakukan terdapat beberapa contoh keterkaitan pemerintah kecamatan dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Kanor dan Kecamatan Malo.

**Kecamatan Kanor**

*Kelembagaan Usaha Jasa Irigasi*

Pemerintah Kecamatan Kanor berusaha turut mensukseskan program pengembangan BUMDES di Bojonegoro yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dengan dukungan pemerintah kabupaten (Bappeda dan BPMPD), Pemerintah Kecamatan Kanor berusaha memperkenalkan, mensosialisasi dan membantu legislasi lembaga BUMDES pengairan di Kec. Kanor. Sampai saat ini di kecamatan tersebut telah dilahirkan 2 BUMDES di Kec. Gedongrimpen dan Kedungprimpen.

*Permodalan Usaha Jasa Irigasi*

Kedua BUMDES di Kec. Kanor telah mendapatkan kredit dari UPK PNPM Kec. Kanor. Bantuan ini tidak terlepas dari peran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kanor yang bertindak sebagai PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) PNPM Kec. Kanor. Menurut info dari pengurus UPK, PJOK selalu aktif memonitor dan membina kegiatan UPK dan salah satunya adalah menghubungkan antara kebutuhan BUMDES yang juga menjadi tanggungjawabnya di tingkat kecamatan dengan program PNPM dalam bidang microfinance.

#### ***Kecamatan Malo***

Untuk menyediakan sumber air kepada 7 desa di Kec. Malo yang masih banyak belum mendapatkan air, pemerintah kecamatan bekerjasama dengan UPTD Pertanian Malo telah mendapatkan dana pemerintah kabupaten untuk penyediaan mesin pompa dan salurannya. Pemerintah Kecamatan berusaha melahirkan atau membangkitkan kembali HIPPA di setiap desa serta GHIPPA di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan masih dicari jalan keluarnya. Untuk itu pemerintah kecamatan secara aktif telah berusaha mengambil langkah-langkah agar secara bertahap pengelolaan fasilitas pompa irigasi tersebut dapat berjalan lancar.

#### ***Peluang, Tantangan dan Rekomendasi ke Depan***

Keberhasilan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa selalu tergantung akan perhatian dan keseriusan para pemimpinnya. Belajar dari keberhasilan BUMDES di Kec. Kanor, dimana peran Camat yang selalu aktif dalam memperhatikan sektor pertanian maupun kelembagaannya menjadikan kedua BUMDES terus berkembang dengan baik dan menjadi percontohan di Kab. Bojonegoro.

Untuk itu faktor perhatian dan keseriusan di masing-masing Camat akan menjadi faktor penting yang dapat mendorong keberhasilan Project TIRTA di masa depan. Terlebih lagi dari analisa potensi perluasan layanan irigasi akan menjangkau lintas desa dan lintas kecamatan. Tentu saja, peran Camat akan menjadi sangat penting.

Project TIRTA dari awal pelaksanaan program agar dapat berkoordinasi secara serius dengan para Camat yang menjadi target program. Peran mereka dianggap penting dalam hal mendorong dan mempengaruhi para pihak terkait, baik tingkat terkait di kecamatan (HIPPA/BUMDES, Kepala Desa, UPTD, Lembaga Keuangan) maupun di tingkat Kabupaten (Dinas terkait dan Bupati) untuk memberikan dukungan kepada Project TIRTA

#### ***3.3.5.3 Balai Besar Wilayah Bengawan Solo***

Balai Besar Wilayah Bengawan Solo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Bengawan solo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tumpungan air lainnya seperti irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Wilayah Bengawan Solo terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada 110°18' BT sampai 112°45' BT dan 6°49' LS sampai 8°08' LS, beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Luas total wilayah sungai (WS) Bengawan Solo sekitar 20.125 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo dengan luas 16.100 km<sup>2</sup>, DAS Kali Grindulu dan Kali Lorog di Pacitan seluas 1.517 km<sup>2</sup>, DAS kecil di kawasan pantai utara seluas 1.410 km<sup>2</sup> dan DAS Kali Lamong seluas 720 km<sup>2</sup>.

WS Bengawan Solo secara administratif mencakup 20 (dua puluh) kabupaten dan 3 (tiga) kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah: Kota Surakarta, Kab. Gunung Kidul, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Blora dan Kab. Rembang. Jawa Timur: Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Gresik dan Kota Surabaya.

#### ***Tata Cara Perizinan dan Rekomendasi Teknis***

a) Perizinan Sumber Daya Air

Air merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh manusia dalam proses kehidupan ini setelah udara baik secara kualitas maupun kuantitas. Tanpa zat air manusia akan mengalami kesukaran dan kendala, Dalam menjalani kehidupan ini. Semakin berkembangnya penduduk penggunaan pemanfaatan dan pelayanan penggunaan air juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan perizinan dalam pemanfaatan sumber daya air.

Perizinan sumber daya air meliputi :

- Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air (PP no.42/2008)
- Izin penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu (PP no 42/2008)
- Izin pemanfaatan ruang pada daerah genangan dan sempadan waduk (PP no.37/2010)
- Izin pemanfaatan ruang sungai untuk berbagai kegiatan (PP no.38/2011)
- Izin pengalihan alur sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai (Permen PU 18/2009)

b) Perizinan Penggunaan Aset Lahan (Tanah) Negara Pada Sumber Air

Tanah negara seperti halnya sebutan pada tanah yang lain, misalnya tanah milik dsb. Hal ini menunjukkan hubungan status hokum tertentu antara obyek dan subyeknya, yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan.

Perizinan Penggunaan Aset Lahan (Tanah) Negara pada Sumber Air Di atur dalam:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ; 2/PRT/M/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,
- Peraturan Menteri Keuangan No; 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Milik Negara.

### **Rekomendasi Teknis**

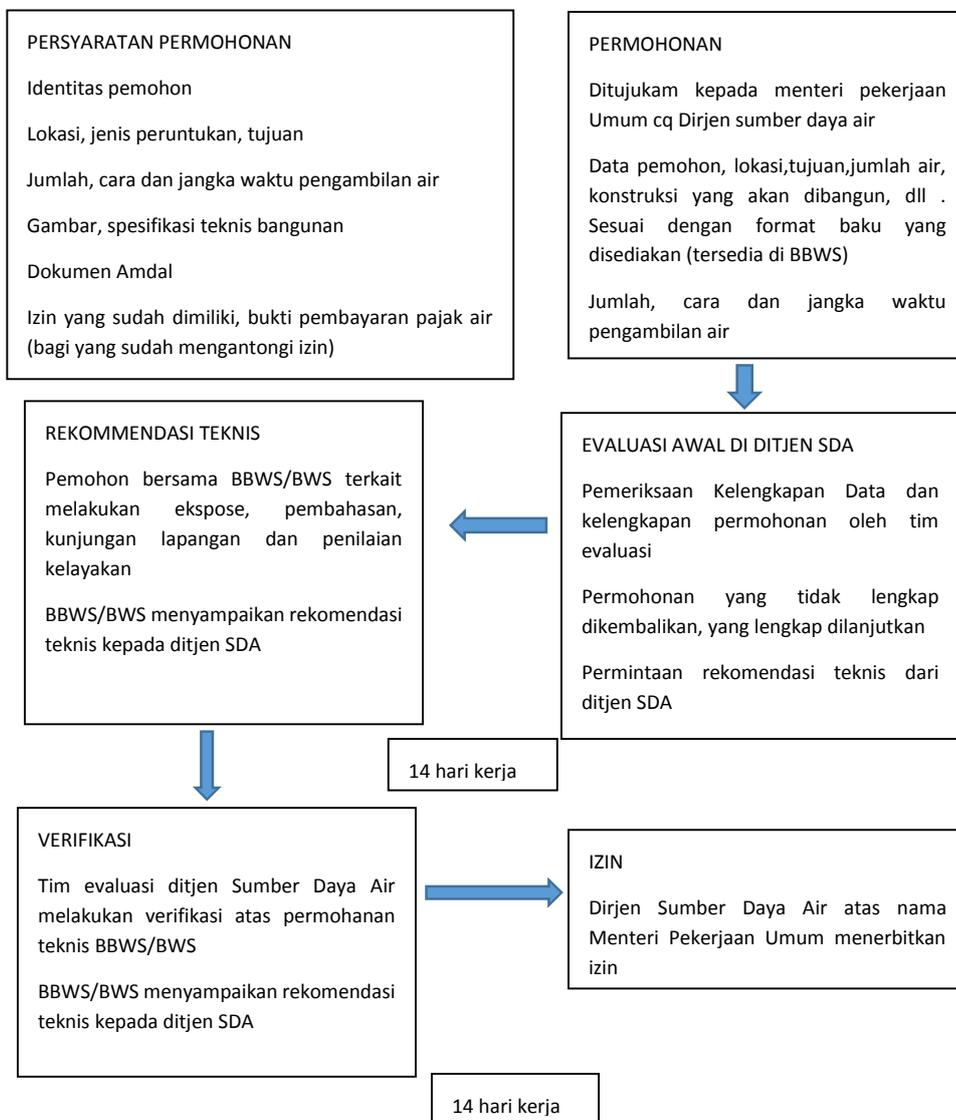
Rekomendasi Teknis dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam penerbitan atau pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi Teknis merupakan hal yang penting dalam soal perizinan karena rekomendasi teknis diberikan oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus di bidang tertentu.

Dalam hal memberikan rekomendasi teknis, tugas rekomendasi teknis BBWS adalah untuk:

- Memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan izin terhadap sumber daya air dan lahan kepada pusat sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.
- Mengawasi dan Melindungi serta mencegah bahaya bagi lingkungan (Kerusakan Lingkungan khususnya sumber daya Air maupun lahan asset negara)

KEGIATAN PADA RUANG SUNGAI	PEMBERI IZIN	PEMBERI REKOMENDASI TEKNIS
Pelaksanaan Konstruksi pada ruang sungai	Menteri, Gubernur, walikota,Bupati	Pengelola SDA ( diatur dalam PP 42 /2008)
Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan atau alur sungai	Menteri, Gubernur, walikota,Bupati	Pengelola SDA ( diatur dalam PP 42 /2008)
Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	Menteri, Gubernur, walikota,Bupati	Pengelola SDA ( diatur dalam PP 42 /2008)
Pemanfaatn bekas sungai	Menteri, Gubernur, walikota,Bupati	Pengelola SDA ( diatur dalam PP 42 /2008)
Pemanfaatn air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat dalam sistim irigasi yang sudah ada	Menteri, Gubernur, walikota,Bupati	Pengelola SDA ( diatur dalam PP 42 /2008)

Figure 5: Prosedur Perizinan Penggunaan dan Pemanfaat Sumber Daya Air



Balai Besar Bengawan solo kabupaten Bojonegoro adalah perwakilan dari pemerintah pusat cq Balai Besar Bengawan Solo. Perwakilan Balai Besar ini hanya bersifat sebagai operator perawatan secara swakelola untuk waduk, tanggul pintu2 air diseputar wilayah Bojonegoro dan Babat. Perawatan rutin yang dilakukan hanya bersifat perawatan minor seperti, pengecatan pintu air, penggantian spare part ringan pintu air, sedangkan untuk pekerjaan besar harus dilakukan oleh Balai Besar Bengawan Solo pusat di Kartasura.



### **Kesimpulan**

Seluruh wilayah aliran Bengawan Solo mulai dari Hulu sampai dengan Hilir adalah menjadi otoritas Balai Besar Wilayah Bengawan Solo yang berkedudukan di Kartasura untuk pemanfaatan dan izin pemanfaatannya, sedangkan dengan pemda kabupaten Bojonegoro hanya bersifat koordinasi. Demikian Juga Perwakilan Balai Besar Bengawan Solo kabupaten Bojonegoro tunduk kepada Balai Besar Kertasura dan dalam tugas kesehariannya hanya sebatas melakukan perawatan rutin kecil pintu-pintu air.

Keterkaitan isu antara BBWS dan project TIRTA dan akan mempengaruhi rancang program ke depan adalah fakta bahwa saat ini para pengguna air Bngawan Solo yang menggunakan stasiun pompa disepanjang wilayah survey TIRTA tidak atau belum memiliki izin dari Balai Besar Wilayah Bengawan Solo



Data tinggi Muka Air Bengawan Solo belum ter update hal ini dikarenakan belum optimal pengoperasian dan baru selesainya di bangun **bendung gerak di Bojonegoro**, yang akan dijadikan stasiun pantau pengukuran tinggi muka air khusus wilayah Bojonegoro.

### **Rekomendasi**

Perlu dilakukan upaya fasilitasi antara pengusaha stasiun pompa irigasi/HIPPA dengan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo terkait legalitas, apakah diperlukan izin atau cukup pemberitahuan saja.

Apabila TIRTA project ingin mengembangkan pilot/contoh pengusaha stasiun pompa irigasi/HIPPA sebaiknya bersama HIPPA dilakukan pembicaraan/diskusi dengan fihak BBWS bengawan solo agar usaha yang dilakukan terlegitimasi dan tidak melanggar aturan Pemerintah yang ada.

#### **3.3.5.4 Bappeda Kabupaten Bojonegoro**

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok ini termasuk menjalankan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lain, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan fisik, infrastruktur sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro.

Bappeda sebagai Koordinator Wilayah/Kabupaten yang berfungsi merencanakan anggaran untuk kegiatan di daerah masih terkendala UU Sumber Daya Alam (SDA) No 7 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan tidak berlakunya UU 7/2004, Bappeda Bojonegoro harus merevisi atau menyesuaikan kembali beberapa program yang sudah berjalan. Meskipun bisa dikatakan saat ini tidak ada kekosongan produk hukum dengan



diberlakukannya kembali UU 11/1974, namun pelaksanaan Pengelolaan SDA kedepan perlu mempunyai payung hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu saat ini sedang disusun Peraturan Pemerintah (PP) Pengusahaan Sumber Daya Air mengacu pada UU No. 11/1974 tentang Pengairan beserta PP terkait dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tetap sesuai dengan kondisi saat ini.

Bupati Bojonegoro ingin menjadikan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energy. Untuk mewujudkan visi Bupati, Bappeda merencanakan anggaran pembangunan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur irigasi dan pertanian. Beberapa bentuk program misallnya, Dinas Pengairan dengan Program Pembangunan 1,000 Embung untuk meningkatkan produksi pertanian sedangkan Dinas Pertanian dengan Program JITUT /JIDES, pompanisasi, pupuk, pembibitan, dan penyuluhan anak tani remaja.

Ada dua rencana aksi program unggulan Bappeda Bojonegoro tahun 2015 yang berhubungan dengan irigasi dan pertanian yaitu; i) Pilot Pengembangan BUMDES dan ii) Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuan Bappeda memfasilitasi Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan maksud untuk membangun kesadaran akan pentingnya penetapan lahan untuk pertanian pangan secara abadi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena adanya konversi lahan sawah ke non sawah. Penurunan luas sawah berdampak sangat nyata terhadap penurunan produksi padi sebagai bahan makanan utama.

### **Pilot Pengembangan BUMDES**

Target sasaran Pilot Pengembangan BUMDES berkembang dari 21 BUMDES di tahun anggaran 2014 menjadi 53 BUMDES Pilot di tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro<sup>19</sup>. Lokasi Pendampingan Pilot Project Pengembangan BUMDES Kabupaten Bojonegoro 2015 bisa dilihat di table berikut.

Table 16: Lokasi Pendampingan BUMDes di Bojonegoro

No.	Kecamatan	Desa
1.	Margomulyo	Meduri
		Margomulyo
2.	Ngraho	Blimbinggede
3	Tambakrejo	Jatimulyo
		Jawik
		Tanjung
4.	Ngambon	Bondol
5.	Sekar	Klino
6.	Bubular	Bubulan
7.	Gondang	Pajeng
		Sambongrejo
8.	Temayang	Kedungsumber
9.	Sugihwaras	Bulu
10.	Kedungadem	Duwel
		Pejok
		Panjang
11.	Kepohbaru	Woro
		Tlogorejo
		Sugihwaras
		Bayemgede
12.	Baureno	Ngemplak
13.	Kanor	Simorejo

<sup>19</sup> SK Bupati Bojonegoro Nomor 186/154/Kep/412.11/2015

		Tejo
		Kedungprimpen
		Semambung
		Sumberwangi
14.	Sumberejo	Pejambon
		Prayungan
15.	Balen	Sekaran
		Pilanggede
16.	Sukosewu	Sidorejo
17.	Kapas	Kapas
		Ngampel
		Bakalan
		Bendo
18.	Bojonegoro	Kalirejo
19.	Trucuk	Pagerwesi
20.	Dander	Sumberagung
		Dander
21.	Ngasem	Trenggulun
22.	Kalitidu	Sumengko
		Ngringinrejo
		Panjunan
		Mojo
23.	Malo	Rendeng
24.	Purwosari	Kuniran
		Purwosari
		Tlatah
25.	Padangan	Nguken
26.	Kasiman	Sambeng
27.	Kedewan	Kadewan
28.	Gayam	Katur

Tujuan Program Pilot oleh Bappeda adalah;

- Teridentifikasinya dengan kriteria yang
- Tersusunnya legalitas
- Terwujudnya BUMDES hal komitmen, Usaha/Permodalan.

Pengembangan BUMDES Peraturan Menteri Desa tahun 2015 tentang pengelolaan dan Legalitas BUMDES di desa PERDES dan SK Kepala

Pengembangan BUMDes

BUMDES baru sesuai telah ditetapkan.

BUMDES (legalitas usaha) yang berkelanjutan dalam kelembagaan, Legalitas,

diatur berdasarkan (Permendes) Nomor 4 pendirian, pengurusan, pembubaran BUMDES. di sahkan dengan adanya Desa.

Metode pelaksanaan pembentukan BUMDES Bappeda dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pra Musyawarah antara calon pengurus, kepala desa, tokoh masyarakat
- Membahas tentang bagaimana permodalannya dan siapa saja pengurus yang akan mengelola BUMDES.
- Hasil diumumkan saat musyawarah desa
- Mengadakan musyawarah lanjutan untuk membentuk BUMDES
- Proses pembentukan BUMDES

Penguatan manajemen BUMDes dilakukan oleh Bappeda sedangkan BPMPD mendukung dalam hal permodalan BUMDes. Untuk tahun pertama penguatan Bappeda dan BPMPD hanya bersifat pendampingan saja. Di tahun kedua, apabila BUMDes tetap eksis maka BUMDes akan diberi suntikan dana sesuai dengan tingkat usaha yang didirikan.

Setiap tahun Bappeda melaksanakan sosialisasi untuk semua BUMDES di kabupaten dan sosialisasi per kecamatan/desa tentang manfaat BUMDES. Minimnya pendirian BUMDES menurut Bappeda karena rata-rata desa masing bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Diharapkan dengan adanya BUMDES akan memperkuat perekonomian dan mengoptimalkan asset desa.

Bappeda menurunkan pendamping lapangan yang bertugas untuk membantu membangun kapasitas BUMDES<sup>20</sup>. Sebelumnya, pendamping lapangan dilatih dalam berbagai aspek seperti, pemahaman tentang regulasi dan mekanisme terbentuknya BUMDES, cara berkoordinasi dengan desa dan SKPD, fasilitasi rencana pengembangan BUMDES dan koordinasi kegiatan BUMDES. Tugas Pendamping Lapangan adalah mendampingi BUMDES dalam hal peluang usaha, analisa pasar, resiko usaha, dan rencana pengembangan usaha.

Untuk mendukung kualitas pendampingan, setiap bulan Rapat Koordinasi Pendampingan diadakan di Bappeda untuk membahas tentang kendala-kendala yang ada di lapangan, pembahasan usaha yang akan dilakukan oleh BUMDES, dan proses fasilitasi membentuk usaha.

Dalam melakukan pendampingan BUMDES ada dua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berwenang:

- Bappeda (Badan Perencanaan Daerah)
- Sebagai perencanaan dan pendampingan BUMDES, kebijakan, menyampaikan dan mengkordinasikan dengan SKPD
- BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)
- Sebagai pemberi bantuan modal keuangan dan penguatan BUMDES

Dari hasil survey Tirta di lapangan, BUMDES Kedungprimpen adalah salah satu sasaran Pilot Pengembangan BUMDES tahun 2015 oleh Bappeda, dimana BUMDES Kedungprimpen mengelola layanan irigasi pertanian melalui Unit Pompanisasi "Sri Sedani". BUMDES mengelola layanan irigasi melalui pompa dari Bengawan Solo menggunakan Dynamo (listrik) dengan luas areal yang dilayani sebesar 350 ha terdiri dari Desa Kedungprimpen 325 Ha, Desa Temu 20 Ha, Desa Pomahan 5 Ha. BUMDES Kedungprimpen merencanakan untuk melakukan pengembangan area irigasi seluas 250 Ha. Untuk menjalankan usahanya, BUMDES Kedungprimpen juga mengakses bantuan modal dari berbagai lembaga keuangan seperti Bank Jatim, BPR dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Untuk BUMDES Kedungprimpen, Bappeda menugaskan Ibu Heny Rochmawaty pendamping lapangan untuk membantu dalam hal pengelolaan BUMDES, administrasi dan pembukuan, peluang usaha unit pompanisasi dan peluang perluasan.

Berdasarkan hasil survey, maka dapat dipertimbangkan beberapa langkah kedepan terkait pelaksanaan Project TIRTA dan pengembangan BUMDES sebagai salah satu penyedia jasa layanan irigasi di Desa:

BUMDES/HIPPA merupakan wadah kelembagaan potensial dan berkelanjutan sebagai penyedia jasa layanan irigasi tersier. Melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan BUMDES diharapkan bisa meningkatkan ekonomi desa, terutama yang berhubungan dengan sarana irigasi dan pertanian.

Penguatan BUMDES juga merupakan prioritas program Bappeda, maka dalam pelaksanaan program TIRTA, koordinasi teratur terutama tentang muatan-muatan bantuan teknis program harus disinergikan dengan program Bappeda.

Peran Bappeda sebagai koordinator wilayah harus bisa maksimal di manfaatkan terutama dalam hal memfasilitasi pertemuan koordinasi antara TIRTA dengan instansi terkait (Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan dan BPMPD) untuk koordinasi perencanaan dan sinergi program.

Bappeda akan bisa mengambil peran dalam hal memfasilitasi pertemuan koordinasi sharing program untuk membahas:

- Planing program yang berkaitan dengan irigasi dan pertanian
- Progress kegiatan yang berkaitan dengan irigasi dan pertanian
- Feed back dari pihak pemerintah dan Tirta
- Plan of action (rencana dan tindak lanjut) program kedepan.

Perlunya koordinasi rutin dengan Bappeda dan SKPD secara teratur karena program TIRTA akan menjangkau lintas sektoral (Dinas pertanian, Dinas Pengairan, BPMPD), sehingga bisa bersinergi dan menghindari tidak tumpang tindih dengan program-program pemerintah yang sedang berjalan.

---

<sup>20</sup> SK Kepala Bappeda Nomor 188/1615/Kep/412.11/2015

Koordinasi yang baik dan teratur dengan BAPPEDA sekaligus akan menjaga hubungan yang tetap baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Program TIRTA sebagai perwakilan terdepan di lapangan dari program AIP-RURAL dan DFAT harus bisa ikut menjaga keharmonisan kerja sama bilateral antara kedua negara.

#### 3.3.5.5 Dinas PU Pengairan

Dinas Pengairan adalah salah satu dinas teknis yang melaksanakan urusan pembangunan di bidang teknis sumber daya air dan pengairan. Dinas Pengairan memiliki fungsi dan peran utama dalam hal pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Selain itu Dinas Pengairan juga bertanggung jawab untuk mengelola daerah irigasi (DI), mengelola penanganan banjir, dan bekerjasama dengan dinas lain dalam hal irigasi, pertanian, serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.

Peran Dinas PU Pengairan dalam menangani banjir adalah dengan melakukan penataan sebelum banjir dengan membuat bangunan fisik dan perkuatan tebing, normalisasi sungai (kali) yang tidak beraturan dengan aliran sungati yang tidak jelas. Dalam melakukan normalisasi sungai atau kali, tanahnya akan digali lalu dibuat semacam tanggul di kanan kiri agar air tidak meluap. Cara lainnya adalah dengan melakukan pembuangan air ke Bengawan melalui pompa ketika debit air di Bengawan dan sungai sama-sama besar. Selain itu Dinas Pengairan juga melakukan pompanisasi untuk penanggulangan banjir dengan cara melakukan buka-tutup pompa. Ketika debit air sama-sama naik maka air dari sungai dibuang (dipompa) ke Bengawan Solo kembali.

Untuk mendukung program Bupati Bojonegoro, Dinas Pengairan Bojonegoro hingga saat ini telah merealisasikan 373 embung dari 1,000 embung yang ditargetkan. Embung dibangun untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat di saat musim kemarau tiba, terutama pengairan untuk sawah dan ladang. Tanah yang dimanfaatkan untuk lokasi embung luasnya minim, hanya berkisar 30 x 30 meter sampai 100 x 170 meter, dengan kapasitas tampungan berkisar 10.000 sampai 20.000 meter<sup>3</sup>. Tahapan-tahapandalam pembangunan embung yaitu prakonstruksi, konstruksi, pemanfaatan dan perawatan. Rencananya pembangunan 1,000 embung untuk mendukung Bojonegoro sebagai lumbung negeri itu akan tuntas pada tahun 2018 mendatang. Pada saat musim kemarau, sebagian besar embung dalam kondisi kering kerontang. Meskipun sebagian embung masih ada airnya tetapi hanya tinggal sedikit dan diprediksi tidak cukup untuk mengairi tanaman disekitarnya. Program 1,000 embung saat ini masih mengalami beberapa kendala utama seperti ketersediaan lahan, dan musim hujan yang mengakibatkan jalan menuju lokasi belum bisa dilewati alat berat. Selain itu, lokasi yang akan dimanfaatkan masih ada tanaman padi yang belum panen.

Dinas Pengairan mengelola 62 Daerah Irigasi (DI) yang berasal dari sumber non Waduk Pacal karena yang mengelola Waduk pacal adalah dari Pusat. DI yang sudah mampu 2 kali musim tanam adalah Dander, Ngunut dan Balong (Kec. Dander). Sedangkan untuk Waduk Pacal, ketersediaan air di tahun terakhir (2015) hanya sampai bulan Mei, tidak berbeda jauh dengan keadaan di tahun 2014 yang mengalir sampai bulan Juni. Jumlah debit air dari waduk Pacal pada mulanya sebesar 45.000 m<sup>3</sup> (1993) tetapi sekarang menurun menjadi 22.000m<sup>3</sup>. Daerah cakupan irigasi dari waduk Pacal sampai ke Kecamatan Kanor hingga Kecamatan Baureno walaupun pada waktu Musim Tanam II tidak sampai ke wilayah Kanor dan Baureno. Pengelolaan Waduk pacal langsung dari Pusat (UPT PSDA) dan pemanfaatan airnya oleh Kabupaten. Sumber Daya Air lain selain Sungai Bengawan Solo yang mendukung irigasi pertanian di kabupaten adalah sebagian Sungai Mekuris, Waduk Pacal, Embung Leran I & II.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) HIPPA, Dinas Pengairan kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pelatihan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Partisipasif. Pelatihan ini memang sangat dibutuhkan oleh semua pengurus HIPPA untuk meningkatkan kapasitas dan menambah pengalaman dalam tata kelola sumber air terkait irigasi. Pelatihan dihadiri dinas terkait Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Dengan pelatihan ini, harapannya agar para petani bisa memanfaatkan embung maupun waduk secara optimal dan bisa mengatasi permasalahan yang ada agar menunjang saluran irigasi yang lebih baik. Harapan kedepannya adalah irigasi lebih terkelola dengan baik hingga dapat mengaliri air ke tanah pertanian agar para petani tidak perlu khawatir sawah mereka kekurangan air.

Pada tahun 2015, Dinas Pengairan mengadakan Pembinaan GHIPPA di Kecamatan Dander Bojonegoro, acara diikuti oleh 34 Desa dan 30 HIPPA gabungan yang terdiri dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Dander dan Kalitidu. Sekaligus pemantapan tentang pemahaman Perbub (Peraturan Bupati) No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan

Petani Pemakai Air Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagaimana mengelola pertanian dengan keterbatasan air yang ada. GHIPPA harus berkoordinasi dengan baik antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, dan semua yang sudah disepakati bersama harus diikuti dan dijalankan dengan baik agar tidak terjadi konflik, karena mengingat jumlah air yang terbatas, yang terpenting bisa guyup rukun bersama untuk memajukan desa.

Dalam menjalankan tugas nya Dinas Pengairan dibantu oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). UPTD adalah pelaksana harian yang menjalankan tugas teknis operasional dinas di lapangan. Di Bojonegoro terdapat 6 UPTD, yaitu:

1. UPTD Wilayah Timur, meliputi : Kecamatan Baureno dan Kepohbaru
2. UPTD Wilayah Tengah I, meliputi : Kecamatan Kedungadem, Sumberejo dan Kanor
3. UPTD Wilayah Tengah II, meliputi : Kecamatan Kapas, Balen, Sukosewu, Sugihwaras dan Temayang
4. UPTD Wilayah Barat I, meliputi : Kecamatan Trucuk, Malo, Kadewan, Kasiman, Kalitidu, Ngasem, Gayam, Dander dan Bojonegoro
5. UPTD Wilayah Barat II, meliputi : Kecamatan Gondang, Sekar, Padangan, Purwosari, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Margomulyo, Ngraho
6. UPTD Peralatan

Selain UPTD, Dinas PU Pengairan dalam melaksanakan tugas sehari-hari juga dibantu Kemantrian Air yang masing-masingnya menangani satu wilayah. Kemantrian dibagi menurut arah pembagian air melalui sungai. Kemantrian air Dinas Pengairan mengelola system jaringan air dan pengolahan airnya bekerjasama dengan dinas lain yang terkait. Tugas utama dari seorang Mantri Air yaitu mengatur kebutuhan air di musim tanam dan eksploitasi pemeliharaan. Terdapat 23 Mantri Air di Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan wilayah survey Tirta di bantaran Sungai Bengawan Solo ada empat Mantri Air wilayah Kanor ada 4 Mantri terdiri dari 3 mantri gabungan dengan Kecamatan Sumberjo dan 1 Mantri dari Kanor. Sedangkan di wilayah Trucuk dan Malo dikelola oleh 1 Mantri.

Berdasarkan hasil survey, beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam implementasi Program TIRTA adalah:

- a. Dinas Pengairan diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan koordinasi rutin untuk sharing program untuk membahas :
  - Planing program yang berkaitan dengan irigasi
  - Progress kegiatan yang berkaitan dengan irigasi
  - Feed back dari pihak pemerintah dan Tirta
  - Plan of action (rencana dan tindak lanjut) program kedepan.
- b. Dinas Pengairan diharapkan bisa memfasilitasi antara HIPPA/GHIPPA, Pengusaha dengan BBWS Bengawan Solo, dan UPT PSDA terkait legalitas dan perizinan irigasi pompa agar alokasi air untuk irigasi pertanian bisa berkelanjutan.
- c. Memberikan masukan teknis kepada Dinas Pengairan dalam hal perencanaan teknis dan penyusunan anggaran pembangunan sarana irigasi khususnya di daerah bantaran Bengawan Solo agar aliran air dari pompanisasi bisa optimal dan mengalir lancar tanpa hambatan.
- d. Memberikan masukan teknis kepada Dinas Pengairan agar program normalisasi sungai yang masih dilakukan dengan cara konvensional/tradisional menjadi lebih modern, dan membangun /memperbaiki saluran irigasi sekunder serta memastikan adanya pemeliharaan yang berkelanjutan.



Dinas Pengairan akan melaksanakan perluasan embung di Dusun Dongi Desa Ngadiluhur Kec. Kedung Adem untuk mencukupi kebutuhan air persawahan

### 3.3.5.6 Dinas Pertanian

Berdasarkan rekapitulasi penggunaan lahan tahun 2014, jumlah total lahan pertanian 77.887 Ha, terdiri dari lahan sawah yang belum teririgasi adalah 41.222 Ha. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa masih terdapat lahan sawah yang belum teririgasi yang luasnya 41.222 Ha. Luang perluasan area irigasi yang jauh dari Bengawan Solo melalui irigasi Bengawan Solo sangat diharapkan untuk keberlanjutan.



Salah satu cara umum adalah dengan membangun sarana irigasi, memberikan bantuan untuk penyuluhan kepada petani, dan membangun HIPPA. Selain itu, Dinas Pertanian juga berperan dalam upaya

meningkatkan ketahanan pangan dengan mengembangkan sumber pangan; memanfaatkan dan mengembangkan

Normalisasi Saluran Desa Talun Kec. Sumberejo oleh Dinas Pengairan

Pembuatan Embung Desa Prangi Kec. Padangan oleh Dinas Pengairan

mandirian ini.

Dalam mendukung layanan irigasi, beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah (i) melakukan pembinaan dan pemberdayaan HIPPA, (ii) memberi bantuan sarana dan prasarana JIUT/JIDES di setiap tahun anggaran dengan mekanisme berkelanjutan, (iii) memberikan bantuan berupa seperangkat sarana pompanisasi tahun 2014-2015 untuk mendukung irigasi pertanian bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran Sungai Bengawan Solo, (iv) memberikan bantuan berupa seperangkat sumur bor untuk mengatasi kekeringan sawah tahun 2015 bagi masyarakat yang jauh dari Sungai Bengawan Solo. Yang terakhir, (v) Dinas Pertanian juga memberikan penyuluhan kepada Gapoktan/Kelompok Tani, dan (vi) rencana memberikan subsidi/asuransi gagal panen untuk petani.

Ada beberapa bidang di Dinas Pertanian yang membidangi irigasi dan prasarana pertanian dan relevan dengan Program TIRTA. Pertama adalah Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian melalui Seksi Pengelolaan Lahan dan Air. Bidang ini mengelola program penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, khususnya pengembangan jaringan irigasi JIUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani), JIDES (Jaringan irigasi Desa), dan bantuan pompa. Bidang selanjutnya di Dinas Pertanian yang relevan adalah Bidang Produksi yang menangani Asuransi Gagal Panen untuk petani. Bidang terakhir yang relevan dengan TIRTA adalah Bidang SDM (Sumberdaya Manusia), yang menangani tentang database Penyuluh Pertanian, dan Data Kelompok Tani.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertanian dibantu UPTD-UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sebagai pelaksana harian yang menjalankan tugas teknis operasional dinas di lapangan. Di Bojonegoro terdapat 29 UPTD namun hanya 14 UPTD yang mencakup daerah di bantaran Sungai Bengawan Solo, yaitu:

1. UPTD Pertanian Kecamatan Baureno
2. UPTD Pertanian Kecamatan Balen
3. UPTD Pertanian Kecamatan Bojonegoro
4. UPTD Pertanian Kecamatan Kanor
5. UPTD Pertanian Kecamatan Kalitidu
6. UPTD Pertanian Kecamatan Dander
7. UPTD Pertanian Kecamatan Kapas
8. UPTD Pertanian Kecamatan Kasiman
9. UPTD Pertanian Kecamatan Trucuk
10. UPTD Pertanian Kecamatan Malo

11. UPTD Pertanian Kecamatan Padangan
12. UPTD Pertanian Kecamatan Purwosari
13. UPTD Pertanian Kecamatan Ngraho
14. UPTD Pertanian Kecamatan Margomulyo

Dinas pertanian memiliki keterkaitan dengan berbagai Dinas lainnya di Kabupaten. Dinas Pertanian bersama dengan Dinas Pengairan berkoordinasi untuk menentukan efektifnya pembangunan JITUT/JIDES. Kerjasama dengan Bappeda dan Dinas Pengairan dilakukan untuk membentuk dan memperkuat GHIPPA. Kerjasama Bappeda dan Dinas Pengairan dilakukan untuk mengadakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan terkait irigasi dan pertanian. Selain dengan SKPD-SKPD lain di Kabupaten, Dinas Pertanian juga bermitra dengan kontraktor swasta/pihak swasta untuk melaksanakan pembangunan fisik/pengadaan barang jasa. Proses pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan cara lelang terbuka lewat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau penunjukan langsung, khususnya untuk sarana dan prasarana irigasi dan alat mesin pertanian dan pompanisasi.

Kelompok Tani/HIPPA bisa mengakses berbagai bantuan dan program Dinas Pertanian. Untuk itu ada beberapa prosedur pengajuan yang harus dipenuhi Kelompok Tani/HIPPA yaitu membuat proposal yang diusulkan melalui UPTD atau melalui Mantri Pertanian/PPL kepada Pihak Dinas terkait. Setelah dilakukan Seleksi CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), ditentukan lokasi terpilih dan dikuatkan dengan SK Bupati Kelompok Penerima Bantuan, dilanjutkan dengan proses pengadaan tender melalui Rekanan Pihak ke 3 (CV, UD, dsb) untuk pengadaan konstruksi jaringan irigasi atau pompanisasi. dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi/pompanisasi

Program Dinas Pertanian tahun 2015 yang berkaitan dengan irigasi dan pertanian di Kabupaten Bojonegoro adalah penyediaan sarana produksi pertanian antara lain;

- a) JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa). JITUT adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier pada jaringan irigasi pemerintah sedangkan JIDES (Jaringan Irigasi Desa), adalah jaringan irigasi berskala kecil terdiri dari bangunan penangkap air, saluran dan bangunan pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Selain program JITUT dan JIDES,
- b) Pompa Air - Dinas Pertanian juga menyalurkan bantuan Pompa Air sebanyak 36 Unit berbasis Listrik.
- c) Jalan Usaha Tani - Selanjutnya Dinas Pertanian juga memfasilitasi pembangunan Jalan Usahatani (JUT). JUT adalah jalan pertanian yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan). Jalan Usaha Tani digunakan oleh masyarakat untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. Sebagian besar jalan usaha tani masih berupa tanah atau berlapis kerikil, namun di beberapa tempat sudah dibangun jalan-jalan usaha tani yang beraspal.

Program Pompanisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang telah dilaksanakan tahun 2015 diantaranya ada di beberapa lokasi survey Tirta, yaitu Desa Kedungprimpen (Kec. Kanor), Desa Rendeng (Kec. Malo), Desa Trucuk, dan Desa Tulungrejo (Kec. Trucuk). Sedangkan Program JITUT/JIDES Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang telah dilaksanakan tahun 2015 diantaranya ada di beberapa lokasi survey Tirta, yaitu Desa Rendeng, Desa Tinawun, Desa Banaran dan Desa Petak (Kec. Malo), Desa Nguken dan Desa Sidorejo (Kec. Padangan), Desa Tulungrejo (Kec. Trucuk).

Program Pompanisasi Berbasis Listrik yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menggunakan dana APBD 2014 adalah:

1. Pompanisasi Berbasis Listrik Desa Kliteh Kecamatan Malo Bojonegoro dengan anggaran Rp. 2.631.977.000,- oleh PT. Udati Jaya Abadi

2. Pompanisasi Berbasis Listrik Desa Banjarjo Kecamatan Padangan dengan anggaran Rp. 340.000.000,-
3. Pompanisasi Berbasis Listrik Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo dengan anggaran Rp. 375.741,000,-



Pompanisasi Berbasis Listrik Bantuan Dinas Pertanian 2014 di Desa Kliteh Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

Menurut Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2016 fokus program diarahkan pada pada bantuan Sumur Bor, khususnya untuk daerah-daerah yang jauh dari Sungai Bengawan Solo agar mendapatkan pengairan untuk lahan sawahnya.

Untuk mendukung pembangunan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pertanian Bojonegoro bekerjasama dengan pihak eksternal seperti IPB dan FAO. Dengan IPB (Institut Pertanian Bogor), Pemerintah Bojonegoro melaksanakan Program Cyber Extension (Cybex) dengan memanfaatkan internet menampung keluhan petani sejak dua tahun lalu sebagai daerah endemic hama wereng dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh FAO (Food and Agriculture Organization). FAO (Food and Agriculture Organization) atau Badan Pangan dan Pertanian PBB yang membidangi masalah pangan mengadakan “Pelatihan Menanam Padi”, tentang cara menanam padi pada musim kemarau dan cara mengantisipasi tanaman padi terserang hama wereng. Sebanyak 200 orang peserta mengikuti pelatihan ini dan berasal dari 4 Kelompok Tani di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dari seluruh Indonesia, FAO hanya melaksanakan program ini di 8 Daerah, dan dua diantaranya ada di Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi dan Bojonegoro (Desa Bendo).

Selain pelatihan bertanam padi dan mengendalikan hama wereng, FAO juga mengembangkan tanaman tumpang sari. Menurut resume FAO tanaman tumpangsari selain bernilai ekonomis juga menghasilkan hama lain yang tidak mengganggu tanaman padi, bahkan menghasilkan zat yang menghambat hama wereng. Sehingga muncul program tanam bunga kenikir dan bunga matahari, yang hama nya bisa menghambat perkembangbiakan hama wereng sekaligus mengembalikan ekosistem. FAO melanjutkan programnya berupa pelatihan rutin setiap hari Selasa dengan mendatangkan pakar pertanian, juga bantuan berupa laboratorium untuk menuju program organic.

Dinas Pertanian juga akan memberikan asuransi gagal panen untuk petani, namun masih sebatas sosialisasi program. Sosialisasi 300 undangan/peserta yang terdiri dari KUPT (Kepala UPT), PPL Se-Kabupaten Bojonegoro, Danramil, dan Babinsa Jajaran Kodim 0803 Bojonegoro. Penyediaan asuransi terhadap komoditas padi dilakukan dalam rangka pencapaian target Upaya Khusus (UPSUS) swasembada pangan di Kabupaten Bojonegoro yang salah satu usahanya adalah melalui perlindungan terhadap gagal panen. Selanjutnya, kerjasama akan dilakukan antara Direktorat Pembiayaan Pertanian Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian) Kementerian Pertanian RI dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Target luas lahan persawahan di Kabupaten Bojonegoro, yang akan mendapat Asuransi seluas 30.000 Ha.

Menurut perwakilan dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), asuransi ini untuk 1 kali musim tanam (MT) dengan pembayaran premi sebesar Rp 180.000,-/Ha/MT. Pembayaran 80% (Rp 144.000,-/Ha/MT) adalah bantuan premi dari Kementerian Pertanian RI dan 20% oleh swadaya petani atau sekitar Rp 36.000,-/Ha/MT. Ganti rugi diberikan apabila terjadi banjir, kekeringan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi dengan kondisi persyaratan

umur tanaman setelah melewati 10 hari setelah tanam dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000,-/Ha/MT.

Persyaratan petani mendapat ganti rugi bila usaha taninya gagal panen adalah petani harus bersedia mengikuti rekomendasi teknis usahatani yang baik, petani harus tergabung dalam kelompok tani aktif; petani memiliki lahan atau menggarap lahan sawah irigasi dengan luas maksimal 2 Ha, petani memiliki lahan yang terletak di wilayah sentra produksi padi dan penyelenggaraan UPSUS dan/atau terletak dalam satu hamparan dalam wilayah satu kecamatan atau wilayah irigasi sekunder.

Berdasarkan hasil survey, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi program TIRTA:

- a. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro berperan besar khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan HIPPA, memberi bantuan sarana dan prasarana JITUT/JIDES, pompanisasi irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT).
- b. Mendukung Dinas Pertanian untuk lebih intensif memberikan penyuluhan kepada petani, dan antisipasi gagal panen dan turunnya hasil produksi saat panen serta kestabilan harga gabah, penanggulangan hama penyakit, efektifitas penggunaan pupuk, obat-obatan dan sarana produksi usahatani lainnya.
- c. Dinas Pertanian diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan koordinasi rutin untuk sharing program untuk membahas planing program dan kajian teknis pompanisasi dan saluran irigasi (spect dan kapasitas pompa, efektifitas pompa, letak dan posisi pompa, dsb), agar bantuan pompa yang diberikan kepada masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik.
- d. TIRTA harus bersinergi dengan Dinas Pertanian tentang teknis irigasi dan layanan pompa untuk meningkatkan layanan irigasi.

Dinas Pertanian dan pihak terkait segera membantu merealisasikan asuransi gagal panen untuk tanaman padi, agar mengurangi kerugian petani.

### 3.3.6 SUPPLIER POMPA DAN LAYANAN PERAWATAN

Atas dasar hasil wawancara dengan operator pompa dan pengusaha areal yang ditemukan pada saat pelaksanaan survey didapat beberapa informasi tentang dari mana berbagai pompa, mesin, dynamo serta pipa diperoleh dibeli.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengusaha areal yang melayani kecamatan Trucut- Bojonegoro pak **Haji Untung Basukhi** bahwa beliau membeli pompa dan mesin dari Surabaya (CV.Baja Karya Jl.Raden Saleh Surabaya) serta untuk pipa paralon dapat dibeli di Bojonegoro (CV.Jaya Makmur).

Sedangkan pengusaha areal lainnya pak Haji Achin - Balen/Bojonegoro, menjelaskan bahwa untuk pompa dipesan di producer local di Kabupaten Lamongan (Pak.Haji Aslan, desa Glagah, Kecamatan Lamongan).

Berdasarkan informasi dari kedua pengusaha areal maka team survey mengadakan kunjungan ke lokasi-lokasi tersebut diatas guna mendapatkan informasi tentang rantai pamaran pompa irigasi dan peralatan penunjang lainnya.

Dari hasil survey/ visit didapat beberapa toko / CV yang menjual pompa hasil produksi local seperti:

Tempat	Penjual Pompa	Keterangan
Bojonegoro	UD Hari Diesel, Surya Teknik, Toko Prima Diesel	Menyediakan pompa merek "Intam" dengan ukuran mulai 2 inch hingga 8 inch, sedangkan untuk ukuran diatas 8 inch harus dipesan terlebih dahulu. Tidak ada producer local untuk pompa air irigasi di Bojonegoro
Lamongan	Toko Perkasa Diesel, Sumber Anyar	Sumber Anyar sebagai salah satu producer pompa irigasi yang selama ini memproduksi produk pompa untuk disupply daerah sekitar Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan

		Cepu dan bahkan melayani pesanan pompa untuk daerah Kalimantan dan Irian.
--	--	---

Menurut pemilik Usaha UD Sumber Anyar Haji Aslan, kapasitas memproduksi pompa rakitan local-nya adalah antara 4-5 unit pompa berukuran sekitar 4 inch hingga 8 inch per harinya. Pak Aslan telah memulai usaha pembuatan pompa irigasi sejak awal tahun 1980an dengan brand / merek “Intan” namun saat ini sudah banyak producer pompa local yang meniru/menggunakan merek tersebut.

Distributor pompa juga banyak ditemukan Surabaya sekitar Pertokoan di Jalan Kembang Jepun serta Jalan Semarang seperti pada Toko-toko; CV.Sumber Teknik Jaya, Sumber Rejeki dan Wijaya Sakti.

Di Surabaya ada producer pompa irigasi local merek / brand “INTAM” yang banyak terjual di took-toko alat pertanian di Lamongan, Bojonegoro yakni PT.MBP/UD.Muncul Jaya di Jl.Darmo Harapan II/EA 12 –Surabaya. Menurut Hermanto (Owner) perusahaan tersebut juga yang selama ini memproduksi pompa “INTAM” untuk distributornya yang ada di Jakarta dan daerah lainnya dengan kapasitas dan ukuran bervariasi antara 3 inch hingga 8 inch, sedangkan untuk pompa ukuran lebih besar harus dipesan dari producer pompa dari Cina.

Pompanisasi untuk penyediaan air irigasi juga merupakan program pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian Bojonegoro (15/12/2015) untuk tahun 2015 ini telah terealisasi bantuan pompa untuk 54 desa. Salah satu supplier pompa bantuan pemerintah tersebut adalah PT.Torishima Guna Engineering- Jakarta ([www.torishimaguna.com](http://www.torishimaguna.com)), anggota group Perusahaan Torishima asal Jepang. Produksi pompa dari perusahaan ini dapat kita temui di Malo, HIPPA Banjarjo dan BUMdes Gedongarum.

Perusahaan ini juga telah mengirim General Manager Pak Moh Amin ke Kantor TIRTA Bojonegoro untuk melihat kondisi lapangan sehubungan dengan design produk sertaantisipasi pasar dikemudian hari. Menurut pak Amin perusahaan Torishima memproduksi pompa berdasarkan permintaan konsumen yang disesuaikan dengan luasan areal yang akan dilayani air/kapasitas pompa yang diperlukan serta ketinggian head isap dan head buang atau jarak penyaluran air ke sawah.Berdasarkan data-data tersebut dibuat design pompa, kemudian diproduksi serta diadakan pengujian sebelum dipasarkan. Produk dari perusahaan ini telah dipergunakan untuk pompa irigasi di Kabupaten Rokan Hilir – Riau, untuk mengairi sawah seluas ~ 5000 ha hanya dengan 2 unit pompa.

Produk pompa Torishima dapat diperoleh lewat distributor /agent yang ada di kota-kota besar di Indonesia, dan PT.Torishima juga melayani perbaikan/service, serta pengujian untuk pompa dan mesin2 irigasi.

Lewat General Manager Pak Amin perusahaan ini dapat bekerja sama dengan TIRTA project dalam design dan pengujian pompa irigasi jika dibutuhkan.

Table 17: Daftar Toko Penjual Pompa

No	Nama Perusahaan	Alamat	Contact Number
1	Toko “Surya Teknik”	Jl.Untung Suropati No. 1 Bojonegoro	0353-881-279
2	Toko”Hari Diesel”	Jl.RA Kartini No.20 Bojonegoro	0353-885-977
3	Toko “Prima Diesel”	Jl.Untung Suropati Bojonegoro	

4	Toko “Perkasa Diesel”	Jl.Raya Gresik – Babat Lamongan	0812-3156992, 082257385938
5	UD Sumber Anyar	Jl.Jaksa Agung Suprpto No.63 Lamongan	0812-3102-155
6	CV.Sumber Teknik Jaya	Jl.Kambang Jepun No.28 Surabaya	031-3542850-3542851
7	Toko “Sumber Rejeki”	Jl.Kembang Jepun No.22 Surabaya	031-3555680-3555673
8	Wijaya Sakti	Jl.Semarang No.114 Surabaya	081703772100

### **Perbaikan Pompa / Pump Service Centre**

Dari hasil wawancara dan kunjungan terhadap stasiun pompa yang ada serta hasil interview dengan pengurus HIPPA atau BUMdes mereka sering mengeluarkan Dana yang cukup besar untuk perbaikan dan penggantian suku cadang pompa dan mesin penggerak seperti pada HIPPA Klotok, menurut mereka sering ditemukan adalah kerusakan pada mesin pompa terutama yang menggunakan mesin mobil bekas dan diesel. Untuk kerusakan ringan mereka hanya menggunakan tenaga teknis/montir local namun untuk kerusakan berat mereka membutuhkan tenaga mekanik specials seperti pak Yadi di Lamongan yang sering melayani panggilan service pompa mulai dari daerah Cepu, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Pak Yadi juga mempunyai bisnis tukar tambah / jual beli pompa bekas.

Ada juga pak Harry Suharto, yang mempunyai work shop (Bengkel) di Jl.Mulyosari 157 Surabaya untuk service / modifikasi dan perakitan mesin pompa.

Table 18: Bengkel Servis Pompa

No	Nama Perusahaan	Alamat	Contact Number
1	UD.Jaya Mandiri	Jl.Kembang Jepun No,21 Surabaya	08165430637, 082140647939
2	“Benkel Yadi”	Jl.Gresik, Desa Tritunggal ,Kec.Pucuk – Lamongan	082140329572

### **3.3.7 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)**

PLN menyediakan layanan listrik kepada berbagai jenis pelanggan. Ada dua pilihan pelayanan PLN kepada pelanggan yaitu:

- **Reguler:** merupakan proses seperti pada umumnya, layanan listrik dalam jangka waktu terus menerus dengan tarif reguler sesuai kelasnya terlampir.
- **Jual Beli Sementara Tenaga listrik (JBST):** merupakan layanan yang ditentukan oleh jangka waktu dengan syarat pembayaran EMI (Energi Minimal Instalasi) yang harus dibayar dimuka (1 bulan sebelumnya) sebesar 60% -. Untuk menggunakan jenis layan ini, pelanggan harus menyediakan investasi investasi jaringan sendiri. Listrik hanya akan dibayar jika digunakan (untuk irigasi pertanian belum pernah ada pengajuan, biasanya digunakan oleh kontraktor proyek yang hanya menggunakan secara *temporary* atau beberapa waktu saja), namun tariff yang dikenakan pada pelanggan lebih tinggi daripada tarif reguler.

PLN pada umumnya juga memberikan pelayanan listrik untuk irigasi, kalau secara pribadi pelanggan bisa datang langsung ke PLN untuk melakukan pengajuan permohonan. Namun apabila pengajuan permohonan listrik adalah Program dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait, maka dinas terkait yang mengajukan permohonan ke PLN. PLN kemudian melaksanakan survey lokasi untuk menentukan apakah memerlukan tambahan jaringan atau tidak. Selanjutnya PLN membuat Rancangan Biaya (RAB) untuk menguji kelayakan teknis. Setelah semua proses disetujui, PLN lalu melakukan pelaksanaan tender dan mencari vendor untuk pengadaan material dan pengerjaan layanan listrik.



Figure 6: PLN Bojonegoro

Persyaratan pengajuan permohonan listrik kepada PLN adalah sebagai berikut;

- Melakukan pendaftaran bisa on line melalui website resmi PLN atau datang ke kantor PLN setempat.
- Mengisi formulir pendaftaran Pasang Baru (PB) atau Tambah Daya (TD)
- Fotokopi KTP/SIM
- Fotokopi Rekening Terakhir bagi pelanggan PD (Perubahan Daya)

Sesuai UU No. 30 tahun 2009, semua pelanggan harus mempunyai SLO (Sertifikat Laik Operasi). SLO dikeluarkan oleh PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional) atau Penyedia Jasa Sertifikat Laik Operasi. Biaya SLO adalah 25 rupiah dikalikan daya yang dibutuhkan. Pengurusan SLO bisa dilakukan di kantor PLN.

Table 19: Rincian Biaya Pasang Baru Listrik Pra-Bayar

450 VA	Rp. 421.000,-
900 VA	Rp. 843.000,-
1300 VA	Rp. 1.218.000,-
2200 VA	Rp. 2.062.000,-
Daya > 2200 VA	Rp. 969,- / VA

\*\*\* Belum termasuk biaya instalasi, SLO, materi, administrasi PPOB dan Token Perdana

Untuk pemasangan peralatan listrik (travo, dinamo dll) dilakukan oleh instalasi listrik non PLN, sedangkan PLN hanya menyediakan Daya dan Kwh meter selebihnya investasi di tanggung oleh pelanggan.

Jika lokasi rencana belum ada jaringan dan memerlukan perluasan jaringan/penambahan material lain, maka PLN perlu melakukan survey terlebih dahulu. Setelah survey dilakukan, PLN menentukan RAB untuk mengetahui kelayakan teknis dialiri listrik. Jika dinyatakan layak maka ada proses menunggu konfirmasi. Jika dinyatakan tidak layak, maka pemasangan menunggu rencana berikutnya.

Table 20: Standard Waktu Pelayanan

Tanpa perluasan jaringan	5 hari
--------------------------	--------

Dengan perluasan jaringan tegangan rendah	15 hari
Dengan perluasan jaringan tegangan menengah	40 hari
Dengan perluasan jaringan tegangan menengah > 10 gawang	100 hari

Tarif listrik per Kwh terbagi atas kelas-kelas, (i) Sosial, (ii) Rumah Tangga, (iii) Bisnis, (iv) Industri dan (iv) Pemerintah. Untuk pompa air irigasi termasuk dalam kelas Bisnis (B2).

Untuk Prosedur pembayaran atau tarif listrik, PLN menerapkan dua metode pembayaran:

- **Pasca bayar:** pembayaran dibatasi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan dan dikenakan sanksi denda 3 % dari tagihan, apabila sampai dengan tanggal 30 belum dibayar, tanggal 1 denda akumulatif 6 % serta pencabutan sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani, apabila 60 hari setelah saluran listrik diputus tidak ada pembayaran dilakukan bongkar rampung (bongkar total), apabila pelanggan ingin mendapatkan saluran listrik harus mengajukan Pasang Baru (PB)
- **Prabayar:** PLN menyediakan pulsa listrik (nilai token tersedia dari minimal 20 ribu hingga 1 juta rupiah)

PLN bekerja sama dengan dua asosiasi sub-kontraktor utama yaitu AKLINAS dan AKILI. AKLINAS pernah melakukan pemasangan instalasi listrik untuk Pengusaha H. Untung Basuki di Kecamatan Trucuk dengan daya sebesar 84 Kva dan biaya 94 juta. Selain itu, contoh dari pengalaman lapangan yang diberikan oleh AKILI sebagai berikut. Untuk mengairi areal seluas 100 ha biasanya menggunakan dynamo dengan kapasitas 40 – 50 HP dan kapasitas pompa 12 – 14 dim. Namun pada prinsipnya instalasi listrik harus mempertimbangkan jarak gardu induk dengan layanan, dan tentu saja memerlukan survey lapangan dalam menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya. Pemasangan dynamo bisa disediakan oleh pihak instalasi atau disediakan sendiri oleh pelanggan.

Kantor PLN di Bojonegoro yang melayani basis wilayah berdasarkan Rayon setempat (8 Rayon) adalah sebagai berikut:

Table 21: Alamat Kantor PLN Berdasarkan Rayon

No.	Unit Pelayanan	Alamat	Telp.
1.	Rayon Sumberejo	Jl. K.H Hasyim Ashari No. 3 Bojonegoro	(0353) 888270
2	Rayon Bojonegoro Kota	Jl. Teuku Umar No.3 Bojonegoro	(0353)-883666
3	Rayon Padangan	Jl. Dr. Sutomo No.4 Padangan	(0353)-551220
4	Rayon Tuban	Jl. AKBP Suroko no.36 Tuban	(0356)-323731
5	Rayon Jatirogo	Jl. P.B Sudirman Jatirogo	(0356)-552015
6	Rayon Brondong	Jl. Raya Paciran Km 35, Paciran-Lamongan	(0322)-663038
7	Rayon Lamongan	Jl. Veteran NO. 36, Lamongan	(0322)-321500
8	Rayon Babat	Jl. Raya Plaosan No.73 Babat	(0322)-451196

PLN hanya menyediakan listrik dan KWH meter, apabila pengusaha/petani ingin membangun saluran listrik harus melaksanakan instalasi listrik dengan mendaftarkan rencana instalasi listriknya. Kemudian PLN melakukan survey ke

lokasi, melakukan negosiasi harga dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tergantung lokasi, dan kebutuhan instalasi listrik (pemasangan kabel dan panel). Seluruh proses ini membutuhkan waktu 1-2 hari selesai.

Table 22: Contoh RAB Instalasi Listrik

Jenis	Harga	Satuan
Tiang	3.985.400	unit
Terminal & Tiang	173.250	unit
Kabel Twist	7750	M
Aksesoris Kabel	166.700	Unit
Penyambungan	16.700	M
Tarik Kabel Udara	2750	M
Tap Konektor	14.500	Buah
Panel Box	3.447.700	Set
Penyambungan Daya	77.600.000	80000 kva
Uang Jaminan Pelanggan	24.000.000	80000 kva
Jumlah	109.414.750	

Untuk menentukan daya dynamo yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu stasiun pompa, bisa menggunakan rumus sebagai berikut  $P = V \cdot I$

P : Daya listrik dengan satuan Watt (W)

V : Tegangan listrik dengan satuan Volt (V)

I : Arus listrik dengan satuan Ampere (A)

Contoh jika diketahui misalnya besar arus listrik 13,6 Ampere dan Voltase 220 V, daya listrik Dynamo (P) adalah :  $220 \times 13,6 = 2992$  watt dibulatkan 3000 watt

Dynamo motor biasanya menggunakan satuan Horse Power (HP), , bila dikonversi dalam satuan PK:

1 HP = 1 PK = 750 Watt

4 HP = 4 PK = 3000 Watt

40 HP = 40 PK = 30.000 Watt

Misalnya Dynamo 40 HP memiliki daya 30.000 Watt tegangan listrik 220, kuat arusnya (I) adalah  $P / V$

$$= 30.000 / 220$$

$$= 136 \text{ Ampere}$$

Kalau dengan hitungan dan melihat contoh dilapangan, BUMDES Gedongarum dengan Voltase 82.500 VA mampu mengeluarkan daya dengan kapasitas 70.125 Watt (perhitungan oleh pihak PLN).

Melihat keadaan di lapangan saat survey dan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas skema irigasi, maka bisa disimpulkan kebutuhan spesifikasi/kapasitas pompa dan aliran daya sebagai berikut:

Table 23: Analisa dan Rekomendasi Aliran Daya berdasarkan Kebutuhan dan Kapasitas

Kebutuhan	Rekomendasi Kapasitas Pompa dan Aliran Daya yang dibutuhkan
Areal Sawah <25 Ha	Menggunakan 1 dynamo berkapasitas 5 HP (4 KW) dan pompa 6 inch yang mampu mengeluarkan air sebanyak 50 liter/detik. Dan untuk pemasangan instalasi listrik perkiraan cukup dengan aliran daya sebesar 5 KVA
Areal Sawah 50-100	Menggunakan 1 dynamo berkapasitas 15 HP (11 KW) dan pompa 8 inch yang mampu mengeluarkan air sebanyak 100 liter/detik. Dan untuk pemasangan instalasi listrik perkiraan cukup dengan aliran daya sebesar 15 KVA.
Areal Sawah 100 – 200 Ha	Menggunakan 1 dynamo berkapasitas 30 HP (22 KW) dan pompa 12 inch yang mampu mengeluarkan air sebanyak 216 liter/detik. Dan untuk pemasangan instalasi listrik perkiraan cukup dengan aliran daya sebesar 30 KVA.
Areal Sawah 200-300 Ha	Menggunakan 1 dynamo berkapasitas 40 HP (30 KW) dan pompa 14 inch yang mampu mengeluarkan air sebanyak 280 liter/detik. Dan untuk pemasangan instalasi listrik perkiraan cukup dengan aliran daya sebesar 40 KVA.

Perkiraan diatas tidak mutlak, harus diperhitungkan juga lokasi dan jarak jaringan listriknya, serta kestabilan tegangan listriknya. Selain itu, ada beberapa pertimbangan penting lainnya yang juga harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Pastikan kondisi di lokasi terjangkau jaraknya oleh sumber aliran listrik terdekat.
2. Pastikan kondisi lokasi pemasangan pompa dan dynamo, jarak ketinggian muka air dari pompa (Jarak Hisap = M) dan jarak ketinggian air yang akan disalurkan (Total Head = M).
3. Harus mengetahui spesifik pompa yang akan direncanakan, meliputi: dimensi (inch/dim), daya untuk menggerakannya (HP/KW), kapasitas hisap (M) dan kapasitas buang (M).
4. Pastikan juga materi pipa yang akan digunakan (PVC, Galvalum, dll) karena masing-masing bahan materi memiliki "Friction Loss" yang berbeda. Friction loss pipa terjadi karena disebabkan gesekan antara air dengan permukaan dalam pipa, sehingga menimbulkan gaya gesek. Gaya gesek inilah yang menyebabkan hambatan pada tekanan pompa. Besarnya friction loss pipa tergantung dari jenis material, diameter, dan panjang pipa.
5. Untuk saluran yang menggunakan pipa dengan panjang lebih dari 200 m sebaiknya dipertimbangkan penggunaan "Check Valve". Check Valve adalah alat yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja atau agar tidak terjadi reversed flow/back flow. Untuk mengalirkan fluida hanya ke satu arah dan mencegah aliran ke arah sebaliknya. Dalam prakteknya check valve tidak menggunakan handle untuk mengatur aliran, tapi menggunakan gravitasi dan tekanan dari aliran fluida itu sendiri. Fungsinya untuk mencegah aliran balik (backflow). Check Valve sering digunakan sebagai pengaman dari sebuah equipment dalam sistem perpipaan.

### **3.3.8 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I**

Peran Perum Jasa Tirta tidak relevan dengan project TIRTA, itulah mengapa ia tidak termuat dalam peta stakeholder di awal bab. Namun pembahasan mengapa stakeholder ini tidak dianggap relevan perlu di bahas karena perannya tertera didalam dalam Program Design Document sebagai salah satu stakeholder yang relevan.

Jasa TIRTA adalah sebuah BUMN berbentuk Perum, didirikan berdasarkan PP No.5/1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan perubahan PP No.93/1999 kemudian dirubah kembali dengan PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Perusahaan beberapa kegiatan usaha dilakukan oleh Perusahaan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a) Pelayanan air baku untuk air minum, industri pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- b) Penyediaan tenaga listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasa laboratorium kualitas air; dan
- d) Pengembangan SPAM.(Sistim Penyediaan Air Minum)

Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi, sumber daya energi, jasa konsultansi, jasa konstruksi, ekobisnis, pusat pelatihan, usaha pertanian, jasa penyewaan, dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikuasai Perusahaan.

Modal perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Yang dikecualikan dari modal adalah: waduk, bendung, tanggul, terowongan, dan pelurusan sungai.

#### **Latar Belakang Berdirinya Perum Jasa Tirta I**

Latar belakang berdirinya Perum Jasa TIRTA I adalah untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana pengairan menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya air. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut maka aspek operasi dan pemeliharaan (O&P) dari prasarana sumber daya air (SDA) sangat penting untuk menjamin manfaat pelayanan air dan melindungi masyarakat dari daya rusak air.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia sejak 30 tahun lalu (hingga kini) dalam melaksanakan kegiatan O&P adalah keterbatasan dana. Keterbatasan ini mengakibatkan penurunan fungsi prasarana SDA karena mengurangi umur teknis dan unjuk kerja bangunan tersebut. Akibatnya kemampuan menyuplai air guna memenuhi tuntutan berbagai sektor pemanfaat (pertanian, domestik, industri, dan lingkungan) ikut menurun.

Untuk menjawab persoalan di atas, digagas pendirian suatu "badan usaha" yang memiliki tugas pokok mengelola wilayah sungai beserta prasarana SDA yang telah dibangun, sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sektor dapat tersedia secara akuntabel.

Ide pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970-an, setelah selesainya dua bendungan besar di Wilayah Sungai Brantas.

Setelah melakukan studi banding ke beberapa lembaga pengelolaan air dan/ atau prasarana SDA di Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan Perancis pada awal tahun 1980-an, diputuskan untuk mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga pengelolaan serupa di Indonesia.

Dari berbagai usulan yang masuk dan berdasarkan pertimbangan strategis, maka pekerjaan mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahkan kepada konsultan PT Indoconsult yang dipimpin almarhum Prof DR. Sumitro Djojohadikusumo. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik mengenai lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT Indoconsult menyepakati untuk menyerahkan laporan hasil studi kepada Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat oleh DR. Ir Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin Menteri PU disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani wilayah sungai Brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas.

Setelah melalui pembahasan antar departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di Wilayah Sungai Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah PP Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta, sebagai sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkedudukan di Kota Malang.

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP Nomor 5 Tahun 1990, pada tanggal 1 Nopember 1991, lahir Peraturan Menteri PU Nomor: 56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa Tirta 1. Pada Pasal 6 dari peraturan tersebut, Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi:

- Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;
- Pengusahaan air dan sumber-sumber air;
- Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni: perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air serta sumber-sumber air;
- Rehabilitasi prasarana pengairan (sesuai kewenangan perusahaan)

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 93 Tahun 1999 (13 Oktober 1999) yang mengatur keberadaan Perum Jasa Tirta. Sesuai Pasal 2 Ayat (2) dari PP tersebut, ditetapkan Perum Jasa Tirta sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan penyesuaian lingkup tugas pengelolaan SDA serta kegiatan usaha PJT I, maka Peraturan Pemerintah (PP) tentang PJT I perlu disesuaikan yakni menjadi PP No. 46 tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan air dan prasarana SDA di WS Kali Brantas dan WS Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta I berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjaga keseimbangan antara misi pemerintah dan misi perusahaan. Pelaksanaan tugas pokok telah diupayakan peningkatannya secara lebih memadai sesuai RKAP dan Rencana Jangka Panjang (RJP).

Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I

1. Wilayah Sungai Brantas
2. Wilayah Bengawan Solo
3. Wilayah Sungai Toba Asahan
4. Wilayah Sungai Jratun Seluna
5. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

***Perum Jasa Tirta I Divisi Jasa Asa IV Perwakilan Kabupaten Bojonegoro***

Perum Jasa Tirta I yang ada di Bojonegoro adalah perwakilan dari divisi JASA ASA IV hanya sebagai operator pemeliharaan pintu-pintu intake / pengambilan air Bengawan untuk pemanfaatan air bersih/air minum dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan instalasi pengolahan air bersih pihak swasta yang sumbernya diambil dari Bengawan solo sepanjang kabupaten Bojonegoro samapai Babat. Perawatan yang dilakukan juga hanya perawatan minor swakelola, sedangkan untuk perawatan besar dilakukan oleh perum Jasa Tirta I yang berkedudukan di Malang. Perwakilan JASA ASA IV ini juga tidak melakukan pengutipan iuran pembayaran jasa penggunaan air, pembayaran iuran dilakukan langsung di kantor Jasa Tirta yang berkedudukan di Malang.

Kesimpulan ;

- Secara Umum Perum Jasa TIRTA belum melaksanakan perannya dalam penyediaan air irigasi untuk pertanian. Fokus utama mereka saat ini hanyalah pada penyediaan jasa air minum.
- Perum JASA TIRTA I khususnya perwakilan Bojonegoro tidak terkait langsung, karena PERUM JASA Tirta I tidak mengelola intake/pengambilan air untuk pemanfaatan irigasi baik irigasi teknis maupun non teknis.

### 3.4 MODEL-MODEL SKEMA IRIGASI POTENSIL

Dari hasil survey pendalaman potensi wilayah dan pemetaan stakeholder, Tim TIRTA merumuskan lima model skema irigasi potensial sebagai berikut:

No	Model Skema Irigasi	Contoh Areal Sasaran Irigasi	Target Luas Lahan	Penjelasan tentang model
1	Skema Kecil (non-padi)	Tulungrejo dan Trucut	<25 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema irigasi dengan luas lahan sasaran dibawah 25 ha.</li> <li>• Petani mengerjakan komoditi selain padi.</li> </ul>
2	Skema Kecil (padi)	Nguken dan Rendeng	25 - 100 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan skema irigasi dengan luas lahan sasaran antara dibawah 25-100 ha.</li> <li>• Petani mengerjakan komoditi padi.</li> <li>• Jarak sungai dan areal lahan &lt;3km</li> <li>• Perluasan areal irigasi bisa di dalam ataupun lintas Desa</li> <li>• Tingkat ketinggian antara stasiun pompa dan areal lahan relative datar</li> </ul>
3	Skema Sedang dan Lintas Desa (Kedungprimpen)	(Kedungprimpen dan Gedongarum)	100 - 300 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan skema irigasi dengan luas lahan sasaran antara 100-300 ha.</li> <li>• Petani mengerjakan komoditi padi.</li> <li>• Jarak sungai dan areal lahan &lt;5 km</li> <li>• Perluasan areal irigasi lintas Desa</li> <li>• Tingkat ketinggian antara stasiun pompa dan areal lahan relative datar</li> </ul>
4	Skema Besar	Klith Malo	> 300 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan skema irigasi dengan luas lahan sasaran diatas 300 ha.</li> <li>• Petani mengerjakan komoditi padi.</li> <li>• Jarak sungai dan areal lahan 5 – 10 km</li> <li>• Perluasan areal irigasi bisa lintas Desa dalam kecamatan</li> <li>• Ada perbedaan ketinggian antara stasiun pompa dan areal lahan. Sistem penyaluran dari stasiun pompa ke reservoir (bak penampung) lalu dengan gravitasi ke areal lahan.</li> </ul>

### 3.5 PERAN PEREMPUAN DALAM USAHA PADI DAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN IRIGASI POMPA

Sebagai bagian dari kajian pemetaan stakeholder, Tim TIRTA juga mengumpulkan informasi tentang pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam usaha padi serta peran perempuan dalam kelembagaan petani pemakai air di desa<sup>21</sup>. Informasi tentang pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam usaha padi dan irigasi ini akan sangat berguna bagi Tim TIRTA ketika merancang intervensi agar bisa memastikan dampak program nantinya bisa dinikmati secara berimbang oleh perempuan dan laki-laki. Pemahaman tentang pembagian peran perempuan dan laki-laki akan membantu TIRTA menentukan metode monitoring yang tepat untuk mengukur dampak program yang sensitive melihat dampak kepada laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lainnya dalam stakeholder mapping seperti data-data tentang skema irigasi, wadah kelembagaan pemakai air, penyedia jasa layanan air irigasi, stakeholder-stakeholder pendukung jasa layanan irigasi dan usaha tani yang ada di Desa. Tim TIRTA mewawancarai sebanyak 51 laki-laki dan tujuh (7) perempuan tani, serta perwakilan dari delapan (8) wadah pengelola layanan irigasi (HIPPA/BUMDES) yang tersebar di 18 desa Bojonegoro dan Tuban. Walaupun dengan ruang lingkup yang lebih spesifik, temuan tim TIRTA bisa dikatakan senada dengan temuan tim DFAT saat melakukan analisa Gender di bulan Maret-April 2015<sup>22</sup> di wilayah sasaran TIRTA.

Temuan pertama adalah bahwa kontribusi dan peran perempuan seakan-akan tidak terlihat (*invisible*) dalam berbagai tahapan usaha padi. Hasil wawancara dengan para petani laki-laki dan perempuan, ditemukan bahwa peran perempuan sebenarnya cukup besar terutama pada beberapa proses usaha padi seperti saat penyiapan lahan dan penyiangan (pencabutan rumput), proses penanaman padi dan saat pengambilan keputusan penjualan hasil panen. Uniknya pandangan yang sama ini dikemukakan tidak hanya oleh petani laki-laki tapi juga oleh petani perempuan.

Para perempuan tani di desa bisa dibagi dalam dua kelompok, pertama, petani perempuan tidak berbayar yang membagi waktu kesehariannya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan membantu suami dalam berbagai usaha tani. Kedua, kelompok petani perempuan yang selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai buruh tani. Mereka akan bekerja di lahan sawah petani yang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mencabut benih, membersihkan gulma, dan penanaman. Upah yang diterima berkisar antara Rp. 30,000 – 40,000 per hari. Berbeda dengan temuan tim DFAT, tim TIRTA tidak menemukan ada perbedaan upah harian antara buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki. Kemungkinan perbedaan upah terjadi apabila buruh tani perempuan memilih bekerja hanya setengah hari dibandingkan laki-laki yang bekerja sehari penuh. Untuk upah setengah hari kerja, buruh tani perempuan menerima upah sekitar Rp. 25,000. Dari pengelompokan ini jelas terlihat bahwa di sebagian keluarga tani penghasilan pertanian tidak hanya berasal dari lahan yang di olahnya tapi juga dari hasil upah bekerja di lahan petani yang lain. Ini harus dipertimbangkan oleh TIRTA saat melakukan pengukuran peningkatan pendapatan keluarga. TIRTA harus mempertimbangkan apakah akan hanya focus pada peningkatan pendapatan dari lahan yang dikerjakan atau juga menghitung penambahan pendapatan karena peningkatan upah sebagai buruh tani. Penambahan luas lahan sawah dan musim tanam otomatis akan berimbas pada peningkatan permintaan tenaga kerja di sawah.

Data pemerintah daerah<sup>23</sup> melaporan jumlah petani perempuan yang sangat rendah dibandingkan dengan petani laki-laki sebagai anggota kelompok tani. Proporsi petani perempuan hanya sejumlah 5% dari total 210,533 petani yang terdaftar di kelompok tani. Bahkan 10 dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, tidak melaporkan sama sekali adanya petani perempuan sebagai anggota kelompok tani.

<sup>21</sup> Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

<sup>22</sup> Scope kajian tim gender DFAT lebih luas tidak hanya mencakup peran perempuan dalam pertanian, tapi melihat juga ekonomi keluarga Gender and Social Inclusion Report, March/April 2015, Gillian Brown (Senior Gender Adviser), Dr. Ir. M. Yanuar J. Purwanto (Head of Agricultural and Rural Infrastructure Division, Center for Research on Engineering Application in Tropical Agriculture), Cynthia Gunawan (Gender Specialist, PRISMA); Astari Widiastomo (Program Officer, DFAT).

<sup>23</sup> Data Kelompok Tani, Dinas Pertanian Bojonegoro - 2015

Peran perempuan dalam keorganisasian petani pemakai air HIPPA dan badan usaha milik desa (BUMDES) penyedia layanan jasa air juga tidak terlihat. Tim TIRTA mengunjungi 8 HIPPA/Bumdes dan dari 8 HIPPA/BUMDES ini, hanya (3) HIPPA/BUMDES<sup>24</sup> yang aktif memberikan jasa layanan air irigasi kepada anggotanya. Lima (5) HIPPA lainnya tidak aktif atau tidak berperan langsung dalam penyediaan jasa layanan air irigasi karena disediakan oleh investor/pengusaha. Dari tiga wadah kelembagaan masyarakat yang aktif, hanya BUMDES Gedongarum yang memiliki perempuan duduk di kepengurusan lembaga sebagai wakil sekretaris dan bendahara. Alasan utama yang dikemukakan mengapa perempuan tidak aktif terlibat dalam kepengurusan adalah karena urusan pengaturan air membutuhkan perhatian setiap saat dan dianggap laki-laki lebih tepat melakukan pekerjaan ini dari pada perempuan. Temuan Tim TIRTA ini mirip dengan temuan Tim DFAT yang hanya menemukan adanya perempuan yang terlibat dalam kepengurusan di dua dari tujuh HIPPA yang dikunjungi.

Rekomendasi<sup>25</sup> untuk diperhatikan saat perancangan, pelaksanaan dan pengukuran dampak intervensi TIRTA sebagai berikut:

a. **Identifikasi beneficiary** yang jelas terutama beneficiary perempuan. Beneficiary (pemanfaat) program TIRTA harus bisa didefinisikan secara jelas sejak awal program. Beberapa tipe pemanfaat program TIRTA adalah sebagai berikut:

- Pemilik lahan yang teririgasi dan mengerjakan lahan sendiri atau yang hanya menyewakan lahannya.
- Penyewa lahan
- Anggota keluarga terutama perempuan yang bekerja di sawah tanpa dibayar ataupun yang menerima upah sebagai buruh tani di sawah orang lain.
- Pejabat pemerintah desa, yang menerima tanah bengkok, mengolah dan mendapatkan manfaat dari hasil panen.
- Investor / Pengusaha Areal
- Para karyawan / pekerja para Pengusaha ataupun HIPPA/BUMDES.
- Pengurus HIPPA / BUMDES yang mendapatkan manfaat dari honor ataupun pembagian sisa hasil usaha di saat panen / akhir tahun (khusus BUMDES).

b. **Peningkatan pendapatan pertanian dan kemungkinan adanya Trade offs, dan Opportunity Cost.**

Peningkatan pendapatan dari usaha padi akan bermanfaat untuk seluruh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Laporan Assessment DFAT menyarankan agar TIRTA memonitor dan memahami dinamika yang akan mungkin terjadi seperti *trade off* dan *opportunity cost* ketika program TIRTA sukses membantu keluarga tani memperluas lahan sawah dan/atau menambah musim tanam.

Trade off terjadi ketika anggota keluarga terutama perempuan yang memiliki mata pencaharian lain dan secara teratur mengirimkan uang membantu keluarga harus meninggalkan pekerjaannya untuk membantu mengerjakan lahan sawah. Dampak dari penambahan luas lahan sawah dan musim tanam, keluarga membutuhkan tenaga tambahan untuk mengerjakan lahan. Akibatnya, anggota keluarga, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki jenis pekerjaan lain, harus meninggalkannya dan membantu mengerjakan lahan sawah.

Opportunity cost terjadi apabila anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, harus memilih bekerja di lahannya dan tidak mengambil kesempatan mendapatkan sumber penghasilan lain yang ada di luar lahan sawah seperti misalnya kesempatan bekerja di pabrik-pabrik.

Dari wawancara tim TIRTA dengan para petani, kebanyakan mereka sebenarnya tidak terlalu bergantung pada anggota keluarga sendiri dalam mengerjakan lahannya. Sebagian besar petani mempekerjakan buruh tani untuk membantu dalam berbagai tahapan-tahapan usaha padi yang tidak bisa dilakukannya sendiri, misalnya; pengolahan lahan dengan traktor, pencabutan benih padi, penanaman, penyiangan, hingga panen. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan *trade off* dan *opportunity cost* ini tidak akan terjadi karena dalam prakteknya, para petani telah terbiasa membayar buruh di berbagai tahapan usaha taninya. Namun, tim TIRTA tetap harus memonitor kemungkinan dinamika-dinamika ini terjadi.

c. **Mendorong peran perempuan dalam berpartisipasi dan menikmati manfaat dari irigasi**

---

<sup>24</sup> BUMDES Kedungprimpen, BUMDES Gedongarum, HIPPA Klotok

<sup>25</sup> Rekomendasi yang dipaparkan di sini mengadopsi sebagian besar rekomendasi yang ada dalam laporan tim gender DFAT

Tim DFAT mengidentifikasi bahwa tantangan utama terbesar perempuan untuk lebih berpartisipasi dan menikmati manfaat irigasi adalah norma gender yang ada di masyarakat yang mengakibatkan peran dan kontribusi perempuan seperti tidak terlihat (*invisible*). Salah satu contoh utama adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai pengurusan HIPPA / BUMDES. Tim TIRTA disarankan untuk tidak serta merta menerima dan mengikuti norma gender yang ada di masyarakat ini akan tetapi harus terus mempertanyakan norma yang berlaku dan aktif berupaya mencari jalan untuk membuka partisipasi perempuan misalnya menjadi pekerja / karyawan dari para investor ataupun menjadi anggota penting dalam badan kepengurusan HIPPA / BUMDES.

### 3.6 ORANG-ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (PEOPLE WITH DISABILITIES)

Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari 154 negara di dunia yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)* pada bulan Mei 2015. Dalam konteks bantuan luar negeri Australia, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), mengembangkan suatu kerangka strategi<sup>26</sup> untuk memandu program-program yang didanai DFAT agar mendukung resolusi PBB ini.

Kerangka Strategi DFAT menjabarkan tiga tujuan utama yaitu; a) meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan orang-orang berkebutuhan khusus, b) mengurangi kemiskinan orang-orang berkebutuhan khusus, dan c) meningkatkan kesetaraan orang-orang berkebutuhan khusus dalam setiap aspek kehidupan publik termasuk pelayanan dasar, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai tiga tujuan ini, dua pendekatan kembar dilakukan yaitu, *pertama*, pendekatan mainstreaming, adalah pendekatan yang secara aktif melibatkan orang-orang berkebutuhan khusus sebagai peserta atau beneficiary dari berbagai upaya pembangunan di semua sektor pembangunan. *Kedua*, pendekatan terfokus, adalah pendekatan yang menekankan pada rancangan inisiatif pembangunan yang bisa bermanfaat langsung untuk orang-orang berkebutuhan khusus.

Dalam dokumen strateginya, DFAT mengartikan orang-orang berkebutuhan khusus sebagai orang-orang yang secara jangka panjang atau episodik memiliki keterbatasan indrawi, intelektual, mental dan fisik dan dengan ditambah hambatan-hambatan lainnya secara keseluruhan membatasi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif secara setara dalam masyarakat. TIRTA sebagai salah satu program pembangunan yang didanai DFAT harus memperhatikan hal penting ini dan mencari peluang untuk mendukung strategi DFAT dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang berkebutuhan khusus.

Untuk bisa melaksanakan strategi DFAT, TIRTA harus memahami konteks daerah sasaran program secara baik dan situasi orang-orang berkebutuhan khusus. Sebagai bagian dari proses stakeholder mapping, tim TIRTA juga mengumpulkan informasi-informasi tentang orang-orang berkebutuhan khusus. Tujuan dari pengumpulan informasi terkait orang-orang berkebutuhan khusus adalah; a) memahami keberadaan (eg. jumlah, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian) orang-orang berkebutuhan khusus di wilayah sasaran TIRTA baik di tingkat kabupaten maupun desa-desa calon sasaran program TIRTA, b) mencari apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan orang-orang berkebutuhan khusus, c) memahami usaha-usaha produktif yang dilakukannya, dan seberapa besar peran mereka di bidang usaha padi dan layanan irigasi pompa, dan yang terakhir d) memahami hambatan-hambatan yang dihadapi orang-orang berkebutuhan khusus dalam berbagai usaha produksi. Berikut adalah berbagai temuan-temuan tim TIRTA terkait orang-orang berkebutuhan khusus.

Di ranah lingkungan kebijakan, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih belum mempunyai kebijakan khusus baik berupa Peraturan daerah, Keputusan Bupati maupun Instruksi Bupati terkait Disabilitas hanya sebatas himbuan Bupati kepada jajarannya agar memperhatikan juga kebutuhan kaum disabilitas. Biasanya kaum disabilitas diundang pada acara rutin temu wicara/tatap muka jajaran pemkab untuk mendengarkan masukan/ keluhan dari penyandang disabilitas melalui Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (HDKB).

---

<sup>26</sup> DFAT, *Development for All 2015-2020 Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program. May 2015*

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui SKPD terkait Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) sudah secara rutin mendata masyarakatnya yang menyandang status disabilitas. Dari data tahun 2014 yang di terbitkan tercatat sejumlah 4,015 orang (1,752 perempuan) penyandang disabilitas, dan 1,398 anak (602 anak perempuan) dengan disabilitas.

Table 24: Data Disabilitas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014<sup>27</sup>

No	Kecamatan	Anak Dengan Disabilitas			Penyandang disabilitas		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kedawan	16	11	27	20	20	40
2	Tambak rejo	28	16	44	-	-	-
3	Kapohbaru	35	17	52	190	143	333
4	Gondang	25	14	39	46	34	80
5	Kedungadem	-	-	-	109	114	223
6	Bubulan	13	4	17	77	38	115
7	Ngasem	40	31	71	74	57	131
8	Ngraho	54	52	108	-	-	-
9	Balen	35	11	46	105	37	142
10	Kasiman	12	8	20	49	44	93
11	Kapas	44	21	65	148	100	248
12	Dender	55	61	116	179	237	416
13	Padangan	22	31	53	145	91	236
14	Malo	15	8	23	18	12	30
15	Sugihwaras	25	22	47	76	54	130
16	Subarrejo	41	38	79	190	135	325
17	Gayam	21	19	40	16	17	33
18	Ngambon	6	6	12	19	13	32
19	Purwosari	-	-	-	151	119	270
20	Trucuk	19	15	34	126	73	199
21	Bojonegoro	68	52	120	54	30	84
22	Sukosewu	26	25	51	-	-	-
23	Baurano	65	39	104	281	207	488
24	Kanor	52	42	94	-	-	-

<sup>27</sup> Disnakertransos Kab. Bojonegoro

No	Kecamatan	Anak Dengan Disabilitas			Penyandang disabilitas		
		L	P	Jml	L	P	Jml
25	Temayang	41	26	67	12	2	14
26	Sekar	14	17	31	116	117	233
27	Margomulyo	9	8	17	43	39	82
28	Kalitidu	15	8	23	20	18	38
	JUMLAH	796	602	1.398	2.263	1.752	4.015

Di kabupaten Bojonegoro telah terbentuk Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (HDKB) yang merupakan wadah bagi kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro (HDKB)<sup>28</sup>. Himpunan ini menjadi mitra pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan program yang menysasar /memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, baik berupa bantuan langsung maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Dengan dukungan Dinas-Dinas seperti Disnakertransos dan Dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro, HDKB telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan-pelatihan (bordir, budidaya perikanan, pengelolaan hasil pertanian, dan budi daya jamur tiram), mengadakan pengajian dan pertemuan rutin anggota.

Di tingkat Desa, tidak semua pemerintah Desa mendata secara teratur keberadaan para penyandang disabilities. Dari pengumpulan data cepat di beberapa desa sample, keberadaan para penyandang disabilitas cukup tinggi bejumlah 100 orang (56 laki-laki dan 46 perempuan) dengan jenis-jenis disabilitas yang beragam seperti tunanetra, tuna wicara, fisik, dan mental. Pada umumnya para penyandang disabilitas sejak lahir, tidak mendapatkan akses pendidikan formal (SLB) dan tidak banyak melakukan kegiatan produktif. Hanya sejumlah kecil (30%) dari responden yang aktif dalam berbagai kegiatan produktif (Lampiran 3). Beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan misalnya bekerja sebagai buruh pabrik dan beternak. Yang menarik adalah Tim TIRTA berhasil bertemu dengan dua penyandang disabilities yang aktif bekerja dalam pelayanan jasa air irigasi di desa yaitu Muslih dan Sucipto. Muslih adalah seorang pengusaha areal di desa Rendeng dan Sucipto adalah pengawas HIPPA di Desa Klotok. Keterbatasan disabilitas tidak menghalangi Muslih dan Sucipto untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Keterbatasan yang dialaminya tidak menghalangi pak Muslih, untuk menjalankan bisnis penyediaan jasa air irigasi untuk para petani di desanya dan juga menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa di Desa Rendeng. Begitupun dengan Sucipto, ia tetap aktif menjalankan tugasnya sebagai pengawas HIPPA.

Table 25: Data Penyandang Disabilitas di 9 Desa Sample

Desa	L	P	Total
Gedong arum	4	1	5
Kedungprimpen	18	17	35
Klotok	1	-	1
Nguken	2	3	5
Petak	3	2	5
Rendeng	2	1	3

<sup>28</sup> Dibentuk berdasarkan akta notaris Didiek Wahyu Indarta SH dengan SK Menkeh tgl 4 Juni 1999 N0.19 Skt Kesbangpol dan Linmas Kabupaten. Alamat Sekertariat di JLn.Sutowijoyo Rt 05/01 Lengkong, kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Ketua HDKB adalah Mochamad Sanawi dan Sekretarisnya adalah Supadmi

Desa	L	P	Total
Simorejo	3	2	5
Sukoharjo	4	3	7
Temu	6	8	14
Trucuk	11	9	20
Grand Total	54	46	100



**Pak Sucipto** berusia 41 tahun adalah Pengawas HIPPA Klotok Kecamatan Plumpang Tuban dari beberapa periode sebelumnya, beliau memang tidak turun langsung ke sawah, namun lebih sering memberikan dukungan pemikiran untuk organisasi HIPPA, membantu mengontrol pekerjaan pengelola layanan irigasi HIPPA Klotok Plumpang Tuban, memberikan laporan kepada Kepala Desa tentang layanan irigasi di desa, setiap malam minggu membantu cek nota-nota pengeluaran HIPPA. Pak Sucipto cukup kritis dalam hal pengelolaan irigasi agar masyarakat petani mendapatkan air yang cukup.

Pada tahun 2002, Pak Sucipto mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangan kanan nya harus diamputasi, namun tidak menjadikan kendala Pak Sucipto untuk beraktifitas sehari-hari. Ia masih bisa mengendarai sepeda motor yang sudah dimodifikasi.

Pak Sucipto belum pernah menerima pelatihan atau pendidikan dari pemerintah setempat (Tuban), beliau berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk kaum disabilitas.

Ada beberapa implikasi dari temuan-temuan diatas untuk program TIRTA. Pertama, melihat jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi ditiap-tiap desa, akan besar kemungkinannya bahwa keluarga dari para penyandang disabilities juga akan menjadi penerima langsung dari layanan jasa irigasi. Untuk itu TIRTA sebaiknya membangun system monitoring yang tidak hanya menganalisa dampak program TIRTA kepada para petani di desa pada umumnya, tapi harus juga mampu menganalisa/sensitive untuk secara spesifik memonitor apakah dampak peningkatan pendapatan juga bisa dinikmati oleh para penyandang disabilities dan keluarganya. Agar proses monitoring bisa berjalan dengan baik, basis data peserta program harus cukup rinci memuat daftar anggota keluarga, jenis kelamin, mata pencaharian di luar pertanian dan tentunya status disabilitas.

Selanjutnya apabila TIRTA ingin secara khusus merancang kegiatan-kegiatan yang mendorong keterlibatan serta pengembangan kapasitas para penyandang disabilities,sebaiknya berkoordinasi dengan Disnakertrans dan Himpunan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (HDKB) sebagai mitra kerja.

### 3.7 TEMUAN FISIK STASIUN POMPA

Sesuai rancangan Project TIRTA, focus program adalah untuk meningkatkan pendapatan 10,000 petani hingga 60%. Hal ini diperoleh dengan perluasan areal lahan yang diirigasi dengan system pompanisasi, efisiensi pompa dan efisiensi pemakaian air. Survey terhadap berbagai wilayah sasaran TIRTA dengan lebih mengkaji stasiun pompa dibutuhkan untuk mengetahui berbagai aspek teknis guna merancang intervensi pelaksanaan TIRTA.

Survey dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung pada stasiun-stasiun pompa yang berada di 175 desa yang dijadikan target survey sepanjang bantaran Bengawan Solo mulai dari Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan .

Dalam kunjungan ke stasiun pompa tersebut diambil data-data tentang 1) jenis/type , kapasitas dan ukuran pompa, 2) type mesin penggerak pompa serta daya/power yang digunakan dan 3) jenis-jenis pipa atau saluran irigasi yang ada serta jarak dari stasiun pompa ke sumber air juga selisih ketinggian.

Setiap station pompa yang dikunjungi diambil posisi GPS serta foto tentang jenis pompa, mesin dan pipa.

Data-data yang pendukung lain juga dikumpulkan seperti luasan areal yang dilayani oleh setiap stasiun pompa, ada tidak yang melintasi desa dan juga biaya operasional stasiun pompa serta tarif jasa pelayanan air irigasi yang dibebankan kepada petani.

Dalam survey tersebut ditemukan ada sekitar 280 stasiun pompa yang memompa air dari Bengawan Solo untuk mengairi areal sawah-sawah yang terletak di bantaran Bengawan Solo dengan luasan sekitar ~ 20.000 ha<sup>29</sup>.

Berikut adalah ringkasan temuan fisik lapangan terkait stasiun pompa:

### 3.7.1 TYPE, MERK, KAPASITAS, SERTA UKURAN POMPA YANG DITEMUKAN

Hasil survey mengenai pemakaian pompa di stasiun pompa tersebut hampir semua menggunakan pompa Sentrifugal, sedangkan berdasarkan merek pompa ditemukan beberapa merek sebagai berikut:

- Merek Local ; Intan, Intam , Tambak
- Merek Pabrik : Chang Hang, Chang He, Torishima , NS , Niagara , Ebara

Sedangkan berdasarkan type hanya ditemukan 2 type yakni:

- Self Priming (type Box/Kotak); untuk merek seperti NS, Niagara dan Ebara
- Mixed Flow (type Keong); seperti merek Intan, Intam dan Tambak Cina (Chang Hang dan Chang He), dan Torishima.

Mengenai ukuran / diameter pompa yang digunakan adalah ukuran 4 – 6 Inch untuk pompa imbalan dan ukuran 6 - 12 Inch untuk station pompa guna memompa air langsung dari Bengawan.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Table 26: Jenis dan Type Pompa Hasil Temuan Survey Potensi Desa

Perusahaan (Producer )	Series	Type	Capacity	Head	Power Required	Ukuran (Dim)
CHANG HANG	12HBC2-40	Mixed Flow	1035m3/h	2,3 m	80 HP	12 Dim
DPS PUMPS	NS - 100	Self-Priming	450 m3/ha	12 m	2200	12 Dim
DPS PUMPS	NS - 80	Self-Priming	280 m3/ha	7 m	2000	8 Dim
CHANG HE		Mixed Flow	780 m3/h	7 m	22 KW	12 Dim

<sup>29</sup> Lihat Laporan Survey 1

CHANG HE		Mixed Flow	360 m <sup>3</sup> /h	7 m	20 KW	6 Dim
Torishima Pump	ETAN - 200x150-250	Self-Priming	360 m <sup>3</sup> /h	15 m		6 Dim
EBARA Pump	150 SQPB	Self-Priming	360 m <sup>3</sup> /h	8 m	20 HP	6 Dim
PT.MBP	INTAM	Mixed Flow	660 m <sup>3</sup> /h	5.5m	30 HP	8 Dim
			420 m <sup>3</sup> /h	6 m	20 HP	6 Dim
UD Sumber Anyar	INTAN	Mixed Flow	7 – 900 m <sup>3</sup> /h	2 – 15 m	8 – 60 HP	3 – 12 Dim

### 3.7.2 TYPE JENIS/KAPASITAS MOTOR PENGGERAK POMPA

Sedangkan untuk jenis motor penggerak pompa hanya ada dua kelompok yang ditemukan yakni:

- 1) Pompa yang mempergunakan motor penggerak Mesin; ada yang menggunakan mesin mobil bekas dan ada juga yang mempergunakan generator/diesel.
- 2) Pompa yang menggunakan motor penggerak Dynamo dan PLN sebagai penyedia daya listrik.

Hasil survey tidak menemukan pompa yang menggunakan sumber daya lain seperti angin, turbin dan solar panel.

Table 27: Motor Penggerak Pompa (Mesin Diesel)

NO	NAMA DIESEL	TIPE	DAYA
01	DONG FENG (CINA)	S195	13 HP
		ZS 1100	16 HP
		ZS 1115	24 HP
		ZS 1115T/T	26 HP
02	JIANG DONG (CINA)	JD300	30 HP
		ZS 1115	26 HP
03	JIANGFEI (CINA)	S 195	14 HP
		ZS1100	16 HP
		ZS 1115	26 HP
04	YANMAR (JEPANG)	TS 230 H	19 DK
		TF 115 MH-DI	11,5 HP

NO	NAMA DIESEL	TIPE	DAYA
05	DAFA (CINA)	S-195	13,5 HP
06	MITSUBISHI	-	160 PS
07	HONG TONG FANG	S 1100	16 HP
08	TONGFENCO (CINA)	R 180	7,7 HP
09	KUBOTA (jepang)	KND 220 DI	12,51 KW- 22 KW
10	IN-DA (Indonesia)	ZS 1115	24 HP
11	CHANG CHAI	ZS1100	16 PK
12	CHANG SHEN	S195	14 PK
13	MERCEDES	-	-
14	JAGOAN	R180	8HP
15	SWAN (CINA)	R180	8 HP

Table 28: Penggerak Pompa Berbasis Listrik/Dynamo

No	Jenis Dinamo	Spesifik Dinamo
1	Siemen	<p>Seri No : 3-MOT ILE0102-2AB4-4AA4 50 HZ/30KW/1470 RPM</p> <p>Seri No : MEZ 3-MOT 10B64A70-2 40 HP/30 KW/4 POLE</p> <p>Seri No : 3-MOT ILG0253-4AA70-Z 62 KW/4 POLE/50 HZ/1770 RPM</p> <p>Seri No : ILE01022C62 62 KW/4 POLE/50 HZ/1775 RPM</p>
2	Tatung	<p>Seri No : 4-35647 30 KW/40HP/4 POLE/1470 RPM</p> <p>Seri No : 4-35676 37 HP/50 KW/4 POLE/1470 rpm</p>

No	Jenis Dinamo	Spesifik Dinamo
3	Teco	Seri No : H7117115004 40 HP/30 KW/4 POLE/1470 RPM Seri No : P9302632 60 HP/45 KW/4 POLE/1455 RPM Seri : H611A510014 22 KW/ 30 HP/ 380 V/ 2 Pole/ 2930 RPM
4	Bartex	Seri No : Y160M4 15 HP/11 KW/50 HZ/1500 RPM

### 3.7.3 PIPA

Pada umumnya setiap stasiun pompa menggunakan pipa paralon sebagai pengisap air dari Bengawan Solo atau parit/saluran dan kemudian menyalurkan air dan pompa ke saluran air sebelum masuk ke sawah.

Adapun jenis pipa yang dipergunakan adalah pipa PVC merek; **Maspoin, Ruchika dan Wavin** dengan ukuran bervariasi mulai dari 4, 6, 8, 10 dan 12 Inch.

### 3.7.4 KARAKTERISTIK STASIUN-STASIUN POMPA DI DESA-DESA SAMPLE STAKEHOLDER MAPPING

Dalam stakeholder mapping, Tim TIRTA melakukan pendalaman tentang karakteristik berbagai stasiun pompa yang ada di 10 dari 19 desa sample. Berikut adalah spesifikasi teknis dari stasiun-stasiun pompa yang dikunjungi.

NO	DESA (Lokasi)	MESIN	TIPE	KAPASITAS MESIN	KAPASITAS POMPA	LUAS AREAL
01	Kedungprimpen	DINAMO	TATUNG 4-35676	30 KW/ 40 HP	10 DIM	304 Ha
			TATUNG 4-35676		10 DIM	
			TATUNG 4-35676		8 DIM	
02	Gedongarum	DINAMO	TECO H7117115004	40 HP/ 30 KW	10 DIM	500 Ha
			TECO H7122112005	40 HP/ 30 KW	10 DIM	
			SIEMENS MES 3 MOT 10B64A702	40 HP/ 30 KW	10 DIM	
			SIEMENS MES 3 MOT 10B64A702	40 HP/ 30 KW	10 DIM	
			SIEMENS 3MOT ILEO1022AB-44AA4	40 HP/ 30 KW	8 DIM	
03	Sukoharjo	DINAMO	TATUNG 435676	37 KW/ 50 HP	14 DIM	200 Ha- 250 Ha
			TATUNG 435647	40 HP/ 30 KW	12 DIM	
			TIMES	-	14 DIM	

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

NO	DESA (Lokasi)	MESIN	TIPE	KAPASITAS MESIN	KAPASITAS POMPA	LUAS AREAL
04	Leran	DINAMO	SIEMENS	-	TORISHIMA ETAN 6 DIM 15 M, 360 M3/ Jam	20 Ha
05	Klitech	DINAMO	SIEMENS 3-MOT IL602534AA70Z	62 KW	8 DIM	100 Ha
			SIEMENS ILE01022C62	62 KW	8 DIM	
06	Rendeng	DIESEL	JF 2S1115	26 HP	6 DIM	75 Ha
		DINAMO	TECOH61567763046	30 HP/ 22 KW	8 DIM	
		DIESEL	JF	26 HP	6 DIM	
		DIESEL	DONGFENG S1115	24 HP	6 DIM	
07	Tulungrejo	DIESEL	YANMAR TS230H	23 HP	EBARA PUMP MODEL 150 SQPB 6 DIM	-
	SUKRI	DIESEL	-	24 HP	10 DIM	30 Ha
		DIESEL	-	24 HP	6 DIM	
		DIESEL	-	24 HP	6 DIM	
		DIESEL	-	20 HP	6 DIM	
	WINDARTO	DIESEL	-	-	10 DIM	23 Ha
	UNTUNG B	DIESEL	-	-	6 DIM	20 Ha
08	Nguken	DINAMO	CHINA Y 180 L-4	30 HP/ 22 KW	10 DIM	75 Ha
		DINAMO	TECO	30 HP/ 22 KW	10 DIM	
09	Prambonwetan	DINAMO	TECO H611A510014	30 HP/ 22 KW	8 DIM	170 Ha
		DINAMO	TECO H2138509048	60 HP/ 45 KW	10 DIM	
		DINAMO	TECO P9302632	60 HP/ 45 KW	10 DIM	
10	Klotok	DINAMO	-	-	16 DIM	585
		DINAMO	-	-	16 DIM	
		DINAMO	-	-	14 DIM	

## 4. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI UNTUK PROGRAM TIRTA

Berdasarkan temuan-temuan survey, Tim TIRTA merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### 4.1 PENENTUAN BENEFICIARY PROGRAM TIRTA

Beberapa kelompok masyarakat di Desa akan berpeluang untuk meningkat pendapatannya apabila program TIRTA sukses membantu mengembangkan irigasi, misalnya para petani pemilik dan juga menggarap lahannya, petani penyewa lahan, pemilik lahan sawah (yang tidak menggarap), para petani penyedia layanan jasa dan barang seperti petani pengusaha benih, pengusaha traktor, buruh tani dan buruh panen (penebas). Untuk itu identifikasi target sasaran utama program TIRTA menjadi sangat penting. Beneficiary di bagi menjadi dua kelompok; ***Beneficiaries Primer*** dan ***Beneficiaries Sekunder***.

***Direct Beneficiaries*** adalah petani dan keluarganya yang menerima manfaat langsung peningkatan pendapatan sebagai akibat dari peningkatan usaha padi oleh karena adanya perluasan lahan atau penambahan musim tanam. Petani di sini adalah petani yang memiliki pendapatan dari lahan yang dimilikinya atau lahan sewaan. Pada umumnya para petani ini mengerjakan lahan yang kecil seluas rata-rata 0.3 ha, dan sebagian besar berada di bawah cut-off point 150% tingkat kemiskinan nasional, atau hidup dengan penghasilan dibawah USD2 per hari.

Program TIRTA akan memastikan bahwa petani perempuan kepala keluarga dan petani dengan anggota keluarga berkebutuhan khusus termasuk dalam kelompok ini. Tentu saja sistem monitoring program harus secara baik mendata dan memonitornya.

Program TIRTA harus memastikan bahwa daftar peserta program selalu ada dan terupdate secara baik, misalnya menjadi bagian dari proses seleksi skema irigasi yang mengharuskan calon penyedia jasa irigasi (pengusaha dan HIPPA/BUMDES) mengajukan daftar calon petani penerima layanan irigasi terpilah jenis kelamin, memberikan keterangan status petani perempuan kepala keluarga dan petani dengan anggota keluarga berkebutuhan khusus. Daftar peserta yang rinci seperti ini akan memfasilitasi pengukuran dampak program TIRTA.

***Beneficiary Sekunder*** adalah orang-orang yang akan menikmati peningkatan skala usahanya sebagai dampak dari meningkatnya usaha padi / pertanian dari kelompok direct beneficiaris. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini adalah; penyedia jasa dan barang dari usaha padi, misalnya, para penyedia jasa irigasi, pengusaha benih, pengusaha traktor, buruh tani, penebas, dan para penampung panen (tengkulak).

### 4.2 KRITERIA SELEKSI SKEMA IRIGASI

Beberapa kriteria seleksi di bawah bisa dipertimbangkan untuk menjadi calon kriteria seleksi skema irigasi yang akan menerima bantuan teknis program TIRTA.

Table 29: Kriteria Seleksi Skema Irigasi

No	Kriteria	Penjelasan
1	Potensi Fisik Lahan	Potensi lahan yang dianalisa adalah; luas lahan yang akan menerima irigasi, topografi wilayah, akses sumber air (jarak dan ketinggian)
2	Jumlah petani penerima jasa irigasi	Jumlah petani menjadi pertimbangan penting sebab Program TIRTA memiliki target outreach sebesar 10,000 petani. Calon skema irigasi yang memiliki jumlah perempuan kepala keluarga tani dan petani dengan anggota berkebutuhan khusus akan memiliki peluang semakin besar untuk dipilih menjadi calon skema irigasi penerima bantuan teknis TIRTA.

No	Kriteria	Penjelasan
3	Komitmen Perluasan - usulan bersama oleh stakeholder utama di desa dan komitmen anggaran desa.	Expression of Interest harus di usulkan dan ditandatangani oleh perwakilan petani penerima jasa irigasi (Kelompok Tani, HIPPA atau BUMDES) dan Kepala Desa serta calon pengusaha (jika telah ada).  Expression of interest juga harus memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan dan jumlah dana yang telah dialokasikan untuk dukungan irigasi dalam APBDes dan total APBDes untuk tahun anggaran berjalan. Tiga informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan desa berkomitmen mendukung. Keterangan tentang program dan dana dari pemerintah desa untuk irigasi akan menjadi kriteria extra (preferable) ketika Program TIRTA memilih calon skema irigasi.
4	Feasibilitas teknis	Analisa dari survey lapangan akan menentukan apakah calon skema irigasi memiliki feasibilitas teknis yang bisa di intervensi oleh program TIRTA. Feasibilitas teknis mencakup topografi wilayah dan akses pada sumber air
5	Ketersediaan Calon Penyedia Jasa Irigasi	Desa-desa yang telah memiliki atau mengidentifikasi calon penyedia jasa irigasi misalnya; pengusaha, kelompok tani atau HIPPA dan BUMDes akan memiliki potensi yang lebih besar untuk terpilih sebagai penerima bantuan teknis program TIRTA
6	Rendah potensi konflik	Ketika verifikasi lapangan di lakukan tim TIRTA akan melakukan analisa potensi konflik untuk menentukan apakah calon penerima skema irigasi memiliki kerentanan konflik misalnya sengketa sumber air, keengganan nyata dari desa tetangga untuk dilewati saluran irigasi

### 4.3 PROSES SELEKSI SKEMA IRIGASI

Berikut adalah penjelasan tentang tahap persiapan dan proses seleksi skema irigasi program TIRTA;

#### 4.3.1 SOSIALISASI PROGRAM TIRTA DAN KRITERIA DAN PROSES SELEKSI

Walaupun Program TIRTA telah berada di Bojonegoro selama hampir 6 bulan namun peluncuran resmi program belum pernah dilakukan di tingkat kabupaten. Peluncuran program secara formal telah di lakukan di tingkat pemerintah provinsi dan difasilitasi oleh biro kerja sama luar negeri Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pertemuan dengan pihak pemerintah di tingkat kabupaten dilakukan dalam beberapa tahap dengan agenda khusus untuk setiap tahapannya.

##### a) Pengenalan formal Program TIRTA

- Pertemuan perkenalan resmi Program TIRTA bersifat melanjutkan berbagai pertemuan informal yang telah dilakukan tim TIRTA selama ini dengan berbagai kantor pemerintah di tingkat kabupaten. Pertemuan pengenalan ini sifatnya untuk meningkatkan pemahaman pemerintah kabupaten tentang program TIRTA, basis legalitas program, dan sharing informasi tentang kemajuan yang diperoleh dari survey-survey awal TIRTA, dan rencana selanjutnya di tahun 2016. Bappeda harus menjadi leading agency untuk pertemuan ini dengan mengundang Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan, BPMPD, dan BBWS.
- Jika pertemuan pengenalan ini juga melibatkan kantor pemerintah daerah kabupaten lain maka Bappeda Provinsi Jatim harus dilibatkan.

- Yang mewakili pihak TIRTA bisa melibatkan Provincial Manager dari Program PRISMA yang baru saja di tunjuk oleh Direktur Program AIP Rural untuk memimpin proses komunikasi dan koordinasi dari program-program di bawah AIP Rural dengan pihak pemerintah daerah. Oleh karena ini merupakan pertemuan formal pertama antara TIRTA dan Pemerintah Daerah, Sekretariat AIP Rural dan DFAT bisa ikut menghadiri rapat ini. Kehadiran mereka akan bisa membantu tim TIRTA dalam mengklarifikasi seputar basis legal program TIRTA di daerah.
- Output utama dari pertemuan awal ini adalah untuk meluncurkan TIRTA secara formal di daerah dan mendapatkan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi teknis dengan SKPD-SKPKD teknis terkait.

#### **b) Konsultasi dan Pembahasan Kriteria Seleksi**

Berbagai rapat-rapat selanjutnya kemudian dilakukan dengan SKPD-SKPD teknis terkait untuk membahas kriteria dan proses seleksi intervensi TIRTA. Sebelum pertemuan TIRTA harus siap untuk bernegosiasi dengan para SKPD apabila mereka ingin menambah kriteria seleksi atau ingin terlibat lebih mendalam proses pemilihan kriteria seleksi. Bappeda dan BPMPD misalnya bisa saja ingin agar TIRTA lebih memprioritaskan desa-desa dengan BUMDES yang telah mereka damping, Dinas Pertanian bisa saja ingin TIRTA memprioritaskan desa-desa yang menerima pompanisasi seperti di desa Kliteh – kecamatan Malo. TIRTA juga harus mempertimbangkan apakah pemerintah akan ikut terlibat dalam tim seleksi untuk memilih skema irigasi mana yang akan di dukung oleh TIRTA.

### **4.3.2 PROSES SELEKSI SKEMA IRIGASI**

Dengan asumsi bahwa TIRTA dan Pemerintah Kabupaten telah menyepakati kriteria seleksi selanjutnya TIRTA telah bisa memulai proses seleksi skema irigasi. Proses seleksi dilakukan dalam empat langkah;

#### **Langkah 1 – Pengenalan Program ke desa-desa di tingkat Kecamatan.**

Program TIRTA akan melakukan sosialisasi untuk desa-desa di tingkat kecamatan dengan menjabarkan informasi-informasi seperti apa itu program TIRTA, menu bantuan teknis yang akan menjadi bagian dari intervensi, penjelasan tentang Kriteria dan Proses Seleksi, dan format isian proposal Desa.

#### **Langkah 2 – Pengajuan Proposal (expression of interest) dari Desa ke Program TIRTA**

Tidaklah untuk mengharapkan Desa mampu mengajukan suatu proposal yang lengkap, karena itu format isian yang diberikan kepada desa-desa calon pelamar harus sederhana dan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

- a) Surat Pengantar yang ditanda tangani bersama oleh kepala desa dan perwakilan kelompok tani, HIPPA atau BUMDES. Jika *Pengusaha* telah teridentifikasi, maka pengusaha juga bisa ikut menandatangani surat pengantar
- b) Data-data tambahan yang dijadikan lampiran surat pengantar:
  - a. Luasan lahan yang akan di irigasi
  - b. Topografi wilayah
  - c. Informasi Akses sumber air (jarak dan letak sumber air)
  - d. Hambatan yang dihadapi untuk mengembangkan skema irigasi
  - e. Jumlah petani terpilah jenis kelamin dan informasi tentang petani perempuan kepala keluarga dan petani dengan anggota keluarga berkebutuhan khusus
  - f. Informasi APBDes tahun berjalan (Total APBDes, kegiatan-kegiatan dukungan irigasi di desa dan alokasi dana)

#### **Langkah 3 – Proses Seleksi Expression of Interest (shortlisting)**

Tim TIRTA akan melakukan proses seleksi expression of interest dengan memberikan skoring atas kriteria-kriteria seleksi (no 1-3). Proses seleksi expression of interest akan menghasilkan daftar pendek calon skema irigasi calon penerima bantuan teknis program TIRTA. Jika ada desa-desa yang menunjukkan potensi yang besar namun tidak memiliki data yang lengkap di dalam proposal, Tim TIRTA bisa turun ke lapangan dan membantu desa melengkapi data-data yang dibutuhkan.

#### Langkah 4 – Survey Lapangan dan Verifikasi

Berdasarkan daftar pendek calon skema irigasi dari proses seleksi expression of interest, tim TIRTA akan mengunjungi desa-desa dan melakukan verifikasi lapangan dan akan mengumpulkan informasi tambahan tentang;

1. Verifikasi potensi fisik (data gps, data topografi desa dan akses ke sumber air)
2. Feasibilitas teknis
3. Jumlah petani
4. Verifikasi komitmen stakeholder kunci (investor, petani dan pemerintah desa / kecamatan)
5. Ketersediaan dan kapasitas penyedia jasa irigasi (lembaga / pengusaha)
6. Resiko potensi konflik

Dari empat langkah diatas, Program TIRTA akan bisa menentukan calon-calon potensial skema irigasi dan kegiatan program bisa dilanjutkan kepada proses perancangan intervensi.

## 4.4 KOORDINASI DAN PELIBATAN PEMERINTAH

Program TIRTA adalah salah satu anak program AIP Rural yang merupakan program bilateral antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu hubungan dan koordinasi yang baik harus dibangun dengan berbagai level pemerintah. Struktur pengaturan program TIRTA juga mengindikasikan pelibatan yang erat dari Pemerintah di berbagai level, misalnya di tingkat pusat lewat forum pertemuan *Program Coordinating Committee (PCC)* dan forum koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Forum PCC di koordinasikan langsung oleh DFAT sedangkan forum koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten merupakan tanggung jawab Program TIRTA. Koordinasi dengan pemerintah bisa dilakukan dalam beberapa tingkatan sesuai kebutuhan.

Table 30: Jenis-Jenis Strategi Pelibatan Pemerintah

Jenis Pelibatan	Strategi	Kantor Pemerintah Sasaran
Sharing Informasi	Informasi tentang progress implementasi TIRTA selalu diberikan secara teratur. AIP Rural Secretariate mengusulkan untuk menunjuk Provincial Manager dari AIP PRISMA sebagai focal point penyalur informasi program ke Bappeda Provinsi. Program TIRTA di Bojonegoro harus memberikan informasi secara teratur lewat laporan ataupun pertemuan berkala melaporkan kemajuan TIRTA atau mengundang staff pemerintah meninjau implementasi program TIRTA ketika skema irigasi telah mulai beroperasi.	Kantor Bappeda Provinsi – Unit Kerja sama luar negeri  Kantor Bappeda Kabupaten  Dinas Pertanian dan PU Pengairan
Koordinasi dan Konsultasi Teknis	Program TIRTA berkonsultasi dan berkoordinasi dengan SKPD teknis seperti Dinas Pertanian dan Pengairan di tahapan-tahapan penting dalam implementasi program, misalnya saat perumusan kriteria seleksi skema irigasi, dan konsultasi teknis ketika berhubungan dengan asset-aset	Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan dan Balai Besar Bengawan Solo

	<p>pemerintah daerah yang ada di desa (saluran irigasi dan pompa misalnya).</p> <p>Koordinasi teknis diperlukan untuk memaksimalkan sinergi dan sinkronisasi program antara Program TIRTA dan Program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terutama untuk areal irigas model raksasa (&gt;1,000 ha). Ini bisa menjadi entry point dalam upaya membantu pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi program-program pemerintah terkait irigasi di desa.</p> <p>Konsultasi tentang perijinan dan kerangka regulasi tetap dilakukan agar Program TIRTA tidak melangkah keluar dari peraturan pemerintah yang ada.</p>	
<p>Pemerintah terlibat aktif dalam setiap tahapan program</p>	<p>Level 3 adalah pelibatan aktif pemerintah dalam setiap proses keputusan pelaksanaan program TIRTA. Mereka akan terlibat dan ikut mengambil keputusan dalam setiap level penting seperti perencanaan kegiatan tahunan, perumusan kriteria seleksi skema irigasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Program TIRTA.</p>	<p>Diantisipasi tidak dilakukan untuk Program TIRTA</p>

Saat ini dari tiga jenis pelibatan Pemerintah, paling tidak Program TIRTA harus melakukan pelibatan untuk type I dan type II dari Pelibatan Pemerintah. Type ke III, tidak harus dilakukan oleh Program TIRTA sebab pelibatan yang terlalu intense dengan pemerintah malah bisa menjadi *counter productive* karena akan memberikan sejumlah resiko, seperti pembajakan agenda Program TIRTA oleh pemerintah. Padahal, Program TIRTA dimaksudkan untuk mendorong pelibatan aktif sector swasta dalam penyediaan jasa irigasi kepada para petani.

**LAMPIRAN 1 – DAFTAR DESA-DESA SURVEY TAHAP 2**

	Respondents	Location	Jenis Desa	Coordinator	Date of Visit
1	Kedungprimpen	Bojonegoro	Intervensi	Group	10-Nov-15
2	Temu	Bojonegoro	Target Expansion	Group	10-Nov-15
3	Ngoken	Bojonegoro	Intervensi	Dani	16-Nov-15
4	Sukoharjo	Bojonegoro	Intervensi	Agus	16-Nov-15
5	Sidorejo	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	16-Nov-15
6	Gedongarum	Bojonegoro	Intervensi	Agus	17-Nov-15
7	Pomahan	Bojonegoro	Target Expansion	Agus	17-Nov-15
8	Banaran	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	17-Nov-15
9	Ketileng	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	17-Nov-15
10	Rendeng	Bojonegoro	Intervensi	Dani	17-Nov-15
11	Prambonwetan	Tuban	Intervensi	Dani	24-Nov-15
12	Tulungrejo	Bojonegoro	Intervensi	Dani	26-Nov-15
13	Klitech	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	30-Nov-15
14	Trucuk	Bojonegoro	Target Expansion	Agus	30-Nov-15
15	Leran	Bojonegoro	Target Expansion	Agus	1-Dec-15
16	Tinawun	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	1-Dec-15
17	Petak	Bojonegoro	Target Expansion	Dani	2 & 3 Dec 2015
18	Ngujung	Bojonegoro	Target Expansion	Agus	2 & 3 Dec 2015
19	Klotok	Tuban	Learning Site	Dani	29 Dec 2015

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR RESPONDEN

Stakeholder type		no of Respondents
1	Village Respondents Based on Service Provider Type	128
2	Government Agencies	21
3	Pump Suppliers and Repair Shops	14
4	Investors (additional)	6
5	People and Family with Disabilities	32
6	Financial Institutions	5
	<b>Total</b>	<b>206</b>

### STAKEHOLDER INTERVIEWS AT THE VILLAGES BASED ON SERVICE PROVIDER TYPE

#	Service Provider Type	Villages	Total Village	Frmr	Village Head	Village Leader	HIPPA	BUMDES	SP Staff	Investors	P S
1	Pengusaha (<50)	Rendeng, Tulungrejo, Trucuk, Banaran	4	12	3	1	1	1	0	2	
2	Pengusaha (>50-100 ha)	Nguken, Sukoharjo, Ketileng, Prambonwetan, Tinawun, Petak & Ngujung	7	27	5	1	5	0	1	3	
3	Pengusaha (>100)	Klith & Leran	2	6	2	1	1	0	0	1	
4	Bumdes (100 - 500 ha)	Kedungprimpen, Temu, Gedongarum and Pomahan	4	13	3	0	0	7	0	0	
5	HIPPA (>500 ha)	Klotok	1	0	1	0	1	0	8	0	
6	Non-Model but also visited	Malebo, Simo, Mori, Ngumpek, Kandangan, Sidorejo	6	1	0	1	0	0	0	0	
			<b>24</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

#	Service Provider Type	Villages	Total Village	Fmr	Village Head	Village Leader	HIPPA	BUMDES	SP Staff	Investors	P	S
Total												

## GOVERNMENT AGENCIES

#	Name	L/P	Institusi	Jabatan	Contact Person
1	Ajir	L	BPMD Kabupaten Bojonegoro	Kasubid Pemberdayaan Desa	081335677244
2	Imam Wahyudi	L	Dinas Pertanian Bojonegoro	Kaseksi Pengelolaan Lahan dan Air	081330481757
3	Masahid	L	Dinas Pengairan Bojonegoro	Sekretaris	08125960120
4	Faisol Ahmadi	L	Setda Kabupaten Bojonegoro Bagian Hukum	Kasubag Bantuan Hukum	085230369030
5	Madyar Harahap	L	Balai Besar Wilayah Bengawan Solo - Kantor Perwakilan Bojonegoro	Kepala Pelaksana Administrasi	(0353) 893645
6	Dwi Hariningsih	P	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab Bojonegoro	Kepala Bidang Bimbingan Rehabilitasi Sosial	081330455414
7	Suparno	L	Dinas Pertanian Tuban	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura	081359726566
8	Nin Ulfa	P	Dinas Pertanian Tuban	Mantri Pertanian	081259404214
9	Muntaqo	L	Dinas Pertanian Tuban	Kasie Pertanian	085646116966
10	Umi Heni	P	Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	082187113832
11	Dyah Enggarini Mukti	P	Bappeda Kabupaten Bojonegoro	Kasubid Industri, Perdagangan, Koperasi dan Inventarisasi	081259287676
12	Toto	L	Dinas Pertanian	Mantri Pertanian Malo	081390315195
13	Edi Susanto	L	Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro	Kepala Dinas	081554788192
14	Muharom	L	UPT PSDA Bojonegoro	Kepala Seksi Operasi UPT PSDS	081235719861
15	Bambang	L	Jasa Tirta Divisi IV Bojonegoro	Kepala Seksi Jasa Air IV	08122628464
16	Siti Sumiah	P	Bappeda Kabupaten Lamongan	Kasubdit Bappeda	081357323295
17	Aris Setiadi	L	Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan	Kepala Dinas Pertanian	081357226908
18	Karmuji	L	UPT Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Maduran Lamongan	Supervisor	081330569382

#	Name	L/P	Institusi	Jabatan	Contact Person
19	Junaedi Sutaryo	L	UPT Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Laren Lamongan	Kepala UPT	08123141855
20	Darwati	P	UPT Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Babat Lamongan	Supervisor	081332550360
21	Subiyono	L	Kecamatan Kanor	Camat	08121759273

## PUMP SUPPLIERS AND PUMP REPAIR SHOPS

	Toko / Perusahaan	Alamat	Contact Number
	Supplier Pompa		
1	Toko "Surya Teknik"	Jl.Untung Suropati No. 1 Bojonegoro	(0353) 881279
2	Toko "Hari Diesel"	Jl.RA Kartini No.20 Bojonegoro	(0353) 885977
3	Toko "Prima Diesel"	Jl.Untung Suropati Bojonegoro	-
4	Toko "Perkasa Diesel"	Jl.Raya Gresik – Babat Lamongan	08123156992/082257385938
5	UD Sumber Anyar	Jl.Jaksa Agung Suprpto No.63 Lamongan	08123102155
6	CV.Sumber Tehnik Jaya	Jl.Kembang Jepun No.28 Surabaya	031-3542850-3542851
7	Toko "Sumber Rejeki"	Jl.Kembang Jepun No.22 Surabaya	031-3555680-3555673
8	Wijaya Sakti	Jl.Semarang No.114 Surabaya	081703772100
	Bengkel Service Pompa		
10	UD "Jaya Mandiri"	Jl.Kembang Jepun No,21 Surabaya	08165430637, 082140647939
11	"Bengkel Yadi"	Jl.Gresik, Desa Tritunggal ,Kec.Pucuk – Lamongan	082140329572
12	Workshop "Harry Suharto"	Jl. Mulyosari 157 Surabaya	-
13	Bengkel Jual Beli Perbaikan "Yadi"	Jl. Raya Gresik-Babat Tritunggal Lamongan	0821-4032-9572
	Supplier Pompa		
14	CV "Jaya Makmur "	Bojonegoro	-

## SUPPLEMENTARY INTERVIEWS WITH STAKEHOLDERS

**INVESTORS**

No	Name	L/P	Address	Irrigation Area	Location	Contact
1	Hadi Pranoto	L	Ngringrejo-Kalitidu-BJR	7	Ngringinrejo (7 Ha)	082140369410
2	Arief Saifudin	L	Nguken –Ngraho BJR	75	Dengok (10 Ha), Nguken (55 ha)	081259776059
3	Muslih, ST	L	Rendeng-Malo BJR	75	Rendeng (40 Ha), Ketileng (15 Ha)	085204558399
4	Jayus	L	Simo,Soko-TBN	190	Kalirejo (150 Ha)	081234924010
5	Haji Makmur	L	Mojoagung,Soko-TBN	360	Mojoagung (360 Ha)	081331352835
6	Haji Moh Achin	L	Pilangede,Balen-BJR	210	Pilangede (210 Ha)	085235449545

**PEOPLE WITH DISABILITIES**

#	Nama	L/P	Umur	Desa	Pekerjaan
1	A. Sobirin*	L	11	Kedungprimpen	Pelajar
2	Agus Affifudin*	L	15	Temu	-
3	Candra Puji Purnomo*	L	25	Kedungprimpen	-
4	Wahyuni Agustina	P	29	Sukoharjo	-
5	Intan Febrianty*	P	11	Petak	-
6	Edy Slamet	L	21	Gedongarum	-
7	Jayat*	L	25	Petak	-
8	Nyoto*	L	21	Petak	-
9	Julianto	L	30	Tulungrejo	Tukang Pijit
10	Kacong*	L	34	Malebo	-
11	Abdul Rokhim*	L	20	Nguken	-
12	Surepto*	L	26	Nguken	-
13	Mariyam*	P	35	Malebo	Kerajinan dan bantu berdagang

#	Nama	L/P	Umur	Desa	Pekerjaan
14	Hartatik*	P	30	Nguken	-
15	Ahmad Fauzin*	L	29	Simo	Ikut bertani
16	Rofiah	L	26	Temu	-
17	Nur Aeni	P	23	Kedungprimpem	Buruh Pabrik
18	Yeti Oktafia	P	21	Gedongarum	-
19	Rina Purwanti	P	24	Temu	-
20	Siti Aminah	P	42	Tulungrejo	-
21	Nur Aini	P	33	Nguken	-
22	Sucipto	L	41	Klotok	Pengawas HIPPA (profil)
23	Sumi	P	80	Petak	-
24	Supani	P	32	Sukoharjo	Buruh Tani (profil)
25	Suprpto	L	60	Tulungrejo	Penggembala Domba
26	Suradi	L	41	Gedongarum	Buruh Tani dan Beternak
27	Tamaji	L	50	Petak	Beternak dan Buruh Tani
28	Sumarti	P	40	Nguken	-
29	Mujianto*	L	37	Sukoharjo	-
30	Muslih	L	43	Rendeng	Pengusaha Areal / Kepala Desa
31	Qoirul Naum*	L	40	Rendeng	Kerajinan Gerabah
32	Anna Rahmawati*	P	23	Sukoharjo	Pabrik Walet

### FINANCIAL INSTITUTIONS

#	Name	L/P	Institusi	Posisi	Contact Person
1	Sri Gun Cahyo	L	KPRI Lumintu Rengel	Ketua I KPRI	0822234512256/085746845009
2	Irmawati	P	BPR Bank Daerah Bojonegoro	Kepala Biro Pemasaran	087755888871/0353-883956
3	Gugy Pratama	L	Bank Jatim	Penyelia Pemasaran	081330621002
4	Rokhim	L	PNPM	Sekretaris UPK PNPM Kec Kanor	085233772053
5	Hendit Agus	L	BRI	Account Officer (AO)	0852 3500 4700



## LAMPIRAN 3 – PROFIL-PROFIL USAHA PADI

### 3.1 PENYEDIA TRAKTOR

Nama : Sudardi  
Alamat : Ds. Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro  
No. Telp : 085331154699  
Tanggal : 14 Desember 2015  
Anggota Lap. : Mahbub & Nanda

Pak Sudardi merupakan salah satu warga Ds. Leran yang memiliki mesin traktor. Beliau juga menerima jasa traktor untuk pengolahan lahan sawah. Awal mula Pak Sudardi membeli traktor yaitu pada tahun 1990, pada waktu itu beliau membeli mesin Merk Dongfeng (10 pk) dengan harga Rp. 1.875.000 (bekas) di Toko Surya Teknik Bojonegoro.

Sebelum mengoperasikan traktor tentunya memeriksa dahulu keadaan mesinnya, bila ada kerusakan maka beliau segera memperbaiki. Menurut beliau biasanya pada musim hujan biaya perbaikan untuk kerusakan mesin sekitar Rp. 1.000.000. Tergantung kerusakannya, apabila kerusakannya ringan bisa diperbaiki sendiri, apabila kerusakannya berat dibawa ke bengkel milik pribadi.

Pak Sudardi mengatakan bahwa biasanya beliau mendapatkan 15 Ha pada musim hujan dan di musim kemarau beliau mendapatkan 21 Ha. Per hektar beliau mendapat upah jasa traktor sebesar Rp. 1.000.000 (biaya solar dan upah tenaga kerja). Traktor beroperasi dari awal sampai siap tanam membutuhkan 3 kali pembajakan diantaranya singkal (pembalikan tanah), garo (pemerataan tanah) 2 kali.



**Analisis Traktor**

Nama : Sudardi

Alamat : Ds. Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro

15 Ha pada musim hujan dan di musim kemarau beliau mendapatkan 21 Ha

Perhitungan per musim (hujan)

Usaha Penyedia Traktor	Keterangan	Rp	
		Kredit	Debit
Pendapatan	RP. 1.000.000 x 15 Ha		15.000.000
	Total Pendapatan (A)		15.000.000
Pengeluaran			
Biaya Solar	15 liter x Rp 6.800 x 15 Ha	1.530.000	
Biaya pemeliharaan	1.000.000/musim	1.000.000	
	Total Biaya Pengeluaran (B)	2.530.000	-
	Laba (A – B)		12.470.000

**3.2 PENGUSAHA BIBIT (BENIH) CABUT**

Nama : Asmali (Pertanian - Kebun Benih)

Alamat : Ds. Ngumpak Dalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro

No. Telp : 08125927205

Tanggal : 17 Desember 2015

Anggota Lap. : Mahbub &amp; Nanda



Pak Asmali merupakan penyedia bibit cabut padi yang memulai usahanya pada tahun 2011. Karena beliau merupakan salah satu karyawan Dinas Pertanian Mojokerto yang mendapat tugas di Bojonegoro untuk pelestarian benih dan beliau melihat para petani banyak yang gagal tanam karena banjir dan diserang tikus dan banyak petani yang mengeluh “andaikan ada yang menjual bibit cabut, jadi tidak usah susah payah”. Selain itu iklim yang tidak bersahabat. Akhirnya beliau memiliki ide membuat bibit cabut.

Dengan bekal yang beliau miliki dari Diklat, beliau memulai usahanya dengan modal benih dari Dinas Pertanian Mojokerto sebatas untuk membantu petani. Dalam pelaksanaan pembibitan beliau

memiliki beberapa proses sampai bibit siap di pindah tanam, berikut beberapa proses itu:

## 1. Perendaman benih

Pak Asmali membutuhkan benih 250 kg dalam 1 kotak dengan harga Rp. 10.000/kg. Benih direndam dalam air minimal 24 jam.

## 2. Pemeraman

Benih yang direndam selama 24 jam diangkat dan ditiriskan airnya, kemudian benih yang ditiriskan diangin-anginkan sampai benihnya agak mongering. Kemudian benih tersebut direndam dan ditutupi plastik kembali selama 24 jam. Setelah itu benih yang direndam akan keluar tunas disebut dengan bibit. Kemudian bibit siap di keluarkan dan disebar.

## 3. Sebar benih (tanah dalam kondisi nol)

Kondisi tanah dalam keadaan siap, yang sudah diolah dengan traktor dan di tamping. Kemudian bibit disebar ke lahan tersebut. Dalam penyebaran bibit, pertama-tama Pak Asmali menggunakan 1 kotak lahan yang luasnya 2.000 m<sup>2</sup>. Dimana 1 kotak berisi 25 lajur dengan panjang kali lebar 2m x 40m. Pak Asmali menyebarkan bibit ke 1 lajur membutuhkan 10 kg bibit. Dalam pengolahan traktor, Pak Asmali memberi upah sebesar Rp. 200.000 dan tamping 5 orang setiap orangnya Rp. 35.000, sedangkan upah untuk sebar benih beliau membayar Rp. 35.000.

## 4. Perawatan (pemberian pupuk dan penyemprotan Fungisida)

Pak Asmali menyebar pupuk pada saat tanaman berusia 7 hari. Beliau menggunakan pupuk SP-36 25 kg dengan harga Rp. 2.000/kg dan menggunakan pupuk Urea 10 kg dengan harga Rp. 1.800/kg. Sedangkan untuk proses penyemprotan dilakukan pada usia 14 hari, dengan menggunakan Pestisida Fungisida yang /botol 250 cc harganya Rp. 125.000, namun beliau hanya menggunakan 40 cc. Untuk upah pemeliharaan, Pak Asmali membayar Rp. 35.000.



## 5. Cabut bibit

Pencabutan bibit dilakukan pada usia 16 atau 17 hari. Dan bibit siap untuk di jual. Untuk penjualan, Pak Asmali memberikan harga Rp. 200.000/lajur. Dan upah untuk tenaga cabut benih beliau membayar Rp. 50.000. Selain itu Pak Asmali juga member upah pada tenaga kerja bagian pencatatan pesanan, biasanya beliau membayar Rp. 50.000.

Dari penjelasan beliau, benih yang akan disemai sebaiknya dibantu pertumbuhannya dengan cara di rendam dan diperam. Agar benih yang telah diperam akan memiliki daya tumbuh yang lebih cepat dan lebih baik dibanding dengan benih yang tidak diperam, sehingga dalam persemaian akan tumbuh lebih kuat dan sehat.



Untuk sebar benih sendiri, harus pada lahan yang awalnya pernah di tanami oleh varietas yang sama. Ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kualitas benih yang akan dihasilkan.

## Keterangan:

Untuk mengantisipasi kerugian, sebelum 20 hari para petani harus memesan terlebih dahulu. Agar bisa bersiap-siap untuk proses penanaman.

Pada musim penghujan, beliau mengandalkan air hujan dan beliau membuat embung kecil di belakang gubug, agar sewaktu-waktu membutuhkan air bisa mengambil dari embung tersebut. Sedangkan musim kering, beliau memanfaatkan air bekas mandi dari beberapa rumah terdekat. Beliau kumpulkan jadi satu di saluran depan rumah kemudian di sedot menggunakan diesel. Untuk biaya solar diesel 1 Ha beliau membutuhkan 15 liter dengan harga per liternya Rp. 6.800.

Untuk lahan 1 Ha per tahun beliau membayar Rp. 15.000.000. Beliau tanam 10 kali dalam 1 tahun.

### Analisis Laba Rugi

1 kotak menghasilkan Rp. 1.260.000, maka 1 Ha menghasilkan = **Rp. 6.300.000**

Bila 10 bulan tanam maka menghasilkan = **Rp. 63.000.000**

### Versi Excel

	Tahap Usaha Bibit Cabut	Keterangan	Rp	
			Kredit	Debit
1	Pendapatan	25 lajur x Rp. 200.000		5,000,000
		Total Pendapatan (A)		5,000,000
2	Biaya Produksi			
A	Benih	Ciherang 250 kg x Rp. 10.000	2,500,000	
		TOTAL BENIH	2,500,000	
B	Pupuk:			
	SP-36	25 kg x Rp. 2.000	50,000	
	Urea	10 kg x Rp. 1.800	18,000	
		TOTAL PUPUK	68,000	
C	Pestisida:			
	Fungisida	250 cc = 1 botol	125,000	
		TOTAL PESTISIDA	125,000	
D	Sewa Buruh:	(hari & orang)		
	Traktor	1 unit	200,000	
	Tamping	5 orang x Rp. 35.000	175,000	
	Sebar benih	1 orang	35,000	
	Pemeliharaan	1 orang	35,000	
	Cabut benih	3 orang x Rp. 50.000	150,000	
	Pencatatan	1 orang	50,000	
		TOTAL SEWA BURUH	645,000	
E	Sewa Lahan 1 Ha, 1 tahun 15 juta, 1 Ha = 5 kotak	Dibayar 10x tanam	300,000	
F	Kebutuhan Solar	15 liter x Rp. 6.800	102,000	
		<b>Total Biaya Produksi (B)</b>	<b>3,740,000</b>	

	Tahap Usaha Bibit Cabut	Keterangan	Rp	
			Kredit	Debit
		<b>Laba (A – B)</b>		<b>1,260,000</b>

## Perhitungan Per Ha

Tahap Usaha Bibit Cabut	Keterangan	Rp	
		Kredit	Debit
Pendapatan	Rp. 5.000.000 x 5 kotak		25,000,000
	<b>Total Pendapatan (A)</b>		<b>25,000,000</b>
Biaya Produksi			
Benih	Ciherang 250 kg x Rp. 10.000 x 5 kotak	12,500,000	
	<b>TOTAL BENIH</b>	<b>12,500,000</b>	<b>-</b>
Pupuk:			
SP-36	25 kg x Rp. 2.000 x 5 kotak	250,000	
Urea	10 kg x Rp. 1.800 x 5 kotak	90,000	
	<b>TOTAL PUPUK</b>	<b>340,000</b>	<b>-</b>
Pestisida:			
Fungisida	250 cc = 1 botol x 5 kotak	625,000	
	<b>TOTAL PESTISIDA</b>	<b>625,000</b>	<b>-</b>
Sewa Buruh:	(hari & orang)		
Traktor	1 unit x 5 kotak	1,000,000	
Tamping	5 orang x Rp. 35.000 x 5 kotak	875,000	
Sebar benih	1 orang x kotak	175,000	
Pemeliharaan	1 orang x kotak	175,000	
Cabut benih	3 orang x Rp. 50.000 x 5 kotak	750,000	
Pencatatan	1 orang x 5 kotak	250,000	
	<b>TOTAL SEWA BURUH</b>	<b>3,225,000</b>	<b>-</b>
Sewa Lahan 1 Ha, 1 tahun 15 juta, 1 Ha = 5 kotak	Dibayar 10x tanam	1,500,000	
Kebutuhan Solar	15 liter x Rp. 6.800	510,000	
	<b>Total Biaya Produksi (B)</b>	<b>18,700,000</b>	<b>-</b>
	<b>Laba (A – B)</b>		<b>6,300,000</b>

## 3.3 PENYEDIA TENAGA TANAM

Nama : Rusmiati  
Alamat : Ds. Nguken Kec. Padangan Kab. Bojonegoro  
No. Telp :  
Tanggal : 28 Desember 2015  
Anggota Lap. : Mahbub & Nanda

---

**Nguken** – berada di desa paling ujung barat Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas penduduknya merupakan petani dan buruh tani. Dulu petani Nguken mencari tenaga tanam padi (tandur: jawa) masih mudah. Namun beberapa tahun belakangan ini petani disana kesulitan mencari tenaga tanam dengan cara mundur. Akhirnya para petani mengimpor tenaga tanam dari desa sebelah.

Namun ada ibu-ibu bernama Rusmiati yang merupakan buruh tanam asli dari Desa Nguken. Di hari-hari tertentu bila ada petani yang membutuhkan tenaga terampilnya yang berjalan mundur dengan membawa benih berumur 25 HSS (Tandur), beliau siap untuk menanam lahan milik petani tersebut.

Dengan berkelompok yang terdiri dari 7 orang termasuk beliau, beliau sigap menggarap lahan tersebut. Setiap 0,2 Ha (1 Kranggan: Jawa) ibu Rusmiati beserta anggotanya mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000, itu pun harus dibagi dengan 7 orang. Setiap musim kelompok ibu Rusmiati bisa menanam 2.000 m<sup>2</sup> (2 Ha = 10 kranggan), tapi itu tergantung dari ada tidaknya petani yang membutuhkan tenaganya.

“Itu pun kita sudah bersyukur mas. Apalagi kalau lagi musim tanam serempak. banyak buruh tanam yang dari luar desa.”  
Kata ibu Rusmiati.



### 3.4 PEMBORONG (TENGGULAK)

Nama : Nurjaman (luar desa)  
Alamat : Ds. Kandangan Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro  
No. Telp : 082331085599  
Tanggal : 11 Desember 2015  
Anggota Lap. : Mahbub & Nanda

---

Pak Nurjaman mengawali usahanya sebagai tengkulak sekaligus pemborong sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Dari kegiatannya, Pak Nurjaman membeli dan menjual padi.

Pada bulan Desember 2015 beliau memanen padi di daerah Trucuk dengan luas 25 Ha. Untuk lahan 1 Ha yang menentukan pembagian lahan antara petani dengan jasa air adalah Pengusaha (Pak Untung). Dengan harga tebasan Rp. 22.000.000.

Selama proses memanen, pak Nurjaman mengerahkan bawahannya untuk menjalankan proses penebasan dengan upah Rp. 35.000 per kuintal. Dalam memanen beliau menghasilkan 6 ton per Ha, apabila 25 Ha yang beliau kerjakan maka hasil panennya adalah 150 ton.

Pak Nurjaman membeli gabah ke petani/pemilik sawah dengan harga Rp. 4.400 per kg dan menjual ke pengusaha (H. Nurman) di Ds. Sungai Lebak Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dengan harga Rp. 4.600 per kg.

Setiap 1 musim P. Nurjaman (Penebas + Tengkulak) mengirim maks. 28 truk (per truk @8,5 – 9 ton) ke pengusaha besar, dengan panen 2 x dalam setahun.



### **Analisis Laba Rugi Tengkulak (25 Ha)**

#### **Diketahui:**

1 Ha menghasilkan 6 ton

25 Ha = 6 x 25 = 150 ton

ton = 1.500 kuintal = 150.000 kg

Harga beli ke petani = Rp. 4.400/kg

Harga jual ke pengusaha = Rp. 4.600/kg

Upah borongan = Rp. 35.000/kuintal

Biaya borongan = Rp. 22.000.000/Ha



#### **Pendapatan:**

150.000 kg x Rp. 4.600 = Rp. 690.000.000

#### **Pengeluaran:**

Upah borongan = 1.500 kuintal x Rp. 35.000 = Rp. 52.500.000

Biaya borongan (25 Ha) = Rp. 22.000.000 x 25 Ha = Rp. 550.000.000

**Total pengeluaran = Rp. 602.500.000**

**Labanya = Rp. 87.500.000**

**Versi Excel**

	Tahap Usaha	Keterangan	Rp	
			Kredit	Debit
1	Pendapatan	150.000 kg x Rp. 4.600		690,000,000
		<b>Total Pendapatan (A)</b>		<b>690,000,000</b>
2	Pengeluaran			
	Biaya Borongan (25 Ha)	Rp. 22.000.000 x 25 Ha	550,000,000	
	Upah Borongan	1.500 kuintal x Rp. 35.000	52,500,000	
		<b>Total Biaya Pengeluaran (B)</b>	<b>602,500,000</b>	<b>-</b>
		<b>Laba (A – B)</b>		<b>87,500,000</b>

## LAMPIRAN 4 – PROFIL PENGUSAHA

### 4.1 PROFIL PENGUSAHA DESA NGRINGINREJO

#### HADI PRANOTO - PENGUSAHA AREAL

Pada mulanya terdapat 39 kepala keluarga yang memiliki sawah seluas 7 Ha. Mereka hanya bias menanam padi 1 kali dalam 1 tahun, selebihnya sawah ditanami palawija dan sayuran kemudian dibiarkan bero setelahnya.

Kemudian berdasarkan usulan dan permintaan dari para tetangga ( 9 tahun yang lalu) agar sawah mereka bisa terairi oleh air bengawan solo dengan system pompanisasi pada musim kemarau. Dan mereka bias kembali menanam padi (2 kali panen dalam 1 tahun).

Untuk melaksanakan usaha ini Pak Hadi meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintahan Desa dengan memberikan kontribusi untuk kas Desa sebesar 2 juta per tahun.



#### SEJARAH BISNIS

Investasi modal awal untuk memulai bisnis penyediaan air adalah sebesar 50 juta ditambah pinjaman ekuitas dari BRI sebesar 25 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli mesin diesel seharga 5 juta, pompa air seharga 2 juta, pipa paralon seharga 35 juta.

Sedangkan untuk pelaksana tugas harian pengoperasional pompa dan pendistribusi air dia dibantu oleh seorang operator dengan tariff 25.000 rupiah per hari.

Mesin dan Pompa bekerja selama 3 hari berturut-turut setelah itu diistirahatkan selama 2 jam. Dalam pengoperasiannya mesin diesel memerlukan 3, 5 liter bahan bakar setiap hari dan penggantian oli atau pelumas setiap 2 minggu sekali.

#### PEMBAYARAN JASA AIR

Untuk pembagian hasil panen dikenai tariff pembayaran sebesar 20 % dari hasil panen. Dan dilakukan dengan cara memilih dan memanen sendiri disawah.

Pada musim panen Pak Hadi mendapatkan hasil dari pembagian rata-rata sebesar 8,4 ton gabah. Dan jika dirupiahkan pak Hadi mendapatkan hasil sebesar kurang lebih 22 juta rupiah.

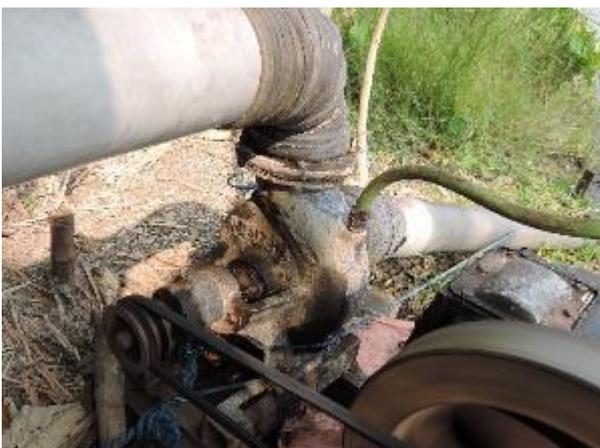
Beliau pernah mendapatkan tawaran untuk menggantikan mesin diesel dengan dynamo yang berinstalasi listrik tapi Pak Hadi harus menyediakan uang sebesar 50 juta rupiah.

NERACA HADI PRANOTO NGRINGINREJO

ASSET	Unit	IDR	Passiva	IDR
Mesin diesel	1	5.000.000	modal awal	50.000.000
Pompa	1	2.000.000	pinjaman Bank BRI	25.000.000
Pipa paralon 400 m		35.000.000	pendapatan tahun berjalan	28.856.250
			penyertaan modal	(61.856.250)
TOTAL		42.000.000		42.000.000

ANALISA LABA/ RUGI

Pendapatan			8400	37.800.000
			Total pendapatan	37.800.000
Biaya				
Gaji operator		625.000		
solar/BBM		1.758.750		
ganti oli		360.000		
kontribusi ke kas desa		2.000.000		
Panen		4.200.000		
		Total pengeluaran	8.943.750	
Laba/ Rugi			laba	28.856.250





## 4.2 PROFIL PENGUSAHA AREAL – JAYUS

Pak Jayus adalah pengusaha areal/pompa yang melayani 2 areal yaitu di Ds. Kalirejo 150 Ha dan Ds. Mboko/Ds. Kapas 40 Ha. Beliau mengatakan bahwa bisnis areal/pompa sudah ada sejak tahun 1980an. Beliau memiliki inisiatif dengan menyontoh Pak Nursalim.

Pak Jayus memulai bisnis penyediaan air pada tahun 1987 di Ds. Mojoagung Kecamatan Soko, kemudian dilanjutkan di Rengel pada tahun 1988 dan pada tahun 1989/1990 di Plumpang.

Beliau berpendapat bahwa bisnis ini tidak memiliki prospek yang baik karena ulah dari Aparat Desa/HIPPA yang sering memutuskan kontrak dengan pengusaha dan memberikan kepada pengusaha lain tanpa ada konfirmasi apapun. Faktor lainnya adalah tidak adanya kontrak permanen dengan aparat desa atau saat pergantian pengurus Desa/HIPPA (Aparat Desa sangat berperan dalam pengelolaan Aset Desa termasuk Irigasi).

### Pengelolaan pengusaha areal

Untuk mengelola Ds. Kalirejo, beliau mendapatkan kontrak pada awal tahun 2015 dengan 3 tahun pelayanan irigasi dengan nilai kontrak Rp. 35 juta/tahun. Modal Investasi yang diperlukan untuk Ds. Kalirejo adalah sebesar Rp. 500 juta.

Dalam penyediaan air untuk Ds. Kalirejo disupply dari sungai Bengawan Solo dengan 3 stasiun pompa yang memiliki mesin mobil dengan pompa yang berkapasitas 12 dim, serta 15 mesin diesel berkapasitas 16 pk dengan pompa berkapasitas 4 dim dan 6 dim sebagai imbalan yang digunakan untuk menaikkan air. Sedangkan cost untuk tiap unit mesin pompa (mesin mobil) sekitar Rp. 115 juta (tipe D-16) dan pipa paralon sekitar Rp. 15 juta.

Beliau mengatakan bahwa, beliau tidak tertarik untuk menggantikan system pompa mesin ke listrik/dinamo karena jangka waktu kontrak hanya 3 tahun, serta tidak adanya perjanjian untuk pengalihan asset dengan HIPPA jika beliau tidak melanjutkan kontrak. Beliau mengira-ngira perhitungannya membutuhkan dana sekitar Rp. 200



juta untuk pemasangan pompa listrik di Ds. Kalirejo, dan biaya itu belum termasuk pemasangan Dinamo dan Pompa (Untuk pemasangan dynamo listrik dan pompa 6 dim diperlukan dana sekitar Rp. 50 juta/unit).

Untuk operasional pompa,, setiap harinya dibutuhkan 1.200 liter solar untuk menggerakkan mesin. Hari kerja selama satu bulan adalah 25 hari, apabila 1 musim maka tinggal dikalikan 4 bulan. Kemudian untuk pemeliharaan mesin dikeluarkan biaya sebesar Rp. 15 juta/bulan. Maka total kerja per musim sekitar Rp. 723 juta. Dan modal akan kembali setelah 2 tahun pengelolaan apabila tidak terjadi masalah.

Selain itu, Pak Jayus mendapatkan pinjaman dari Bank Panin sebesar Rp. 150 juta. Tidak hanya mendapatkan pinjaman dari Bank Panin, beliau juga mendapatkan pinjaman dari Perusahaan Penggilingan Padi dengan cara pembayaran dengan setoran gabah. Beliau juga pernah mengajukan kredit pinjaman ke Bank BRI namun beliau dipersulit. Beliau hanya fokus bisnis tersebut ke 2 areal tersebut dan tidak tertarik untuk mengembangkan ke areal lain karena keterbatasan tenaga dan orang kepercayaan.

### 4.3 PROFIL PENGUSAHA SUMUR BOR

Desa Ngujo terletak dikecamatan kalitidu— Kabupaten Bojonegoro. Di desa tersebut terdapat pengusaha sumur bor yang bernama H. Abdul Hamid (60 tahun) dan sekaligus bendahara Ta'lim Masjid. Beliau menjadi pengusaha sumur bor selama 10 tahun sampai dengan sekarang. Selain menjadi pengusaha sumur bor beliau juga menjual pupuk untuk pertanian.

Tanah yang digunakan untuk Sumur bor di Dsn. Kalipang dulunya adalah tanah milik H. Anonim Alm, kemudian tanah tersebut diwakafkan ke masjid Ngujo untuk membangun masjid, namun dalam pembangunannya dikelola oleh pengurus Masjid Ngujo. Setelah disepakati bersama— sama oleh pengurus masjid, mereka memutuskan untuk menjual dan menyewakan tanah dengan cara bagi petak (per petak 200 m<sup>3</sup>) pada masyarakat.

Setelah lahan tersebut disewakan ke masyarakat selama 2 tahun, masyarakat tersebut merasa rugi, entah apa sebabnya beliau tidak member kejelasan. Kemudian tanah tersebut dilelang secara umum oleh pengurus Ta'lim Masjid, namun tidak ada yang minat. Akhirnya pada tahun 2012 ada salah satu warga yang menyewa tanah tersebut yaitu Pak Abdul Hamid. Dilahan tersebut sebelumnya sudah terdapat sumur tua, daripada tidak digunakan akhirnya beliau memanfaatkannya untuk bisnis sumur bor.

#### SEJARAH PELAYANAN SUMUR BOR

Pak Abdul Hamid melayani lahan sumur bor seluas 5 Ha pada musim kemarau dan 8 Ha pada musim hujan. Sumur bor tersebut menggunakan 3 mesin diesel merk Dongfeng. Yang diairi dari sumur bor tersebut lahan sendiri dan lahan sekitarnya yang mau ikut pelayanan sumur bor yang berada didusun Kalipang Leran milik Pak Hamid.

Dengan modal awal 52 juta dan sewa lahan sebesar 20,5 juta per tahun, tetapi tiap tahun harga sewa tersebut mengalami kenaikan sebesar 10%.

Dengan adanya pelayanan sumur bor di Dsn. Kalipang petani bisa tanam padi 1 tahun 3 kali. Selain digunakan untuk bertani, beliau juga mempunyai lahan persemaian dengan benih varietas Ciharang kumis. Pelayanan tersebut petani dikenakan biaya jasa air pada MT II sebesar 1/4, MT III sebesar 1/3, namun MT I tidak membayar jasa air karena MT I merupakan musim penghujan.

#### **NERACA SUMUR BOR H. Abdul Hamid Dsn. Kalipang—Leran**

##### Asset Sumur Bor



TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

Pompa 3 dim	Rp 2.700.000
Mesin Diesel	Rp 7.000.000
Pipa luar	Rp 1.500.000
Pipa dalam	Rp 675.000
Anstransmisi	Rp 1.500.000
Sewa tanah dan sumur	Rp 22.550.000
Ban kipas 300	Rp 169.500
Ban kipas 310	Rp 175.000
Ban kipas 475	Rp 268.000
Biaya memperbaiki deker	Rp 20.500.000
Ngebor	Rp 5.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp 62.037.500</b>



**Neraca laba/ Rugi**

Pendapatan jasa air	Ha	Gabah (kg)	Harga (Rp)	Income (Rp)
	5	6.500	4.500	48.750.000

BBM	Rp 10.050.000
Panen	Rp 5.416.667
Pemeliharaan	Rp 750.000
Upah dan tenaga kerja	Rp 4.000.000
Kontribusi desa	Rp 200.000
<b>Total pengeluaran</b>	<b>Rp 20.416.667</b>
<b>Laba/ Rugi</b>	<b>Rp 28.333.333</b>

**4.5 PENGUSAHA SLEP – HAJI MAKMUR (UD HAJI MAKMUR)**

Pengusaha Slep, Jasa Air dan Sarana Produksi

Haji Makmur (46 tahun) merupakan pengusaha muda di bidang penyediaan jasa air yang cukup sukses, dibawa perusahaan UD Haji Makmur beliau mengelalo semua bisnis yang berhubungan dengan produksi padi, mulai dari penyedia jasa air irigasi, pupuk dan obat2an , membeli gabah dari petani dan menjual beras ke Dolog / pengusaha sembako lainnya.

Haji makmur memulai dengan bisnis penyediaan air sejak tahun 1988 dengan memberikan layanan air untuk lahan seluas 30 ha, dan terus berkembang hingga pada tahun telah melayani bisnis penyediaan air untuk areal total sekitar 500 ha. Namun mendapat musibah banjir pada tahun 2007 sehingga terjadi gagal panen pada semua areal yang dikelola dan bisnis penyediaan air beliau bankrupt.

Pak Haji merantau ke Malaysia menjadi TKI dan kembali ke melanjutkan bisnis penyediaan air pada tahun 2010 dan memulai kembali bisnis penyediaan air di desa-nya Mojo Agung dimana istrinya sebagai kepala desa. Sebelumnya penyedia jasa air pada desa ini dilayani oleh pak Jayus.

Selain mengelola bisnis penyediaan air di desa Mojo Agung dengan areal 200 ha, Haji Makmur juga melayani pengairan sawah seluas 160 ha di desa Sari Rejo , Kecamatan Kapas – Bojonegoro. Lamanya kontrak pelayanan untuk kedua desa tersebut adalah desa Mojo Agung 5 tahun kontrak pelayanan air dengan nilai kontrak 20 juta per tahun, sedangkan untuk Sarirejo 7 tahun pelayanan air dengan nilai kontrak 15 juta per tahun.

Sebagai pengusaha muda beliau tidak hanya memikirkan jasa penyediaan air tapi bagaimana mana bisa menjalankan semua bisnis yang berhubungan dengan produksi padi, mulai dari penyedia air, bibit, pupuk dan obat2an, membeli gabah, membuka usaha penggilingan dan pedagang beras hingga mendapat kontrak dari Dolog untuk menyediakan beras “Raskin”.

Sistem pengelolaan bisnis sarana produksi untuk padi sawah adalah dengan cara in-kind kredit untuk bibit padi, pupuk dan obat2an kepada petani kemudian akan dibayar saat panen dengan gabah hasil produksi. Dengan cara ini beliau berpikir petani tidak akan meminjam uang kepada para rentenir /pihak ketiga dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Untuk bisnis penyedia beras “Raskin” beliau mendapat kontrak dari Dolog setiap tahun pengadaan 5500 ton beras, untuk itu harus membeli gabah sekitar 10 – 15 ribu ton gabah tiap tahun untuk di giling.

Untuk membeli gabah dalam jumlah belasan ribu ton , pada haji membutuhkan cash sehingga ia mendapatkan pinjaman dari Bank BRI cabang Tuban sebesar 3 milyar untuk modal kerja.

Menurut beliau untuk memberikan pelayanan jasa air di desa Mojo Agung menggunakan 4 pompa berkapasitas 360 m3/h dengan motor penggerak 4 dynamo listrik kapasitas masing 30 HP. Sedangkan untuk sari rejo menggunakan 3 pompa 12 inch dengan motor penggerak 1 mesin fuso dan 2 mesin colt diesel.

Untuk biaya operasional setiap hari untuk pembelian minyak/fuel rata2 mengeluarkan Rp.3,5 juta , dan listrik 40 juta setiap bulannya.

Tenaga kerja yang dipergunakan sebanyak 13 orang sebagai pegawai tetap yang terbagi untuk 3 orang tenaga admin, dan 10 orang sebagai staf lapangan.

Untuk perkembangan bisnis penyediaan jasa air kedepan beliau ingin menambah lagi sekitar 200 ha area pelayanan air.

Analisa laba rugi UD Haji Makmur: (MK III , 2015)

Item	Pengeluaran	Pendapatan
Setoran Gabah Jasa Air		Rp.1,944,000,000
Listrik	Rp, 115,000,000	
Fuel / Bahan Bakar	Rp. 262,500,000	
Salary Staf	Rp. 52,000,000	
Biaya Panen	Rp. 756,000.000,-	
Bunga Bank	Rp. 157,500,000,-	
Pembayaran pihak 3	Rp. 15,000,000,-	
	Rp.1,358,000,000,-	
		Rp. 586,000,000,-

## 4.6 PENGUSAHA AREAL ARIF SAIFUDIN

**Nguken**, adalah Desa yang langsung perbatasan dengan Kabupaten Cepu, paling barat di Kabupaten Bojonegoro dan berdekatan dengan Bengawan Solo, tidak jauh dengan daerah lain dengan luas desa ± 200 KM<sup>2</sup> dan Mayoritas penduduk disana merupakan petani dan buruh tani yang luas garapan 180 Ha, dengan 275 petani pemakai air. Setiap tahun bisa tanam 2 kali, yakni pola tanam padi-padi. Dari sekian luas lahan garapan ada yang sudah di iri secara teknis, ada juga yang belum tersentuh air disebabkan lokasi yang terlalu naik.

Di sana ada pengusaha pengairan yang juga menjabat sebagai kepala desa yakni Pak Arif Saifudin. pengusaha dari Nguken yang memulai bisnis layanan irigasi pada Tahun 2007, yang melanjutkan usaha dari Bapak angkat P. Drajat yang pernah mengalami kerugian pada saat banjir terjadi dibengawan solo pada tahun 2007, beliau memilih melanjutkan bisnis layanan irigasi karena sudah lama berkecimpung dibidang irigasi pertanian dengan memberikan layanan irigasi di Desa Dengok 10 ha dengan modal awal 50 juta, dengan pompa diesel 10 inci (2) dan 8 inci.

Lokasi stasiun pompa berada di Desa Dengok dengan dynamo 35 KVA dan 40 KVA. Stasiun Pompa di desa Dengok adalah milik HIPPA Desa Dengok, Karena HIPPA belum mampu mengelola ( kekurangan modal untuk operasional ) mengajak P. Arif untuk bekerjasama, dengan memberikan kontribusi ke Desa Dengok sebesar 5 juta per musim.

### AREAL PELAYANAN

- Desa Ngoken 55 Ha jumlah 55 petani, pembayaran jasa air 20%
- Desa Dengok 10 Ha, Jumlah petani 200 Petani, Pembayaran jasa air 20%
- Desa Padangan 10 Ha, Jumlah petani 140, Pembayaran Jasa air 20 %

Luas layanan air irigasi saat ini untuk Desa Ngoken 55 Ha dengan jumlah 55 petani, Dengok 10 ha dengan jumlah 200 petani, Padangan 10 ha dengan jumlah 140 petani dan pembayaran jasa air sama 20%, total layanan saat ini 75 ha dari ketiga desa tersebut. Dari pengalaman P. Drajat (Orang tua angkat ) pernah mengalami kerugian karena gagal panen pada waktu banjir besar Tahun 2007 dan hampir bangkrut. Kemudian Pak Arif mendapatkan bantuan modal dari Bank BRI sebesar 200 juta dengan jaminan sertifikat tanah, dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun ( tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut ). Staregi untuk mendapatkan areal potensial adalah dengan melihat peluang beberapa areal yang belum terairi, dengan bertemu petani langsung dan menanyakan apakah mau mendapatkan layanan air irigasi. Selama ini Pak arif belum pernah mengikuti tender tentang layanan air irigasi, baik di Desa sendiri maupun di Desa lain. Rencana untuk perluasan layanan yang belum terairi dengan target desa Ngoken 75 Ha, Sidorejo 75 Ha, Cendono 100 Ha.



Foto Pompa Jica di Desa Nguken

Dasar untuk menentukan besarnya jasa air berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara petani yang di iri. Asalkan airnya mencukupi untuk bertanam petani mau membayar 20 %. Untuk pekerjaan Administrasi dan pembukuan beliau serahkan kepada salah satu dari keluarganya. Dengan pegawai lapangan atau petugas pembagi air sekaligus bagian perbaikan berjumlah 5 orang dan kerusakan pompa diperbaiki oleh tenaga teknis / lapangan dari pak arif sendiri. Selain menyediakan layanan irigasi, Pak Arif memiliki usaha pembelian gabah dari pemakai air, karena berpikir sekalian bisa membantu petani dalam pembelian gabah dari petani (tebasan).

### ASSET Pak Arif Saifudin

Pompa merk Jepang	RP. 100.000.000
Dinamo merk Taiwan & Instalasi Listrik	RP. 200.000.000
Mesin diesel imbalan	RP. 10.000.000

Saluran 200 M	RP. 50.000.000
Total	RP. 360.000.000

#### 4.6 PENGUSAHA PAK SUDARWAJI (CV AREAL SEKAWAN PRAMBONWETAN)

Pada saat penulisan study kasus tentang design proyek TIRTA , pak Sudarwdji, dikenal sebagai pengusaha priba yang melayani jasa penyediaan air irigasi untuk beberapa desa seperti Prambon Wetan, Banjar Arum , Kesamben dan Trutup dengan luasan total sekitar 316 ha , saat ini telah diperluas areal jangkauan pelayanan pada desa2 tersebut menjadi total areal yang dilayani 426 ha.

Pada awal tahun 2014 bisine penyediaan air irigasi pak Sudarwadji dijadikan CV dengan nama “Areal Sekawan Prambonwetan” , dengan tambahan modal dari 3 orang teman dalam pembentukan perusahaan tersebut

Tabel Komposisi Kepemilikan saham CV.Areal Sekawan Prambonwetan.

No	Nama	Komposisi Saham
1	H.Sudarwadji	37.50%
2.	Djinawan	25 %
3.	H Dasmono , SH	25 %
4.	H. Mimsareh	12.50 %

Berdasarkan komposisi kepemilikan tersebut maka pembagian pendapatan disesuaikan dengan komposisi kepemilikan saham yang ada.

Sesuai dengan perkembangan bisnis pengairan secara umumnya dengan tambahan investasi sebesar ~ Rp.800 juta-an telah menganti mesin penggerak pompa dari mesin mobil / generator ke penggunaan dynamo sebagai motor penggerak dimana untuk stasiun pompa utama yg memompa air dari sungai Bengawan Solo telah menggunakan 3 buah dynamo masing2 berkapasitas 30 HP untuk menggerakkan tiap pompa berkapasitas 270 m3/ha . Serta untuk pompa imbalan telah ada 3 stasiun yang menggunakan dynamo , 1 mesin mobil dan 2 lainnya memakai generator.

Berbeda dengan pengusaha yang lain perusahaan ini juga membangun saluran irigasi sepanjang 2 km untuk dapat melayani desa2 yang memakai jasa airnya serta membangun jembatan penyebrangan /deker baik untuk orang dan untuk mengalirkan air.

Akibat dari komitmen pak Sudarwadji dan kawan2 untuk membangun fasilitas umum sarana irigasi serta kontribusi dalam bentuk pembagian hasil usaha kepada Desa, HIPPA , dan melibatkan masyarakat local dalam pengelolaan bisnis jasa air maka hingga saat ini masyarakat tetap menginginkan mereka untuk tetap mengelola pelayanan air di desa2 layanan pak Sudarwadji dkk atau CV Areal Sekawan Prambonwetan.

Analisa laba rugi CV. Areal Sekawan Prambonwetan.

Pendapatan (October 2014 )	1,140,300,950
Pengeluaran	
BBM (Solar)	277,742,500
Listrik	81,103,000

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

Operator Pompa	37,000,000
Pemeliharaan & Alat	129,808,567
Pembayaran Pihak ke-3	
HIPPA 6 %	68,418,057
Kas HIPPA	17,104,514
Desa	91,224,076
Biaya Panen	33,402,000
Biaya Bunga Hutang	188,929,260
Total Pengeluaran	924,731,974
<b>Laba/ Rugi</b>	<b>215,568,976</b>

<b>Neraca</b>				
<b>Aktiva</b>			<b>Pasiva</b>	
Station Pompa/Rumah	7	14,000,000	Modal Awal	998,458,254
Diesel Mesin	3	82,500,000	Utang Bank	932,472,770
Dinamo	7	105,000,000	Laba tahun berjalan	215,568,976
Pompa Air	10	150,000,000		
Pipa (PVC)	30	225,000,000		
Saluran Air Irigasi 1,7 km		500,000,000		
Jembatan / deker		270,000,000		
Instalasi listrik		800,000,000		
		<b>2,146,500,000</b>		<b>2,146,500,000</b>

## 4.7 PROFIL PENGUSAHA RENDENG (MUSLIH) – KEPALA DESA

Desa Rendeng terletak dikecamatan Malo sebelah Barat kota Bojonegoro. Desa Rendeng memiliki potensi pertanian yang bagus. Dengan luas total 53 Ha sawah. Di desa Rendeng ada seorang pengusaha yang bernama Pak Muslih, beliau juga sekaligus menjabat sebagai kepala Desa.

Pak Muslih dibesarkan di desa Rendeng dari keluarga petani. Beliau adalah seorang alumnus perguruan tinggi di Malang.

Pak Muslih adalah penyedia jasa layanan air yang memulai usahanya pada tahun 2008. Beliau melanjutkan usaha dari Bapaknya, beliau memilih melanjutkan bisnis layanan irigasi karena beliau dibesarkan dari keluarga petani.

Pak Muslih memiliki 1 orang pekerja dari pihak keluarga sendiri sebagai administrasi dan dibantu oleh tenaga teknis lapangan sebanyak 7 orang yang bertugas sebagai pembagi air dan memanen.

### Sejarah pelayanan irigasi

Pak Muslih memberikan layanan irigasi di desa Rendeng sebesar 25 Ha dengan modal awal kurang dari 100 juta menggunakan sistem pompanisasi berbasis mesin diesel. Hingga saat ini Pak Muslih memiliki 3 stasiun pompa yang berada di 3 desa tersebut salah satu stasiun pompa sudah menggunakan dynamo listrik. Dari ketiga stasiun pompa tersebut mampu mengairi lahan seluas 75 ha sawah. Masing—masing terletak di desa Sudah seluas 10 ha, Desa Ketileng 15 ha, Desa Malo 10 ha, Desa Rendeng 40 ha.

### Sistem Pembayaran jasa air dan bagi hasil

Untuk pembayaran jasa air dari masing—masing desa adalah sebagai berikut :

- Desa Sudah 10 ha, pembayaran jasa air 25 % MK, 20 % MP, dengan jumlah 45 petani.
- Desa Ketileng 15 Ha, pembayaran jasa air 25%, 20% MP, dengan jumlah 40 petani.
- Desa Malo 10 ha, pembayaran jasa air 25%, 20% MP, dengan jumlah 30 petani
- Desa Rendeng 40 ha, pembayaran jasa air 25%, 20% MP, dengan jumlah 185 petani.

Untuk penarikan jasa layanan air Pak Muslih mengikuti standart harga pasaran sebesar 25 %, dan menurut para petani dirasa tidak memberatkan.

### Sumber Dana

Pada mulanya Pak Muslih mendapatkan pinjaman modal dari bank Mandiri dengan pinjaman 150 juta dengan bunga 1,1 % dibayar angsuran bulanan 5,5 juta selama 3 tahun. BPR dengan pinjaman 50 juta dengan bunga 1 % dibayar pada saat panen/musiman 50 juta. UMKM, pinjaman 50 juta dengan bunga 0,5% per bulan (6% setahun) angsuran setiap 6 bulan dibayar 25 juta (2 kali).

### Strategi dan Resiko yang terjadi

Strategi yang dia gunakan untuk mendapatkan areal potensial adalah dengan mencari sendiri peluang areal yang belum terairi, selain itu juga ada beberapa petani yang meminta sawahnya untuk diairi.

Sedangkan resiko dari bisnis ini ketika mengalami gagal panen pada saat banjir besar (bencana alam) pada tahun 2007. yang menanggung kerugiannya adalah pengusaha dan petani masing-masing.

Peralatan dan Bisnis lain

Menurut nara sumber (Muslih) bisnis layanan irigasi ini akan terus berlangsung asalkan sungai bengawan solo tidak kekurangan air (air bengawan solo keadaan bagus), dengan modal yang mendukung layanan irigasi akan berlangsung.

Selain menyediakan layanan irigasi, Pak Muslih juga mempunyai bisnis yang lain seperti : sewa alat angkut truk, membeli gabah dari petani pemakai air, karena untuk mempermudah sekaligus petani menjual hasil panen.

Biasanya type pompa yang menjadi favorit adalah pompa Cyloscar, karena debit air yang dikeluarkan besar dan daya dorong airnya kuat. Kalau dynamo yang paling disukai adalah dynamo merk HB karena awet dan tidak mudah rusak. Dan apabila terjadi kerusakan peralatan yang bertugas memperbaiki adalah tenaga teknis / operator lapangan, jika tidak mampu baru memanggil teknisi dari luar.

Bantuan dari Pemerintah

Sedangkan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian sudah pernah memberikan bantuan berupa JITUT/JIDES pada tahun 2015 sepanjang 153 meter untuk sarana irigasi dan digunakan untuk menunjang jaringan irigasi desa setempat.

Untuk selanjutnya ada rencana perluasan dengan target desa Ketileng 100 Ha, Banaran 50 Ha.

Asset Pak Muslih, ST

Asset Pak Muslih, ST

Pemasangan instalasi listrik	Rp 40.000.000
Pemasangan instalasi pipa	Rp 5.000.000
Mesin diesel 26 HP @ 5,5 Juta	Rp 33.000.000
Pipa 6 dim (200m)	Rp 205.907.000
Pipa 8 dim (600m)	Rp 147.810.000
Dynamo HB	Rp 16.000.000
Pompa imbalan @4 juta	Rp 32.000.000
Rumah pompa	Rp 10.000.000
Total asset	Rp 489.717.000

Analisis laba /rugi Pak Muslih, ST

Pendapatan jasa air	Ha	Gabah	harga	Income
			(kg)	(Rp)
	75	5.500	4.500	464.062.500
BBM				Rp 80.400.000
Rekening listrik/ token				Rp 45.000.000
Perawatan				Rp 5.000.000
Gaji				Rp 35.000.000
Panen				Rp 51.562.500
Bayar ciclan bank mandiri				Rp 22.000.000

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

Bayar hutang bank BPR	Rp 50.000.000
Bayat UMKM	Rp 25.000.000
Bazar bantuan beras masyarakat	Rp 4.500.000
Total Pengeluaran	Rp 318.462.500
<b>Laba/rugi</b>	<b>Rp 145.600.000</b>



### 4.8 PROFIL PAK HAJI MOCHAMMAD ACHSIN

#### Pengusaha Areal

Pak Haji Mochammad Achin (58 tahun) , adalah seorang Pengusaha Areal (penyedia jasa layanan air irigasi) di desa Pilangede (150 ha) dan desa Sarirejo (60 ha).

Selain sebagai pengusaha areal , pak Achin juga mempunyai usaha penggilingan padi yang berkapasitas giling 1600 ton per musim tanam.

Pak Haji Achin memulai usaha penyediaan jasa air bagi petani padi sawah sejak tahun 1988 pada desa Puncangarum, Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro . Kemudian usaha tersebut terus berkembang ke desa Semambung dan saat ini hanya memberikan pelayanan pada desa Sarirejo dan Pilangede.

Selama menjalankan bisnis penyediaan air pak Haji Achin mendapat berbagai hambatan dan tantangan terutama dari sesama pengusaha jasa air dan aparat desa terutama dengan iming2 memberikan prosentase setoran jasa air dan nilai kontrak yang lebih baik agar petani padi sawah menggunakan jasa mereka. Sebagai akibat dari semuanya pak Haji Achin meninggalkan beberapa lokasi pelayanan jasa air yang dikelolanya seperti di Puncangarum dan Semambung yang saat ini dikelola oleh pengusaha lain.

Untuk desa Sarirejo Haji Achin yang berinisiatif untuk membantu masyarakat dengan investasi awal membangun jaringan irigasi sepanjang 600 m, karena desa tersebut belum ada jaringan irigasi teknis pada tahun 1992 . Kemudian mulai dengan pemasangan pompa untuk mengairi lahan seluas 60 hektar , dan memberikan jasa pelayan air pada awalnya 25 % dan terus berkurang hingga saat ini dengan jasa pelayanan air 15 % dari hasil yang didapat oleh petani. Pada wilayah tersebut tariff jasa pelayanan hanya 15% karena beliau berpendapat air yang dipompa dari bengawan dapat langsung dimasukkan ke sawah2 petani karena topografi lahan relative datar.

Pelayanan air di desa Pilangede dimulai pada awal tahun 2015, setelah kepala desa dan ketua HIPPA datang meminta untuk mengelola pelayanan irigasi didaerah tersebut , setelah pengusaha terdahulu tidak mampu memberikan service pelayanan air yang baik akibat kondisi lahan yang tidak datar serta kerusakan jaringan irigasi teknis yang ada. Pak SACHin memulai dengan merehabilitasi saluran irigasi serta mendesign lokasi/titik untuk penambahan pompa imbalan guna air

dapat mencakup semua area persawahan dalam desa tersebut. Sehubungan dengan adanya perbaikan saluran irigasi dan tambahan pompa imbalan maka tariff jasa layanan air irigasi yang harus dibayar pemakai air irigasi untuk mengairi sawah adalah 20% dari hasil yang diperoleh.

Sistem pengumpulan iuran air irigasi yang dilakukan pak haji Achin adalah dengan cara memilih padi sawah yang siap panen dilapangan dan membaginya berdasarkan prosentase yang telah disetujui antara 15 % atau 20%. Kemudian dia akan memborongkan kepada “Penebas” untuk memanen serta disetorkan ke Penggilingan Padi-nya.

Mengenai usaha penggilingan pak haji Achin, rata2 setiap musim dalam mengumpulkan gabah maksimum sebanyak 1,600 ton , dan menurut beliau rendamen gabah setelah digiling pada musim hujan sekitar 53% beras dan pada musim kering 62% beras.

#### **Neraca Usaha Pak Haji Achin**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>	
Station Pompa/Rumah	12	15,500,000	Modal Awal	300,783,000
Diesel Mesin	12	42,000,000	Utang Bank	200,000,000
Dinamo	7	80,500,000	Laba tahun berjalan	422,917,000
Pompa Air	10	47,500,000		
Pipa (PVC)	30	103,200,000		
Saluran Air Irigasi 1,7 km	600m	350,000,000		
Instalasi listrik		285,000,000		
		<b>Rp.923,700,000</b>		<b>Rp.923,700,000</b>

#### **4.9 PENGUSAHA SUMUR POMPA – LATIF**

Pak latif adalah pengusaha sumur pompa dalam (Bor) di desa sukoharjo yang dimulai pada tahun 1990. sebelum itu sumur pompa tersebut adalah milik Pak ahmad (Alm) yang dikelola pada tahun 1980an. Yang kemudian di ahli wariskan kepada saudaranya yang bernama Pak Kintomo (Alm).

Pada awal tahun 1990 pak kintomo meninggal, lahan sawah beserta sumur pompa diberikan kepada anaknya yang bernama Ana, Dewi, Santi. Namun ketiga anaknya tidak mau dan tidak bisa mengelola sumur pompa, akhirnya lahan sawah beserta sumur pompa tersebut disewakan kepada pak latif hingga saat ini.

Pada masa sumur pompa dikelola oleh pak ahmad Layanan jasa air tidak bisa mengelola dengan maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemeliharaan mesin pompa hingga menyebabkan kerugian. Namun setelah dikelola pak latif hasilnya lebih menguntungkan karena beliau lebih memahami segala hal yang berkaitan dengan sumur pompa.

Setelah sumur pompa dikelola oleh pak latif, beliau membeli mesin diesel baru setiap tahunnya merek Dong Feng dengan kapasitas 16 PK dikarenakan beliau tidak ingin mengambil resiko kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian yang berlebihan. dalam satu hari sumur pompa pak latif membutuhkan 30 liter solar, dalam masa kerja selama 70 hari. Beliau juga mengganti oli mesin (3 liter, yang perliternya Rp. 16.000) dalam jangka waktu satu minggu sekali. Beliau tidak sendirian untuk menjalankan usaha sumur pompa, beliau dibantu oleh 6 orang karyawan dengan upah Rp. 60.000 per orang sedangkan 1 operator mesin di beri upah Rp. 4.000.000 per musim

Sumur pompa milik pak latif dalam musim penghujan bisa melayani 10 Ha sawah, sedangkan untuk musim kemarau hanya mampu melayani 5 Ha dengan pembayaran jasa air 30% (MK) dan 25% (MP). Musim panen terahir pak latif mampu mengairi lahan petani hingga 5 Ha dengan hasil penen keseluruhan 17.5 Ton



<b>Aset sumur pompa</b>	<b>Ja</b>
Mesin 16 PK (4 UNIT)	M
Pipa paralon 3 Dim (10 Batang)	M
Pipa Besi 4 Dim (8 Batang)	
Poli-poli & Ban kipas 3 Unit	
Selang plastik 400 Meter	
Pengeboran dengan kedalaman 45 Meter	

**NERACA SUMUR BOR**

ASSET	UNIT	IDR	PASSIVA	IDR
MESIN 16 PK	1	5,500,000	Penyertaan Modal	17,310,000.00
POMPA 3 DIM	4	2,800,000	Pendapatran tahun berjalan	3,840,000.00
POLI-POLI + BAN KIPAS	3	3,000,000		
PIPA BESI 4 DIM	8	0		
ONGKOS PENGEBORAN		3,000,000		
	10	850,000		

TANAH DAN BANGUNAN		6,000,000		
<b>TOTAL:</b>		<b>21,150,000</b>		<b>21,150,000.00</b>

**ANALISA LABA / RUGI**

<b>PENGHASILAN</b>		<b>32,000,000</b>		
		<b>TOTAL PENDAPATAN:</b>		<b>32,000,000.00</b>
<b>PENGELUARAN</b>				
BIAYA PANEN		7,000,000		
BIAYA OPRASIONAL		5,025,000		
BIAYA KARYAWAN		4,000,000		
BIAYA TEKNISI	1	4,000,000		
		<b>TOTAL PENGELUARAN:</b>	<b>20,025,000</b>	
<b>LABA/RUGI</b>			<b>LABA</b>	<b>11,975,000</b>

**4.10 PROFIL HAJI UNTUNG BASUKI**

“Haji Untung Basuki (64 tahun) pensiunan pegawai pemerintah. Dengan modal awal sekitar Rp.50 juta beliau memulai bisnis Irigasi Pompa sejak 1992 di Desa Sumberjo, Kecamatan Trucut Kabupaten Bojonegoro dengan memompa air dari Kali Geneng untuk mengairi lahan seluas 125 hektar .

Saat ini bisnis penyediaan jasa air irigasi Haji Untung Basuki telah berkembang dengan melayani jasa penyediaan air irigasi untuk 5 (lima) desa yang berada dikecamatan Trucut yakni desa Sumberjo (125 ha), desa Padang (50 ha), desa Trucut (80 ha), desa Tulung Rejo (60 ha) dan desa Mori ( 250 ha).

***Sejarah Perkembangan Bisnis Pak Untung Basuki***

Sebagai mantan leader Local (Camat) selama beberapa periode di Kecamatan Bojonegoro Haji Untung tergerak hatinya untuk membantu petani yang menggarap tanah dibantaran Sungai Bengawan Solo yang tidak punya akses ke Irigasi teknis terutama desa2 yang terletak di sebelah Utara Bengawan Solo lantaran tidak berfungsinya Pompa bantuan Pemerintah /JICA .

Pak Untung memulai dengan pelayanan Jasa Air untuk desa Sumberjo dengan memompa air dari Kali Geneng di tahun 1987, kali ini merupakan anak sungai Bengawan Solo. Dengan bertambahnya penduduk dan peningkatan akan kebutuhan air di hulu kali tersebut, ketersediaan air irigasi sudah tidak mencukupi lagi , maka pada tahun 1994 Haji Untung mulai dengan memompa air dari Bengawan Solo untuk mengairi areal layanan di Sumberjo melewati desa tetangga yakni desa Padang. Untuk maksud tersebut beliau harus membangun saluran Irigasi sepanjang 1,5 km.

Dengan semakin banyaknya permintaan akan jasa air irigasi dari desa sekitarnya maka pada tahun 2009 Pak Untung perluas areal pelayanan ke desa Trucut dan desa Tulung Rejo di Kecamatan Trucut (Bojonegoro) pada tahun 2011.

Adanya perkembangan teknologi inovatif dimana mesin penggerak pompa dapat menggunakan dynamo listrik dan lebih efisien dalam pengoperasian maka pada bulan April 2015 Pak Untung menerima tawaran dari Desa Mori untuk

mengantikan pengusaha Areal yang tidak melanjutkan kontrak jasa pelayanan air untuk desa tersebut. Saat itu Pak Untung sudah merencanakan untuk menggunakan dynamo listrik sebagai mesin penggerak pompa.

Investasi sekitar 200 juta-an harus dikeluarkan untuk dapat mengairi lahan seluas 250 ha di desa Mori, termasuk untuk pekerjaan yang istimewa penarikan jalur kabel listrik menyebrangi sungai bengawan solo untuk melayani 2 stasiun pompa listrik yang akan mengairi lahan sawah di desa Mori.

#### ***Dasar Pemikiran Pak Untung dalam Bisnis “Pengareal”***

Untuk bertahan lama dalam pengelolaan air irigasi dalam satu lokasi / desa ;”pengusaha harus terlebih dahulu melakukan investasi agar saluran irigasi baik dengan cara perbaikan atau pembangunan saluran baru” serta “Menjalinkan hubungan baik dengan tokoh2 masyarakat setempat serta turut aktif dalam setiap event/kegiatan di area layanan dengan kontribusi seperlu-nya .

#### ***Station Pompa Pak Untung Basuki***

Untuk memberikan pelayanan air Irigasi pada 5 desa dengan total areal 565 hektar ada 5 station pompa untuk memompa air dari Bengawan Solo dan 10 pompa Imbalan

Satu station pompa menggunakan mesin penggerak pompa “Mesin Diesel” ex Singapore PS FE.

Station pompa memakai dynamo listrik sebagai penggerak Pompa dengan Kapasitas dynamo sekitar 20-25 HP

Total jumlah Pompa Air yang digunakan sebanyak 10 unit Pompa dengan ukuran :

10 dim 1(satu) pompa dan ukuran 9 dim sebanyak 9 (Sembilan) pompa.

#### ***Pengalaman dalam penggunaan Pompa Air untuk Irigasi padi sawah***

Pak Untung memulai dengan menggunakan mesin diesel 24 PK pada tahun 1987 untuk memompa air dari kali Geneng ke sawah Petani di Desa Sumberjo.

Dengan perkembangan waktu dan inovasi teknologi pada tahun 1994 membeli 4 (empat) mesin bekas Isuzu PS FE untuk dimodifikasi sebagai mesin penggerak pompa. Total biaya untuk satu Unit pompa komplet saat itu sekitar ~ Rp.17 juta ( Harga Mesin PS.FE ~ Rp.10 juta per unit , Pompa 9 dim ~ Rp.5 juta per unit serta ongkos rakit/pasang ~ Rp.2 juta per set pompa)

Pada tahun 2015 pak Untung Basuki mulai menggunakan dynamo sebagai mesin penggerak untuk 4 station pompa yang ada dengan total investasi untuk instalasi listrik dan pembelian dynamo sekitar ~ Rp.350 juta rupiah.

Kapasitas / daya listrik yang digunakan untuk ke-4 station pompa tersebut adalah 2 station menggunakan daya 41.000 KW , satu station pompa menggunakan daya 66.000 KW dan satu station menggunakan daya 82.000 KW.

## LAMPIRAN 5 – PROFIL BENGKEL POMPA

### DATA BENGKEL POMPA

Nama : Yadi  
Alamat : Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan  
No. Telp : 0821-4032-9572  
Tanggal : 17 Desember 2015  
Anggota Lap. : Mahbub

Pak Yadi adalah sapaan akrab dari seorang bos bengkel perbaikan pompa dikawasan Lamongan. Sejak tahun 1977 beliau sudah memulai bisnis jual beli pompa bekas sekaligus perbaikan dan modifikasi pompa di daerahnya. Tak hanya itu, dia juga mempunyai bengkel didekat rumahnya dan satu lagi terletak di seberang jalan raya arah Gresik - Babat.



Beliau memiliki 4 pegawai yang semua asli warga sekitar. Untuk masalah gaji pegawai, beliau menerapkan 2 sistem gaji yakni Rp. 100.000,- untuk tenaga dilapangan dan Rp. 70.000,- untuk tenaga kasar (perbaikan di bengkel) dengan pembayaran dilakukan tiap minggu. Dari keterangan yang kita dapat, untuk masalah pendapat atau perbaikan pompa tidak menentu akan tetapi beliau perkiraan tiap musim paling tidak mendapat Rp. 350.000.000,-. Untuk pemasangan lengkap sebagai contoh pompa 20 dim dan mesin 8 silinder pemesan harus membayar Rp. 150.000.000,- dengan proses dimuka 50% dan 50% nya lagi saat musim panen.

Pak yadi sudah banyak memperbaiki pompa dan mesin dinamo, diesel ataupun mesin times. Dari kawasan aliran bengawan solo mulai perbatasan Cepu dan Bojonegoro sampai Gresik telah beliau jelajahi, tak itu saja kawasan tambak pun sering. Tapi saat ini yang langsung terjun kelapangan untuk memperbaiki adalah para pegawainya, beliau juga menjadi makelar pompa atau pun mesinnya. Akan tetapi juga mesin-mesin pengilingan bekas (perontok padi, penggiling beras, dan penggiling kelapa).



Pompa di daerah Bojonegoro yang pernah dia tangani bervariasi, mulai 6 dim sampai 20 dim, terkait pembayaran pemasangan atau pun pembutan juga bervariasi. Saat kita kesana, beliau sedang memperbaiki sekaligus memasang pompa dan mesin times milik pengusaha dari Bojonegoro yakni dari desa Soko kecamatan Kanor.

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

Berikut daftar harga perbaikan pompa dan mesin :

- 6 dim : Rp. 1.000.000,-
- 8 dim : Rp. 1.250.000,-
- 10 dim : Rp. 2.000.000,-
- 12 dim : Rp. 3.500.000,-
- 16 dim : Rp. 10.000.000,-
- 20 dim : Rp. 15.000.000,-



**LAMPIRAN 6 – DATA BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI**

NO	Petani	Desa	Pemakai Air or Non Pemakai Air	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (Ton)	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Net Production Value	Poverty Status
1	Wito	Nguken	Pemakai Air	2.5	17.5	38,199,500	98,437,500	60,238,000	Not Poor
2	Ahmad Ngalim	Kedungprimpen	Pemakai Air	1	9.3	11,520,714	42,075,000	30,554,286	Not Poor
3	H. Sabit	Ketileng	Pemakai Air	4	20	56,940,000	120,000,000	63,060,000	Not Poor
4	Mustaqim	Rendeng	Pemakai Air	0.75	4	6,265,000	18,000,000	11,735,000	Poor
5	Mat Langgeng	Rendeng	Pemakai Air	0.25	1.3	3,685,000	7,800,000	4,115,000	Not Poor
6	Harun	Rendeng	Pemakai Air	0.4	3	6,145,000	18,000,000	11,855,000	Poor
7	Suwarno	Nguken	Pemakai Air	0.15	1	2,348,250	4,781,250	2,433,000	Not Poor
8	Pasiran	Nguken	Pemakai Air	0.2	1	2,103,250	5,906,250	3,803,000	Not Poor
9	Soko Hiryanto	Kedungprimpen	Pemakai Air	3.1	24	42,337,143	126,000,000	83,662,857	Not Poor
10	Kasmuri	Kedungprimpen	Pemakai Air	1.5	7.6	10,348,929	34,222,500	23,873,571	Not Poor

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

NO	Petani	Desa	Pemakai Air or Non Pemakai Air	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (Ton)	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Net Production Value	Poverty Status
11	Kanip	Sukoharjo	Pemakai Air	5	4.65	8,907,250	20,925,000	12,017,750	Not Poor
12	Sarkawi	Sukoharjo	Pemakai Air	1.5	9.35	15,603,750	42,075,000	26,471,250	Not Poor
13	Suntoro	Prambon Wetan	Pemakai Air	0.3	1.8	5,405,000	8,100,000	2,695,000	Not Poor
14	Sudarto	Prambon Wetan	Pemakai Air	0.2	1.2	3,079,250	9,843,750	6,764,500	Not Poor
15	Sadiran	Gedongarum	Pemakai Air	0.6	5	7,795,032	26,100,000	18,304,968	Poor
16	Yono	Prambon Wetan	Pemakai Air	0.25	1.8	3,304,000	10,125,000	6,821,000	Not Poor
17	Sudarto	Gedongarum	Pemakai Air	0.2	1.2	2,498,571	10,350,000	7,851,429	Poor
18	Eny	Tulungrejo	Pemakai Air	1.4	2.6	6,700,000	10,400,000	3,700,000	Not Poor
19	Lasmujiono	Tulungrejo	Pemakai Air	0.5	3.1	7,092,500	17,325,000	10,232,500	Not Poor
20	Ngademin	Tulungrejo	Pemakai Air	0.25	1	4,309,000	26,500,000	22,191,000	Not Poor
21	Sutekno	Tulungrejo	Pemakai Air	0.4	2.4	2,762,000	27,050,000	24,288,000	Not Poor

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

NO	Petani	Desa	Pemakai Air or Non Pemakai Air	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (Ton)	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Net Production Value	Poverty Status
22	Japar	Gedongarum	Pemakai Air	0.1	0.6	1,151,675	4,725,000	3,573,325	Not Poor
23	Marjuki	Klitech	Pemakai Air	1	9.87	12,862,500	44,437,500	31,575,000	Not Poor
24	Yudiono	Klitech	Pemakai Air	0.25	1.62	3,202,500	7,312,500	4,110,000	Poor
25	Sarji	Klitech	Pemakai Air	1	6	13,250,000	45,000,000	31,750,000	Not Poor
26	Rastam	Trucuk	Pemakai Air	0.25	1.12	2,807,500	5,062,500	2,255,000	Not Poor
27	Mz. Arif	Trucuk	Pemakai Air	0.2	1.625	3,202,500	7,312,500	4,110,000	Not Poor
28	Setya Budi	Trucuk	Pemakai Air	1	6	16,152,000	45,000,000	28,848,000	Not Poor
29	Muntoro	Leran	Pemakai Air	0.6	3.6	14,287,000	29,250,000	14,963,000	Not Poor
30	Asmuri	Leran	Pemakai Air	1	8	15,065,000	36,000,000	20,935,000	Not Poor
31	Yasin	Petak	Pemakai Air	1	6.7	30,420,000	13,049,000	17,371,000	Not Poor
32	Mulyono	Petak	Pemakai Air	4	26.7	120,217,500	49,289,375	70,928,125	Not Poor

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

NO	Petani	Desa	Pemakai Air or Non Pemakai Air	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (Ton)	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Net Production Value	Poverty Status
33	Karsono	Petak	Pemakai Air	1	7.45	33,525,000	14,001,250	19,523,750	Not Poor
34	Mashuri	Ngujung	Pemakai Air	0.2	1.8	8,154,000	4,100,800	4,053,200	Not Poor
35	Sutekno	Ngujung	Pemakai Air	0.25	1.87	8,437,500	4,333,500	4,104,000	Not Poor
36	Kasbi	Temu	Non Pemakai Air	0.5	3	5,280,000	13,500,000	8,220,000	Poor
37	Suwartoyo	Sidorejo	Non Pemakai Air	1.5	7	10,835,000	39,375,000	28,540,000	Not Poor
38	Kardi	Ketileng	Non Pemakai Air	0.25	1	1,760,000	4,500,000	2,740,000	Not Poor
39	Lani	Pomahan	Non Pemakai Air	1.5	8.5	19,882,400	47,812,500	27,930,100	Not Poor
40	Rohmat	Temu	Non Pemakai Air	0.2	1.2	1,925,000	6,480,000	4,555,000	Poor
41	Ali Masmuk	Banaran	Non Pemakai Air	0.5	0.47	3,315,000	13,500,000	10,185,000	Not Poor
42	Dol Hadi (Padi)	Banaran	Non Pemakai Air	0.2	0.25	1,683,000	9,000,000	7,317,000	Poor
43	Harso	Temu	Non Pemakai Air	0.25	1.5	3,105,000	8,910,000	11,610,000	Poor

## TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

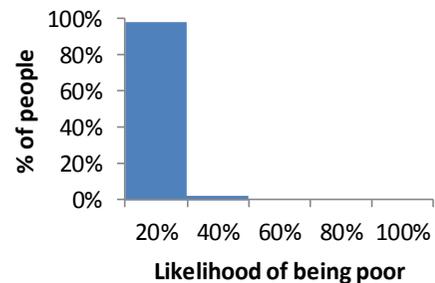
NO	Petani	Desa	Pemakai Air or Non Pemakai Air	Luas Lahan (HA)	Hasil Panen (Ton)	Total Biaya Produksi	Total Pendapatan	Net Production Value	Poverty Status
44	Tasir	Leran	Non Pemakai Air	0.36	1.5	4,650,000	6,750,000	2,100,000	Not Poor
45	Mangil	Tinawon	Non Pemakai Air	0.2	0.49	1,065,000	2,205,000	1,140,000	Poor
46	Juwani	Tinawon	Non Pemakai Air	0.2	0.7	978,000	3,150,000	2,172,000	Poor
47	Muhajir	Tinawon	Non Pemakai Air	0.75	2.4	4,187,000	10,800,000	6,613,000	Not Poor
48	Muntholib	Petak	Non Pemakai Air	0.25	1.8	8,100,000	1,916,000	6,184,000	Poor
49	Pariman	Petak	Non Pemakai Air	0.4	2.5	11,250,000	3,001,000	8,249,000	Poor
50	Ladi	Petak	Non Pemakai Air	0.3	2.2	9,900,000	2,038,000	7,862,000	Not Poor
51	Nursalim	Ngujung	Non Pemakai Air	0.2	3.3	14,985,000	6,911,250	8,073,750	Not Poor
52	Sater	Ngujung	Non Pemakai Air	2	18.6	83,992,500	33,688,125	50,304,375	Not Poor

## LAMPIRAN 7 – DATA INDEKS KEMISKINAN MENURUT PROGRESS AGAINST POVERTY INDEX (PPI)

#	Farmer	Village	User / Non User	Sex	Age	No of Family Members	No Family Members currently at school	PPI Scores										100% National		150% National		\$2.5 2005 PPP		
								Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Total	Status	Likelihood	Status	Likelihood	Status	Likelihood
1	Ahmad Ngalm	Kedungprimpen	Water User	M	53	4	2	5	0	3	6	5	4	5	0	0	9	37	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
2	Kasmuri	Kedungprimpen	Water User	M	40	3	2	11	2	4	6	5	1	5	0	8	9	51	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
3	Lani	Pomahan	Non Water User	M	51	4	2	11	0	4	6	5	1	5	0	8	9	49	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
4	Kasbi	Temu	Non Water User	M	42	4	1	11	2	4	3	0	1	0	0	9	30	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%	
5	Soko Hiryanto	Kedungprimpen	Water User	M	40	3	1	18	2	4	6	5	1	5	0	8	9	58	Not Poor	0.2%	Poor	5.2%	Poor	26.9%
6	Kardi	Ketileng	Non Water User	M	46	2	0	24	0	4	6	5	1	5	0	0	9	54	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
7	H. Sabit	Ketileng	Water User	M	63	0	4	11	0	4	6	5	1	5	0	8	9	49	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
8	Mat Langgeng	Rendeng	Water User	M	50	3	1	18	2	4	0	5	1	5	0	0	9	44	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
9	Mustaqim	Rendeng	Water User	M	70	4	1	11	2	3	0	0	1	5	0	0	9	31	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
10	Ali Masmuk	Banaran	Non Water User	M	37	4	1	11	0	4	0	5	1	5	0	0	9	35	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
11	Dol Hadi	Banaran	Non Water User	M	45	4	1	11	2	3	0	0	1	5	0	0	9	31	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
12	Wito	Ngoken	Water User	M	41	5	1	5	2	4	1	0	1	5	0	8	9	35	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
13	Sudarto	Gedongarum	Water User	M	55	5	0	5	0	3	3	5	1	5	0	8	0	30	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
14	Japar	Gedongarum	Water User	M	40	4	1	11	0	4	3	5	4	5	0	0	9	41	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
15	Sadiran	Gedongarum	Water User	M	74	7	2	0	2	4	6	0	1	5	0	0	9	27	Poor	17.3%	Poor	65.5%	Poor	91.5%
16	Rohmat	Temu	Non Water User	M	61	2	0	24	0	4	3	0	0	0	0	0	31	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%	
17	Suwartoyo	Sidorejo	Non Water User	M	50	2	0	24	0	6	1	0	1	5	0	8	9	54	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
18	Harun	Rendeng	Water User	M	52	6	4	0	2	4	0	5	1	5	0	8	9	34	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
19	Pasiran	Nguken	Water User	M	60	4	1	11	0	4	3	5	1	5	6	8	9	52	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
20	Suwarno	Nguken	Water User	M	47	5	1	5	2	3	3	0	1	5	0	8	9	36	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
21	Kanip	Sukoharjo	Water User	M	30	1	3	18	2	4	6	5	4	5	0	8	9	61	Not Poor	0.1%	Not Poor	2.9%	Not Poor	17.6%
22	Sarkawi	Sukoharjo	Water User	M	66	1	5	5	2	4	6	5	4	5	0	8	9	48	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
23	Suntoro	Prambonwetan	Water User	M	62	4	2	11	2	4	6	5	4	5	0	8	9	54	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
24	Yono	Prambonwetan	Water User	M	30	2	0	24	0	3	6	0	4	5	0	0	9	51	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
25	Sudarto	Prambonwetan	Water User	M	57	4	0	11	0	4	6	5	1	5	0	0	9	41	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
26	Eny	Tulungrejo	Water User	F	40	3	2	18	2	6	0	5	1	5	0	8	9	54	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
27	Lasmujiyono	Tulungrejo	Water User	M	57	4	0	11	2	6	6	5	1	5	5	8	9	58	Not Poor	0.2%	Poor	5.2%	Poor	26.9%
28	Ngademini	Tulungrejo	Water User	M	44	5	1	5	2	3	6	5	1	5	0	8	9	44	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
29	Sutekno	Tulungrejo	Water User	M	65	2	0	24	0	3	6	5	1	5	0	0	9	53	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
30	Harso	Temu	Non Water User	M	57	3	0	18	0	4	6	0	4	5	0	0	0	37	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
31	Marjuki	Klith	Water User	M	47	4	0	11	0	4	6	5	1	5	0	8	9	49	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
32	Yudono	Klith	Water User	M	47	4	1	11	2	4	6	0	1	0	0	0	24	Poor	25.2%	Poor	76.2%	Poor	95.2%	
33	Sarji	Klith	Water User	M	40	3	1	18	2	4	6	5	1	5	0	8	9	58	Not Poor	0.2%	Poor	5.2%	Poor	26.9%
34	Rastam	Trucuk	Water User	M	73	7	3	0	2	4	6	5	1	5	0	8	9	40	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
35	Arif	Trucuk	Water User	M	63	6	2	0	2	4	6	5	1	5	0	8	9	40	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
36	Setya Budi	Trucuk	Water User	M	44	8	3	0	2	4	6	5	1	5	0	8	9	40	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
37	Muntoro	Leran	Water User	M	50	4	0	11	0	3	6	5	1	5	0	8	9	48	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
38	Tasir	Leran	Non Water User	M	55	3	1	18	2	3	3	0	1	5	0	0	9	41	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
39	Asmuri	Leran	Water User	M	52	4	1	11	2	6	6	5	1	5	0	8	9	53	Not Poor	0.6%	Poor	9.9%	Poor	40.1%
40	Mangil	Tinawon	Non Water User	M	75	5	1	5	2	3	6	0	1	5	0	0	9	31	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
41	Juwani	Tinawon	Non Water User	M	60	5	0	5	0	4	6	0	4	5	0	0	9	33	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
42	Muhajir	Tinawon	Non Water User	M	50	3	0	18	0	3	6	0	1	0	0	0	9	37	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
43	Muntholib	Petak	Non Water User	M	38	4	2	11	2	4	6	0	1	0	0	0	9	33	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
44	Pariman	Petak	Non Water User	M	37	4	1	11	2	4	6	0	1	0	0	0	9	33	Poor	10.3%	Poor	54.0%	Poor	87.7%
45	Sutekno	Ngujung	Water User	M	50	3	1	18	2	4	6	0	1	5	0	0	9	45	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
46	Nursalim	Ngujung	Non Water User	M	44	4	2	11	2	4	6	0	1	5	0	0	9	38	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
47	Mashuri	Ngujung	Water User	M	60	3	0	18	0	4	6	0	0	5	0	0	9	42	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
48	Sater	Ngujung	Water User	M	50	4	0	11	0	4	6	0	1	5	0	0	9	36	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
49	Karsono	Petak	Water User	M	42	5	1	5	2	4	6	5	1	5	0	8	9	45	Not Poor	1.4%	Poor	17.4%	Poor	54.7%
50	Ladi	Petak	Non Water User	M	39	3	1	18	2	4	6	0	1	0	0	0	9	40	Not Poor	3.2%	Poor	27.9%	Poor	68.4%
51	Mulyono	Petak	Water User	M	67	5	1	5	2	4	6	5	1	5	0	0	9	37	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%
52	Yasin	Petak	Water User	M	45	5	0	5	0	4	6	5	1	5	0	0	9	35	Not Poor	5.8%	Poor	40.7%	Poor	79.7%

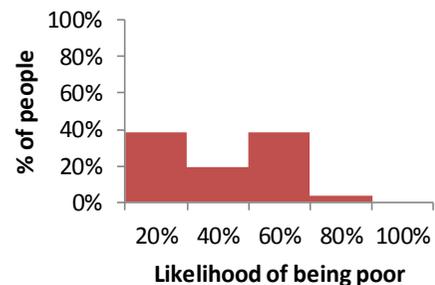
**100% National**

Cut-off point	Criteria	Number
34	less than or equal to 34	12
	more than 34	40
% below 100% National [Targeted]		23%
% below 100% National [Non-Targeted]		5%



**150% National**

Cut-off point	Criteria	Number
60	less than or equal to 60	51
	more than 60	1
% below 150% National [Targeted]		98%
% below 150% National [Non-Targeted]		31%



Likelihood Range	100% National		150% National	
	Frequency	%	Frequency	%
20%	51	98%	20	38%
40%	1	2%	10	19%
60%	0	0%	20	38%
80%	0	0%	2	4%
100%	0	0%	0	0%

**\$2.5 2005 PPP**

Cut-off point	Criteria	Number
59	less than or equal to 59	51
	more than 59	1
% below \$2.5 2005 PPP [Targeted]		98%
% below \$2.5 2005 PPP [Non-Targeted]		31%

## LAMPIRAN 8 – PROFIL HIPPA AKTIF (HIPPA KLOTOK)

### Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (HIPPA Aktif)

HIPPA “SUBUR MAKMUR” terbentuk dengan Keputusan Desa Nomor : 01/1993 yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban Nomor : 06/1993 tertanggal 14 Mei 1993. Status keputusan pembentukan HIPPA telah dirasakan manfaatnya sebagai berikut : adanya pengakuan dan kepercayaan kelembagaan HIPPA sebagai kelembagaan yang legal dalam pengelolaan irigasi Desa Klotok oleh anggota dan kelembagaan lainnya semakin meningkat. Kemudahan penarikan IPAIR karena petani yakin legalitas kelembagaan HIPPA. Dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga dapat menguntungkan anggota.



#### Motto

Mandiri, Demokratif, Partisipatif, dan Transparan

#### Visi

Unggul dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, Pelayanan untuk Meningkatkan Taraf Hidup Anggota

#### Misi

- ❖ Menyempurnakan dan menetapkan wadah untuk menghimpun petani pemakai air untuk mengurus kepentingan pertanian dan pengairan di desa secara tertib, teratur dan lancar.
- ❖ Meningkatkan kemampuan kelembagaan agar pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan irigasi dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga air yang diterima petani merata, adil dan tepat waktu.
- ❖ Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan berdasarkan pada kebutuhan anggota untuk memperbaiki dan mengembangka usahatani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
- ❖ Meningkatkan partisipasi anggota dengan melibatkan anggota sebagai pelaku utama usahatani untuk berperan aktif sejak proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga akan menumbuhkan perasaan memiliki dan sebagai jaminan keberlanjutan program.

#### Tujuan

HIPPA “Subur Makmur” berazaskan gotong royong dan musyawarah bersama sesama petani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar tata cara pengelolaan irigasi di dalam HIPPA dilakukan dari, oleh, dan untuk petani dengan sistem pengelolaan di bawah pengawasan Pemerintah Desa. HIPPA “Subur Makmur” melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip :

- a. Langsung dan mengikat
- b. Partisipatif
- c. Demokratis
- d. Desentralisasi
- e. Keterbukaan
- f. Akuntabilitas

### **Wilayah Kerja**

Wilayah Kerja HIPPA Subur Makmur berbasis desa, yaitu : Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Secara geografis terletak di Tuban bagian selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Desa Magersari
- Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Timur : Desa Kedungsoko
- Barat : Desa Bandungrejo

Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terbagi menjadi empat Dusun, yaitu :

- Dusun Lingit
- Dusun Klotok
- Dusun Dolok
- Dusun Landeyan

### **Sejarah Pengelolaan Irigasi**

Air baku yang dimanfaatkan pada waktu itu berasal dari sumber air Beron Kecamatan Rengel yang sangat terbatas jumlahnya sehingga berpengaruh terhadap pembagian air pada petak-petak sawah dan berdampak pada rendahnya hasil produksi. Oleh karena itu pada bulan September s/d Oktober 1980 Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas PU Pengairan membuat Proyek PTP (Petak Tersier Percontohan) yang ditujukan untuk memperbaiki saluran, membuat saluran baru serta membuat boks-boks pembagi untuk memperlancar pembagian air.

Dalam menunjang PTP untuk pembagian air ke petak-petak sawah, maka tahun 1980 dibentuk P3A (Petani Pemakai Air) yang selanjutnya berdasarkan Instruksi Gubernur Daerah Kepala Tingkat I Provinsi Jawa Timur tanggal 19 desember 1980 Nomor : 253.05/120.05/21/1980 tentang Pembentukan Petani Pemakai Air, di Jawa Timur P3A disebut HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Pemerintah Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melalui musyawarah desa pada tanggal 8 Januari 1993 membentuk HIPPA “SUBUR MAKMUR” dengan Keputusan Desa Nomor : 01/1993 yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban Nomor : 06/1993 tertanggal 14 Mei 1993.

HIPPA “SUBUR MAKMUR” difasilitasi pemerintah mengembangkan sumber air Bengawan Solo menjadi suplesi tambahan bagi Daerah Irigasi Beron untuk wilayah tersier Desa Klotok melalui proyek JICA. Di sisi lain degradasi sumber air di DI Beron mulai meningkat, sehingga layanan ini tidak mendapatkan air dari DI Beron.

Pengembangan sumber daya air dari pompa Bengawan Solo bantuan JICA tidak berlangsung lama (1993-1996), akibat kerusakan pompa air. Masyarakat petani Desa Klotok berinisiatif mengembangkan fasilitas pompa air dengan swadaya. Pengelolaan dan pengembangan pompa air untuk Desa Klotok juga didukung oleh pemerintah desa. Pendanaan pemerintah desa dan petani dapat meningkatkan potensi prasarana irigasi pompa ini secara bertahap, dan berdampak pengembangan areal 555 Ha menjadi 644 Ha.

### **Organisasi/Kelembagaan**

Struktur kelembagaan HIPPA “Subur Makmur” Desa Klotok Kecamatan Plumpang Tuban adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota, rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi, dimana setiap anggota mempunyai 1 suara, rapat anggota untuk menetapkan :
  - a. AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dan peraturan khusus lainnya

- b. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha
- c. Pemilihan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja HIPPA serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.

Rapat Anggota terdiri dari :

- 1.1 Rapat Anggota Musiman, bersifat rutin dan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun pada akhir musim panen sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas, paling lambat 2 bulan setelah akhir musim panen yang dilaksanakan dengan system perwakilan melalui Pemerintah Desa.
- 1.2 Rapat Anggota Khusus, bersifat insidentil dan dilaksanakan karena :
  - Ada perubahan AD/ART
  - Pengurus melakukan kegiatan yang bertentangan dengan AD/ART dan mengakibatkan kerugian pada HIPPA.
- 1.3 Rapat Anggota Luar Biasa, bersifat insidentil dan dilaksanakan karena keadaan luar biasa yang segera membutuhkan suatu keputusan dan kewenangannya ada pada anggota HIPPA.

Semua keputusan Rapat Anggota HIPPA dicatat dalam sebuah buku Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan berlaku sebagai Peraturan Tertulis yang sah dan mengikat.

## 2. Anggota

Anggota HIPPA “Subur Makmur” adalah semua masyarakat petani yang mendapatkan pelayanan air irigasi pompa atau irigasi pedesaan, baik air permukaan maupun air tanah, yang meliputi :

- a. Petani pemilik;
- b. Petani penyewa;
- c. Petani penggarap;
- d. Perwakilan-perwakilan dari badan-badan pemerintah yang memanfaatkan air irigasi (perikanan, pabrik, tanaman pangan dan tanaman perdagangan).

## 3. Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1.	Nursalim	Ketua I
2.	Siswo	Ketua II
3.	Joko Sunaryo	Sekretaris I
4.	M. Syaifudin	Sekretaris II
5.	Mulyadi	Bendahara I
6.	Zaenal Arifin	Bendahara II
7.	Kasmuji	Koordinator Teknis
8.	Umar Al Faruq	Pelaksana teknis
9.	Khoirul Anam	Pelaksana teknis
10.	Jupri	Pelaksana teknis
11.	M. Ansori	Pelaksana teknis
12.	Irawan Hadi	Pelaksana teknis

No.	Nama	Jabatan
13.	Isnaram	Pelaksana teknis
14.	Mat Tasmiran	Pelaksana teknis

## 4. Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1.	Sucipto	Koordinator
2.	Riswadi	Anggota
3.	Ali Mahmud	Anggota
4.	Ali Mas'ud Ansori	Anggota

Tugas Badan Pengawas adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan organisasi;
- b. Meminta keterangan kepada pengurus dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan;
- c. Mengadakan koordinasi dengan Pemerintahan Desa

## 5. Pembina

Pembina Umum HIPPA adalah Panitia Irigasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Pemerintah Desa Klotok adalah Pembina Umum HIPPA “Subur Makmur”. Sedangkan Pembina Teknis adalah Cabang Dinas PU Pengairan (UPTD) dan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

## 6. Penanggung jawab

Penanggungjawab HIPPA adalah Kepala Desa (Supranoto, SPd. ) dan Sekretaris Desa, yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kebijakan, pengelolaan kegiatan pengairan di desa.

**Administrasi Kelembagaan**

HIPPA “Subur Makmur” menerapkan sistem administrasi dengan kelembagaan terpadu :

1. Administrasi Organisasi
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Usaha

**Tabel Jenis Buku Administrasi Organisasi HIPPA “Subur Makmur”**

No.	Jenis Buku	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Buku Notulen Rapat	√	
2.	Buku Daftar Pengurus	√	
3.	Buku Daftar Pengawas	√	
4.	Buku Agenda Surat Masuk	√	
5.	Buku Agenda Surat Keluar	√	

No.	Jenis Buku	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
6.	Bukun Tamu	√	
7.	Buku AD ART	√	
8.	Buku Daftar Anggota	√	
9.	Buku Kegiatan	√	
10.	Buku Ekspedisi	√	
11.	Buku Daftar Piket	√	
12.	Buku Daftar Hadir	√	

Tabel Jenis Buku Administrasi Keuangan HIPPA “Subur Makmur”

No.	Jenis Buku	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Buku Kas	√	
2.	Buku Jurnal	√	
3.	Buku Kas Umum	√	
4.	Buku Bank	√	

Tabel Jenis Buku Administrasi Usaha HIPPA “Subur Makmur”

No.	Jenis Buku	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Buku Iuran Petani	√	
2.	Buku Penjualan	√	
3.	Buku Rekap Lansir	√	

### Pendampingan HIPPA

Pendampingan HIPPA dilakukan oleh :

- ❖ Komisi Irigasi Kabupaten Tuban

Komisi Irigasi Kabupaten Tuban telah memfasilitasi sosialisasi partisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier.

- ❖ Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tim Pembina HIPPA/GHIPPA/IHIPPA Provinsi Jawa Timur memfasilitasi peningkatan manajemen kelembagaan, peningkatan manajemen irigasi dan manajemen keuangan dengan bahan perbaikan dari HIPPA.

Jumlah anggota HIPPA “Subur Makmur” adalah sebagai berikut :

- ❖ Anggota petani : 1905 anggota/petani
- ❖ Luas lahan : 585 Ha (Laporan Terakhir) sekarang 644 Ha
- ❖ Jumlah SP (Stasiun Pompa) : 2 (Dsn. Lingit dan Dsn. Klotok)
- ❖ Kapasitas Pompa :
  - SP 1 : Dsn. Lingit Dynamo 16 dim 2 unit
  - SP 2 : Dsn. Klotok Dynamo 14 dim 1 unit

Iuran Anggota (Jas Air) dalam bentuk prosentase hasil panen petani adalah sebagai berikut :

- a. Musim Kemarau (MK) : 14 % dari hasil panen petani;
- b. Musim Penghujan (MP) : 12 % dari hasil panen petani

Hal ini sudah tertuang berdasarkan AD/ART HIPPA “Subur Makmur” Desa Klotok. Perbedaan jarak tidak mempengaruhi besarnya iuran, karena dalam desa Klotok terdiri dari kumpulan beberapa pompa imbalan yang mengairi satu areal/hamparan yang sama, sehingga besarnya iuran tidak dibedakan berdasarkan jaraknya.

Cara pembayaran iuran dengan bagi hasil (piyakaan) tanaman padi di sawah, jasa air MK 14 % dan jasa air MP 12 %, untuk petani dan pembayaran iuran dilakukan pada saat panen.

Jika terjadi gagal panen kerugian atau resiko ditanggung masing-masing, petani dan HIPPA. Jika terjadi kerusakan pompa akan segera diperbaiki oleh mekanik, ada mekanik khusus dari pengurus HIPPA yang bertugas memperbaiki kerusakan pompa sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan layanan air irigasi.

Masalah yang sering dihadapi terkait tarif jasa air adalah kehilangan gabah saat panen yang disebabkan ada kekeliruan saat mencatat, antara hasil timbangan dengan catatan tidak sama, sehingga terjadi selisih berat gabah. Contoh real jasa air MK I 2015/2016 (panen terakhir) gabah hilang di lapangan 8 sak, berat 416 kg, sehingga pengurus HIPPA mengambil langkah-langkah :

- Mempercepat kendaraan dalam mengangkut bawon (pembayaran jasa air)
- Meminta kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap aset, inventaris dan hasil HIPPA.
- Menjalin koordinasi antara lembaga desa dan instansi terkait

Masalah teknis yang timbul di lapangan :

- Terjadi genangan di Dusun Lingit
- Terjadi longsor di tempat Dinamo Induk Kawis
- Pengambilalihan lokasi/lahan dari HIPPA Bandungrejo

Upaya yang dilakukan :

- Membongkar pondasi saluran air yang menyempit di Dusun Lingit dan dipasang gedek (anyaman bambu) agar tidak longsor.
- Segenap pokja, pengurus, operator segera mambantu mengisi zak yang berisi tanah untuk menghadang/menghalau air yang menggenang.
- Dengan adanya alih teknologi BBM ke listrik HIPPA “Subur Makmur” mampu menangani lahan Klotok yang dulu dilayani areal dari HIPPA Desa Bandungrejo.

**Tabel Daftar Aset HIPPA “Subur Makmur”**

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Kondisi
1.	Kantor HIPPA	1	500.000.000	80 %
2.	Gudang Gisik	1	50.000.000	65 %
3.	Pos HIPPA	1	20.000.000	75 %
4.	Rumah Diesel	13	8.500.000	60 %
5.	Gudang Gabah	1	40.882.000	80 %
6.	Sumur Bor 3 D Lokasi Dadap	1	1.500.000	60 %
7.	Bak Kontrol Lokasi Utara Landean	2	1.201.000	70 %
8.	Bak Penghisap Temes Balong		8.014.500	70 %
9.	Tempat Diesel Geger Kali	1	21.416.500.	85 %
10.	Rumah Diesel Temes Balong	1	7.000.000	70 %
11.	Plengsengan Dolok ke PU	1.665 m	457.000.000	70 %
12.	Plengsengan Makam Dolok ke Utara	225 m	60.000.000	65 %
13.	Plengsengan Tangkis ke Pasar	300 m	70.000.000	50 %
14.	Plengsengan Karanganyar	780 m	180.000.000	50 %
15.	Plengsengan Tangkis Sekunder	330 m	90.750.000	70 %
16.	Plengsengan SD Klotok ke Utara	500 m	150.000.000	70 %
17.	Plengsengan Depan Warung P. Parno	60 m	18.000.000	70 %
18.	Plengsengan H. Aripin ke Utara	150 m	40.000.000	60 %
19.	Plengsengan Depan Kantor HIPPA	400 m	100.000.000	45 %
20.	Plengsengan Pertigaan Rifai ke Utara	100 m	30.000.000	70 %
21.	Plengsengan Perempatan Dolok	100 m	31.000.000	65 %
22.	Plengsengan Kali Menceng/Jagong	1.415 m	415.000.000	65 %
23.	Plengsengan Telogo Karanganyar	120 m	42.000.000	70 %
24.	Plengsengan Depan P. Parto ke Utara	350 m	133.000.000	70 %
25.	Plengsengan Gorong2 Klotok	12 m	30.000.000	65 %
26.	Plengsengan Kali Balong Dolok H. Kasmuni	200 m	18.684.000	65 %
27.	Rumah Pos dan Motor Listrik Induk		744.154.000	99 %
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.268.102.000</b>	

**Tabel Pendapatan HIPPA “Subur Makmur” MK I 2005/2016**

No.	Uraian	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Hasil Panen MK I 2015-2016	3.843.387.350		4.852.670.644

No.	Uraian	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
2.	Bunga Bank	2.228.893		4.854.899.537
	a. Pajak Bank		444.530	4.854.455.007
	b. Administrasi Bank		55.000	4.854.400.007
3.	Biaya-Biaya Operasional			
	a. Operasional/BBM		328.720.000	4.525.680.007
	b. Perawatan dan Pemeliharaan		131.920.700	4.393.759.307
	c. Administrasi		251.276.297	4.142.483.010
	d. Dana Sosial		3.640.000	4.138.843.010
	e. Lain-lain		232.585.609	3.906.257.401
4.	Pengembalian 50 % Biaya	474.071.303		4.380.328.704
5.	SHU (Sisa Hasil Usaha)			
	a. 20 % Jasa Pengurus		674.209.082	3.706.119.622
	b. 10 % Administrasi		337.104.541	3.369.015.081
	c. 2,5 % Zakat Maal		84.276.135	3.284.738.946
	d. 12,5 % Kas HIPPA		421.380.676	2.863.358.270
	e. 50 % Pemeliharaan Fisik		1.685.522.705	1.177.835.565
	f. 5 % BOP Desa		168.552.271	1.009.283.294
6.	Pendapatan 12,5 % dari SHU dari Hasil Panen	421.380.676		1.430.663.970
	<b>Jumlah</b>	<b>4.741.068.222</b>	<b>4.319.687.546</b>	<b>1.430.663.970</b>

Tabel Biaya Operasional HIPPA “Subur Makmur”

No.	Uraian Biaya Operasional	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1.	Biaya BBM		328.720.000	
	a. Bahan Bakar Mesin Pompa	323.149.000		
	b. Bahan Bakar Mobil	5.571.000		
2.	Biaya Perawatan dan Pemeliharaan		131.920.700	
	a. Suku Cadang Mesin Pompa	47.573.500		
	b. Servis Mesin Pompa	915.000		
	c. Suku Cadang Kendaraan	4.352.000		
	d. Servis Kendaraan	3.169.500		
	e. Pemeliharaan Saluran	75.910.700		
3.	Biaya Administrasi		251.276.297	
	a. Pengadaan ATK	15.490.800		

No.	Uraian Biaya Operasional	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
	b. Konsumsi	52.588.500		
	c. Transportasi	11.560.000		
	d. Prosentase Desa Lain	7.515.000		
	e. Biaya Rapat	18.674.500		
	f. Uang Minum	37.200.000		
	g. Biaya Seragam	19.063.000		
	h. Biaya Panen	89.184.497		
4.	Dana Sosial		3.640.000	
	a. Santunan Kecelakaan Kerja	2.840.000		
	b. Sumbangan-Sumbangan	800.000		
5.	Biaya Lain-Lain		232.585.609	
	a. Sewa dan Ongkos	8.875.500		
	b. Jasa Listrik	223.710.109		
	<b>Jumlah</b>			<b>948.142.606</b>

Table SHU (Sisa Hasil Usaha) HIPPA “Subur Makmur”

<b>A. Pendapatan Usaha</b>		3.845.116.713
a. Hasil Panen MT I 2015-2016	3.843.387.350	
b. Jasa Bank	1.729.363	
<b>B. Pengeluaran/ Biaya-Biaya</b>		474.071.303
50 % dari jumlah pengeluaran biaya	474.071.303	
<b>C. Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>		3.371.045.410

Table Pembagian SHU HIPPA “Subur Makmur”

<b>Sisa Hasil Usaha (SHU)</b>			<b>3.371.045.410</b>
a. Jasa Pengurus	20 %	674.209.082	
b. Administrasi	10 %	337.104.541	
c. Zakat Maal	2,5 %	84.276.135	
d. Kas Organisasi	12,5 %	421.380.676	
e. Pemeliharaan Fisik	50 %	1.685.522.705	
f. BOP Desa	5 %	168.552.271	
<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>3.371.045.410</b>	<b>3.371.045.410</b>

Pada awalnya wilayah kerja HIPPA “Subur Makmur” Desa Klotok merupakan daerah layanan Daerah Irigasi Beron dengan luas layanan 595 Ha. Degradasi sumberdaya mengakibatkan ketersediaan tidak mampu melayani sawah irigasi Desa Klotok. Desa Klotok difasilitasi pemerintah mengembangkan pompa air bantuan JICA dengan memanfaatkan Bengawan Solo.

Pompa air dari Bengawan Solo hanya mampu bekerja selama 3 tahun (1993-1996). Swadaya pemerintah desa dan petani mengembangkan dan mengelola sisa jaringan irigasi menjadi jaringan irigasi yang dikelola pemerintah desa bersama petani dengan investasi secara bertahap tahun 1993 sampai tahun 2010 sebesar Rp. 3.488.371.200. Jaringan irigasi berkembang dari 595 Ha menjadi 644 Ha dengan perubahan lahan ladang /tegalan menjadi sawah irigasi.

Jaringan irigasi ini memanfaatkan Jaringan irigasi Beron mulai B.BR 15 sampai B.BR.19, wilayah ini merupakan wilayah pemerintah Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Jaringan irigasi tersier yang terdiri dari 6 jaringan tersier, yaitu :

1. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 15 B seluas 113,84 Ha
2. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 15 seluas 241,98 Ha
3. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 16 seluas 11 Ha
4. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 17 seluas 267,8 Ha
5. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 18 seluas 11,8 Ha
6. Jaringan Irigasi Tersier B.BR 19 seluas 8,62 Ha

Jaringan irigasi ini memanfaatkan sumber air dari Bengawan Solo dan suplesi favour Kuwu dengan pompa air. Pemompaan air dari Bengawan Solo disuplai ke Saluran Sekunder Beron hanya menjangkau 578,04 Ha, pemanfaatan pompa imbal di tengah daerah layanan maka daerah layanan irigasi pompa Desa Klotok Kecamatan Plumpang Tuban mencapai 644 Ha.

### **Wewenang Pengelolaan**

Pengelolaan jaringan irigasi pompa Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban merupakan jaringan irigasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Sumber investasi jaringan irigasi terdiri dari 2, yaitu ;

1. Investasi bangunan dan saluran Jaringan Sekunder Beron dari Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Investasi pengembangan jaringan tersier berasal dari Pemerintah Desa Klotok.

### **Jaringan Irigasi Desa Klotok**

Jaringan irigasi Desa Klotok memanfaatkan Bengawan Solo dan Afvour Kuwu dengan pompa air. Air irigasi yang terpompa dialirkan ke saluran Sekunder beron B. BR 15 samapai B. BR 19 (pada B. BR 19 dilakukan pembendungan sementara). Di tengah-tengah daerah layanan dilakukan pemompaan “pompa imbal” guna memperluas wilayah layanan. Pompa “imbal” berfungsi menaikkan elevasi air irigasi, juga berfungsi pula sebagai penguras genangan air.

### **Pembagian Air Irigasi**

Ketersediaan air jaringan irigasi Desa Klotok tergantung dari ijin pemakaian air, ketersediaan air Afvour Kuwu dan kemampuan pompa.

- a. Dasar pembagian air dilakukan berdasarkan perbandingan daerah layanan (semakin besar wilayah layanan, dilakukan pembukaan pintu air yang semakin besar)

b. Prosedur pembagian air dilakukan :

- Berdasarkan kesepakatan areal tanam, maka HIPPA merancang instalasi pompa
- Ketua blok mengatur pembukaan pintu air di Saluran Sekunder Beron dan kelompok kerja mengatur pembukaan pintu atau pemasangan papan pada sponeng boks tersier/kuarter. Pembukaan pintu atau pemasangan pap ini berdasarkan luas layanan.
- Jika air irigasi yang diterima petani kurang memenuhi, maka petani mengusulkan ke kelompok kerja, kelompok kerja melakukan penyesuaian penyetelan pintu air atau pemasangan papan.

**Sumber Dana**

Dana HIPPA “Subur Makmur” diperoleh dari :

1. Iuran anggota
2. Sumbangan atau bantuan
3. Denda-denda pelanggaran
4. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum yang berlaku

Program pendanaan harus disahkan melalui Rapat Anggota.

Sedangkan cara memperoleh dana gotong royong dan usaha lain yang sah serta denda-denda pelanggaran akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.

**Sisa Hasil Usaha**

Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah sebagai berikut :

No.	Prosentase	Kegunaan
1.	20 %	Jasa Pengurus
2.	10 %	Administrasi
3.	15 % terdiri dari :	Kas Organisasi
	12,5 %	Dana Cadangan
	2,5 %	Zakat Maal
4.	50 %	Pemeliharaan Fisik
5.	5 %	Kas Desa

**A. Jasa Pengurus**

Pengurus HIPPA “Subur Makmur” mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan jasa atas jerih payahnya sebagai pengurus. Dana untuk jasa pengurus sebesar 20 % berlaku untuk :

- a. 8 % : Pengurus Inti
- b. 12 % : Kelompok Kerja

**B. Administrasi**

Dana administrasi sebesar 10 % dipergunakan untuk :

- a. Dana Pembinaan; adalah dana yang dipergunakan untuk penanggungjawab dan pembinaan oleh pemerintah desa serta kebutuhan lain terkait kegiatan pertanian.

- b. Dana Pengawasan;
- c. Dana Sopir dan Operator
- d. Dana Administrasi Rapat Anggota

**C. Dana Kas Organisasi**

Dana Kas Organisasi sebesar 15 % dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 2,5 % : Zakat Maal, dikelola oleh pemerintahan desa
- b. 12,5 % : Dana Cadangan, sebagai tambahan modal apabila dalam pengelolaan kegiatan mengalami kekurangan modal kerja (bila pengeluaran organisasi lebih besar daripada rencana anggaran yang dibuat). Dana cadangan diwujudkan dalam bentuk simpanan di Bank

**D. Dana Pemeliharaan Fisik**

Dana untuk pemeliharaan fisik sebesar 50 % merupakan dana penyisihan untuk desa yang pengelolaannya oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan desa.

**E. Kas Desa**

Dana untuk kas desa sebesar 5 % berlaku ketentuan bahwa dana tersebut adalah dana untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa (BOP).

**Kunci Sukses HIPPA “Subur Makmur” adalah :**

- Peningkatan kinerja dengan kerjasama yang baik antara pengurus, pokja dan petani yang baik dan kompak untuk mewujudkan tujuan yang sama.
- Pengadaan barang sudah berjalan dengan baik, pengawas sudah melakukan control yang ketat, yaitu mendampingi saat pembelian barang diatas 1 juta, dan melakukan pengecekan nota-nota pembelian setiap malam minggu.
- Pengawasan pada waktu panen untuk mengontrol dan mengevaluasi hasil iuran jasa air.

**Prestasi HIPPA “SUBUR MAKMUR”**

Prestasi yang telah dicapai HIPPA “SUBUR MAKMUR” Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban adalah :

- 1. Peringkat I (2011) : Evaluasi dan Pembinaan HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Bojonegoro
- 2. Peringkat I (2011) : Sarasehan Evaluasi dan Pembinaan HIPPA/GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur
- 3. Teladan I (2011) : Evaluasi dan pembinaan HIPPA/GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur
- 4. Pemenang Juara I (2012) : HIPPA Nasional

**Kesimpulan dan Rekomendasi TIRTA :**

- ❖ Beberapa pengelola irigasi tersier adalah HIPPA, namun beberapa penyedia layanan irigasi pompa Bengawan Solo adalah pengusaha area, kebanyakan HIPPA tidak aktif, karena kurangnya dukungan modal, manajemen organisasinya kurang bagus, kelembagaannya lemah, namun ada salah satu HIPPA yang aktif yaitu HIPPA “Subur Makmur” Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
- ❖ TIRTA mendalami bagaimana HIPPA Klotok bisa mengelola layanan irigasi dengan areal seluas 644 Ha dan mengkaji lebih jauh tentang ketrampilan HIPPA mengelola layanan irigasi dan manajemen organisasi dan bagaimana kesuksesan HIPPA Klotok bisa direplikasi atau dicontoh oleh desa lain, sehingga bisa mewujudkan kemandirian HIPPA dalam hal :

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

- Kapasitas pengelolaan irigasi / organisasi untuk operasionalisasi dan penyediaan layanan irigasi.
- Kapasitas pengelolaan keuangan untuk mencukupi kebutuhan keuangan biaya operasional, perawatan, perbaikan, & pengembangan jaringan.
- Kapasitas kemampuan teknis / *engineering* untuk penyediaan, perawatan dan perbaikan skema irigasi.
- Penghematan air dan peningkatan produktivitas.

Foto HIPPA “Subur Makmur” Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban



Persediaan pipa baru HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Tangki BBM untuk menyimpan solar/BBM pompa HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Peta Wilayah Kerja HIPPA “Subur Makmur” Klotok yang terpasang di Kantor HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Struktur Organisasi HIPPA “Subur Makmur” Klotok yang terpasang di Kantor HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Foto Bersama Pengurus dan Pengelola Saat Kunjungan ke HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Foto Bersama Pengurus dan Pengelola Saat Kunjungan ke HIPPA “Subur Makmur” Klotok



Foto Bersama Pengurus dan



Kantor HIPPA “Subur Makmur”



Program Kerja HIPPA "Subur Makmur" Klotok



Piagam Penghargaan HIPPA "Subur Makmur" Klotok sebagai Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

## LAMPIRAN 9 – PROFIL BUMDES AKTIF (BUMDES GEDONGARUM)

Nama	: BUMDES LPPD (Lembaga Pengelolaan Pompanisasi Desa) HIPPA “JAYA TIRTA”
Alamat	: Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor – Kabupaten Bojonegoro Prov. Jawa Timur
Berdiri	: 7 April 2003
Pelayanan	: Jasa Air
Legalitas	: Akte Notaris & Pengadilan Negeri tahun 2015
Ketua	: Karnoto (0858 1538 3702)

### PROFIL DESA

Desa Gedongarum merupakan bagian dari Kec. Kanor yang terdiri dari 25 desa. Luas desa + 4,5 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 2500 orang. Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa adalah pertanian, khususnya tanaman padi.

BUMDES berdiri dengan cikal bakalnya adalah HIPPA “Jaya Tirta” yang sejak tahun 2003 mengelola sendiri jasa irigasi air kepada para petani. Pengelolaan jasa irigasi air di Desa Gedongarum sendiri dimulai sejak tahun 1991. Dari tahun tersebut hingga 2002, pengelolaan jasa air di Desa Gedongarum dilakukan pengusaha perorangan yang bermitra dengan HIPPA. HIPPA secara perlahan belajar dan memupuk modalnya sendiri untuk pengelolaan jasa air kepada petani hingga akhirnya berhasil menjadi mandiri.

Secara bertahap, HIPPA terus mengembangkan pelayanannya hingga mampu menjangkau baik Desa Gedongarum sendiri maupun Desa Temu. Secara umum, pelayanannya hingga saat ini adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI (DESA)	LUAS WILAYAH PELAYANAN (Ha)	JUMLAH PETANI DILAYANI	YG STASIUN POMPA
1	Gedongarum	360,5	1.014	1
2	Temu	145,1	442	
	Total	505,6	1.456	1

Jumlah Pompa yang dimiliki BUMDES Gedongarum sampai saat ini adalah 5 unit type dynamo (4 swadaya dan 1 bantuan pemerintah) dengan kapasitas 205.500 Kwh. Pompa ini didukung mesin imbalan sejumlah 46 unit, dengan kapasitas 8,5-24 PK.

### KINERJA BUMDES GEDONGARUM

Secara umum, BUMDES Gedongarum telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hal ini terlihat dari jangkauan pelayanannya yang telah melebihi 500 Ha dan menjangkau desa tetangga. Secara eksternal, juga telah mendapatkan predikat sebagai salah satu HIPPA/BUMDES terbaik dari Pemkab. Bojonegoro dan juga selalu mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk bantuan modal usahanya.

Di masa depan, BUMDES juga Gedongarum juga diyakini memiliki peluang usaha pengembangan jasa irigasi yang terbuka luas. Hal ini disebabkan BUMDES masih dapat melayani areal sawah di beberapa desa yang belum mendapatkan layanan air irigasi secara memadai. Beberapa desa tetangga tersebut antara lain Desa Temu, Simorejo, Prigi dan Sumberwangi.

Secara kinerja, BUMDES Gedongarum dapat berhasil mengelola usaha karena hal-hal berikut :

1) Sejak awal para pengelola telah memiliki keinginan kuat untuk mengelola usaha jasa irigasi ini secara mandiri. Sehingga sejak awal para pengelola telah mulai belajar mengoperasikan pompa dan teknis irigasi serta mengumpulkan permodalan untuk bisa membiayai sendiri kebutuhan investas dan modal kerja usahanya.

2) Secara operasionalnya, BUMDES Gedongarum berusaha memberikan pelayanan terbaik dan secara transparan melaporkan hasil usahanya. Pelayanan ini terlihat dari kelancaran dan kecukupan air untuk sawah petani serta nilai jasa yang ditetapkan dari sebelumnya yaitu 1/6 menjadi 1/7. Transparansi dari terlihat dari laporan-laporan tertulis tentang keuangan yang dilaporkan melalui musyawarah desa secara rutin.

3) Bentuk usaha BUMDES secara operasional mendorong para pengelolanya untuk mampu mengkombinasikan unsur sosial dan bisnis yang menjadi ciri BUMDES serta sekaligus mendapat dukungan dari pemerintahan desa.

Secara keuangan kinerja BUMDES Gedongarum adalah sebagai berikut:

Neraca Bumdes Gedongarum - 2015

<b>Assets /Aktiva</b>		<b>IDR</b>	<b>Liabilities/Pasiva</b>	<b>IDR</b>
Dynamo	5	103,345,000.00	Pinjaman Pihak ke 3	280,000,000.00
Mesin			Pinjaman KPRI Rangel	550,000,000.00
D15	3	68,750,000.00	Penyertaan Modal Awal	105,653,834.00
Disel Imbalan	43	177,310,000.00	Pendapatan tahun berjalan	187,864,634.00
Pompa	39	127,610,000.00		
Paralon	50	122,696,800.00		
Tanah & bangunan		102,047,500.00		
Saluran & Jembatan		198,705,650.00		
Peralatan Lain-nya		41,878,000.00		
Inventaris&Mebel Air		181,175,518.00		
		<b>1,123,518,468.00</b>		<b>1,123,518,468.00</b>

## LAMPIRAN 10 – LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN

### LEMBAGA KEUANGAN YANG MENJADI RESPONDENT SURVEY TIRTA

Beberapa lembaga keuangan yang disurvei terdiri dari beberapa jenis lembaga keuangan dengan ruang lingkup pelayanan yang juga berbeda-beda (produk dan market nya).

#### 1.BANK JATIM

Alamat : Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya 60271  
 Telpon : (031) 531 0090  
 Website : [www.bankjatim.co.id/](http://www.bankjatim.co.id/)  
 Badan Hukum : PT (Terbuka / Go Public)  
 Jenis Lembaga : Lembaga Keuangan Bank  
 Asset : Rp. 52 Trilyun (Per September 2015)  
 Pemilik : Pemerintah Daerah (80%)-Mayoritas  
 Contact Person : Gugy Pratama (Penyelia Pemasaran Bank Jatim Bojonegoro)/081330621002



bersama kami, berkembang pasti

Bank Jatim berdiri sejak 17 Agustus 1961 dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui berbagai layanan yang dimilikinya. Saat ini memiliki kantor pusat di Surabaya dan telah melayani masyarakat, bukan saja di Jawa Timur, tetapi juga provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Namun untuk daerah Indonesia Timur (khususnya NTT, NTB, Papua), Bank Jatim belum memiliki kantor pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta data yg diperoleh, Bank Jatim telah memiliki beragam produk yang sesuai untuk membiayai usaha pertanian, seperti Pundi Kencana, Kredit Investasi Pemerintah (KIP) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta Pinjaman Rekening Koran (PRK). Khusus untuk kredit bidang pertanian, bahkan telah dikelola tersendiri oleh Direktorat Kredit Agrobisnis.

Dengan produk yang bervariasi ini, para pengusaha/lembaga usaha memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sesuai kemampuan dan kebutuhan yang dimilikinya.

Dari hasil interview dengan Staf Kredit Bank Jatim Bojonegoro, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Jatim telah memiliki komitmen untuk membiayai sektor pertanian, beberapa produk kreditnya (KIP dan KKP-E) bahkan merupakan produk yg menjadi program pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) termasuk salah satunya di sektor pertanian.
2. Untuk pengusaha/lembaga usaha di bidang pompa irigasi, Bank Jatim bahkan telah lebih 3 tahun menyalurkan kredit, baik kepada pengusaha maupun HIPPA (Gedongarum, Tambakrejo, Pilang, Prigi) dan BUMDES (Kedungprimpen). Atau dengan kata lain, Bank Jatim telah familiar dengan usaha pompa irigasi maupun lembaga HIPPA/BUMDES. Bagi lembaga keuangan, hal ini sangat penting karena berarti mereka telah memahami usaha pompa irigasi, baik teknis usaha maupun market nya (pelaku dan wilayahnya).
3. Di masa depan, Bank Jatim berkomitmen untuk terus memberikan kredit untuk usaha pompa irigasi, karena dipandang merupakan usaha yang prospektif yang dibuktikan dengan kelancaran pembayaran mereka. Hal ini merupakan hal yang sangat positif bagi pelaku usaha pompa irigasi untuk mengakses kredit di Bank Jatim, karena usaha ini dianggap telah memiliki track record yang bagus (khusus Bank Jatim Cab. Bojonegoro 95% lancar).
4. Produk kredit yang dimiliki Bank Jatim juga memberikan kemudahan untuk usaha pompa irigasi, karena tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun, plafond pinjaman bisa lebih 1 milyar, suku bunga terjangkau (11-15% efektif/tahun) serta adanya subsidi pemerintah untuk meringankan bunga dan jaminan kredit. Sehingga sesuai untuk kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sehingga dapat disimpulkan, Bank Jatim akan dapat menjadi partner penting bagi Project TIRTA, khususnya untuk wilayah Jawa Timur.

#### RINGKASAN PRODUK PINJAMAN

NO	NAMA	FITUR UMUM	PERSYARATAN UMUM	LAINNYA
1	Pundi Kencana	-Plafond = Max 500 juta -Jangka Waktu = Max 5 Tahun -Bunga =15,5%/tahun annuitas -Biaya lain-lain = Provisi 0,5%	-Sasaran= Perorangan, Badan Usaha (UD, CV, PT, BUMDES), Kelompok (Koptan, HIPPA) -Usia usaha = 1 tahun` -Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi -Kelengkapan Dokumen :	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukukan secara notaril maupun dibawah tangan

		dan administrasi max 500 ribu	<ul style="list-style-type: none"> <li>-KTP/KK, Foto Pengurus, NPWP</li> <li>-SIUP dan TDP</li> <li>Izin usaha lokal (SK Kades)</li> <li>-Daftar Anggota Pemanfaat (khusus Kelompok , BUMDES)</li> <li>-Proposal &amp; RDKK</li> <li>-Rekomendasi Dinas terkait (Koptan, HIPPA, BUMDES)</li> <li>-Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKP &amp; STNK, Cash Collateral, Asuransi Kredit</li> </ul>	(tergantung besar plafond).  Khusus untuk BUMDES, kelembagaannya telah disahkan secara notaril.
2	Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plafond = Sesuai kebutuhan dan kemampuan (dapat diatas 500 juta).</li> <li>-Jangka Waktu = Max 5 Tahun</li> <li>-Bunga =13-14%/tahun efektif murni</li> <li>-Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran= Perorangan, Badan Usaha (UD, CV, PT, BUMDES), Kelompok (Koptan, HIPPA)</li> <li>-Usia usaha = 1 tahun`</li> <li>-Penggunaan = Investasi</li> <li>-Kelengkapan Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>-KTP/KK, Foto Pengurus, NPWP</li> <li>-SIUP dan TDP</li> <li>Izin usaha lokal (SK Kades)</li> </ul> </li> <li>-Daftar Anggota Pemanfaat (khusus Kelompok , BUMDES)</li> <li>-Proposal &amp; RDKK</li> <li>-Rekomendasi Dinas terkait (Koptan, HIPPA, BUMDES)</li> <li>-Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB &amp; STNK, Cash Collateral, Asuransi Kredit</li> </ul>	<p>Proses pinjaman maksimal 2 minggu.</p> <p>Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).</p>
3	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plafond = <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perorangan Max 100 juta</li> <li>-Kelompok/Kop Max 500 juta</li> </ul> </li> <li>-Jangka Waktu = Max 5 tahun</li> <li>-Bunga =12,75-13,75%/tahun efektif murni</li> <li>-Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran=Perorangan,Kelompok dan Koperasi.</li> <li>-Usia usaha = 1 tahun</li> <li>-Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi</li> <li>-Kelengkapan Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>-KTP/KK, Foto Pengurus, NPWP</li> <li>-SIUP dan TDP</li> <li>Izin usaha lokal (SK Kades)</li> </ul> </li> <li>-Daftar Anggota Pemanfaat (khusus Kelompok , BUMDES)</li> <li>-Proposal &amp; RDKK</li> <li>-Rekomendasi Dinas terkait (Koptan, HIPPA, BUMDES)</li> <li>-Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB &amp; STNK, Cash Collateral, Asuransi Kredit</li> </ul>	<p>Proses pinjaman maksimal 2 minggu.</p> <p>Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).</p>
4	Kredit Umum Pola Angsuran (KUPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plafond = Max 500 juta</li> <li>-Jangka Waktu = Max 15 tahun</li> <li>-Bunga = 12,75%/bulan Effektif murni</li> <li>-Biaya lain-lain = Provisi 0,5% dan administrasi max 500 ribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran= Perorangan (Pegawai / PNS)</li> <li>-Penggunaan = Konsumtif &amp; Usaha</li> <li>-Kelengkapan Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>-KTP/KK, Foto, NPWP</li> <li>-SK Pegawai</li> </ul> </li> <li>-Jaminan : Pemotongan Gaji</li> </ul>	<p>Proses pinjaman maksimal 2 minggu.</p> <p>Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).</p>

5	Pinjaman Rekening Koran (PRK)	-Plafond = Sesuai Kemampuan dan kebutuhan -Jangka Waktu = Max 1 tahun -Bunga = 12,75% dari fasilitas pinjaman yang dipakai -Biaya lain = Tidak Ada	Sasaran= Perorangan & Badan Usaha (UD,CV, PT) -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK, Foto, NPWP,TDP, SIUP, -AD/ART Badan Usaha -Proposal -Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB & STNK, Cash Collateral	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).
---	-------------------------------	---	--	--

Catatan : Untuk usaha pompa irigasi, suku bunga, jaminan dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan umum masing-masing produk. Khusus untuk pembayaran angsuran kredit usaha, secara umum bank melihat dan menganalisa karakteristik dan resiko usaha yang dimiliki sebagai dasar untuk penentuan keputusannya. Untuk bidang pertanian, biasanya melihat siklus tanam komoditi yang dibiayai dan dibayar pada saat panen.

## 2.BPR BANK DAERAH BOJONEGORO

Alamat : Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro 60271  
 Telpon : (0353) 883956  
 Website : -  
 Badan Hukum : PD (Perusahaan Daerah)  
 Jenis Lembaga : Microfinance - Bank  
 Asset : Rp. 159 Milyar (Per Juni 2015)  
 Pemilik : Pemerintah Daerah  
 Contact Person : Irmawati (Kepala Biro Pemasaran)/08775588871



Didirikan sejak 1959 oleh Pemkab Bojonegoro dengan tujuan mendukung perekonomian Kab. Bojonegoro, khususnya untuk masyarakat pedesaan dan berpenghasilan rendah.

Sebagai lembaga microfinance lokal, saat ini BPR hanya memiliki layanan di Bojonegoro saja (6 kecamatan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta data yg diperoleh, BPR telah memiliki beragam produk yang sesuai untuk membiayai usaha pertanian, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) Jasa dan KMK Pertanian.

Dengan produk yang bervariasi ini, para pengusaha/lembaga usaha memiliki pilhan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sesuai kemampuan dan kebutuhan yang dimilikinya.

Dari hasil interview dengan Staf Kredit BPR, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1.BPR telah memiliki komitmen untuk membiayai sektor pertanian. Pemkab Bojonegoro bahkan secara rutin meminta BPR untuk secara khusus mensukseskan program-program pembangunan, termasuk bidang pertanian. Di tahun 2015, BPR diminta secara khusus mendukung program Pemkab Bojonegoro untuk mensukseskan pengembangan BUMDES. Di tahun tersebut, BPR telah membiayai 2 BUMDES (salah satunya BUMDES untuk irigasi pompa, yaitu Desa Kedungrimpen).
- 2.Untuk pengusaha/lembaga usaha di bidang pompa irigasi, BPR telah lebih 2 tahun menyalurkan kredit , baik kepada pengusaha maupun HIPPA. Atau dengan kata lain, BPR telah familiar dengan usaha pompa irigasi maupun lembaga HIPPA/BUMDES. Bagi lembaga keuangan, hal ini sangat penting karena berarti mereka telah memahami usaha pompa irigasi, baik teknis usaha maupun market nya (pelaku dan wilayahnya).
- 3.Di masa depan, BPR berkomitmen untuk terus memberikan kredit untuk usaha pompa irigasi, karena dipandang merupakan usaha yang prospektif yang dibuktikan dengan kelancaran pembayaran mereka. Hal ini merupakan hal yang sangat positif bagi pelaku usaha pompa irigasi untuk mengakses kredit di BPR, karena usaha ini dianggap telah memiliki track record yang bagus (95% lancar).
- 4.Produk kredit yang dimiliki BPR juga cukup memberikan kemudahan untuk usaha pompa irigasi, karena tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 3 tahun, plafond pinjaman mencapai Rp. 300 juta, suku bunga cukup bersaing dng lembaga microfinance lain (12-18% flat/tahun). Dari segi usaha pompa irigasi, produknya cukup sesuai untuk kebutuhan modal kerja.

Sehingga dapat disimpulkan, BPR Bank Daerah Bojonegoro akan dapat menjadi partner penting bagi Project TIRTA, khususnya untuk wilayah Bojonegoro.

RINGKASAN PRODUK PINJAMAN				
NO	NAMA	FITUR UMUM	PERSYARATAN UMUM	LAINNYA
1	Kredit Modal Kerja (KMK) Pemberdayaan	-Plafond = Max 10 juta -Jangka Waktu = Max 12 bulan -Bunga =0,5%/bulan flat -Biaya lain-lain tidak ada	- Sasaran= Perorangan -Usia usaha = 0 tahun -Penggunaan = Modal Kerja -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK dan NPWP -Izin usaha lokal (SK Kades) -Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB & STNK	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).
2	KMK Umum	-Plafond = Max 10 juta -Jangka Waktu = Max 36 bulan -Bunga =0,9%/bulan flat -Biaya lain-lain tidak ada	Sasaran= Perorangan -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK dan NPWP -Izin usaha lokal (SK Kades) -Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB & STNK	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).
3	KMK Perdagangan/Jasa	-Plafond = Max 100 juta -Jangka Waktu = Max 36 bulan -Bunga = 1%/bulan flat -Biaya lain = Provisi 1,5%	Sasaran= Perorangan & Badan Usaha (UD,CV, PT) -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK, NPWP,TDP, SIUP -AD/ART Badan Usaha -Proposal -Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB & STNK, Cash Collateral	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).
4	KMK Pertanian	-Plafond = Max 100 juta (khusus HIPPA/BUMDES Max. 300 juta) -Jangka Waktu = Max 6 bulan -Bunga = 1,5%/bulan flat -Biaya lain = Provisi 1,5%	Sasaran= Perorangan & Badan Usaha (UD,CV, PT, BUMDES) -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja usaha pertanian -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK, NPWP,TDP, SIUP -AD/ART Badan Usaha -Proposal -Jaminan : Sertifikat Tanah, BPKB & STNK, Cash Collateral	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).
5	KMK Konstruksi	-Plafond = Max 300 juta -Jangka Waktu = Max 6 bulan -Bunga = 1%/bulan flat -Biaya lain = Provisi 1,5%	Sasaran= Perorangan & Badan Usaha (UD,CV, PT) -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja usaha konstruksi, khususnya proyek pemerintah -Kelengkapan Dokumen : -KTP/KK, NPWP,TDP, SIUP -AD/ART Badan Usaha -Proposal -Jaminan : Sertifikat Tanah,	Proses pinjaman maksimal 2 minggu.  Perjanjian kredit dilakukan secara notaril maupun dibawah tangan (tergantung besar plafond).

Catatan : Untuk usaha pompa irigasi, suku bunga, jaminan dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan umum masing-masing produk. Khusus untuk pembayaran angsuran kredit usaha, BPR melihat dan menganalisa karakteristik dan resiko usaha yang dimiliki sebagai dasar untuk penentuan keputusannya. Untuk bidang pertanian, biasanya melihat siklus tanam komoditi yang dibiayai dan dibayar pada saat panen.

### 3. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-Perdesaan Kec. KANOR

Alamat : Jl. Raya Kanor No. 01 (Komplek Kantor Kec. Kanor)  
 Telpon : -  
 Website : -  
 Badan Hukum : SK Bupati Bojonegoro  
 Jenis Lembaga : Lembaga Keuangan Microfinance  
 Asset : Rp. 7,9 Milyar (Per November 2015)  
 Pemilik : Pemerintah Kecamatan  
 Contact Person : Rokhim/Sekretaris UPK (0852 3377 2053)



UPK merupakan lembaga tingkat kecamatan yang mengelola program PNPM. PNPM merupakan program pemerintah RI berbasis partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru.

UPK PNPM Kec. Kanor telah dibentuk sejak 1998 (sejak program nasional ini lahir dengan nama awal Program Pengembangan Kecamatan/PPK). Selain mengelola microfinance, UPK juga memiliki tugas rutin dalam mengelola dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari pemerintah. Selain untuk microfinance, dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai bidang pembangunan di tingkat desa seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

Untuk pengembangan program PNPM, DFAT (melalui Palladium) juga telah memberikan bantuan dana selama 5 tahun terakhir. Bantuan ini dikoordinasikan dan diimplementasikan melalui Project PRSF (Poverty Reduction Support Facility) yang bertugas membantu TNP2K (Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang merupakan induk program PNPM saat ini.

Dalam bidang microfinance, UPK hanya memiliki produk kredit saja. Produk tersebut adalah UEP (Unit Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). Kedua produk disalurkan ke masyarakat dengan berbasis kelompok.

Prosedur dan kebijakan microfinance PNPM diatur dan dilaksanakan berdasarkan PTO (Petunjuk Teknik Operasional) dari pemerintah pusat serta ditambah dengan kebijakan lokal yang diputuskan masyarakat di tingkat kecamatan.

Mengingat produk SPP hanya untuk perempuan saja, maka yang lebih sesuai untuk usaha pertanian, khususnya pompa irigasi adalah UEP.

Sampai saat ini di Bojonegoro hanya UPK Kec. Kanor saja yang telah membiayai usaha pompa irigasi. Kendala terbesar yang dihadapi UPK dalam operasionalnya adalah sumber dana terbatas yang dimilikinya. Hal ini disebabkan UPK hanya memiliki sumber dana microfinance dari BLM (yang juga terbatas karena dibagi untuk bidang lain) serta perguliran (revolving) dana yang ada.

UPK Kec. Kanor sendiri telah lebih 5 tahun menyalurkan kredit untuk modal kerja HIPPA dan BUMDES di 2 desa (Gedongarum dan Kedungrimpin) dan pengembaliannya selalu lancar (100%).

Karena kemampuan terbatas tersebut, kredit yang diberikan juga dalam jangka waktu sangat pendek yaitu 1 musim tanam (4 bulan) dengan bunga yang cukup tinggi 2,75% flat per bulan.

#### RINGKASAN PRODUK PINJAMAN

NO	NAMA	FITUR UMUM	PERSYARATAN UMUM	LAINNYA
1	UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	-Plafond = Max 150 juta (khusus HIPPA/BUMDES Max. 300 juta) -Jangka Waktu = Max 18 bulan (khusus HIPPA/BUMDES 1 musim tanam dng angsuran pada saat panen sekaligus). -Bunga =1,25%/bulan flat (khusus HIPPA/BUMDES 2,75%)	- Sasaran=Kelompok (laki-laki & perempuan, max. anggota 15 orang) -Usia kelompok 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi -Kelengkapan Dokumen -KTP/KK anggota kelompok -AD/ART Kelompok -Proposal	-Pinjaman lunas tepat waktu mendapat insentif pengembalian 10% bunga. -Proses pinjaman biasanya 1 bulan, dng melihat ketersediaan dana. -Pendampingan dan pelatihan usaha kelompok.

		-Biaya lain-lain tidak ada	-Rekomendasi Kades -Jaminan : Tanggung Renteng	-Perjanjian kredit dibawah tangan
2	SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan)	-Plafond = Max 150 juta -Jangka Waktu = Max 18 bulan -Bunga =1,25%/bulan flat -Biaya lain-lain tidak ada	Sasaran=Kelompok (perempuan, max. anggota 15) -Usia kelompok 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi -Kelengkapan Dokumen -KTP/KK anggota kelompok -AD/ART Kelompok -Proposal -Rekomendasi Kades -Jaminan : Tanggung Renteng	-Pinjaman lunas tepat waktu mendapat insentif pengembalian 10% bunga. -Proses pinjaman biasanya 1 bulan, dng melihat ketersediaan dana. -Pendampingan dan pelatihan usaha kelompok. -Perjanjian kredit dibawah tangan.

#### 4. KPRI LUMINTU RENGEL

Alamat : Jl. Raya Rengel No.363 – Tuban 62371  
 Telpon : (0356) 811251  
 Website : -  
 Badan Hukum : Koperasi  
 Jenis Lembaga : Microfinance - Koperasi  
 Asset : Rp. 10 Milyar (Per November 2015)  
 Pemilik : Anggota Koperasi (440 orang)  
 Contact Person : Sri Gun Cahyo (Ketua I)/082234512256

KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) berdiri sejak 1991. Koperasi dibentuk dan melayani para PNS/CPNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kec. Rengel – Tuban. Para PNS/CPNS adalah anggota sekaligus pemilik KPRI.

Mengingat layanan yang diberikan hanya untuk para anggota saja, maka pelayanan KPRI sangat terbatas (jumlah plafond s/d Rp. 40 juta sebagian besar hanya untuk keperluan konsumtif).

Untuk kredit usaha pertanian, khususnya pompa irigasi, KPRI telah lebih 6 tahun menyalurkannya dan pengembaliannya selalu lancar (100%) . Terdapat 1 HIPPA (Tuban-Desa Campurejo) dan 1 BUMDES (Bojonegoro-Desa Gedongarum) yang telah mendapat kredit. Hal ini bisa dimungkinkan karena sebagian dari pengurus HIPPA/BUMDES tersebut menjadi anggota KPRI. Pinjaman diberikan kepada HIPPA/BUMDES dengan pengurus yang menjadi anggota KPRI bertindak sebagai penjamin.



Karena dianggap beresiko lebih tinggi dibanding pinjaman konsumtif, kredit yang diberikan juga dalam jangka waktu sangat pendek yaitu 1 musim tanam (4 bulan) dengan bunga yang cukup tinggi 3% flat per bulan.

#### RINGKASAN PRODUK PINJAMAN

NO	NAMA	FITUR UMUM	PERSYARATAN UMUM	LAINNYA
1	Unit Simpan Pinjam (USP)	-Plafond = Max 40 juta -Jangka Waktu = Max 60 bulan -Bunga =1,25%/bulan flat -Biaya lain-lain : Biaya Resiko 2%	- Sasaran= Perorangan -Penggunaan = konsumtif dan modal usaha -Kelengkapan Dokumen -KTP/KK anggota kelompok -SK PNS	Proses Pinjaman Maksimal 1 minggu  Perjanjian kredit dibawah tangan

				-Proposal -Rekomendasi Diknas lokal -Surat Kuasa Potong Gaji -Jaminan : Pemotongan Gaji	
2	Perumahan	-Plafond = Sesuai kebutuhan anggota, kesediaan dana dan putusan pengurus KPRI -Jangka Waktu = Max 60 bulan (khusus HIPPA/BUMDES 1 musim tanam dng angsuran pada saat panen sekaligus). -Bunga =1,5%/bulan flat (khusus HIPPA/BUMDES 3%) -Jangka Waktu = Max 60 bulan -Biaya lain-lain : Provisi 1%	- Sasaran= Perorangan dan Badan Usaha -Penggunaan = Pemilikan Rumah dan modal usaha -Kelengkapan Dokumen -KTP/KK Pengurus Badan Usaha -SK PNS -Proposal Usaha -Rekomendasi Diknas lokal -Surat Kuasa Potong Gaji -Jaminan : Pemotongan Gaji	Proses Pinjaman maksimal 1 minggu  Perjanjian kredit Dibawah tangan	

## 5.BANK BRI

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210  
 Telpon : (021) 251 0244  
 Website : www.bri.co.id  
 Badan Hukum : PT (Terbuka / Go Public)  
 Jenis Lembaga : Lembaga Keuangan Bank  
 Asset : Rp. 802 Trilyun (Per September 2015)  
 Pemilik : Pemerintah RI (56,75%)  
 Contact Person : Hendit Agus /0852 3500 4700 (BRI Bojonegoro)

BRI bercikal bakal dari sebuah lembaga keuangan bernama Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto yang telah berdiri sejak 16 Desember 1895 yang didirikan di Purwokerto, Prov. Jawa Tengah. Tanggal tersebut kemudian dijadikan hari kelahiran Bank BRI.

Sejak awal didirikannya hingga saat ini, BRI setia dengan visi nya sebagai bank yang ditujukan untuk masyarakat kecil dan pedesaan. Sampai saat ini BRI merupakan lembaga keuangan yang memiliki kantor pelayanan terbesar di Indonesia dengan lebih 10.000 outlet.

BRI telah sejak dahulu diposisikan pemerintah sebagai agent of development dalam bidang pertanian di wilayah pedesaan. Salah satu hasil yang telah dicapai BRI dan telah diakui dunia internasional adalah pendirian dan pengembangan BRI Unit sebagai unit microfinance yang telah berhasil mempermudah akses keuangan masyarakat kecil dan pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta survey, BRI memiliki layanan pinjaman yang beragam untuk memenuhi kebutuhan segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan segmen lainnya (pegawai dan corporate). Terdapat total 21 produk pinjaman yang diklasifikasikan dalam 4 group ( Pinjaman Mikro 1 produk, Pinjaman Ritel 15 produk, Pinjaman Menengah yg berfokus untuk agribisnis 1 produk, Pinjaman Program yang terkait pemerintah 3 produk dan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat 1 produk).

Secara umum, produk pinjaman yang sesuai untuk usaha irigasi pertanian dapat digambarkan sebagai berikut :

## RINGKASAN PRODUK PINJAMAN UNTUK PERTANIAN

NO	NAMA	FITUR UMUM	PERSYARATAN UMUM	LAINNYA
1	Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)	-Plafond = Max 200 juta -Jangka Waktu= Max 60 bulan	- Sasaran= Badan Usaha & Perorangan -Usia usaha = 1 tahun -Penggunaan = Modal Kerja dan	Perjanjian kredit dilaku secara notariil dan dit tangan (sesuai plafond

		<p>-Bunga = 1-1,2%/bulan , flat (sesuai plafond)</p> <p>-Biaya lain : Adm (sesuai jumlah plafond mulai dari Rp. 10.000).</p>	<p>Investasi</p> <p>-Kelengkapan Dokumen :</p> <p>-KTP/KK</p> <p>-Izin usaha lokal (SK Kades)</p> <p>-Jaminan : Sertifikat/Non Sertifikat, BPKB, Surat Kios</p> <p>-Angsuran : Bulanan/Musiman (sesuai jenis usaha)</p>	<p>Debitur diasuransikan (jiwa dan kecelakaan)</p> <p>Hanya diproses di kantor unit</p> <p>Ada IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu)</p>	
2	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	<p>-Plafond = Max 500 juta</p> <p>-Jangka Waktu =Max 60 bulan</p> <p>-Bunga =0,55%/bulan flat</p> <p>-Biaya lain-lain tidak ada</p>	<p>- Sasaran= Badan Usaha &amp; Perorangan (belum bankable)</p> <p>-Usia usaha = 6 bulan</p> <p>-Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi</p> <p>-Kelengkapan Dokumen :</p> <p>-KTP/KK dan NPWP</p> <p>-Izin usaha lokal (SK Kades)</p> <p>-Agunan : Tidak ada (s/d 25 juta) Sertifikat/Non Sertifikat, BPKB, Surat Kios (Diatas 25 juta)</p> <p>-Angsuran : Bulanan/Musiman (sesuai jenis usaha)</p>	<p>Perjanjian kredit dilakukukan secara notaril dan dibawah tangan (sesuai plafond)</p> <p>Plafond &lt; 25 juta diproses di kantor unit</p> <p>Plafond &gt; 25 juta diproses di kantor cabang</p>	
3	Kredit Modal Kerja	<p>-Plafond = Max 40 Milyar</p> <p>-Jangka Waktu =Max 36 bulan</p> <p>-Bunga =15-16%/thn, efektif</p> <p>-Biaya lain = Adm. 1,5%</p> <p>Provisi sesuai plafond</p>	<p>- Sasaran= Badan Usaha &amp; Perorangan</p> <p>-Usia usaha = 1 tahun</p> <p>-Penggunaan = Modal Kerja</p> <p>-Kelengkapan Dokumen :</p> <p>-KTP/KK dan NPWP</p> <p>-Izin usaha (SITU/TDP)</p> <p>-Agunan : Sertifikat</p> <p>-Angsuran : Sesuai jenis usaha</p>	<p>Perjanjian kredit dilakukukan secara notaril</p> <p>Hanya bisa diproses di Kantor Cabang</p>	
4	Kredit Investasi	<p>-Plafond = Max 40 Milyar</p> <p>-Jangka Waktu =Max 36 bulan</p> <p>-Bunga =15-16%/thn, efektif</p> <p>-Biaya lain = Adm. 1,5%</p> <p>Provisi sesuai plafond</p>	<p>- Sasaran= Badan Usaha &amp; Perorangan</p> <p>-Usia usaha = 1 tahun</p> <p>-Penggunaan = Investasi</p> <p>-Kelengkapan Dokumen :</p> <p>-KTP/KK dan NPWP</p> <p>-Izin usaha (SITU/TDP)</p> <p>-Agunan : Sertifikat</p> <p>-Angsuran : Sesuai jenis usaha</p>	<p>Perjanjian kredit dilakukukan secara notaril</p> <p>Hanya bisa diproses di Kantor Cabang</p>	
5	Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKP-E)	<p>-Plafond =</p> <p>-Perorangan Max 50 juta</p>	<p>-Sasaran=Perorangan, Kelompok dan Koperasi.</p> <p>-Usia usaha = Perorangan 1 tahun,</p>	<p>Perjanjian kredit dilakukukan secara notaril</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kelompok/Kop Max 500 juta</li> <li>-Jangka Waktu= Max 36 bulan</li> <li>-Bunga =12,5-13,5%/tahun</li> <li>Efektif, murni (mengacu tingkat suku bunga LPS)</li> <li>-Biaya lain-lain = Adm &amp; Provisi sesuai plafond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>koperasi 2 tahun</li> <li>-Penggunaan = Modal Kerja dan Investasi</li> <li>-Kelengkapan Dokumen :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-KTP/KK, Foto Pengurus, NPWP</li> <li>-SIUP &amp; TDP, Izin usaha lokal (SK Kades)</li> <li>-Daftar Anggota Pemanfaat (khusus Kelompok , Koperasi)</li> <li>-Proposal &amp; RDKK</li> <li>-Rekomendasi Dinas terkait (Kelompok, Koperasi)</li> </ul> </li> <li>-Jaminan : Sertifikat/Non Sertifikat, BPKB</li> <li>-Angsuran : Sesuai jenis usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan dibawah tangan (sesuai plafond)</li> <li>Hanya bisa diproses di Kantor Cabang</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--

Dari hasil interview dengan Staf Kredit BRI, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk usaha di bidang pompa irigasi, BPR telah lebih 5 tahun menyalurkan kredit. Sampai saat ini di BRI Kantor Cabang Bojonegoro sendiri yang dilayani ada sekitar 5 pengusaha, sedangkan HIPPA/BUMDES tidak ada. Kesemua debitur tersebut berstatus debitur lancar (100%). Produk pinjaman yang diberikan adalah Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dengan plafond sekitar 200-500 juta.

2. Walaupun berstatus lancar, terdapat pertimbangan dan perhatian khusus terhadap usaha pompa irigasi maupun juga usaha pertanian lainnya secara umum, yaitu musim panas yang berkepanjangan di tahun 2015 sehingga mengakibatkan sumber air di Sungai Bengawas Solo menipis. Hal ini menurut pandangan BRI mengakibatkan resiko bagi usaha irigasi maupun hasil panen petani sendiri.

Kondisi ini mendorong BRI Cabang Bojonegoro saat ini memiliki tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi (selektif) dalam membiayai usaha pompa irigasi.

Dimasa depan, hubungan Tirta Project dengan BRI diharapkan dapat terus dijalin. Kemampuan BRI dengan seluruh jaringannya di Indonesia serta pengalaman panjangnya di bidang pertanian dapat menjadi hal yang sangat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan Tirta Project.

## LAMPIRAN 11 – DATA PERAN PEREMPUAN DALAM USAHA PADI

#	Farmer	Village	User / Non User	Sex	Age	No of Family Members	No Family Members currently at school	Pembelian Benih (A)	Pembelian Pupuk (B)	Pembelian Pesticida (C)	Pengolahan Tanah (D)	Penanaman dan Penyiangian (E)	Pemupukan (F)	Penyemprotan (G)	Panen (H)	Keputusan harga penjualan (I)
1	Ahmad Ngalm	Kedungprimpen	Water User	M	53	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kasmuri	Kedungprimpen	Water User	M	40	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Lani	Pomahan	Non Water User	M	51	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kasbi	Temu	Non Water User	M	42	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soko Hiryanto	Kedungprimpen	Water User	M	40	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Kardi	Ketileng	Non Water User	M	46	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
7	H. Sabit	Ketileng	Water User	M	63	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	Mat Langgeng	Rendeng	Water User	M	50	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	Mustaqim	Rendeng	Water User	M	70	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	Ali Masmuk	Banaran	Non Water User	M	37	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11	Dol Hadi	Banaran	Non Water User	M	45	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
12	Wito	Ngoken	Water User	M		5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	Sudarto	Gedongarum	Water User	M	55	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Japar	Gedongarum	Water User	M	40	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	Sadiran	Gedongarum	Water User	M	74	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Rohmat	Temu	Non Water User	M	61	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
17	Suwartoyo	Sidorejo	Non Water User	M	50	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18	Harun	Rendeng	Water User	M	52	6	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1
19	Pasiran	Nguken	Water User	M	60	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	Suwarno	Nguken	Water User	M	47	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21	Kanip	Sukoharjo	Water User	M	30	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22	Sarkawi	Sukoharjo	Water User	M	66	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Suntoro	Prambonwetan	Water User	M	62	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Yono	Prambonwetan	Water User	M	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sudarto	Prambonwetan	Water User	M	57	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	Eny	Tulungrejo	Water User	F	40	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1
27	Lasujiono	Tulungrejo	Water User	M	57	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28	Ngademin	Tulungrejo	Water User	M	44	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sutekno	Tulungrejo	Water User	M	65	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
30	Harso	Temu	Non Water User	M	57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Marjuki	Klith	Water User	M	47	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32	Yudiono	Klith	Water User	M	47	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sarji	Klith	Water User	M	40	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	Rastam	Trucuk	Water User	M	73	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35	Arif	Trucuk	Water User	M	63	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36	Setya Budi	Trucuk	Water User	M	44	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	Muntoro	Leran	Water User	M	50	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	Tasir	Leran	Non Water User	M	55	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
39	Asmuri	Leran	Water User	M	52	4	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
40	Mangil	Tinawon	Non Water User	M	75	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41	Juwani	Tinawon	Non Water User	M	60	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

#	Farmer	Village	User / Non User	Sex	Age	No of Family Members	No Family Members currently at school	Pembelian Benih (A)	Pembelian Pupuk (B)	Pembelian Pestisida (C)	Pengolahan Tanah (D)	Penanaman dan Penyiangan (E)	Pemupukan (F)	Penyemprotan (G)	Panen (H)	Keputusan harga penjualan (I)
42	Muhajir	Tinawon	Non Water User	M	50	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
43	Muntholib	Petak	Non Water User	M	38	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1
44	Pariman	Petak	Non Water User	M	37	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45	Sutekno	Ngujung	Water User	M	50	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
46	Nursalim	Ngujung	Non Water User	M	44	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
47	Mashuri	Ngujung	Water User	M	60	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
48	Sater	Ngujung	Water User	M	50	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
49	Karsono	Petak	Water User	M	42	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
50	Ladi	Petak	Non Water User	M	39	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mulyono	Petak	Water User	M	67	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
52	Yasin	Petak	Water User	M	45	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
52	Yasin	Petak	Water User	M	45	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
53	Basri	Gedongarum	-	F	25	3	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
54	Gami	Petak	-	F	30	5	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1
55	Munawaroh	Nguken	-	F	50	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
56	Munijiatin	Kedungprimpen	-	F	30	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0
57	Siti Marpuah	Kedungprimpen	-	F	30	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
58	Supani	Sukoharjo	-	F	32	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
<b>Total</b>								4	2	2	3	42	4	1	2	16

## LAMPIRAN 12 – DATA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BOJONEGORO

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel Tani	Luas Lahan	Jumlah Anggota		Total Anggota
					Laki-laki	Perempuan	
1	Margomulyo	6	63	6,916	6,059	-	6,059
2	Ngarho	16	60	15,120	5,940	1,620	7,560
3	Tambakrejo	18	76	12,164	12,523	236	12,759
4	Ngambon	5	21	1,262	2,079	347	2,426
5	Sekar	6	51	6,155	5,614	664	6,278
6	Bubulan	5	23	1,147	3,737	-	3,737
7	Gondang	7	48	2,289	5,914	308	6,222
8	Temayang	12	47	5,629	6,908	-	6,908
9	Sugihwaras	17	61	4,665	8,099	35	8,134
10	Kedungadem	23	119	8,740	8,168	1,429	9,597
11	Kepolibraru	25	97	6,483	12,159	-	12,159
12	Baureno	25	75	5,452	9,771	640	10,411
13	Kanor	25	62	4,935	9,242	-	9,242
14	Sumberrejo	26	95	6,253	11,438	-	11,438
15	Balen	23	61	4,540	10,238	-	10,238
16	Sukosewu	14	46	4,233	7,958	-	7,958
17	Kapas	21	54	3,220	8,150	85	8,235
18	Bojonegoro	11	24	1,600	2,584	267	2,851
19	Trucuk	12	37	2,163	3,416	108	3,524
20	Dander	16	71	6,869	10,959	2,929	13,888
21	Ngasem	17	53	5,574	15,938	61	15,999
22	Kalitidu	18	59	6,314	8,012	310	8,322
23	Malo	20	48	3,734	3,694	921	4,615
24	Purwasari	12	43	4,607	4,641	184	4,825
25	Padangan	16	51	3,997	4,622	500	5,122
26	Kasiman	10	29	3,117	4,305	-	4,305
27	Kedewan	5	10	1,256	1,265	-	1,265
28	Gayam	12	40	4,042	6,076	-	6,076
	<b>Total</b>	<b>423</b>	<b>1,524</b>	<b>142,476</b>	<b>199,509</b>	<b>10,644</b>	<b>210,153</b>
		%			95%	5%	

## LAMPIRAN 13 – QUESTIONNAIRE

### KELUARGA PETANI NON PEMAKAI AIR

Nama Responden : .....

Alamat : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No. Telephon/HP : .....

Tanggal Interview : .....

Note Taker : .....

**Petani yang diwawancarai harus – Petani pemilik penggarap dan petani penyewa penggarap (tidak boleh buruh tani).**

**Pertanyaan :**

1. Apakah lahan yang dikerjakan milik sendiri atau sewa?
2. Berapa luasan lahan sawah yang anda kerjakan?
3. Berapa kali tanam, apa pola tanam dan periode dalam setahun? (bagi dalam periode bulan untuk 3 musim tanam)

- MT Bulan .....Sd .....

- MT Bulan ..... SD .....

- MT Bulan ..... SD .....

4. Berapa hasil panen dari lahan pertanian anda setiap musim (zak/karung dan hitung ton/satuan hektar)? (kalau lebih dari satu kali tanam, tanyakan hasil pada musim kering dan hujan).

(hitung terpisah untuk padi dan tanaman lain)

5. a Berapa total biaya yang anda keluarkan untuk usahatani musim tanam padi (saprodi)?

	<b>Tahap Usaha Tani</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
1.	Pendapatan (konversikan no 4 ke total Rp)		
		Total Pendapatan (A)	
2	Biaya Produksi		
a	Benih		
b	Pupuk:		
c	Pestisida		
d.	Sewa Buruh	(hari & orang)	
	- Pengolahan Tanah / Traktor		

	- Tanam		
	- Pemupukan		
	- Penyemprotan		
	- Panen		
	Biaya air		
		Total Biaya Produksi (B)	
		Laba / Rugi (A – B)	

\* Kolom Rp. Hanya diisi angka tidak boleh ada text.

5. b. Berapa total biaya yang anda keluarkan untuk usahatani tanaman lain terakhir (saprodi)?

	Tahap Usaha Tani	Keterangan	Rp
1.	Pendapatan (konversikan no 4 ke total Rp)		
		Total Pendapatan (A)	
2	Biaya Produksi		
a	Benih		
b	Pupuk:		
c	Pestisida		

d.	Sewa Buruh	(hari & orang)	
	- Pengolahan Tanah / Traktor		
	- Tanam		
	- Pemupukan		
	- Penyemprotan		
	- Panen		
	Biaya air		
		Total Biaya Produksi (B)	
		Laba / Rugi (A – B)	

## 6. Bagaimana pembagian peran khususnya perempuan dalam setiap tahapan usaha tani??

	Tahap Usaha Tani	Pembagian Tugas		Keterangan
		L	P	
	Pengambilan Keputusan:			
A	Pembelian Benih			
B	Pembelian Pupuk			
C	Pembelian Pestisida			
	Pengerjaan:			
D	- Pengolahan Tanah / Traktor			
E	- Tanam			
F	- Pemupukan			
G	- Penyemprotan			

TIRTA – Survey stage 2 – Results and Initial Analysis

H	- Panen			
I	Pengambilan keputusan penjualan / harga			

7. Apakah ada rencana untuk menambah musim tanam ? Ya/Tidak

a. Ya --- air dari mana ?

Jika jawabannya dari sumur pompa dalam ---- tanyakan apakah berkeinginan untuk menggunakan air irigasi dari desa sebelah (sebut nama desa)? Bagaimana keinginan petani lainnya?

b. Tidak --- kenapa ?

(Jika air merupakan kendala utama gali apakah responden mengetahui sumber air alternatif)

8. Menurut anda apakah air dari desa sebelah (sebut nama desa) bisa dengan mudah masuk ke desa ini?

a. Ya --- kenapa selama ini belum ada yang mengupayakan ?

b. Tidak -- apa hambatan nya?

9. Apabila anda ingin mendapatkan air dari desa sebelah...(sebut nama desa), berapa kisaran harga jasa air yang anda bersedia bayar?

10. Kalau air tercukupi dengan irigasi dari desa (sebut..), anda akan menanam tanaman apa ?

Lanjutkan dengan mengisi form PPI

## KELUARGA PETANI PEMAKAI AIR

Nama Responden : .....

Alamat : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No. Telephon/HP : .....

Tanggal Interview : .....

Note Taker : .....

### Pertanyaan :

1. Apakah lahan yang dikerjakan milik sendiri atau sewa?

2. Berapa luasan lahan sawah yang anda kerjakan?

3. Apa pola tanam padi per tahun?

- MT Bulan .....Sd .....

- MT Bulan ..... SD .....

MT Bulan ..... SD .....

4. Berapa hasil panen dari lahan pertanian anda setiap musim (zak/karung dan hitung ton/satuan hektar) per musim diatas (no 3)

## 5. Berapa total biaya yang anda keluarkan untuk usahatani musim tanam padi (saprodi)?

	<b>Tahap Usaha Tani</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
1.	Pendapatan (konversikan no 4 ke total Rp)		
		Total Pendapatan (A)	
2	Biaya Produksi		
a	Benih		
b	Pupuk:		
c	Pestisida		
d.	Sewa Buruh	(hari & orang)	
	- Pengolahan Tanah / Traktor		
	- Tanam		
	- Pemupukan		
	- Penyemprotan		
	- Panen		
	Biaya air		
		Total Biaya Produksi (B)	
		Laba / Rugi (A - B)	

\* Kolom Rp. Hanya diisi angka tidak boleh ada text.

6. Selama beberapa tahun terakhir siapa saja yang menyediakan layanan irigasi ? (tuliskan siapa, kapan)– jika ada lebih dari satu urutkan dari tahun yang paling lama

7. Saat ini siapakah yang menyediakan layanan irigasi ? Sejak kapan menggunakan layanan irigasi tersebut (sebut bulan dan/atau tahun) ? Siapa pemilik pompa nya ?

8. Berapa kali dalam (seminggu/sebulan/satu musim) anda mendapatkan giliran air? Apakah anda ikut memutuskan jadwal pembagian air tersebut?

9. Bagaimana tanggapan anda tentang pelayanan air irigasi saat ini ? (gali lebih jauh tanggapannya – mengapa?)



14. Apa keterlibatan anda dalam kepengurusan HIPPA/BUMDES?

## 15. Bagaimana pembagian peran khususnya perempuan dalam setiap tahapan usaha tani??

	Tahap Usaha Tani	Pembagian Tugas		Penjelasan
		L	P	
	Pengambilan Keputusan:			
A	Pembelian Benih			
B	Pembelian Pupuk			
C	Pembelian Pestisida			
	Pengerjaan:			
D	- Pengolahan Tanah / Traktor			
E	- Tanam			
F	- Pemupukan			
G	- Penyemprotan			
H	- Panen			

I	Pengambilan keputusan penjualan / harga			
---	--	--	--	--

Lanjutkan dengan mengisi form PPI

**I. RESPONDEN : DESA – HIPPA/BUMDES .....**

**Nama HIPPA/BUMDES** :  
**Nama Responden** :  
**Jabatan** :  
**Alamat** :  
**No.Telpon** :  
**Tanggal Interview** :  
**Note Taker** :

**1.ASPEK KELEMBAGAAN**

A.Bagaimana proses pembentukan organisasi HIPPA/BUMDES (kenapa BUMDES) di desa :

.....  
.....

B.Status Legalitas HIPPA/BUMDES (notaril, koperasi, Yayasan, PT, lokal desa)

.....

C.Jika HIPPA, adakah rencana menjadi BUMDES ? Jika Ya, kapan, proses persiapan bagaimana ?

D.Data Administrasi HIPPA/BUMDES

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Kantor (sebutkan kedudukan/alamat)		
2	Daftar Anggota		
3	Staf/Karyawan	..... Orang	
4	Rekening Bank	Bank.....	
5	NPWP		

D.Struktur organisasi terakhir yang resmi, masa jabatan .....

PENGURUS :

A.Ketua : .....

B.Sekretaris : .....

C.Bendahara : .....

**2.ASPEK OPERASIONAL**

A.Program Kerja HIPPA/BUMDES :

B. Pertemuan Pengurus HIPPA/BUMDES :

C. Pertemuan / Musyawarah Anggota

D. Laporan / Pertanggungjawaban yan dihasilkan/dibuat : (diupayakan diminta)

E. Kegiatan Jasa Pelayanan Air

<b>NO</b>	<b>LOKASI (DESA)</b>	<b>LUAS WILAYAH PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH PETANI YG DILAYANI</b>	<b>STASIUN POMPA</b>
1				
2				

F. Berapa besar & apa pertimbangan dalam penentuan besar jasa layanan air ?

G. Bagaimana cara penentuan pembagaian air ?

H. Bagaimana cara penarikan pembayaran dari petani ?

I. Apa tantangan dalam layanan jasa air ?

**3.ASPEK KEUANGAN**

A. Apa saja asset yang dimiliki HIPPA/BUMDES ? (Mesin Pompa, Rumah Pompa, Pipa, Kantor, Kendaraan, Kas, Saluran, Listrik (jika ada))

NO	JENIS ASSET	JUMLAH UNIT	NILAI ASSET PEMBELIAN (Rp) Jika memungkinkan saja	NILAI ASSET SAAT INI (Rp.) Data Harus Didapat
1	POMPA UTAMA			
2	POMPA IMBALAN			
3				
4				
	TOTAL			

**B.Pendapatan dan Biaya**

NO	LOKASI	MUSIM	
		KERING	HUJAN
1	PENDAPATAN		
2	BIAYA		
	A.BAHAN BAKAR		

	B.LISTRIK		
	C.TENAGA KERJA		
	D.PEMELIHARAAN/PERBAIKAN		
	E.SUMBANGAN KE DESA		
	F.....		
	TOTAL BIAYA		
3	PENDAPATAN BERSIH (1-2)		

C.Kapan petani melakukan pembayaran jasa air?

D.Hutang dan Piutang (Hutang dari mana, jumlah & periode pinjaman, angsuran (pokok+bunga) )

#### 4.ASPEK KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

A.Bagaimana pengalaman bekerjasama dengan pihak lain dalam layanan jasa air?

B. Bagaimana proses pemilihan mitra pengusaha (khusus yg bekerjasama dng pengusaha, digali kriteria yang dipakai dalam tender )

C. Bagaimana bentuk kontrak kerjasama dng pengusaha ?

### 5. ASPEK TEKNIS PENGELOLAAN POMPA IRIGASI

A. Data Pompa (Lihat dan lengkapi data survey awal dan isi table)

NO	JENIS POMPA (LISTRIK / DIESEL)	JUMLAH DINAMO / MESIN	KAPASITAS	LAMA PENGGUNAAN OLEH HIPPA/BUMDES	TEMPAT PEMBELIAN (Sebut Nama Pengusaha / Toko)

B. Jika pernah menggunakan pompa listrik dan diesel, apa perbedaannya (harga, operasional, pemeliharaan)?

.....  
.....

C. Apa jenis kerusakan pada stasiun pompa yang sering dialami & siapa penyedia layanan perbaikan (jika penyedia layanan dr eksternal dicatat nama, alamat dan HP)?

- mesin / diesel:
- dynamo
- pompa

**6.PENGEMBANGAN HIPPA/BUMDES (KHUSUS YANG POTENSIAL UNTUK PERLUASAN)**

A.Adakah rencana perluasan areal (ekspansi) = Jumlah areal, dana yg dimiliki dan sumber dana ?

.....  
.....

B. Mengapa sampai sekarang belum bisa direalisasikan? Bagaimana rencana anda untuk merealisasikannya dan kapan?

.....  
.....

C. Apa perijinan yang diperlukan terkait rencana perluasan areal anda?

**7. KESETARAAN GENDER**

A. Berapa jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan HIPPA/BUMDES (posisi apa)

B. Apakah ibu-ibu juga diundang dalam berbagai pertemuan yang diadakan HIPPA/BUMDES? Sejauh mana peran ibu-ibu dalam proses pengambilan keputusan di HIPPA/BUMDES?

**II. RESPONDEN : DESA - KEPALA DESA .....**

**Nama** :  
**Jabatan** :  
**Alamat** :  
**No.Telpon** :  
**Tgl Interview** :  
**Note taker** :

1. Bagaimana pendapat dan pengalaman Kepala Desa terhadap pengelolaan irigasi di desa ini ? Sejarah, perkembangan, penilaian penyedia layanan terbaik (HIPPA/BUMDES/Pengusaha), visi ke depan.
2. Bagaimana fungsi pemerintah desa terhadap pengembangan irigasi (peranan, fungsi, tanggungjawab) :
3. Apakah HIPPA/BUMDES melaporkan secara tertulis perkembangan organisasinya ? bagaimana cara mereka melaporkan?

4. Bagaimana rencana untuk mengembangkan layanan irigasi (sebutkan hasil survey awal tentang rencana pengembangan irigasi di desa) Apakah ada hambatan untuk hal tersebut ?

5. Bagaimana desa memilih penyedia layanan irigasi (digali proses pemilihan) - (beri catatan jika HIPPA sendiri yang menyediakan layanan tidak melibatkan pengusaha)

6. Kontrak Pengusaha dengan desa (khusus untuk penyedia layanan adalah pengusaha, digali kriteria yang dipakai dan bagaimana desa mencari pengusaha calon penyedia)

A. Bagaimana bentuk kontrak penyedia jasa layanan irigasi ?

.....

B. Berapa nilai kontrak?

.....  
C. Berapa lama ?

.....  
D. Adakah kontribusi lain ?

.....  
E. Penggunaan kontribusi pengusaha di desa ?

.....  
7. Adakah rencana dana pemerintah desa untuk mendukung layanan perluasan irigasi desa? (klarifikasi sudah ada di tahun anggaran tahun ini atau ada di APBDES tahun depan) (pertanyaan ini untuk menilai seberapa konkrit rencana pemerintah desa, sebaiknya diperdalam untuk bisa menilainya).

8. Khusus untuk desa pengembangan lintas desa, apakah ada peraturan tentang pemakaian air untuk lintas desa ?

9. Jika bekerja dengan pengusaha) pernahkah punya pengalaman mengganti pengusaha penyedia layanan? Mengapa diganti bagaimana proses pengambilan keputusan penggantian?

**DINAS PU PENGAIRAN KABUPATEN .....**

Nama Responden : .....

Alamat : .....

Instansi : .....

Kabupaten : .....

No. Telephon/HP : .....

Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Apa peran utama Dinas PU Pengairan dalam mengelola dan mengatur kegiatan irigasi di kabupaten ?
2. Apakah ada KOMIR, Bagaimana peran KOMIR (Komisi Irigasi) di kabupaten, seberapa aktif KOMIR di kabupaten?
3. Apakah ada Dinas lain yang juga mendukung kegiatan irigasi di kabupaten? Apa peran utama dinas lain tersebut? Apakah ada lembaga lainnya lagi?
4. Bagaimana Dinas PU pengairan berkoordinasi dengan Dinas /Instansi lain untuk mendukung irigasi ?
5. Apa rencana jangka menengah dalam Renstra DINAS PU Pengairan untuk mendukung irigasi ? (tanyakan periode Renstra dan apakah bisa mendapatkan Dokumen RENSTRA? )  
Apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di tahun anggaran 2015 dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk APBD 2016 untuk mendukung pengembangan Irigasi?
6. Bagaimana peta skema irigasi di kabupaten ?
  - a. Berapa total luas areal sawah (Ha).....
  - b. Berapakah luas areal yang sudah ada irigasi (Ha).....
  - c. Berapakah luas areal yang belum ada irigasi/tadah hujan (Ha).....
7. Berapakah luas areal kabupaten yang rentan banjir (Ha).....

8. Bagaimana peran Dinas PU Pengairan dalam menangani banjir ?.....

9. Berapa luas areal kabupaten yang mendapatkan layanan dari Sungai Bengawan Solo (Ha)

10. Berapa luas areal kabupaten yang mendapatkan layanan dari Waduk Pacal (Ha)? Ada daftar desa layanan Waduk Pacal?

(apakah pertanyaan ini relevan untuk semua kabupaten? Atau hanya kabupaten tertentu saja?)

11. Bagaimanakah kondisi Waduk Pacal saat ini ?.....

(apakah pertanyaan ini relevan untuk semua kabupaten? Atau hanya kabupaten tertentu saja?)

12. Adakah SDA lain selain dari Sungai Bengawan Solo yang mendukung irigasi pertanian di kabupaten (sungai, anak sungai, waduk, embung, dll.)

13. Berapakah jumlah pompa existing yang ada saat ini untuk irigasi ?

(saya ragu apakah Dinas PU Pengairan punya data ini)

14. Berapa luas areal irigasi yang dilayani dari pompa ?

15. Apakah ada project bantuan lainnya yang mendukung irigasi dari Donor-donor lain (JICA, World Bank)? Apa jenis dukungan? Periode bantuan? Target sasaran?

**DINAS PERTANIAN KABUPATEN .....**

Nama Responden : .....  
Alamat : .....  
Instansi : .....  
Kabupaten : .....  
No. Telephon/HP : .....  
Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Apa peran Dinas Pertanian dalam mengelola dan mengatur kegiatan irigasi di kabupaten ?
  
2. Kelembagaan petani yang sudah terbentuk di kabupaten
  - a. Berapa jumlah kelompok Tani ?.....
  - b. Berapa Jumlah HIPPA/GHIIPA/IHIPPA ?.....
  
3. Apakah peran tugas dan fungsi UPTD Pertanian di kabupaten ?
  
4. Bagaimana Dinas Pertanian mengelola Program di kabupaten (JITUT/JIDES/PIP)
  - a. Apa yang dilakukan dalam JTUT/JDES/PIP?
  - b. Berapa luas areal yang sudah terlayani dari JITUT/JIDES/PIP ?
  - c. Berapa kecamatan/desa yang sudah mendapatkan JITUT/JIDES/PIP ?

(coba dapatkan daftar data desa JITUT/JIDES/PIP)

5. Areal pertanian :
  - d. Berapa total luas areal sawah (Ha).....
  - e. Berapakah luas areal yang sudah ada irigasi (Ha).....
  - f. Berapakah luas areal yang belum ada irigasi/tadah hujan (Ha).....
  
6. Berapakah luas areal kabupaten yang rentan banjir (Ha).....

7. Bagaimana peran Dinas Pertanian dalam menangani banjir ?
  
8. Berapakah jumlah pompa existing yang ada saat ini untuk irigasi pertanian batuan dari Dinas Pertanian, dimana lokasi nya? Spesifikasi pompa?
  
9. Instalasi Pompa irigasi
  - a. Siapa yang mendesain ?.....
  - b. Berapa Biayanya ?.....
  - c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ?.....
  - d. Darimana sumber dana nya ?.....
  - e. Bagaimana instalasinya ?.....
  
10. Apakah ada program dari Dinas Pertanian untuk mendukung pertanian dan irigasi tahun ini? Apa usulan untuk tahun 2016? (Pompa, Normalisasi Kanal, bantuan pupuk)
  
11. Pelatihan/Training apakah yang sudah dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pertanian dan irigasi di Dinas Pertanian

**BAPPEDA KABUPATEN .....**

Nama Responden : .....  
Alamat : .....  
Instansi : .....  
Kabupaten : .....  
No. Telephon/HP : .....  
Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana Bappeda sebagai koordinator wilayah berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan dan Dinas Pertanian dalam mengelola irigasi ?
2. Apakah BAPPEDA memiliki program dukungan langsung ke DESA khususnya mendukung kegiatan irigasi dan petani pemakai air (HIPPA)? Jika ya, apa yang dilakukan, bagaimana koordinasi dengan Dinas PU Pengairan dan Pertanian?
3. Apa program unggulan pemerintah kabupaten untuk tahun 2015 yang mendukung pertanian dan irigasi?
4. Apa usulan program /kegiatan untuk mendukung pertanian dan irigasi tahun 2016 yang hampir pasti di setujui oleh Legislatif (DPRD)? Berapa total dana yang dianggarkan tahun 2015 dan 2016 untuk pertanian dan irigasi?
5. Bagaimana cara Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai capaian pertanian dan irigasi di kabupaten?

**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) BENGAWAN SOLO**

Nama Responden : .....  
Alamat : .....  
Instansi : .....  
Kabupaten : .....  
No. Telephon/HP : .....  
Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Apakah peran dan tugas fungsi pokok dari BBWS Bengawan Solo dalam mengelola layanan air ?
2. Bagaimana mekanisme BBWS Bengawan Solo membagi alokasi air untuk irigasi pertanian ?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan BBWS Bengawan Solo membagi alokasi air untuk irigasi pertanian ?
4. Bagaimana Kondisi Bengawan Solo saat ini dan parameter yang digunakan untuk mengukur :
  - a. Data Debit Musim Hujan dan Musim Kemarau (tertinggi dan terendah)
  - b. Data ketinggian muka air
  - c. Data Elevasi
  - d. Dll
5. Berapa debit air yang dimiliki tahun ini? Berapa debit air ideal? Dalam 5 tahun kapan terakhir kali debit air tersebut tersedia ?
6. Apakah DEsa (HIPPA dan kelompok petani) harus mendapatkan perizinan untuk menggunakan air dari Bengawan Solo? Jika ya apa syarat yang harus dipenuhi? Seberapa baik aturan ini dipatuhi oleh masyarakat di Desa?
7. Bagaimana pendapat anda tentang rencana ekspansi irigasi pompa dari Bengawan Solo ?



**PERUM JASA TIRTA .....**

Nama Responden : .....  
Alamat : .....  
Instansi : .....  
Kabupaten : .....  
No. Telephon/HP : .....  
Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Apakah peran dan tugas fungsi pokok dari Perum Jasa Tirta ?
2. Apakah Jasa TIRTA bertugas untuk melakukan pembagian alokasi air untuk irigasi pertanian ?  
Jika ya bagaimana mekanismenya?
3. Pertimbangan apa saja yang digunakan Jasa Tirta membagi alokasi air untuk irigasi pertanian ?
4. Bagaimana prosedur perizinan dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan air Sungai Bengawan Solo ?
5. Bagaimana pembagian personel/staf untuk Jasa tirta di lapangan, apakah di setiap stasiun atau di wilayah tertentu ?
6. Bagaimana pendapat anda tentang rencana ekspansi irigasi pompa dari Bengawan Solo ?
7. Kendala apa yang terjadi dengan alokasi pembagian air Bengawan Solo dengan stakeholder terkait ?

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....**

Nama Responden : .....  
Alamat : .....  
Instansi : .....  
Kabupaten : .....  
No. Telephon/HP : .....  
Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

1. Apakah peran Dinas Lingkungan Hidup untuk sector pertanian dan irigasi pertanian ?
2. Apakah ada analisa dampak lingkungan untuk untuk pompa irigasi ? Pernahkah ada studi dan laporan yang bisa kita jadikan referensi? Apa bisa mendapatkan laporan?
3. Saran/rekomendasi seperti apakah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal irigasi pompa untuk mendukung pertanian ?
4. Bagaimana pengelolaan banjir dari Bengawan Solo dikaitkan dengan analisa dampak lingkungan ?
5. Apakah ada program tahun ini dan yang diusulkan tahun depan terkait pertanian, irigasi dan pengelolaan Bengawan Solo?

**KECAMATAN .....**

Nama Responden : .....

Alamat : .....

Instansi : .....

Kabupaten : .....

No. Telephon/HP : .....

Tanggal Interview : .....

**Pertanyaan :**

**1. Data Kecamatan**

Luas wilayah kecamatan (Ha)	
Areal sawah (Ha)	
Areal yang teririgasi (Ha)	
Areal yang belum teririgasi (tadah hujan) (Ha)	
Jumlah BUMDES	
Jumlah HIPPA	
Jumlah Kelompok Tani	
Rentan banjir (Ha)	
Kasi Pertanian	
Kasi Pengairan	

2. Bagaimana rencana Pemerintah kecamatan mendukung irigasi? Apakah ada program yang dilaksanakan tahun ini / rencana tahun 2016? Jika ada rencana tahun 2016 (apakah akan dilakukan tahun depan gali apakah program jangka panjang – dari mana dananya?)
  
3. Bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan Dinas PU Pengairan dan Pertanian dalam mendukung program pertanian dan irigasi di desa-desa?

4. Pihak mana yang paling tepat memberikan layanan jasa air irigasi di desa (HIPPA, BUMDES atau pengusaha) ? Mengapa ?
  
5. Apakah ada BUMDES di Kecamatan anda? Seberapa baik Bagaimana sejarah terbentuknya BUMDES?
  
6. Ada berapa HIPPA di wilayah Anda? HIPPA mana yang paling baik di kecamatan anda dalam hal pengurusan jasa layanan air? Mengapa?
  
7. Apakah ada pengusaha penyedia jasa layanan irigasi di wilayah anda? Siapa pengusaha-pengusaha tersebut? Dalam prakteknya, apakah pengusaha-pengusaha areal harus lapor di pemerintah kecamatan, atau langsung berhubungan dengan Pemerintah Desa / Masyarakat?

## **Investor Questionnaire**

### **Crucial business related questions:**

1. Area coverage
2. Size of existing business
  - a. Current value of existing fixed assets if sold... examples of possible assets?
  - b. Investments in canals or such be taken separately. Is there anything else like that?
3. Working capital - Should be taken per season (small season, big season?)
  - a. Monthly expenses – what are the cost heads?
  - b. Make sure to differentiate b/w diesel and electric pump system and for a specific pump station in case one has several pump stations
4. How long to get back the money from water users.
5. Future/expansion plan
  - a. Available fund / Capacity
  - b. What is stopping them
    - i. Fund
    - ii. Knowledge
    - iii. Confidence
    - iv. Operational hassle
    - v. Local politics
    - vi. What else?
  - c. Interest to go for large pump stations or more small pumps?
6. Source of funds
7. Pricing strategy
8. Difficulties or complexity to get necessary permits for irrigation business

### **Other questions:**

9. Reason for investing in irrigation business
10. Factors for choosing (not choosing) a certain desa to do business
11. Experience to do business with Pengusaha/Investor
  - a. Experience with their business (Preference of pump equipment – pump type, power type, anything else?)
12. Challenges/risks in irrigation business
13. Bid/tender process
14. Type of agreements
15. Decision making process regarding timing of water distribution
16. The reason for getting in inputs business (or adding other business)

